



# Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022



**H. TATTO SUWARTO PAMUJI**



**SYAMSUL AULIYA RACHMAN, S.STP, M.Si**



**H. TATTO SUWARTO PAMUJI**

BUPATI CILACAP 2017-2022



**SYAMSUL AULIYA RACHMAN, S.STP, M.SI**  
WAKIL BUPATI CILACAP 2017-2022



**BUPATI & WAKIL BUPATI CILACAP**  
PERIODE TAHUN 2017-2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Memori ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi kewajiban kami untuk menyusun Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode Tahun 2017-2022 sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cilacap Tahun 2022 di tahun 2023 yang akan datang.

Dokumen ini memuat pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 pada kondisi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, serta berisi kebijakan-kebijakan strategis yang telah dilaksanakan dan perlu untuk ditindaklanjuti dimasa yang akan datang.

Harapan kami, semoga dokumen ini dapat memberikan gambaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cilacap selama tahun 2017-2022, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan bagi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Cilacap kedepan..

Berbagai masukan, saran dan kritik guna perbaikan kinerja senantiasa kami harapkan untuk mewujudkan ***Kabupaten Cilacap yang Semakin Sejahtera Secara Merata***.  
Sekian dan terima kasih.

Cilacap, 19 November 2022

**BUPATI CILACAP,**

**H. TATTO SUWARTO PAMUJI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	4
2.1 Data geografis wilayah.....	4
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif.....	4
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	5
2.1.3 Topografi.....	5
2.1.4 Geologi.....	6
2.1.5 Jenis Tanah.....	7
2.1.6 Hidrologi.....	7
2.1.7 Penggunaan Lahan.....	10
2.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	11
2.3 Wilayah Rawan Bencana.....	16
2.4 Demografi.....	17
2.5 Jumlah ASN / PNS .....	24
BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	26
3.1 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah.....	26
3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	37
3.3 Program Pembangunan .....	44
BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	51
BAB V CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	55
5.1 Capaian Indikator Tujuan.....	55
5.2 Capaian Indikator Sasaran.....	67
5.3 Capaian Indikator Program.....	99
BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.....	231
6.1 Peraturan Daerah yang diterbitkan.....	231
6.2 Peraturan Bupati yang diterbitkan.....	235
BAB VII CATATAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI.....	294
7.1 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022.....	294
7.2 Kebijakan Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti .....	363
BAB VIII PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.....	378
BAB IX PENUTUP .....	383

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022 telah menetapkan pasangan H. Tatto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih dengan perolehan suara sebanyak 514.618 suara atau 56,31%.



Sumber : kpu.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3183 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-3184 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada 19 November 2017 oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.



Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sehingga pada 19 November 2022, Bupati dan Wakil Bupati Cilacap (H. Totto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si) akan berakhir masa jabatannya.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 20, maka perlu disusun Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022 sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bagi Kepala Daerah yang baru atau pejabat pengganti.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154).

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022 adalah untuk menyediakan dokumen hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.



### 1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Memori ini adalah :

1. Memberikan gambaran hasil kinerja H. Tatto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas H. Tatto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022
3. Sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bagi Kepala Daerah yang baru atau pejabat pengganti.

### 1.4. Sistematika Memori Serah Terima Jabatan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2017-2022

#### **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis serta kondisi Aparatur Sipil Negara.

#### **BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan strategis daerah, visi dan misi kepala daerah, program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Cilacap

#### **BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Bab ini berisi APBD Kabupaten Cilacap dan realisasinya.

#### **BAB V CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini berisi capaian indikator Tujuan, indikator Sasaran, indikator Program berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

#### **BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Bab ini berisi daftar produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diterbitkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022

#### **BAB VII CATATAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI**

Berisi capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan APBD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan Kebijakan Strategis yang telah dilaksanakan serta Inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

#### **BAB VIII PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

Berisi prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Kabupaten Cilacap

#### **BAB IX PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

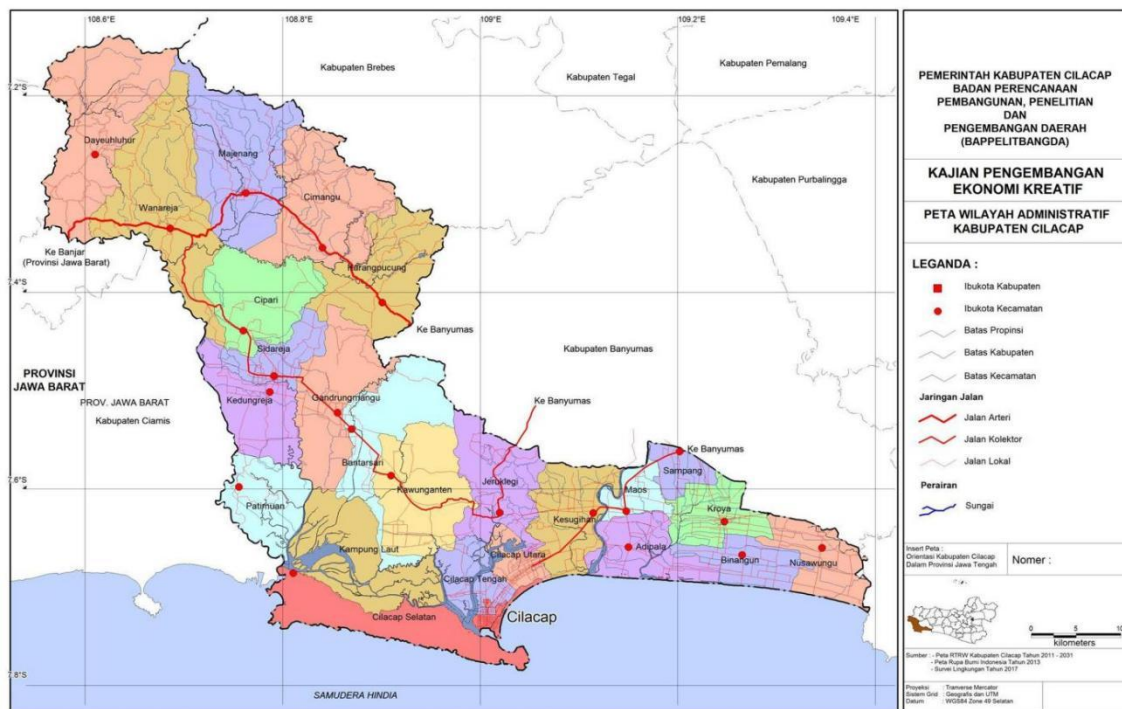
#### 2.1. Data Geografis Wilayah

##### 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 152 Km yaitu dari Kecamatan Dayeuhluhur sampai Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan yaitu dari Kecamatan Cilacap kota ke Kecamatan Sampang berjarak terjauh 35 Km.

Kabupaten Cilacap dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas, Brebes dan Kuningan  
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia  
Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat)  
Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen



**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap**

Luas wilayah Kabupaten Cilacap yaitu 2.253,61 km<sup>2</sup> (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,11 km<sup>2</sup>) atau sekitar 6,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas di Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Wanareja dengan luas 189,73 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Cilacap Utara dengan luas 18,84 km<sup>2</sup>.

### Luas Wilayah Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Dayeuhluhur	185,06
2.	Wanareja	189,73
3.	Majenang	138,56
4.	Cimanggu	167,44
5.	Karangpucung	115
6.	Cipari	121,47
7.	Sidareja	54,95
8.	Kedungreja	71,43
9.	Patimuan	75,3
10.	Gandrungmangu	143,19
11.	Bantarsari	95,54
12.	Kawunganten	117,43
13.	Kampung Laut	146,14
14.	Jeruklegi	96,8
15.	Kesugihan	82,31
16.	Adipala	61,19
17.	Maos	28,05
18.	Sampang	27,3
19.	Kroya	58,83
20.	Binangun	51,42
21.	Nusawungu	61,26
22.	Cilacap Selatan - Pulau Nusakambangan	9,11 115,11
23.	Cilacap Tengah	22,15
24.	Cilacap Utara	18,84
<b>Jumlah</b>		<b>2.253,61</b>

#### 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Cilacap terletak diantara 108<sup>04</sup>'30" – 109<sup>30</sup>'30" (Garis Bujur Timur) serta 7<sup>30</sup>' - 7<sup>45</sup>'20" (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan, dataran rendah dan pesisir.

#### 2.1.3. Topografi

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan laut.

### Ketinggian Rata-Rata Kecamatan Kabupaten Cilacap

No	Kecamatan	Ketinggian Dari Permukaan Laut (m)	Di tempat tertentu
1	Dayeuhluhur	198	Dayeuhluhur
2	Wanareja	25	Wanareja
3	Majenang	23	Majenang
4	Cimanggu	40	Cimanggu
5	Karangpucung	50	Karangpucung
6	Cipari	50	Cipari
7	Sidareja	26	Sidareja
8	Kedungreja	45	Kedungreja
9	Patimuan	5	Patimuan
10	Gandrungmangu	15	Gandrungmangu
11	Bantarsari	8	Bantarsari
12	Kawunganten	56	Kawunganten
13	Kampung Laut	1	Kampung Laut
14	Jeruklegi	9	Jeruklegi
15	Kesugihan	8	Kesugihan
16	Adipala	8	Adipala
17	Maos	8	Maos
18	Sampang	8	Sampang
19	Kroya	10	Kroya
20	Binangun	8	Binangun
21	Nusawungu	10	Nusawungu
22	Cilacap Selatan	6	Cilacap Selatan
23	Cilacap Tengah	5	Cilacap Tengah
24	Cilacap Utara	6	Cilacap Utara

*Sumber : Data Dasar Kabupaten Cilacap Tahun 2020*

#### 2.1.4. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Cilacap dapat dirinci menjadi bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir, maupun kekeringan.

Kabupaten Cilacap memiliki bentang alam yang beragam, secara topografi daerah barat dan utara berupa perbukitan dan pegunungan, serta daerah selatan berupa lahan pesisir dan laut. Wilayah ini memiliki keragaman ekosistem yang tersimpan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Cilacap dari timur hingga barat. Kondisi pantai Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya keseragaman dalam undur geologi dan relief. Geologi atau endapan sepanjang pantai umumnya berupa daratan rendah pantai yang terdiri dari sedimen kuartar. Sedimen tersebut merupakan kombinasi antara endapan-endapan sungai delta, pantai, dan alluvial.

Wilayah Kabupaten Cilacap secara geologi dibentuk oleh formasi-formasi batuan gunung api dan sedimen endapan alluvium menutupi sebagian besar wilayah barat hingga ke bagian selatan (Djuri, 1975; Asikin dkk., 1992, dan Simanjutak dkk., 1992). Formasi-formasi batuan berumur Miosen Tengah yang tersingkap terutama di Pulau Nusakambangan terdiri dari Formasi Nusakambangan dan Pamutuan, dimana formasi yang kedua menindih secara selaras formasi pertama. Kedua formasi tersebut diatas ditutupi oleh Formasi Kalipucang yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal, diendapkan secara tidak selaras di atas formasi Nusakambangan; sementara bagian bawahnya menjemari dengan anggota kalkarenit dari Formasi Pamutuan.

Formasi Nusakambangan disusun oleh tuf, tuf lapilli, tuf pasir/ kerikilan dengan sisipan batu pasir sela di bagian bawah; dimana batu pasir sela semakin bertambah ke bagian atas, berselingan dengan batu lempung, bersisipan breksi. Formasi Pamutuan terdiri dari batu pasir, kalkarenit, napal, tuf, batu lempung, dan batu gamping; sedangkan Formasi Kalipucang merupakan endapan laut dangkal yang didominasi oleh batu gamping terumbu.

Bagian daratan Kabupaten Cilacap dibentuk oleh formasi-formasi Rambatan Halang; Kumbang dan Tapak; yang sebagian besar ditutupi oleh alluvium dengan endapan pantai menutupi terutama bagian pantai selatan dari Kota Cilacap hingga muara Sungai Bengawan di bagian timur kota. Formasi Rambatan berumur Miosen tengah disusun oleh endapan turbidit yang terdiri dari batu pasir gampingan bersisipan napal, batu lempung dan breksi. Formasi Halang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, napal, dan tuf bersisipan breksi yang ditutupi secara tidak selaras oleh Formasi Kumbang berumur Pliosen Awal berupa endapan breksi gunungapi bersisipan lava, batu pasir dan konglomerat bersisipan napal. Sementara Formasi Tapak merupakan satuan batuan sedimen hasil pengendapan laut dangkal, yang terdiri dari batu pasir mengandung cangkang moluska bersisipan napal dan breksi; berumur Pliosen dan diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Halang.

Formasi Halang diterobos oleh retas-retas bersusunan basalt sebagai pengisian bukaan-bukaan batuan berarah hampir sejajar dengan struktur antiklin, yang kemudian dipotong oleh sesar-sesar berarah timur laut- barat daya atau hampir utara-selatan. Luasnya sebaran alluvium berarah barat laut-tenggara diduga sebagai pengisian blok yang mengalami penurunan/ terban (graben) akibat bentukan struktur sesar normal di wilayah pemantauan.

#### **2.1.5. Jenis Tanah**

Jenis tanah di Kabupaten Cilacap dominan alluvial terutama alluvial kelabu dan kecoklatan. Lahan di wilayah dataran dengan tanah aluvial ini penggunaannya didominasi persawahan dengan irigasi teknis, semi teknis maupun sederhana, kawasan ini terutama di wilayah Kecamatan Karangpucung, Adimulya, Sidareja, Patimuan Kroya, Nusawungu, Sampang, Kesugihan dan Cilacap. Curah hujan di wilayah Kabupaten Cilacap secara umum tinggi dan material aluvial mendominasi kawasan dataran ini.

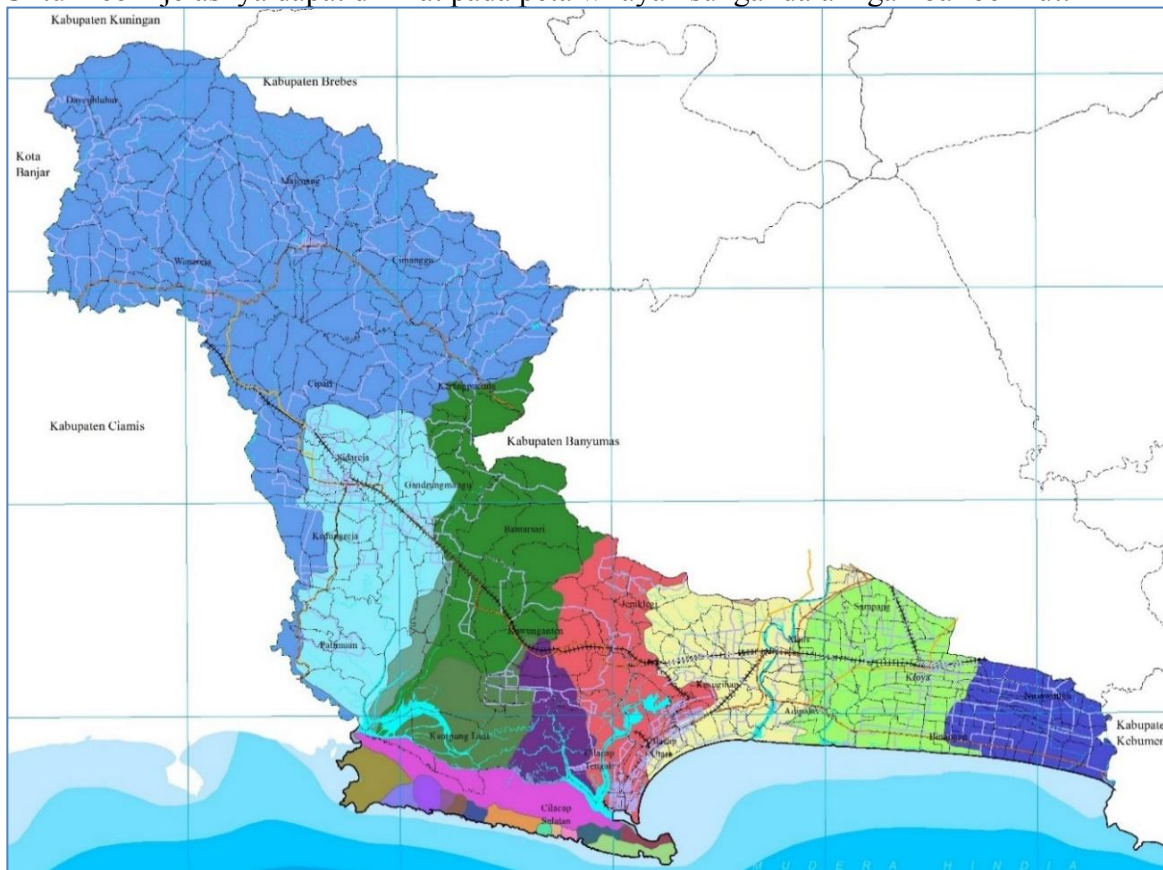
Tanah jenis latosol terdapat di Kabupaten Cilacap terutama di daerah Pegunungan antara lain di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja dan sebagian Kecamatan Majenang dan Kecamatan Cimanggu (bagian utara). Kondisi tanah pada kawasan ini secara umum sangat tebal dan subur sehingga sangat rentan terhadap bahaya gerakan tanah.

#### **2.1.6. Hidrologi**

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi,

geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam yang bersangkutan, juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy dari arah barat, Serayu dari arah Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur laut, serta Tipar dan Ijo di selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, disebutkan bahwa di Kabupaten Cilacap terdapat 24 (dua puluh empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di bawah pengelolaan dan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada peta wilayah sungai dalam gambar berikut:



**Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cilacap**

*Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap*

### **1) Air Tanah**

Hidrogeologi Cilacap secara regional dapat dibedakan atas dasar morfologi, geologi, lingkungan pengendapan batuan dan ketersediaan air tanahnya. Kawasan perlindungan cekungan air tanah di wilayah Kabupaten Cilacap berupa kawasan imbuhan dan lepasan air tanah dengan luasan kurang lebih 1.274 km<sup>2</sup> ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap, dengan rincian luasan dan lokasinya sebagai berikut:

1. Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang seluas  $\pm 108 \text{ km}^2$ ;
2. Cekungan Air Tanah (CAT) Sidareja seluas  $\pm 480 \text{ km}^2$ ;
3. Cekungan Air Tanah (CAT) Nusakambangan seluas  $\pm 45 \text{ km}^2$ ;
4. Cekungan Air Tanah (CAT) Cilacap seluas  $\pm 218 \text{ km}^2$ ;
5. Cekungan Air Tanah (CAT) Kroya seluas  $\pm 423 \text{ km}^2$ .



**Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Cilacap**

*Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap*

## 2) Klimatologi

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Cilacap, banyaknya curah hujan tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan November (133,2 mm) dan terendah terjadi pada bulan Agustus (19,1 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 25 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus dan September sebanyak 10 hari hujan. Suhu maksimum tertinggi tercatat 34,1°C terjadi pada bulan Januari, sedangkan suhu minimum terendah 20,5°C terjadi pada bulan Agustus.

### **Banyaknya Curah Hujan Terbesar dan Jumlah Hari Hujan Yang Tercatat Di Stasiun Meterologi Cilacap Tahun 2020**

No	Bulan	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	Januari	294	132,5	24
2	Februari	385,4	66,8	21
3	Maret	193,7	55,5	19

No	Bulan	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)	Jumlah Hari Hujan
4	April	136,2	42,9	17
5	Mei	74,9	46,4	12
6	Juni	399,3	78,8	19
7	Juli	98,2	33,8	10
8	Agustus	128	25,1	19
9	September	181	64,4	22
10	Oktober	205,7	35	21
11	November	612,4	97,3	25
12	Desember	334,4	57,7	25
<b>Tahun 2021</b>		<b>3.043,20</b>	<b>132,5</b>	<b>234</b>
Tahun 2020		4.495,70	133,2	253
Tahun 2019		1.968,90	135	141
Tahun 2018		2.354,10	200	191
Tahun 2017		3.494,00	180	283

Sumber : BMKG Kabupaten Cilacap, 2022

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori menengah. Curah hujan berubah secara drastis secara langsung dapat mengakibatkan penjumlahan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Tanah yang lama kering, kemudian diguyur hujan menerus, sehingga rentan mengalami pergerakan tanah atau longsor.

### 2.1.7. Penggunaan Lahan

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.850 Ha, sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian seluas 171.532 Ha dan sisanya seluas 42.317 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti untuk jalan, perumahan, dan lain-lain.

Dari lahan yang digunakan untuk pertanian seluas 213.850 Ha, sebagian besar digunakan untuk kepentingan lahan bukan sawah yaitu seluas 105.005 Ha yang digunakan antara lain untuk kebun/perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, padang rumput dan empang. Sedangkan lahan seluas 66.527 ha digunakan untuk sawah, baik sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut maupun untuk rawa lebak.

Secara detail data penggunaan tanah / lahan disajikan pada tabel berikut ini :

#### Luas Penggunaan Tanah/Lahan Tahun 2021

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
<b>Lahan Sawah</b>		
1	Irigasi	45.831
2	Tadah Hujan	19.794
3	Rawa Pasang Surut	618
4	Rawa Lebak	284
<b>Jumlah Lahan Sawah</b>		<b>66.527</b>
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		
1	Tegal / Kebun	40.373
2	Ladang / Huma	924
3	Perkebunan	12.667



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
4	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	7.623
5	Padang Penggembalaan/ Padang Rumput	0
6	Hutan Negara	30.208
7	Sementara Tidak Diusahakan	136
8	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara Dll)	12.205
	<b>Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah</b>	<b>104.136</b>
	<b>Lahan Bukan Pertanian (jalan, Permukiman dll)</b>	<b>43.186</b>
	<b>Total Luas Lahan</b>	<b>213.849</b>

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

## 2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Nasional; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Nasional. Kabupaten Cilacap dalam RTRWN masuk kepada tahapan pengembangan fungsi Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional dan merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan dari tiga kawasan lain di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Dengan ditetapkannya Cilacap sebagai PKN, maka diperlukan peningkatan infrastruktur jalan yang mendukung kelancaran kegiatan nasional. Hal ini sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, yang menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan hinterland (penyangga) untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Brebes.

Terkait dengan pengembangan infrastruktur strategis yang termuat dalam RTRWN maupun Perpres tentang Proyek Strategis Nasional, di Kabupaten Cilacap terdapat beberapa proyek strategis nasional yang perlu mendapat perhatian baik yang memiliki pengaruh dalam skala lokal maupun regional. Pembangunan kawasan industri pengolahan minyak (RDMP Project), pembangkit listrik/PLTU, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan adalah beberapa proyek strategis nasional yang diharapkan dapat memicu efek pengembangan kawasan lokal disekitar kabupaten Cilacap. Rencana Pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Gedegbage – Cilacap, Cilacap - Pejagan dan Cilacap – Yogyakarta, Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan, diharapkan dapat mendorong peran Kabupaten Cilacap dalam pengembangan kawasan regional yang terkoneksi dengan kawasan lain termasuk didalamnya adalah rencana pembangunan/pengembangan bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap dan bandara Jenderal Sudirman di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, pada RTRWN juga menyebutkan bahwa Kabupaten Cilacap termasuk dalam 2 (dua) kawasan andalan, yaitu kawasan andalan Jawa Tengah Selatan dan kawasan andalan laut Cilacap dan sekitarnya.

### Penetapan Kawasan Andalan

Kawasan Andalan	Sektor unggulan	Keterangan
Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya)	- pertanian	1. Tahap pengembangan kawasan andalan untuk pertanian
	- pariwisata	2. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata
	- pertambangan	3. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan
	- industri	4. Tahapan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan
	- perikanan	5. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk perikanan
Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya	- perikanan laut	1. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk kelautan
	- pertambangan	2. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan
	- pariwisata	3. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata

*Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN*

Penetapan Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam kawasan andalan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Cilacap, yaitu “Mewujudkan Ruang Kabupaten Sebagai Pusat Ekonomi Skala Nasional Berbasis Pertanian, Industri, Kelautan, Secara Terpadu dan Berkelanjutan Guna Pemerataan Pembangunan Wilayah”. Selain itu, penetapan sebagai kawasan andalan laut Cilacap dan sekitarnya juga sesuai dengan rencana pemantapan pelabuhan utama di Kabupaten Cilacap. Pemantapan pelabuhan utama tersebut dapat mendukung pengembangan kawasan andalan untuk kelautan.

Mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Kawasan Cilacap merupakan bagian dari kawasan Barlingmasakeb dengan pusat pertumbuhan di Purwokerto akan tetapi diarahkan pada keterpaduan pengembangan kawasan dengan wilayah Cilacap, dan Purbalingga serta Kebumen. Pengembangan kawasan ini adalah didasarkan pada pengembangan potensi sektor unggulan mencakup pertanian, industri, pariwisata, perdagangan jasa, perikanan, pertambangan dan panas bumi. Secara spesifik dalam perda tersebut dijelaskan bahwa terdapat kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa pengembangan Kawasan Industri Cilacap (KIC).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan Budidaya.



Alam Karang Bolong seluas  $\pm 73$  m<sup>2</sup>. Kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Gunung Selok di Kecamatan Adipala seluas  $\pm 116,37$  ha.

Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah terdiri dari cekungan air tanah Majenang, Sidareja, Cilacap, Nusakambnagn, dan cekungan air tanah Kroya. Kawasan sempadan mata air diukur paling sedikit 200 meter, mencakup seluruh sumber mata air yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kawasan cagar budaya terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan non bangunan dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung dan halaman. Sedangkan kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Cilacap berada di sepanjang pantai wilaah Kabupaten Cilacap dan Kawasan Segara Anakan.

Kawasan peruntukan budidaya untuk kawasan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi dan Cilacap Tengah. Sedangkan kawasan hutan produksi terbatas berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu dan Bantarsari. Kawasan perkebunan rakyat tersebar di Kecamatan Adipala, Dayehluhur, Majenang, Wanareja, Cimanggu, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawaungu, Cilacap Selatan, Cilacap Utara dan Cilacap Tengah.

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Kawasan perkebunan adalah tersebar di seluruh kecamatan sedangkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 58.912, ha yang terdiri dari kawasan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 53.030 ha dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan ( LCP2B) seluas 5.882 ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada.

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya terdiri dari kawasan sentra kegiatan kelautan yang meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kelurahan Cilacap Kelurahan Tegalkamulyan dan Kelurahan Sidakaya. Tempat pelelangan ikan yang tersebar di 10 kecamatan dan pelabuhan perikanan yang terdiri dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jetis, Kemiren, Lengkong, Pandanarang, Rawa Jarit, Sentolo Kambang, Sentolo Kawat Sidakaya dan Bengawan Donan. Kawasan sentra kegiatan budidaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Kawasan pertambangan terdiri dari kawasan pertambangan mineral kawasan pertambangan minyak bumi dan gas. Kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam dan batuan, bukan logam dan batubara. Kawasan pertambangan mineral logam dan batuan berada di Kecamatan Majenang, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, Boinangun, Nusawungu dan Kawasan Nusakambangan, Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Wanareja, Majejang, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Patimuan, Kampung luat, Kawunganten, Adipala dan Nusakambangan. Kawasan pertambangan batubara berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Karangpucungm Kawasan pertambangan Majenang dan Kawasan Pertambangan Serayu-Pantai Selatan. Sedangkan kawasan pertambangan minyak

dan gas bumi berada di Kecamatan Cipari, Cimanggu, Karangpucung, Kedungreja, Gandrungmangu, Sidareja, Kawunganten, Jeruklegi, Adipala, Kroya dan Binangun.

Kawasan peruntukan industri kurang lebih seluas 5.286 ha yang meliputi Kawasan Peruntukan Industri Cilacap, Karangandri, Bunton, Warung Batok, Tinggarjaya, Cilacap Timur, Bengawan Donan dan Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kesugihan. Sedangkan pengembangan sentra industri kecil dan menengah diarahkan di kawasan peruntukan industri.

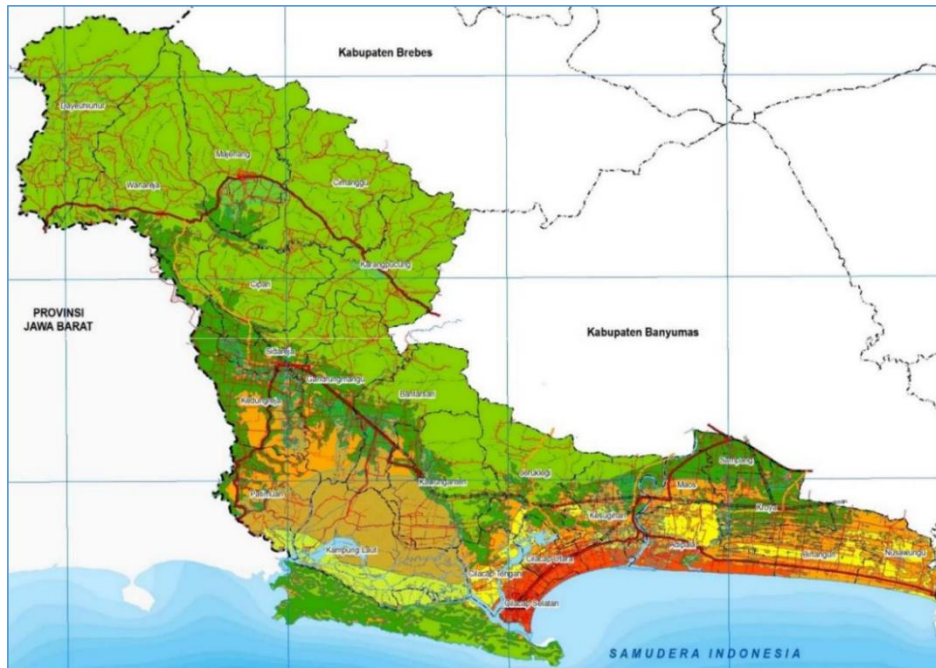
Kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata alam, budaya dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata ini tersebar di hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari kawasan permukiman perkotaan yang meliputi seluruh kawasan perkotaan Cilacap dan beberapa wilayah di setiap kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman yang dekat dengan pusat pertumbuhan dan pemerintahan. Kawasan peruntukan permukiman juga mencakup kawasan permukiman perdesaan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang tidak menghilangkan karakteristik wilayahnya.

Kawasan budidaya lainnya mencakup pertahanan dan keamanan yang meliputi Markas Batalyon Tempur TNI Surya Kusuma, daerah Latihan Militer Komando Pasukan Khusus di Pulau Nusakambangan, Markas Komando Daerah Militer di Kecamatan Cilacap Selatan, Markas Komando Rayon Militer di setiap kecamatan, Markas Polisi Resor Cilacap di Kecamatan Cilacap Utara, Markas Polisi Sektor di setiap Kecamatan, Satuan Polisi Air di Kecamatan Cilacap Selatan, Lapangan Tembak TNI di Kecamatan Adipala, Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Cilacap Selatan dan Lapangan Tembak Polisi di Kecamatan Maos.

Rencana struktur ruang Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW menyebutkan bahwa rencana struktur ruang terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan menggambarkan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dan penetapan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan (pusat kegiatan lokal atau pusat pelayanan kawasan) serta penetapan kawasan perdesaan sebagai pusat pelayanan lingkungan.

Rencana struktur ruang juga mendiskripsikan rencana pembangunan di Kabupaten Cilacap yang mencakup pembangunan sistem jaringan prasarana utama seperti rencana sistem jaringan transportasi darat, jaringan perkeretaapian, jaringan transportasi laut, jaringan transportasi udara serta pembangunan rencana sistem jaringan prasarana lain seperti rencana sistem jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana pengelolaan lingkungan dan jalur serta ruang evakuasi.





Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap

### **Peta Rawan Bencana Tsunami dan Banjir Kabupaten Cilacap**

#### **2.4. Demografi**

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebanyak 1.980.912 jiwa, terdiri dari 1.002.019 jiwa penduduk laki-laki dan 978.893 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin mencapai 102,36. Pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 1,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2020 yang tercatat 1,05 persen.

#### **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2017-2022 (Semester 1)**

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Sem 1
1	Laki-Laki	934.014	964.101	979.745	990.338	1.002.019	1.011.159
2	Perempuan	908.899	942.748	957.682	967.534	978.893	985.826
3	Laki-laki + Perempuan	1.842.913	1.906.849	1.937.427	1.957.872	1.980.912	1.996.985
4	Sex Ratio	102,76	102,26	102,30	102,35	102,36	102,57

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022

Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2017-2022 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.842.913 jiwa meningkat menjadi sebanyak 1.996.985 jiwa pada Semester 1 Tahun 2022. Sedangkan persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata, Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 142.273 jiwa (7,18 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 135.368 jiwa (6,83 persen). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sejumlah 15.839 jiwa (0,80 persen). Perincian penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kecamatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2017-2022 Semester 1 (jiwa)**

No	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 - Sem 1
1	Dayeuhluhur	47.948	48.809	49.188	49.096	49.438	49.866
2	Wanareja	100.079	102.857	104.771	105.761	106.683	107.796
3	Majenang	131.505	135.392	138.476	140.961	142.273	143.341
4	Cimanggu	100.040	102.219	104.212	105.761	106.491	106.895
5	Karangpucung	78.069	79.378	80.071	81.037	81.867	82.258
6	Cipari	64.236	64.379	65.608	65.999	67.107	67.738
7	Sidareja	59.418	61.972	62.305	62.712	63.406	63.829
8	Kedungreja	83.152	84.557	86.929	88.334	89.734	90.885
9	Patimuan	47.281	48.728	49.288	49.646	50.401	50.794
10	Gandrungmangu	104.699	107.169	109.331	110.498	112.234	113.074
11	Bantarsari	69.545	71.383	73.431	74.618	75.784	76.355
12	Kawunganten	81.487	83.753	84.705	85.775	86.866	87.618
13	Kampung Laut	14.978	15.043	15.566	15.609	15.839	16.017
14	Jeruklegi	71.144	73.705	75.156	76.457	77.795	78.626
15	Kesugihan	122.367	129.580	131.283	133.248	135.368	137.316
16	Adipala	86.254	91.069	93.309	94.745	96.211	97.037
17	Maos	45.463	47.006	46.672	46.893	47.407	47.839
18	Sampang	40.063	42.372	43.018	43.592	44.164	44.364
19	Kroya	108.138	113.211	114.119	115.503	117.055	117.784
20	Binangun	62.484	66.522	67.926	68.764	69.718	70.404
21	Nusawungu	77.377	83.184	84.729	85.854	87.613	88.631
22	Cilacap Selatan	82.212	83.328	84.549	84.349	84.151	84.449
23	Cilacap Tengah	87.648	89.709	90.490	90.183	90.010	90.002
24	Cilacap Utara	77.326	81.524	82.295	82.934	83.295	84.067
<b>Jumlah</b>		<b>1.842.913</b>	<b>1.906.849</b>	<b>1.937.427</b>	<b>1.957.872</b>	<b>1.980.912</b>	<b>1.996.985</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022

Untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap maka penduduk ditinjau dari kelompok umur. Berdasarkan kelompok umur kategori penduduk produktif Semester 1 tahun 2022 (15–64 tahun) sebesar 1.386.566 jiwa atau 69,43 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65tahun) sebanyak 167.219 jiwa atau 8,37 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 443.200 jiwa atau 22,19 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,43 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Secara rinci penduduk Kabupaten Cilacap menurut kelompok umur tahun 2017-2022 Semester 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2021**

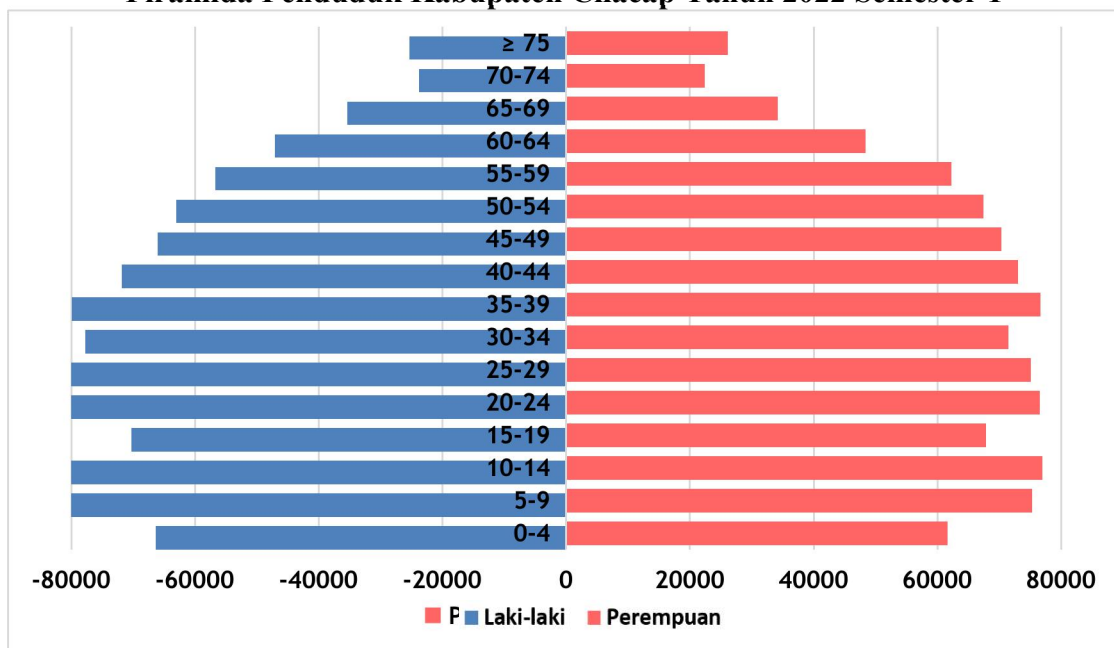
Kelompok Umur	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Sem 1
0-14	455.769	422.246	439.096	448.425	443.167	443.200
15-64	1.225.141	1.344.697	1.348.357	1.364.725	1.377.834	1.386.566
65+	162.003	139.906	149.974	144.722	159.911	167.219
Rasio Ketergantungan	50,42	41,81	43,69	43,46	43,77	44,02

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (data diolah)



Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap dapat dilihat bahwa struktur kependudukan mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,56 persen. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cilacap, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.

**Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Semester 1**



Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 916 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020 menjadi 888 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022 Semester 1. Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 10.504 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 5,67 persen dari total luas Kabupaten Cilacap hanya dihuni 119 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Dayeuhluhur	191,73	49.866	260
2	Wanareja	195,92	107.796	550
3	Majenang	167,6	143.341	855
4	Cimanggu	163,35	106.895	654
5	Karangpucung	124,74	82.258	659
6	Cipari	107,53	67.738	630
7	Sidareja	49,31	63.829	1.294
8	Kedungreja	82,01	90.885	1.108
9	Patimuan	78,68	50.794	646
10	Gandrungmangu	119,26	113.074	948
11	Bantarsari	99,49	76.355	767
12	Kawunganten	138,09	87.618	634
13	Kampunglaut	134,07	16.017	119
14	Jeruklegi	99,41	78.626	791
15	Kesugihan	89,1	137.316	1.541
16	Adipala	74,65	97.037	1.300
17	Maos	34,3	47.839	1.395
18	Sampang	28,89	44.364	1.536
19	Kroya	61,68	117.784	1.910
20	Binangun	53,73	70.404	1.310
21	Nusawungu	66,98	88.631	1.323
22	Cilacap Selatan	8,04	84.449	10.504
23	Cilacap Tengah	51	90.002	1.765
24	Cilacap Utara	29,72	84.067	2.829
<b>Kabupaten Cilacap</b>		<b>2.249,28*</b>	<b>1.996.985</b>	<b>888</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (diolah)

\* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusa Kambangan, luas Pulau Nusa Kambangan 115,00 km<sup>2</sup>. Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusa Kambangan adalah sebesar : 845 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap yang sudah bekerja merupakan petani/pekebun, buruh harian lepas, wiraswasta, karyawan swasta dan pedagang.

**Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Pekerjaan  
Tahun 2022 Semester 1**

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JML
1	AKUNTAN	2	1	3
2	ANGGOTA BPK	0	0	0
3	ANGGOTA DPD	0	0	0
4	ANGGOTA DPR-RI	1	2	3

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>JML</b>
5	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	16	4	20
6	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	1	1
7	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	0	0	0
8	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	72	37	109
9	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
10	APOTEKER	35	119	154
11	ARSITEK	9	0	9
12	ARTIS	0	0	0
13	ASISTEN AHLI	0	0	0
14	ATLIT	0	0	0
15	BELUM/TIDAK BEKERJA	288.055	250.878	538.933
16	BIARAWATI	0	17	17
17	BIDAN	0	1.139	1.139
18	BUPATI	1	0	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	143.836	51.188	195.024
20	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	488	41	529
21	BURUH PETERNAKAN	79	87	166
22	BURUH TANI/PERKEBUNAN	29.243	21.146	50.389
23	CHEFF	0	0	0
24	DOKTER	154	200	354
25	DOSEN	146	141	287
26	DUTA BESAR	0	0	0
27	GUBERNUR	0	0	0
28	GURU	5.220	8.837	14.057
29	IMAM MESJID	15	0	15
30	INDUSTRI	63	20	83
31	JURU MASAK	4	1	5
32	KARYAWAN BUMD	221	81	302
33	KARYAWAN BUMN	2.582	430	3.012
34	KARYAWAN HONORER	816	643	1.459
35	KARYAWAN SWASTA	87.250	31.688	118.938
36	KEPALA DESA	171	10	181
37	KEPOLISIAN RI	960	41	1.001
38	KONSTRUKSI	63	12	75
39	KONSULTAN	5	4	9
40	MANAJER	0	0	0
41	MEKANIK	229	2	231
42	MENGURUS RUMAH TANGGA	384	297.151	297.535
43	NELAYAN/PERIKANAN	8.818	32	8.850

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>LK</b>	<b>PR</b>	<b>JML</b>
44	NOTARIS	7	18	25
45	OPERATOR	0	0	0
46	PARAJI	2	6	8
47	PARANORMAL	9	2	11
48	PASTOR	5	0	5
49	PEDAGANG	17.783	15.350	33.133
50	PEGAWAI NEGERI SIPIL	7.218	4.909	12.127
51	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
52	PEKERJAAN LAINNYA	1	3	4
53	PELAJAR/MAHASISWA	137.460	113.001	250.461
54	PELAUT	188	1	189
55	PEMBANTU RUMAH TANGGA	4	456	460
56	PENATA BUSANA	2	0	2
57	PENATA RAMBUT	5	11	16
58	PENATA RIAS	4	20	24
59	PENDETA	69	15	84
60	PENELITI	11	0	11
61	PENGACARA	23	3	26
62	PENSIUNAN	5.603	2.115	7.718
63	PENTERJEMAH	2	2	4
64	PENYIAR RADIO	2	1	3
65	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
66	PERANCANG BUSANA	1	5	6
67	PERANGKAT DESA	2.615	429	3.044
68	PERAWAT	555	972	1.527
69	PERDAGANGAN	2.502	2.063	4.565
70	PETANI/PEKEBUN	164.102	146.997	311.099
71	PETERNAK	242	143	385
72	PIALANG	1	1	2
73	PILOT	0	0	0
74	PRESIDEN	0	0	0
75	PROMOTOR ACARA	1	0	1
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	3	3
77	SENIMAN	55	20	75
78	SOPIR	2.024	2	2.026
79	TABIB	3	1	4
80	TEKNISI	0	0	0
81	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
82	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.014	13	1.027
83	TRANSPORTASI	121	11	132
84	TUKANG BATU	299	0	299
85	TUKANG CUKUR	26	0	26

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JML
86	TUKANG GIGI	5	0	5
87	TUKANG JAHIT	1.816	190	2.006
88	TUKANG KAYU	395	1	396
89	TUKANG LAS/PANDAI BESI	44	2	46
90	TUKANG LISTRIK	14	0	14
91	TUKANG SOL SEPATU	7	0	7
92	USTADZ/MUBALIGH	70	12	82
93	WAKIL BUPATI	1	0	1
94	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
95	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
96	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
97	WALIKOTA	0	0	0
98	WARTAWAN	40	6	46
99	WIRASWASTA	97.870	35.089	132.959
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.011.159</b>	<b>985.826</b>	<b>1.996.985</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

Penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan jenjang pendidikannya pada tahun 2021 sebanyak 666.114 orang memiliki jenjang pendidikan SD/ sederajat, 331.904 orang memiliki jenjang pendidikan SLTP/ sederajat, 299.323 orang memiliki jenjang pendidikan SLTA/ sederajat. Secara lengkap terkait dengan jenjang pendidikan penduduk Kabupaten Cilacap disajikan dalam tabel berikut.

#### **Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2022**

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak/Blm Sekolah	371.833	389.983	404.614	433.184	446.138	455.155
2	Belum Tamat SD/Sederajat	167.769	172.457	168.815	171.880	169.435	167.937
3	Tamat SD/Sederajat	676.784	689.875	686.611	665.456	666.114	667.516
4	SLTP/Sederajat	305.343	318.285	325.383	328.495	331.904	333.827
5	SLTA/Sederajat	263.017	274.873	287.508	292.761	299.323	303.184
6	Diploma I/II	4.383	4.587	4.525	4.430	4.363	4.304
7	Akademi/ Diploma III	15.003	16.075	16.725	17.035	17.292	17.544
8	Diploma IV/ Strata I	37.221	39.156	41.557	42.901	44.579	45.719
9	Strata-II	1.477	1.483	1.619	1.665	1.703	1.738
10	Strata-III	83	75	70	65	61	61
	<b>Jumlah</b>	<b>1.842.913</b>	<b>1.906.849</b>	<b>1.937.427</b>	<b>1.957.872</b>	<b>1.980.912</b>	<b>1.996.985</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2022

## 2.5. Jumlah Perangkat Daerah dan ASN

### Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

NO	UNIT ORGANISASI	PNS	CPNS	PPPK	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	145	8	0	153
2	SEKRETARIAT DPRD	42	3	0	45
3	INSPEKTORAT	46	10	0	56
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5484	102	4230	9816
5	DINAS KESEHATAN	2011	111	329	2451
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137	26	0	163
7	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	81	21	0	102
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62	6	0	68
9	DINAS SOSIAL	21	6	0	27
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	57	5	0	62
11	DINAS PERHUBUNGAN	49	14	0	63
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	44	7	0	51
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	71	3	0	74
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28	8	0	36
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	34	5	0	39
16	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41	4	0	45
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	26	7	0	33
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30	4	0	34
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	5	0	79
20	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	28	14	1	43
21	DINAS PERTANIAN	138	25	49	212
22	DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN	42	1	0	43
23	DINAS PERIKANAN	29	2	0	31
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36	15	0	51
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	51	6	0	57
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	51	4	0	55

NO	UNIT ORGANISASI	PNS	CPNS	PPPK	JUMLAH
27	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	80	13	0	93
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22	1	0	23
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37	2	0	39
30	KECAMATAN ADIPALA	18	1	0	19
31	KECAMATAN BANTARSARI	13	0	0	13
32	KECAMATAN BINANGUN	27	0	0	27
33	KECAMATAN CILACAP SELATAN	39	2	0	41
34	KECAMATAN CILACAP TENGAH	45	3	0	48
35	KECAMATAN CILACAP UTARA	44	1	0	45
36	KECAMATAN CIMANGGU	25	1	0	26
37	KECAMATAN CIPARI	15	1	0	16
38	KECAMATAN DAYEUHLUHUR	13	0	0	13
39	KECAMATAN GANDRUNGMANGU	18	1	0	19
40	KECAMATAN JERUKLEGI	19	2	0	21
41	KECAMATAN KAMPUNGLAUT	14	2	0	16
42	KECAMATAN KARANGPUCUNG	16	2	0	18
43	KECAMATAN KAWUNGAN TEN	22	0	0	22
44	KECAMATAN KEDUNGREJA	17	1	0	18
45	KECAMATAN KESUGIHAN	23	1	0	24
46	KECAMATAN KROYA	22	0	0	22
47	KECAMATAN MAJENANG	21	3	0	24
48	KECAMATAN MAOS	23	1	0	24
49	KECAMATAN NUSAWUNGU	22	1	0	23
50	KECAMATAN PATIMUAN	14	1	0	15
51	KECAMATAN SAMPANG	23	0	0	23
52	KECAMATAN SIDAREJA	19	3	0	22
53	KECAMATAN WANAREJA	18	1	0	19
<b>TOTAL</b>		<b>9.527</b>	<b>466</b>	<b>4.609</b>	<b>14.602</b>

\*) Kondisi 14 September 2022

## BAB III

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 3.1. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah

##### a. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah masing masing urusan adalah sebagai berikut :

#### 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

- a. Rendahnya rata-rata lama sekolah (tahun 2016 sebesar 6,90 tahun), masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah yang berasal dari putus sekolah (*drop out*) SD (tahun 2016 sebesar 0,01%) dan SMP (tahun 2016 sebesar 0,05%).
- b. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2016 masih terdapat 907 ruang kelas dalam kondisi rusak berat atau 8,56 persen dari seluruh ruang kelas yang ada
- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga Dikmas. Persentase lembaga Dikmas yang terakreditasi sampai dengan 2016 baru mencapai 9,59%.
- d. Belum terpenuhinya rasio kebutuhan guru ASN dengan jumlah guru SD negeri (tahun 2016 sebesar 64,15%) dan guru SMP negeri (tahun 2016 sebesar 89,35).

##### 2. Kesehatan

- a. Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan (tahun 2016 sebanyak 25 kasus), kematian bayi (sebesar 6,5 per 1000 kelahiran hidup) dan kematian Balita (tahun 2016 sebesar 7,9 per 1000 kelahiran hidup).
- b. Masih tingginya gizi buruk (tahun 2016 sebesar 0,03%), dan balita stunting (tahun 2016 sebesar 22,02%).
- c. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Hal ini dapat dilihat dari Rasio puskesmas per satuan penduduk baru mencapai 0,62.
- d. Masih tingginya penyakit menular (tahun 2016 prevalensi DBD sebesar 71 per 100.000 jiwa, kasus penderita HIV/AIDS (tahun 2016 sebanyak 186 kasus), Filariasis, tingkat kematian akibat Tuberculosis (TB) tahun 2016 sebesar 1,77 per 100 ribu penduduk dan penyandang penyakit Kusta.
- e. Terjadi kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (antara lain Diabetes Mellitus (DM) sebanyak 2.632 kasus dan persentase hipertensi sebanyak 8,9%).
- f. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hal ini dapat dilihat dari rumah tangga ber PHBS, dan rumah sehat. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sampai dengan 2016 sebesar 91,2%



- g. Masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Hal ini dapat dilihat dari cakupan Desa ODF hanya 6,3 Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 79,62%, dan Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll) sebesar 77,8
- h. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan. Cakupan puskesmas terakreditasi tahun 2016 sebesar 21,05%.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan (tahun 2016 panjang jalan kondisi baik sebesar 56,15% dan jembatan sebesar 75,20%).
- b. Belum seluruh masyarakat mampu mengakses air minum yang layak (rumah tangga yang mengakses air minum layak sebesar 40,40% pada tahun 2016);
- c. Belum optimalnya drainase saluran pembuang di kawasan perkotaan (tahun 2016 sebesar 63%);
- d. Belum optimalnya cakupan pelayanan sistem air limbah yang memadai (cakupan sebesar 81,37% pada tahun 2016);
- e. Belum optimalnya saluran irigasi sekunder Kabupaten (cakupan sebesar 19 % pada tahun 2016);
- f. Masih adanya ketidaktaatan terhadap peraturan dalam bidang tata ruang (tahun 2016 Ketaatan terhadap RTRW hanya sebesar 63%).

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a. Penanganan pemukiman kumuh belum optimal (Universal Accses), diketahui cakupan tahun 2016 sebesar 66,78% yang perlu penanganan.
- b. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH). Pada tahun 2016 RTLH sebesar 23,54%.
- c. Belum semua wilayah permukiman memiliki PSU (*Prasarana Sarana Utilitas*) (cakupan tahun 2016 sebesar 79%).

### **5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

- a. Belum semua lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap melakukan peran dan dukungan pengembangan bidang kesatuan bangsa dan politik (cakupan tahun 2016 sebesar 20%);
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu; Hal ini dapat dilihat dari % partisipasi pemilu legeslatif tahun 2014 sebesar 65,77%.
- c. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (cakupan pertugas Limas 0,38 tahun 2016);
- d. Masih ditemukannya kasus pelanggaran peraturan daerah (tingkat pelanggaran Perda sebanyak 409 pada tahun 2016);

- e. Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dalam hal ini dilihat dari capaian Desa tangguh bencana baru mencapai 7,04% dari total desa dan kelurahan;

## **6. Sosial**

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan penanganan PMKS terutama pada fakir miskin dan keluarga rentan (cakupan penanganan PMKS sebesar 42% tahun 2016);
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS (cakupan penanganan sebesar 5,46% pada tahun 2016);
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberian jaminan sosial kepada PMKS; Hal ini dapat dilihat dari persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial sebesar 8% tahun 2016.
- d. Belum optimalnya penanganan Korban Bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar saat tanggap darurat (capaian tahun 2016 dengan cakupan sebesar 23,10%).

## **2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

- a. Tingginya angka pengangguran, hal ini dapat dilihat jumlah pengangguran terbuka (TPT) (pada tahun 2016 dengan TPT sebesar 7,81%)
- b. Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi baru mencapai 75% dari total pencari kerja.
- c. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja; Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan tahun 2016 baru mencapai 29%.
- d. Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus konflik industrial setiap tahun. Jumlah Kasus Konflik Industrial tahun 2016 sebesar 16 kasus.
- e. Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan (cakupan tahun 2016 sebesar 97,08%).

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Masih terjadinya kesenjangan pembangunan responsif gender (diketahui dari nilai IPG tahun 2015 sebesar 86,04 dan nilai IDG sebesar 63,53 lebih rendah dari nilai relatif IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah).
- b. Belum optimalnya peran lembaga layanan korban kekerasan anak dan perempuan sampai ke tingkat desa/kelurahan; Sampai dengan tahun 2016 belum dibentuk lembaga penanganan kekerasan ditingkat desa/kelurahan.
- c. Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan perempuan (persentase kasus kekerasan terhadap anak tahun 2016 sebesar 0,142 dan kekerasan terhadap perempuan);

- d. Belum terpenuhinya data terkait dengan PUG dan PUHA (Pengarustamaan Hak Anak) dalam Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga (tahun 2015 sebesar 26,11% lebih rendah daripada Jawa Tengah sebesar 32,4%)

### **3. Pangan**

- a. Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang (Pola Pangan Harapan/PPH) (PPH sebesar 87,2 tahun 2016).
- b. Terbatasnya jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat. Sampai dengan tahun 2016 jumlah lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebesar 6 unit.
- c. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan; sampai dengan tahun 2016 baru 86 %;
- d. Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Cilacap; Sampai tahun 2016 cadangan pangan sebesar 90,8%.
- e. Masih ditemuinya daerah yang berpotensi rawan pangan (rawan pangan transien dan kronis), sebanyak 24 kecamatan berpotensi rawan pangan transien);
- f. Belum optimalnya pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (tahun 2016 terdapat 2 jenis yang telah terakreditasi).

### **4. Pertanian**

- a. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan (kasus tanah yang terfasilitasi pada tahun 2016 sebanyak 26 kasus);
- b. Belum semua luas/bidang tanah Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bersertifikat (capaian cakupan kepemilikan tanah bersertifikat tahun 2016 sebesar 19%);

### **5. Lingkungan Hidup**

- a. Belum dilakukannya pengukuran capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- b. Belum optimalnya penanganan sampah, pesentase pengangkutan sampah pada tahun 2016 masih sebesar 45,00 %.
- c. Belum optimalnya cakupan penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi, serta ruang terbuka hijau (rasio cakupan penghijauan diwilayah konservasi dan rawan abrasi capaian tahun 2016 masih rendah yaitu 3,02%);
- d. Belum Optimalnya Pemantauan terhadap Industri yang melakukan pengolahan Limbah Industri (Capaian 2016 persentase industri yang mengolah limbah sebesar 5, 8%).

### **6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan baik (cakupan akte kelahiran tahun 2016 sebesar 59,59%, Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk sebesar 101,8%, Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar 99,22%).

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa (peningkatan LPMD/K, BPD dan PKK serta Karang Taruna) dalam peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (masih rendahnya desa yang memiliki BUMDES tahun 2016 sebesar 16,73 dan Persentase Posyantek aktif sebesar 40%);
- b. Belum optimalnya pemerintah desa dalam penerapan Undang- Undang tentang Desa (terutama terkait dengan presentase penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes) sebesar 50%).

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* (tahun 2016 sebesar 12,78), persentase peserta KB baru sebesar 72,21, cakupan KB Pria masih rendah yaitu 3,77%, penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah yaitu 26,93 pada tahun 2016.
- b. Masih tingginya angka kelahiran remaja, pada tahun 2016 sebesar 33%;
- c. Belum tersusunnya kebijakan dan pemetaan pertumbuhan penduduk serta pengembangan keluarga;
- d. Masih kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB (PLKB) pada tahun 2016 rata-rata mampu 4 – 5 desa setiap petugas;
- e. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, capaian kinerja tahun 2016 diketahui dari persentase (%) kelurahan/desa yang memiliki BKB (Bina Keluarga Balita) sebesar 72,99%, capaian BKL (Bina Keluarga Lansia) sebesar 68,96%, dan BKR (Bina Keluarga Remaja) mencapai sebesar 77,89%.

## **9. Perhubungan**

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2016 jumlah terminal tipe C sebanyak 7 unit);
- b. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, penerangan jalan umum di jalan Kabupaten Cilacap) tahun 2016 sebanyak 77%.
- c. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2014 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 19.314 kasus
- d. Belum tercapainya rasio jaringan jalan dengan jumlah trayek pada tahun 2016 persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum baru mencapai 75%

## **10. Komunikasi dan Informatika**

- a. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah, sampai dengan tahun 2016 masih pada peringkat 30 dari 35 kab/kota.
- b. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal, karena belum semua website PD updated (capaian tahun 2016 sebesar 23%).

- c. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (tahun 2016) sebesar 70,83%.

#### **11. Koperasi dan UMKM**

- a. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan perkoperasian, hal ini ditandai dengan koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 96,4%;
- b. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, hal ini ditandai dengan belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil, tahun 2016 sebesar 0,38%;
- c. Belum optimalnya sarana promosi produk UMKM, hal ini diketahui dari tersedianya outlet dan showroom UMKM sebanyak 7 unit;
- d. Masih banyak UMKM yang belum memiliki izin, sebagaimana diatur menurut Perda Nomor 7 tahun 2016.
- e. Belum optimalnya peningkatan One Village One Product (OVOP) diketahui tahun 2016 sebanyak 6 produk saja.

#### **12. Penanaman Modal Daerah**

- a. Meningkatnya nilai investasi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, hal ini disebabkan penanaman modal banyak terdapat di sektor industri pengolahan dan industri besar yang padat teknologi, hal ini diketahui dari jumlah investasi yang masuk pada Tahun 2016 11, 562 M tapi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cilacap masih tinggi yaitu 7,81
- b. Investasi yang masuk di Kabupaten Cilacap, belum sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan keterampilan SDM.
- c. Belum optimalnya promosi investasi, sampai 2016 hanya sebesar 4 kegiatan saja.
- d. Belum optimalnya koordinasi antar Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, terutama data realisasi investasi, promosi penanaman modal.

#### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, dengan jumlah organisasi sebanyak 32 unit.
- b. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga, dengan jumlah cabang olahraga sebanyak 32 cabang.
- c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam pengembangan olahraga. Capaian rasio lapangan olahraga terhadap jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 2,75.

#### **14. Statistik**

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- c. Belum terintegrasinya sistem data dan statistik.

## **15. Persandian**

- a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

## **16. Kebudayaan**

- a. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah benda purbakala / situs atau benda cagar budaya.
- b. Masih perlunya meningkatkan jumlah grup kesenian.
- c. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival.
- d. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka (museum).

## **17. Perpustakaan**

- a. Masih kurangnya minat baca masyarakat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 sebanyak 40.000 orang per tahun.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan hal ini dapat dilihat dari kepemilikan jumlah buku sebanyak 53.391 buku dan jumlah buku sebanyak 29.668 buku.
- c. Masih kurangnya tenaga perpustakaan (tahun 2016) sebanyak 4 orang staf.
- d. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah.

## **18. Kearsipan**

- a. Masih rendahnya system duplikasi arsip ke dalam bentuk arsip elektronik.
- b. Masih rendahnya kesadaran PD untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku (tahun 2016) sebesar 64,39%.
- c. Sedikitnya jumlah arsiparis/pengelola arsip.

### **3) Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum optimalnya tingkat produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kab Cilacap. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cilacap sebesar 13.176 ton, kondisinya menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 22.804 ton.
- b. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Cilacap, tahun 2016 diketahui rata-rata konsumsi sebesar 22,93 Kg, per kapita/ per tahun.
- c. Belum optimalnya cakupan pembinaan kelompok nelayan (tahun 2016 sebesar 40%), pembudidaya dibina sebanyak 29,45%, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan.

#### **2. Pariwisata**

- a. Belum optimalnya Pengembangan Destinasi pariwisata, tahun 2016 baru ada 26 obyek wisata, sementara masih ada potensi destinasi yang belum dikembangkan seperti Desa Wisata Karangbanar (Kecamatan Nusawungu), Desa Wisata

Samodra Mandiri Sejahtera Kecamatan Binangun, Desa Wisata Cimendaway Indah (Kecamatan Dayeuhluhur), Desa Wisata Curug Geulis (Kecamatan Cipari).

- b. Belum optimalnya pemasaran pariwisata, ditunjukkan pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Cilacap berjumlah 525.676 orang

### **3. Pertanian**

- a. Tingkat kesejahteraan petani masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari nilai NTP pada tahun 2016 sebesar 99,35%.
- b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai produksi kedelai yang menurun pada tahun 2016 menjadi 1.825 ton.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilihat persentase Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik yaitu 40,63 % pada tahun 2016.
- d. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran petani.
- e. Masih rendahnya kualitas SDM dan ketrampilan petani.
- f. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan petani (tahun 2016 jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani terbina, mencapai antara 55%– 65%.
- g. Masih rendahnya daya saing dan inovasi produk pertanian dan perkebunan.
- h. Semakin berkurangnya tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda bekerja di lapangan usaha pertanian/perkebunan dan peternakan.
- i. Belum optimalnya lahan pertanian berkelanjutan, karena masih tingginya alih fungsi lahan sawah lestari.

### **4. Perdagangan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat (tahun 2016 pasar rakyat yang memenuhi syarat masih rendah sebesar 63,64%).
- b. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan asongan.
- c. Menurunnya nilai ekspor perdagangan dari Kabupaten Cilacap, Tahun 2016 sebesar US \$ 9.924.992.357.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan tera, tera ulang dan perlindungan konsumen. Sampai dengan tahun 2016 cakupan Ukur alat takar dan perlengkapannya baru mencapai 75,5 %.
- e. Masih terbatasnya produk pasar yang diterima di pasar internasional, sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 14 jenis produk yang diterima pasar.
- f. Menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB dari sebesar 22,17% tahun 2015 menurun menjadi sebesar 11,10% pada tahun 2016.

### **5. Perindustrian**

- a. Rendahnya kualitas SDM industri kecil dan menengah (IKM) dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dalam proses produksi.
- b. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah industri sebesar 4% pada tahun 2016.

#### **4) Permasalahan Urusan Penunjang Pembangunan**

##### **1. Perencanaan Pembangunan**

- a. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2016 belum terintegrasi *e-planning, e budgeting, dan e monitoring evaluasi*.
- b. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana dan peneliti sesuai kebutuhan Bappelitbangda.
- c. Belum optimalnya usulann kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD, sampai dengan 2016 baru mencapai 60%.
- d. Belum optimalnya kerjasama jaringan penelitian (Jarlit).
- e. Belum tersedianya kebijakan inovasi daerah dan kelitbang.
- f. Belum semua perangkat daerah (PD) terfasilitasi dalam pengembangan inovasi daerah.

##### **2. Inspektorat**

- a. Belum optimalnya fungsi dan kinerja pengawasan di bidang pemerintahan, kepegawaian, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya obyek pemeriksaan (Obrik) dengan temuan yang berindikasi pelanggaran hukum/tindak pidana korupsi 6,5%.
- b. Belum optimalnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016 nilai maturitas SPIP baru mencapai level 2.

##### **3. Kepegawaian**

- a. Rekrutmen SDM belum sesuai dengan kebutuhan.
- b. Belum semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Penempatan ASN belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- d. Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan ASN.
- e. Masih kurangnya ASN untuk bidang pendidikan (guru dan tenaga kependidikan SD negeri (rasio guru ASN sebesar 64,15%) dan rasio guru SMP (sebesar 89,35%) dan tenaga ASN di bidang kesehatan.

##### **4. Keuangan Daerah**

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sampai dengan tahun 2016 kontribusi PAD terhadap APBD baru mencapai 15,33 %.
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kontribusi dana perimbangan
- c. Masih kurangnya kualitas pelaporan keuangan daerah.
- d. Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel.

##### **5. Sekretariat Dewan**

- a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- b. Belum optimalnya penetapan Peraturan Daerah (Perda).

##### **6. Sekretariat Daerah**

- a. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan pembangunan.



- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya pelayanan publik.

## **b. Isu Strategis Daerah**

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Cilacap pada lima tahun yang akan datang. Isu strategis daerah selama lima tahun ke depan yaitu :

- 1. Kualitas sumber daya manusia** (rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk), diketahui capaian tahun 2016, rata-rata lama sekolah adalah 6,90 tahun (setara kelas 1 SMP), kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 25 kasus, kematian bayi sebesar 7,9 per 1.000 kelahiran hidup, gizi buruk sebesar 0,03%, stunting sebesar 22,02%, penderita HIV/AIDS sebanyak 186 kasus, TB sebesar 1,77 per 100 ribu jiwa, penyakit tidak menular terutama *diabetes mellitus* (DM) dan hipertensi sebesar 8,9%. Demikian pula terkait kualitas sarana prasarana kesehatan dasar (tahun 2016 Puskesmas terakreditasi baru sebesar 21,05%) dan lanjutan. Cukup tingginya kasus kekerasan berbasis gender disebabkan masih belum optimalnya kualitas hidup perempuan, dan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak. Pengendalian penduduk masih menjadi permasalahan, hal ini dilihat dari tingginya *unmetneed* (tahun 2016 sebesar 12,78, kesertaan KB aktif pada metode MKJP masih rendah (sebesar 26,93%) dan tingginya kelahiran remaja/ perkawinan usia muda (sebesar 33%). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan menjadikan Kabupaten Cilacap menjadi Kabupaten yang sehat, cerdas responsif gender dan memiliki daya saing yang kuat di antara kabupaten sekitar, tentunya juga skala nasional dan internasional. Peningkatan kualitas SDM juga akan meningkatkan pencapaian tujuan SDGs yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia.
- 2. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, efisien, efektif dan akuntabel.** Hal ini dapat dilihat belum optimalnya nilai akuntabilitas, masih ditemukan ASN yang tidak disiplin, masih terjadinya temuan Inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan yang berindikasi pelanggaran hukum dan belum terintegrasinya *e-planning, e-budgeting, dan e-monitoring evaluasi*. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan akan mempengaruhi pencapaian indeks reformasi birokrasi, pencapaian indeks korupsi, peningkatan pelayanan pada masyarakat, dan peningkatan nilai akuntabilitas.
- 3. Pengembangan perekonomian dan inovasi daerah.** Masih terdapat usaha mikro/kecil yang belum dibina dalam kluster, jumlah KSP/USP dalam kondisi sehat sebanyak 582 unit dan belum optimalnya pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan (pengurangan kemiskinan), pengurangan kesenjangan dan peningkatan daya saing produk ekonomi lokal.

- 4. Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.** Angka Kemiskinan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 sebesar 14,12% yang sebagian besar terdapat di perdesaan dan wilayah pesisir. Angka kemiskinan ini salah satunya juga ditunjang dengan masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016 sebesar 7,81%. Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Cilacap, disebabkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja kurang sesuai dengan lapangan kerja industri pengolahan, industri dan jasa-jasa yang tersedia. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kewirausahaan.
- 5. Kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah.** Kabupaten Cilacap berdasarkan struktur pendapatan asli daerah (PAD), dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan Pusat melalui dana perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK). Hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang sangat bergantung pada keuangan nasional.
- 6. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah** (jalan dan jembatan dalam kondisi baik, cakupan tersedianya air bersih, penanganan pemukiman kumuh, pelayanan transportasi umum, rumah tidak layak huni (RTLH) dan kurangnya capaian ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini apabila diselesaikan akan mengurangi kesenjangan antar wilayah, mempermudah akses masyarakat pada pelayanan publik. Selain itu juga meningkatkan pencapaian tujuan di dalam SDGs bidang infrastruktur.
- 7. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam,** sampai dengan 2016 indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 68,06. Hal ini apabila diselesaikan akan berpengaruh pada penciptaan indek kualitas lingkungan hidup, pengurangan pencemaran dan perwujudan Kabupaten yang ramah lingkungan.
- 8. Pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan,** wilayah Cilacap memiliki potensi bencana cukup lengkap, antara lain banjir, tanah longsor, tsunami dan abrasi di kawasan pesisir. Kabupaten Cilacap telah menyusun rencana penanggulangan bencana dan mitigasi bencana yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang. Sampai dengan tahun 2016 terdapat bangunan yang berada di daerah Rawan Bencana (Banjir, longsor dan tsunami) sebanyak 105.453 unit. Hal ini apabila diselesaikan akan berpengaruh pada pengurangan korban bencana, dan pengurangan kerugian akibat bencana.
- 9. Penataan/pengembangan wilayah,** Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 2.138,51 km<sup>2</sup> (belum termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11,51 km<sup>2</sup>). Jika dibandingkan dengan luas Propinsi Jawa Tengah seluas 32.544,1 km<sup>2</sup> yang berarti rata-rata luas kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah adalah 929,83 km<sup>2</sup>, ini berarti luas Kabupaten Cilacap lebih dari 2 (dua) kali lipat luas rata-rata kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 152 Km, dari tepi Kecamatan Dayeuhluhur sampai tepi Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan berjarak terjauh 35 Km dari tepi Kecamatan Cilacap kota sampai tepi Kecamatan Sampang. Luasnya geografi

Kabupaten Cilacap ini berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan aspirasi masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Cilacap bagian barat. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan beberapa fasilitasi untuk mengakomodir aspirasi tersebut, seperti mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Kajian Pemekaran Kabupaten Cilacap, menerbitkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 136/221/01/Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cilacap dan mengajukan usulan pemekaran Kabupaten Cilacap kepada Gubernur Jawa Tengah. Namun demikian, berbagai upaya tersebut masih belum berhasil, sehingga dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, pemekaran wilayah dijadikan salah satu Isu Strategis Kabupaten Cilacap dengan harapan proses pemekaran bisa berjalan sesuai harapan.

### **3.2. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam rangka menentukan arah kebijakan di masa depan maka perlu dirumuskan suatu visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan Daerah tahun 2005–2025 yang tercantum dalam RPJPD adalah: **“Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera”** Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena penyusunan RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi. Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

**“Berbudaya”** mengandung maksud masyarakat Kabupaten Cilacap yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mandiri berdasarkan falsafah Pancasila. Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan

memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Daerah mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan Kabupaten lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu daerah tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah daerah dan aparatur penegak perda dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan daerah yang makin kokoh. Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, *kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya*. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

“**Kesejahteraan**“ terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan Daerah, Keadilan dan kemakmuran. Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu Negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian daerah, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama

sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten Cilacap adalah kabupaten yang mempunyai potensi bahari. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu daerah dan sistem politik yang dianutnya. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketentramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju. Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Pembangunan daerah bukan hanya sebagai daerah yang mandiri dan maju, melainkan juga daerah yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Dengan demikian, adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun antar wilayah Kecamatan dan Desa. Daerah yang makmur adalah daerah yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.



Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023

## 1. Visi RPJMD

RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022. Visi pembangunan Kabupaten Cilacap berdasarkan analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

**“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”**

**“Bangga Mbangun Desa”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi Kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan. Pencapaian Visi diatas juga memperhatikan Bangga Mbangun Desa yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial budaya.

**Sejahtera**, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar urusan pemerintahan maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kesejahteraan ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

**Merata**, mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan semua wilayah secara berkeadilan. Pembangunan yang merata dapat dilihat dari semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar penduduk dan semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah sampai ke pelosok desa dan kecamatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

**Bangga Mbangun Desa** merupakan strategi pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita Bupati dan Wakil Bupati pada saat Kampanye “Ayo Kerja Mbangun Desa Menuju Cilacap Sejahtera”. Pengertian ayo kerja adalah suatu ajakan dan upaya yang sungguh sungguh, dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran dan aset dari semua komponen pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan pembangunan secara utuh (kafah) dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera. Ayo Kerja Mbangun Desa menuju Cilacap Sejahtera menjadi dasar dan landasan dalam mewujudkan *Cilacap to be Singapore of Java*.

*Cilacap to be Singapore of Java* merupakan konsep Kabupaten Cilacap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian Selatan dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri terpadu, yang terhubung dengan fasilitas infrastruktur penunjang (Pelabuhan Tanjung Intan, jalan tol Ciamis-Cilacap-Jogjakarta, Pejagan-Cilacap, terkoneksi dengan jalur kereta api) dan di dukung dengan pengembangan pusat jasa dan perdagangan serta pengembangan kawasan wisata dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang optimal.

Cilacap to be Singapore of Java merupakan konsep pengembangan Kabupaten Cilacap jangka panjang, Rencana strategis jangka menengah Pemerintah Kabupaten Cilacap memfasilitasi kebijakan pemanfaatan ruang untuk mendukung konsep tersebut, salah satunya dengan melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031. Konsep Cilacap to be Singapore of Java bukan berarti Cilacap akan menjadi seperti Singapura dalam waktu 5 tahun kedepan, tetapi konsep ini lebih berorientasi kepada pembangunan pondasi atau pijakan dasar yang disusun dalam masa 5 tahun RPJMD untuk menuju cita-cita tersebut.

## **2. Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022**

Untuk mewujudkan visi diatas maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.** Pada Misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penataan desa dan pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- 2. Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*.** Pada misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mewujudkan prinsip- prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik

(administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e- planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

3. **Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.** Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.
4. **Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.** Pada misi ini Kabupaten cilacap akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
5. **Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.** Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kabupaten Cilacap dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya, yakni pembangunan merata dengan semangat:

### **“Bangga Mbangun Desa”**

Makna **Bangga Mbangun Desa** yang terdiri dari 4 (empat) pilar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi; dan Lingkungan Sosial Budaya sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2011 tentang Bangga Mbangun Desa** adalah :

1. Sebagai kebijakan dan strategi percepatan (akselerasi) pembangunan;
2. Pedoman bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap secara terpadu dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi perdesaan;



3. Sebagai pendorong semangat dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan desa menuju desa mandiri.

### 3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka mencapai misi maka tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga, memiliki tujuan;**
  - a. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
  - b. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
- 2. Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* memiliki tujuan;**
  - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean goverment (transparansi berbasis e-goverment)
- 3. Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat memiliki tujuan;**
  - a. Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat.
- 4. Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional memiliki tujuan;**
  - a. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah.
- 5. Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan memiliki tujuan;**
  - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah

### 4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap Berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sasaran
  - a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
  - b. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak dengan sasaran
  - a. Meningkatnya kesejahteraan sosial.
  - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender.
  - c. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

3. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* dan *clean goverment* (transparansi berbasis *e-goverment*) dengan sasaran
  - a. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan melayani.
  - b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat dengan sasaran
  - a. Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik.
  - b. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat
  - c. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
5. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
  - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
  - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Destinasi Wisata.
  - c. Menurunnya pengangguran terbuka.
  - d. Meningkatnya nilai investasi
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah
  - a. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur wilayah.
  - b. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

### **3.3. Program Pembangunan**

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi :

#### **a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran

##### **2. Kesehatan**

- a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

- g. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program obat dan perbekalan kesehatan
- j. Program Pengawasan Obat dan makanan
- k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- l. Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- p. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- q. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- r. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
- b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- c. Program peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan
- d. Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
- e. Program Perencanaan Tata Ruang
- f. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- g. Program Pengelolaan Tata Bangunan
- h. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.
- i. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- j. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
- k. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
- l. Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pembuang
- m. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Raya
- o. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

### **4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Program pengembangan Perumahan
- b. Program Lingkungan Sehat perumahan
- c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

### **5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- b. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- c. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- g. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

**6. Sosial**

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) lainnya.
- b. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial)
- e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
- f. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

**b. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

- a. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- c. Program Pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

**3. Pangan**

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

**4. Pertanahan**

- a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

**5. Lingkungan Hidup**

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program Tata Lingkungan
- g. Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- h. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
  - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
  - a. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - b. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  - c. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
  - d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
  - a. Program Pengendalian Penduduk
  - b. Program Pelayanan Kontrasepsi
  - c. Program Keluarga Berencana
  - d. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
  - e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- 9. Perhubungan**
  - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan
- 10. Komunikasi dan Informatika**
  - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
- 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
  - a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
  - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 12. Penanaman Modal**
  - a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga**
  - a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
  - b. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
  - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 14. Statistik**
  - a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 15. Persandian**
  - a. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

## **16. Kebudayaan**

- a. Program pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

## **17. Perpustakaan**

- a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

## **18. Kearsipan**

- a. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
- c. Program Pemeliharaan rutin berkala sarpras kearsipan

### **c. Urusan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan Darat
- c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- e. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- g. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

#### **2. Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

#### **3. Pertanian**

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertenakan
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- f. Peningkatan Kesejahteraan petani
- g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
- k. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- m. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

#### **4. Perdagangan**

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

#### **5. Perindustrian**

- a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- b. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
- c. Program Penataan Struktur Industri
- d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensi

### **d. Penunjang Urusan**

#### **1. Pengawasan**

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
- b. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

#### **2. Perencanaan**

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- c. Program Perencanaan Sosial Budaya
- d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- e. Program Pengembangan Data/ Informasi
- f. Program Kerjasama Pembangunan
- g. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- h. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- i. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- j. Program Kerjasama Pembangunan

#### **3. Keuangan**

- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

#### **4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Program Pengembangan Kompetensi
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- c. Program Pengadaan dan pemberhentian ASN
- d. Program Pengembangan Sistem dan informasi Kepegawaian
- e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
- f. Program Pendidikan Kedinasan
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5. Penelitian dan Pengembangan**
  - a. Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 6. Sekretariat Dewan**
  - a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 7. Sekretariat Daerah**
  - a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
  - d. Program Kehumasan dan Keprotokolan
  - e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  - f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - h. Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - i. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - j. Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah
  - k. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
  - l. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda
  - m. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - o. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  - p. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 8. Kecamatan**
  - a. Program Pengembangan Kewilayahan
- e. Program Rutin di semua OPD**
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - d. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
  - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



## BAB IV

### ANGGARAN PENDAPATAAN DAN BELANJA DAERAH

Laporan realisasi APBD Kabupaten Cilacap berisi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui keadaan keuangan di Kabupaten Cilacap.



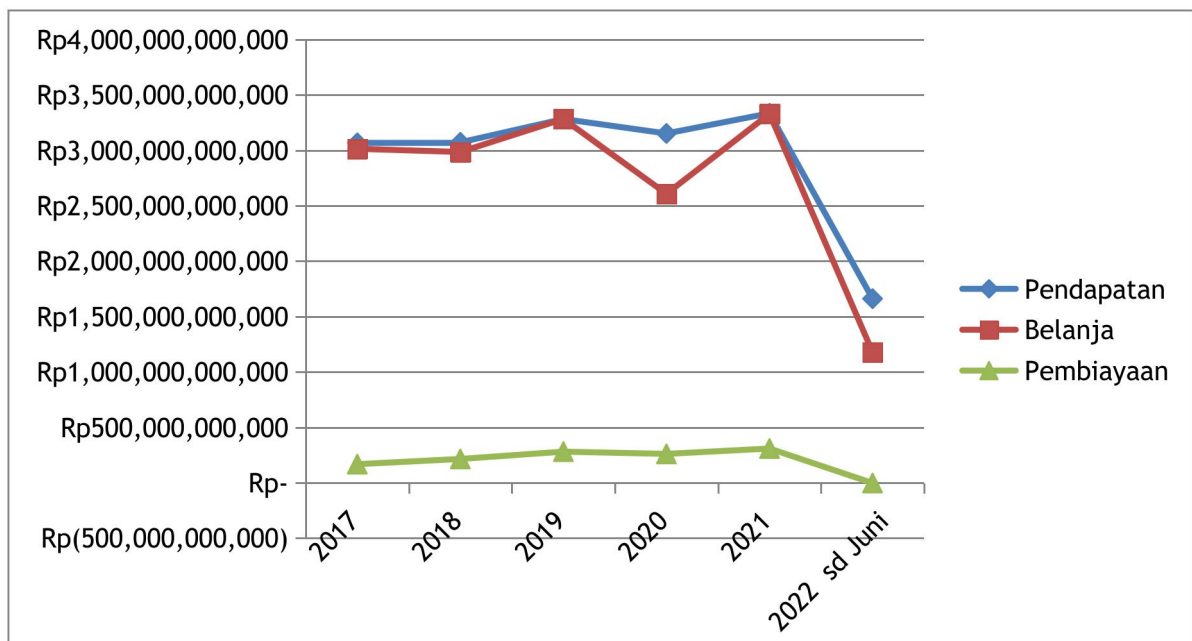
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasiona Kegiatan APBD

#### RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD KAB. CILACAP TAHUN 2017 – 2022 s.d Juni

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
2017	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.079.557.603.070</b>	<b>3.067.274.791.140</b>	<b>99,60</b>
	PAD	612.077.977.866	648.091.381.096	105,88
	Dana Perimbangan	1.919.895.773.000	1.874.953.083.082	97,66
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	547.583.852.204	544.230.326.962	99,39
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.247.867.779.720</b>	<b>3.014.110.475.842</b>	<b>92,80</b>
	Belanja Tidak Langsung	1.794.720.147.500	1.672.835.645.762	93,21
	Belanja Langsung	1.453.147.632.220	1.341.274.830.080	92,30
	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>168.310.176.650</b>	<b>168.310.176.650</b>	<b>100</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.401.176.650	200.401.176.650	100	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.091.000.000	32.091.000.000	100	
2018	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.049.351.736.008</b>	<b>3.072.112.464.787</b>	<b>100,75</b>
	PAD	497.353.613.147	527.577.740.281	106,08
	Dana Perimbangan	1.893.593.643.861	1.874.260.346.332	98,98
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	658.404.479.000	670.274.378.174	101,80

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.260.826.228.955</b>	<b>2.985.422.839.102</b>	<b>91,55</b>
	Belanja Tidak Langsung	1.802.688.439.400	1.667.542.475.133	92,50
	Belanja Langsung	1.458.137.789.555	1.317.880.363.969	90,38
	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>211.474.492.947</b>	<b>215.474.491.947</b>	<b>101,89</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	221.474.492.947	221.474.491.947	100
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	6.000.000.000	60
2019	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.289.004.349.418</b>	<b>3.282.797.966.310</b>	<b>99,81</b>
	PAD	553.906.636.361	574.276.795.303	103,68
	Dana Perimbangan	1.977.669.813.257	1.928.670.863.364	97,52
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	757.427.899.800	779.850.307.643	102,96
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.566.393.467.051</b>	<b>3.283.321.137.886</b>	<b>92,06</b>
	Belanja Tidak Langsung	1.869.867.076.655	1.761.479.421.400	94,20
	Belanja Langsung	1.696.526.390.396	1.521.841.716.486	89,70
	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>277.389.117.633</b>	<b>281.389.117.632</b>	<b>101,44</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	302.164.117.633	302.164.117.632	100
		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.775.000.000	20.775.000.000
2020	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.183.974.378.680</b>	<b>3.152.402.455.712</b>	<b>99,01</b>
	PAD	561.113.709.065	591.343.787.160	105,38
	Pendapatan Transfer	2.417.522.255.115	2.346.223.145.232	97,05
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	205.338.414.500	214.835.523.320	104,62
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.955.015.432.437</b>	<b>2.607.739.427.660</b>	<b>88,24</b>
	Belanja Operasi	2.303.053.385.597	2.118.332.170.798	91,98
	Belanja Modal	529.149.845.492	462.431.933.784	87,39
	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>255.163.946.057</b>	<b>261.013.946.057</b>	<b>102,29</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	280.865.946.057	280.865.946.057	100
		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.702.000.000	19.852.000.000
2021	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.233.576.105.032</b>	<b>3.334.300.290.655</b>	<b>103,11</b>
	PAD	653.354.304.152	739.133.833.863	113,13
	Pendapatan Transfer	2.397.271.507.680	2.403.370.709.951	100,25
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	182.950.293.200	191.795.746.841	104,83
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.543.157.686.542</b>	<b>3.329.814.716.679</b>	<b>93,98</b>
	Belanja Operasi	2.361.038.170.211	2.210.981.437.441	93,64
	Belanja Modal	635.915.122.901	583.816.848.983	91,81

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Belanja Tidak Terduga	13.382.834.160	4.935.080.670	36,88
	Belanja Transfer	532.821.559.270	530.081.349.585	99,49
	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>309.581.581.510</b>	<b>309.581.581.509</b>	<b>99,99</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	324.581.581.510	324.581.581.509	99,99
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	100
2022 s.d Juni	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.330.360.621.060</b>	<b>1.661.399.855.163</b>	<b>49,89</b>
	PAD	742.049.547.060	329.334.750.807	44,38
	Pendapatan Transfer	2.559.311.074.000	1.321.809.627.714	51,65
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.000.000.000	10.255.476.642	35,36
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.503.687.435.633</b>	<b>1.179.162.628.256</b>	<b>33,65</b>
	Belanja Operasi	2.408.845.127.358	866.688.579.940	35,98
	Belanja Modal	506.733.745.975	65.771.173.749	12,98
	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	2.129.269.957	4,26
	Belanja Transfer	538.108.562.300	244.573.604.610	45,45
	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>173.326.814.573</b>	<b>(2.000.000.000)</b>	<b>(1,15)</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	192.826.814.573	-	0
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.500.000.000	2.000.000.000	10,26



**Grafik APBD Kab. Cilacap 2017- Juni 2022**

Dari grafik diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dan pada posisi sampai dengan Bulan Juni 2022, realisasi pendapatan sudah mencapai 1.661.399.855.163 dari target pendapatan sebesar 3.330.360.621.060 atau 49,89 %.

Sedangkan untuk belanja daerah dalam kurun waktu dari tahun 2017 – Juni 2022 mengalami kenaikan/penurunan begitu juga untuk posisi pembiayaan juga mengalami kenaikan/penurunan.

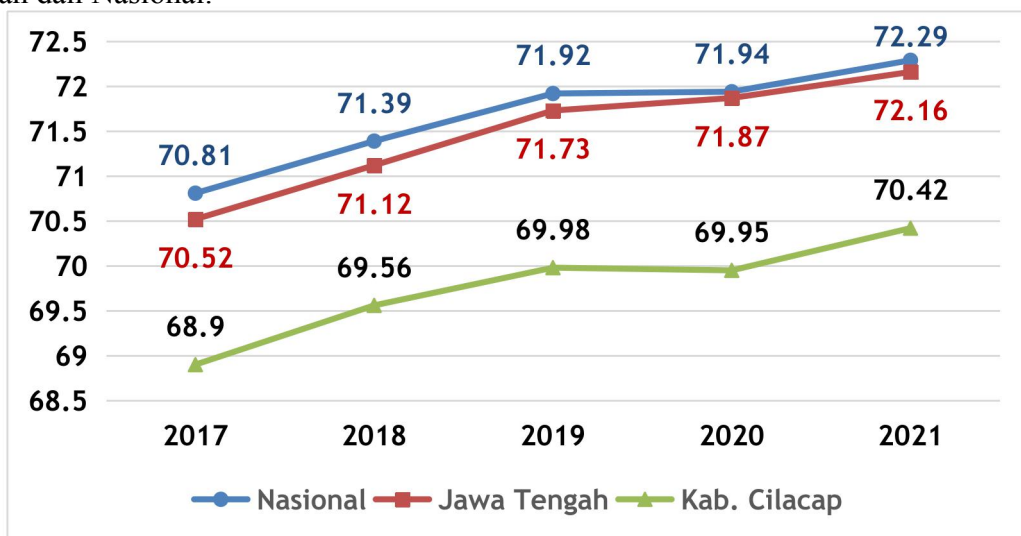
## BAB V

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 5.1 Capaian Indikator Tujuan

##### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada penurunan pada tahun 2020. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Cilacap sebesar 69,98 menurun menjadi 69,95 pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,42. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2017-2021, akan tetapi capaian tersebut masih dibawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.

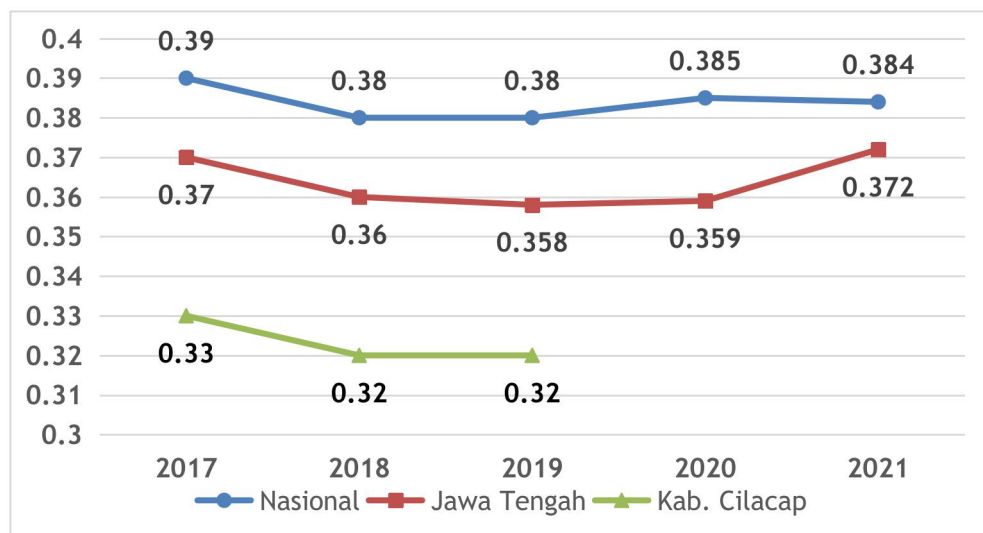


Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

#### Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

##### Indeks Gini

Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian pendapatan dalam populasi tersebut.



Sumber : BPS Tahun 2021

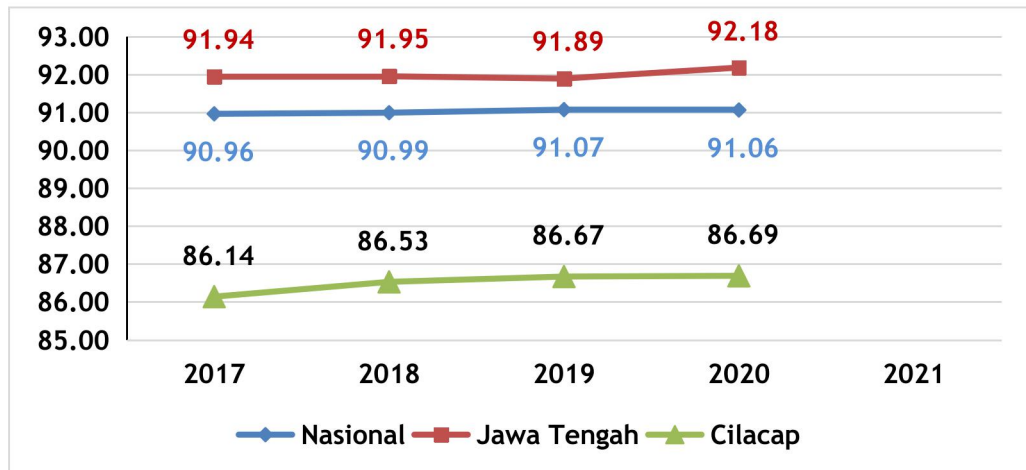
### Indeks Gini Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Indeks Gini Kabupaten Cilacap pada interval tahun 2017-2019 sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kabupaten Cilacap sebesar 0,33 sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 0,32 dan 2019 tetap pada angka 0,32; sedangkan pada tahun 2020, BPS Kabupaten Cilacap tidak melakukan penghitungan Indeks Gini lagi. Angka koefisien sebesar 0,32 tersebut menunjukkan bahwa persebaran pendapatan di Kabupaten Cilacap masuk dalam katagori ketimpangan moderat. Dengan menurunnya indeks Gini tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Cilacap mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021, capaian Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2019 masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

### Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang dipilah laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG dengan nilai 100. Nilai IPG semakin dekat dengan nilai 100 maka ketimpangan gender semakin rendah dan semakin rendah nilai maka ketimpangan gender semakin tinggi, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga (ribu rupiah) dari laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2020 mengalami tren positif. Angka IPG Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 sebesar 86,14, meningkat menjadi 86,69 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata IPG Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPG Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPG Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan ke-5 SDG's yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.



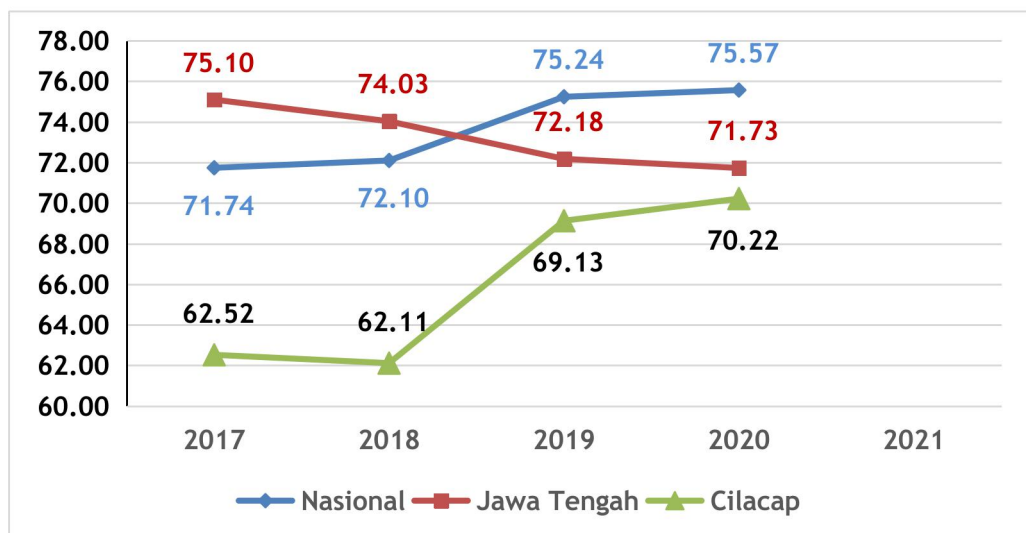
Sumber : BPS Tahun 2021

### Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

#### Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dipergunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan kaum perempuan, terutama dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen, persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan keahlian/keterampilan (administrasi, manajer dan teknisi) serta sumbangan ekonomi rumah tangga dari kaum perempuan.

IDG Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka IDG Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 sebesar 62,52 meningkat menjadi 70,22 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Cilacap masih berada di bawah dari angka Provinsi Jawa Tengah 71,73 dan Nasional 75,57.



Sumber : BPS Tahun 2021

### Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Adapun untuk mengetahui komposit pembentuk IDG Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten  
Cilacap Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterlibatan perempuan di parlemen	%	18	16	24	26	n.a.
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	38,60	43,68	45,11	43,97	n.a.
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	26,20	26,22	26,35	26,44	n.a.
<b>IDG</b>		%	62,52	62,11	69,13	70,22	n.a.

*Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS*

### **Kabupaten Layak Anak**

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Konsep ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak anak di Kabupaten Cilacap.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Cilacap telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan skor 500, di Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 600 dan 638 pada tahun 2019. Tahun 2020 mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya (skor 700-800). Pada tahun 2021, nilai yang diraih Kabupaten Cilacap sebesar 700.

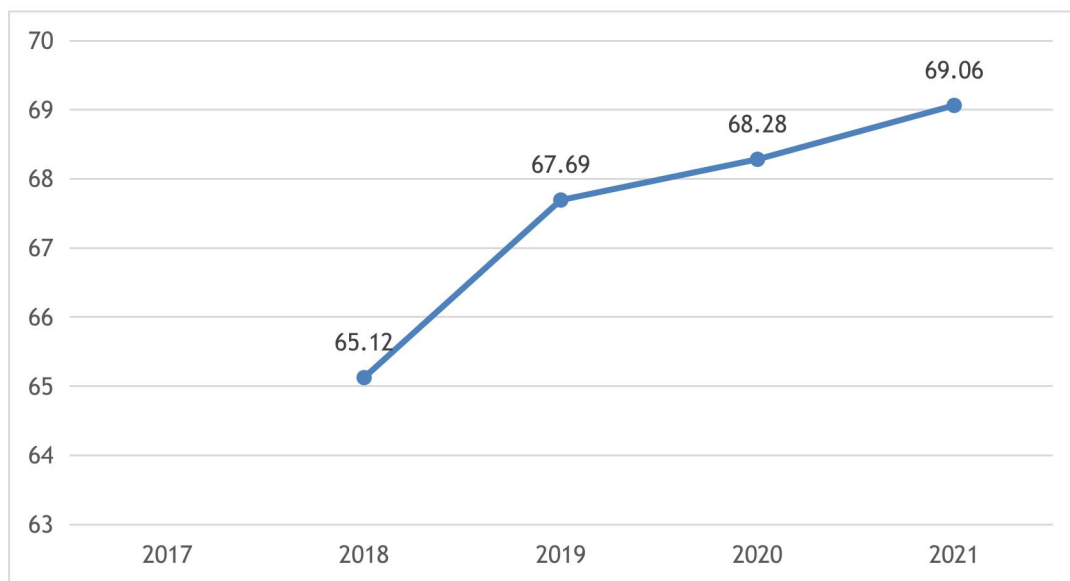
Hal ini dapat tercapai dengan dukungan berupa pembentukan kelembagaan dan penyusunan regulasi tentang perlindungan Anak.

### **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian skor Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cilacap tercapai 68,28 dengan kategori "B" dan nilai tahun 2021 tercapai 69,06 dengan kategori "B". Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan berkelanjutan.





**Capaian Indeks Reformasi Birokrasi  
Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021**

### **Tingkat Partisipasi Pemilu**

Tingkat Partisipasi Pemilu hanya dapat dihitung pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk masa jabatan 2017-2022, sedangkan pada tahun 2018 telah dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023, dan pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketiga pemilu / pilkada tersebut, maka telah tercapai tingkat partisipasi Pemilu Kabupaten Cilacap yang semakin baik, dengan rincian sebagai berikut :

PEMILU / PILKADA	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNAAN HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI
2017	1.472.242	937.929	63,71%
2018	1.442.974	946.272	65,58%
2019	1.506.214	1.082.186	71,85%

Sumber data : Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap

Capaian tersebut merupakan hasil dari seluruh stakeholder pemilu baik penyelenggara pemilu / pilkada, peserta pemilu / pilkada maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan sosialisasi kesadaran penggunaan hak pilih kepada masyarakat pada saat pemilu / pilkada.



Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

### **Angka Kriminalitas Yang Ditangani**

Indikator ini merupakan indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Angka Kriminalitas di Kabupaten Cilacap yang ditangani setiap tahun menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Angka Kriminalitas yang ditangani
2017	219
2018	219
2019	352
2020	352
2021	400

Sumber data : Satpol PP Kabupaten Cilacap

Capaian tersebut telah melebihi target akhir RPJMD yakni sebesar 240. Keberhasilan capaian ini merupakan peran seluruh komponen keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas wilayah.

### **Berkurangnya kerugian akibat bencana**

Wilayah Cilacap memiliki potensi bencana cukup lengkap, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami dan abrasi di kawasan pesisir. Kabupaten Cilacap telah menyusun rencana penanggulangan bencana dan mitigasi bencana yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan tata ruang. Penguatan sistem ketahanan bencana melalui penataan bangunan di daerah rawan bencana, rintisan desa tangguh bencana dan optimalisasi fungsi pusdalop kebencanaan dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada menjadi prioritas pembangunan. Hal ini apabila diselesaikan akan berpengaruh pada pengurangan korban bencana dan pengurangan kerugian akibat bencana.

Selama tahun 2021 telah terjadi 122 kali bencana dengan total kerugian mencapai Rp. 4.314.655.000,-, kerugian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar Rp. 27.017.246.000,- dengan kejadian 173 kali bencana.

Perbandingan total kerugian dengan kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Total Kerugian	Perbandingan Total Kerugian dengan Kejadian bencana
2017	148	22.264.687.000	150.437.074,32
2018	140	20.717.394.000	147.981.385,71
2019	68	11.392.080.000	167.530.588,24
2020	173	27.017.246.000	156.169.052,02
2021	122	4.314.655.000	35.366.024,59

Apabila dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, kerugian akibat bencana mengalami fluktuatif. Namun demikian secara umum upaya mitigasi bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana mulai menunjukkan keberhasilan sehingga dapat meminimalisir kerugian dan korban.

### Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas

#### 1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Keberadaan kilang minyak sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka dalam penghitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cilacap dengan Migas tahun 2017-2021, laju pertumbuhan yang cenderung positif, pertumbuhan PDRB dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap sebesar Rp.109.699.659 juta meningkat menjadi Rp.114.117.079 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 151,96 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.105.150.539 juta dengan indeks perkembangan 140,02 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp. 110.262.463 juta dengan indeks perkembangan 149,82 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 98.100.568 juta meningkat menjadi Rp.100.327.299 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 133,59 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.90.011.584 juta dengan indeks perkembangan 119,86 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp.91.944.588 juta dengan indeks perkembangan 122,43 persen.

#### PDRB Kabupaten Cilacap Dengan Migas Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (juta rupiah)	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah (juta rupiah)	Indeks Perkembangan (%)
2017	103.921.776	138,38	95.254.587	126,84
2018	109.699.659	146,07	98.100.568	130,63
2019	114.117.079	151,96	100.327.299	133,59
2020*	105.150.539	140,02	90.011.584	119,86
2021**	110262463	149,82	91.944.588	122,43

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Cilacap 2022

\*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

Sama seperti PDRB dengan Migas, PDRB Kabupaten Cilacap ADHB dan ADHK tanpa migas, dalam kurun waktu empat tahun terakhir juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, sedangkan pada tahun 2020 ada sedikit kenaikan untuk PDRB ADHB dan sedikit penurunan untuk PDRB ADHK. Pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap sebesar Rp.65.800.554 juta meningkat menjadi Rp.65.991.354 juta pada tahun 2020 dengan indeks perkembangan 221,66 persen dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp.69.826.769 juta dengan indeks perkembangan 234,56 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2019 sebesar Rp.47.492.685 juta dengan indeks 159,53 persen, mengalami penurunan menjadi Rp.46.849.019 juta pada tahun 2020 dengan indeks perkembangan 157,37 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 mencapai Rp.48.435.235 juta dengan indeks 162,69 persen.

**PDRB Kabupaten Cilacap Tanpa Migas  
Tahun 2017-2021**

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah	Indeks	Jumlah	Indeks
	(juta rupiah)	Perkembangan (%)	(juta rupiah)	Perkembangan (%)
2017	57.306.467	192,49	42.868.160	143,99
2018	61.604.062	206,93	45.073.045	151,40
2019	65.800.554	221,02	47.492.685	159,53
2020*	65.991.354	221,66	46.849.019	157,37
2021**	69.826.769	234,55	48.435.235	162,69

*Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022;  
Bappeda Cilacap 2022*

\*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

**2) Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan dengan migas di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun (2017-2021), pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar 5,37 persen, sementara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -1,36 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi 3,39 persen.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2019 sebesar 2,27 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami peningkatan menjadi 2,15 persen.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

Tahun	Dengan Migas (%)	Tanpa Migas (%)
2017	2,58	5,33
2018	2,99	5,14
2019	2,27	5,37
2020*	-10,28	-1,36
2021**	2,15	3,39

*Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Kab. Cilacap Tahun 2022*

\*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

## PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi dengan migas telah mengalami pemulihan dari -10,28 persen pada tahun 2020 menjadi 2,15 persen pada tahun 2021. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,10 persen, dan terendah terjadi pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -1,49 persen. Penurunan level Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cilacap ternyata sangat berpengaruh terhadap percepatan perkembangan perekonomian daerah. Kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor Industri Pengolahan yang mengalami peningkatan sangat signifikan, mencapai 58,35 persen. Peningkatan ini diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,58 persen dan konstruksi sebesar 7,04 persen. Meskipun demikian, terdapat penurunan di sektor yang lain seperti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,04 persen, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen.

### Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 Dengan Migas

Kategori/Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,85	1,75	-1,17	1,08	-1,49
B	Pertambangan dan Penggalian	2,31	3,94	4,07	1,63	5,13
C	Industri Pengolahan	1,15	1,7	0,94	-13,85	1,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,14	5,71	5,67	2,91	4,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	6,21	4,91	5,83	4,99
F	Konstruksi	7,1	6,11	5,89	-4,2	5,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,63	6,97	4,97	-1,74	4,59
H	Transportasi dan Pergudangan	4,78	7,68	7,97	-29,89	2,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6	7,62	8,1	-3,45	6,1
J	Informasi dan Komunikasi	15,46	15,51	18,38	9,1	2,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,12	4,11	4,53	2,1	0,53
L	Real Estate	7,52	5,66	6,72	-0,07	0,71
M,N	Jasa Perusahaan	8,83	10,81	10,19	-6,65	1,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	3,65	1,45	-1,02	-0,44
P	Jasa Pendidikan	7,9	7,95	8,14	-0,31	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,42	10,66	6,59	5,1	0,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,01	9,41	10,63	-7,64	0,51
	Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap	2,58	2,99	2,27	-10,28	2,15

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

\*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2021 meningkat dari -1,36 persen pada tahun 2020 menjadi 3,39 persen. Tidak ada perbedaan pada lapangan usaha jika

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas, hanya perbedaan pada sektor Industri Pengolahan.

**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap  
Tahun 2017-2021 Tanpa Migas (persen)**

Kategori/Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,85	1,75	-1,17	1,08	-1,49
B	Pertambangan dan Penggalian	2,31	3,94	4,07	1,63	5,13
C	Industri Pengolahan	3,99	3,54	5,35	1,83	5,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,14	5,71	5,67	2,91	4,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	6,21	4,91	5,83	4,99
F	Konstruksi	7,1	6,11	5,89	-4,2	5,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,63	6,97	4,97	-1,74	4,59
H	Transportasi dan Pergudangan	4,78	7,68	7,97	-29,89	2,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6	7,62	8,1	-3,45	6,1
J	Informasi dan Komunikasi	15,46	15,51	18,38	9,1	2,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,12	4,11	4,53	2,1	0,53
L	Real Estate	7,52	5,66	6,72	-0,07	0,71
M,N	Jasa Perusahaan	8,83	10,81	10,19	-6,65	1,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	3,65	1,45	-1,02	-0,44
P	Jasa Pendidikan	7,9	7,95	8,14	-0,31	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,42	10,66	6,59	5,1	0,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,01	9,41	10,63	-7,64	0,51
	Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap	5,33	5,14	5,37	-1,36	3,39

### **Inflasi**

Perkembangan Laju Inflasi bulanan di tahun 2021, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua belas bulan laju inflasi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Dari dua belas bulan tersebut ada dua bulan yang mengalami deflasi. Di Kabupaten Cilacap terjadi deflasi sebesar 0,25 persen di bulan Juni dan 0,12 persen di bulan September. Tingginya inflasi di bulan November terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Penyebab utama terjadinya inflasi di Kota Cilacap adalah naiknya harga minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, dan sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan komoditas utama yang menahan laju inflasi di Kota Cilacap antara lain turunnya harga bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kangkung, dan ikan belanak.

### Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan Tahun 2017-2021

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,60	1,33	0,33	-0,03	0,27
Februari	0,69	0,38	-0,25	0,49	0,12
Maret	-0,11	-0,11	0,32	0,06	0,03
April	0,01	-0,11	0,26	0,05	0,05
Mei	0,59	-0,08	0,19	0,29	0,25
Juni	0,99	0,76	0,75	0,28	-0,25
Juli	-0,44	0,09	0,14	-0,17	0,06
Agustus	-0,23	-0,12	0,33	-0,09	0,06
September	0,25	-0,13	-0,46	-0,03	-0,12
Oktober	0,02	0,41	-0,07	0,12	0,23
November	0,39	0,31	0,16	0,39	0,36
Desember	0,60	0,45	0,50	0,35	0,82
<b>Inflasi Tahun Kalender</b>	<b>4,41</b>	<b>3,21</b>	<b>2,19</b>	<b>1,71</b>	<b>1,88</b>

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

Inflasi di tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 1,88 persen, lebih tinggi dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,71 persen. Inflasi tahun kalender 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2018, jika diasumsikan tidak ada kondisi ekonomi yang berubah secara ekstrim.



High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap

Sedangkan inflasi tahun 2022 pada bulan Agustus tercatat sebesar -0,55 persen, inflasi tahun kalender Agustus 2022 terhadap Desember 2021 tercatat 4,78 persen dan Inflasi Tahun ke Tahun Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 6,13 persen.

Kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi sebagai berikut :

Inflasi Tertinggi	Rekreasi, Olah Raga dan Budaya 1,56
Inflasi Terendah	Kesehatan 0,05
Deflasi	Makanan, Minuman dan Tembakau -2,25
	Transportasi -0,01
Stabil	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

### Data Series Inflasi Month to Month Kabupaten Cilacap



### Data Series Inflasi Year on Year Kabupaten Cilacap





## 5.2. Capaian Indikator Sasaran

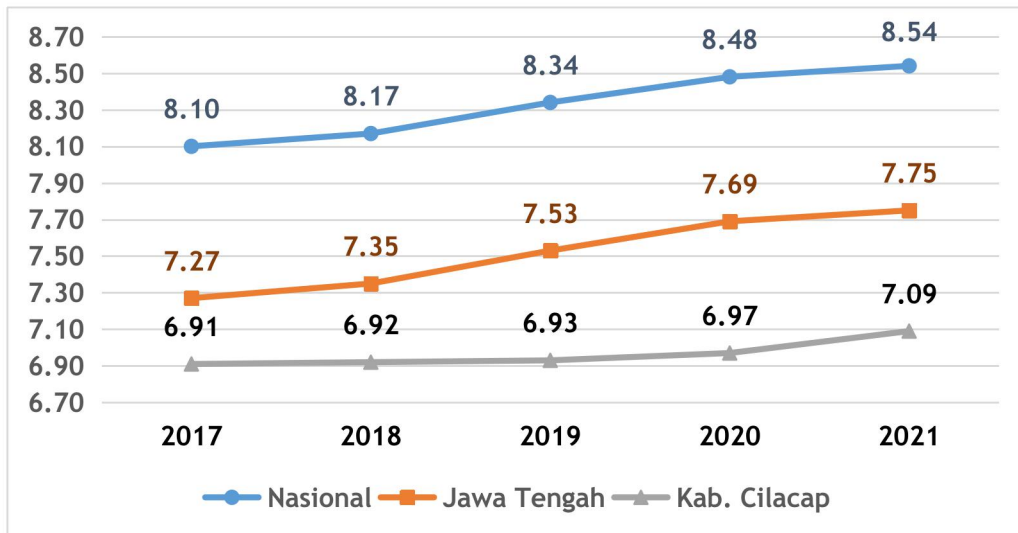
### Realisasi / Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Target Akhir RPJMD 2022		% Realisasi 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022
		Realisasi	% Capaian	Target	% Target Capaian	
1	Rata-rata lama Sekolah	7,09	99,02	7,2	100	98,47
2	Harapan Lama Sekolah	12,63	101,44	12,50	100	101,04
3	Usia Harapan Hidup	73,90	100,28	73,81	100	100,12
4	AKI	163,44	-58,60	59,68	100	-73,86
5	AKB	5,45	89,89	4,95	100	89,89
6	Prevalensi Gizi Buruk	0,038	81,25	0,030	100	73,33
7	Angka Kemiskinan	11,67	111,18	13,15	100	111,25
8	Presentase PMKS yang ditangani	54,54	128,42	43,15	100	126,39
9	Presentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	30	112,19	47,5	100	63,15
10	Presentase Perempuan dalam lembaga legislatif	26	130	20	100	130
11	Persentase Kekerasan anak	0,018	185,24	0,12	100	185
12	Presentase Kecamatan Layak Anak	83,33	100	100	100	100
13	Nilai AKIP	*73,74	106,7	73	100	101,01
14	Nilai rata-rata SKM	86,27	106,50	82	100	105,20
15	Nilai EKPPD	3,1270*	120,27	2,9000 (Tinggi)	100	107,82
16	Kasus Korupsi	0	100	0	100	100
17	Nilai Kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik	Hijau	200	Kuning	100	200
18	Opini BPK	WTP	100	WTP	100	100
19	Presentase suara sah pemilih dalam pemilu	0	100	65	100	100
20	Presentase pelanggaran PERDA	0,076	109,52	0,08	100	105
21	Presentase desa tangguh bencana	13,73	114,70	13,02	100	105,45

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Target Akhir RPJMD 2022		% Realisasi 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022
		Realisasi	% Capaian	Target	% Target Capaian	
22	Presentase Kontribusi Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	15,95	101,35	16,30	100	97,82
23	Presentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB	31,66	97,81	32,39	100	97,74
24	Presentase Kontribusi Perdagangan dalam PDRB	10,85	94,68	11,48	100	94,51
25	Presentase Kontribusi Pariwisata dalam PAD	0,023	3,53	0,65	100	3,53
26	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	9,97	31,01	5,9	100	31,01
27	Nilai investasi	1.351,43	139,60	1.022, 31	100	132,19
28	Persentase ruas jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang dengan lebar perkerasan minimal 5m)	7,95	105,57	7,73	100	102,84
29	Persentase jembatan dalam kondisi baik	83,5	101,42	84,31	100	99,03
30	Efisiensi Irigasi	0,55	84,61	0,65	100	84,61
31	Presentase Kawasan Kumuh	23,2	100	21,20	100	109,43
32	Persentase akses penduduk terhadap air bersih layak (perpipaan dan non perpipaan)	87,74	100,25	89,2	100	98,36
33	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi yang layak	89,84	97,54	94,6	100	94,96
34	Presentase layanan transportasi	69	95,83	75	100	92
35	Skor Adipura	75,12*	100,16	75	100	100

### Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 6,91 tahun meningkat menjadi 7,09 tahun pada tahun 2021 atau 99,02% dari target tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas baru mencapai kelas 1 SMP (kelas VII), yaitu baru mencapai jenjang tamat Sekolah Dasar. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun 2017-2021 angka capaian Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

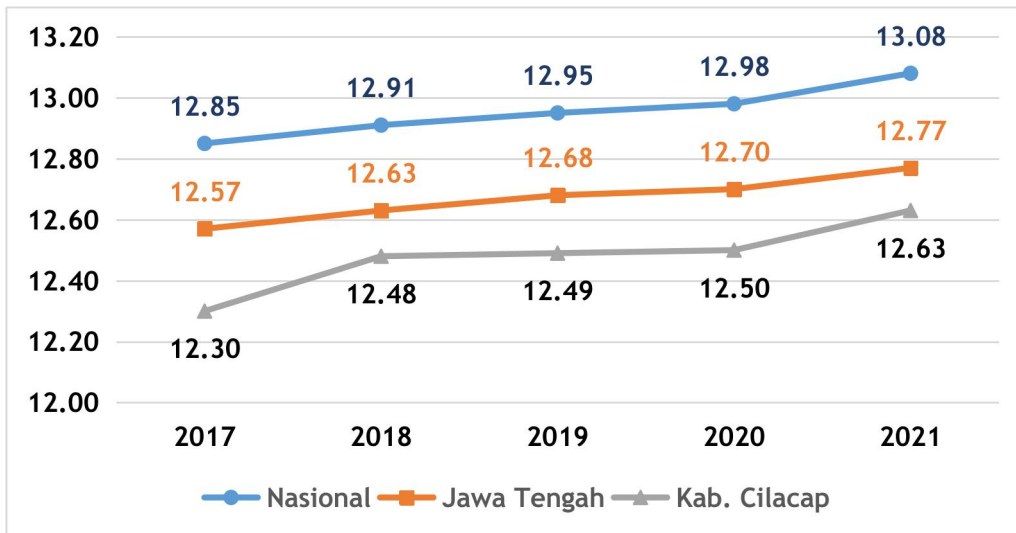


Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

### Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

### Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS Kabupaten Cilacap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah mencapai 12,30 tahun meningkat menjadi 12,63 tahun pada tahun 2021 (100,56 % dari target tahun 2021). Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

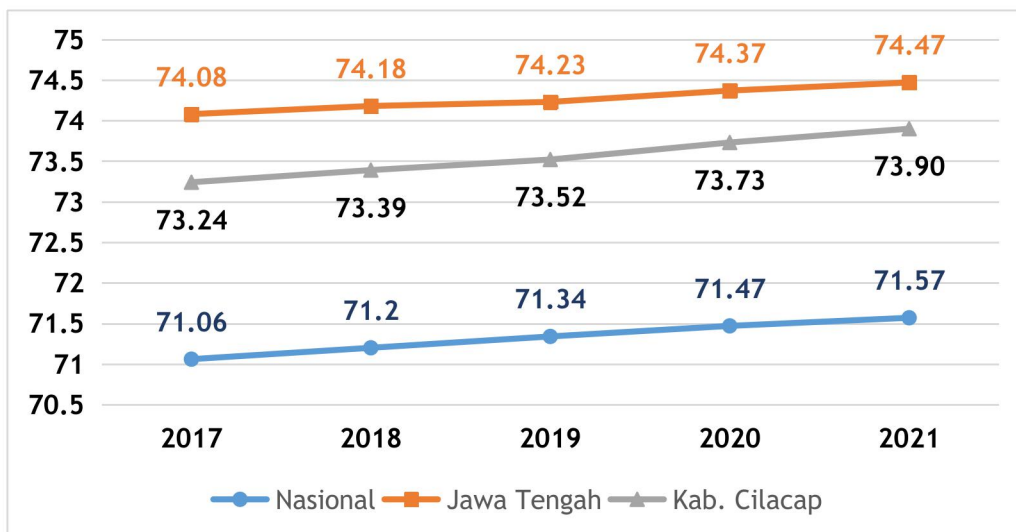


Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

### Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

#### Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Cilacap periode tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 capaian UHH mencapai 73,24 meningkat menjadi 73,90 pada tahun 2021 atau 100,28 % dari target tahun 2021. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode 2017-2021 capaian Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibanding capaian Nasional namun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.



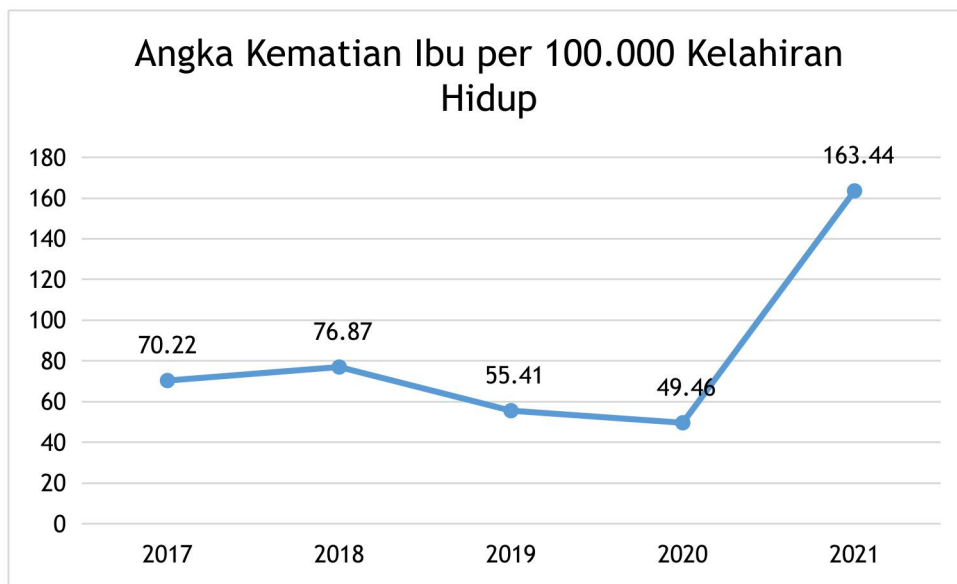
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

### Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

### Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dan 2020 sudah mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu mencapai angka 163,44 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 63,2 per 100.000 kelahiran hidup (tingkat capaian kinerja -58,61%).

Penyebab tingginya kematian ibu pada tahun 2021 yaitu adanya penambahan kasus kematian ibu bersalin karena Covid-19 sejumlah 30 kasus, masih ada beberapa ibu bersalin di beberapa Puskesmas yang melahirkan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan (ditolong dukun), belum semua puskesmas memberikan pelayanan persalinan 24 jam, belum semua Puskesmas mampu PONEK dan belum semua Rumah Sakit mampu PONEK, tidak semua ibu hamil mau melahirkan di Puskesmas sedangkan sebagian besar bidan praktek mandiri tidak memberikan pelayanan persalinan di Bidan Praktek Mandiri (BPM), serta beberapa wilayah ada yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya bersalin dengan nakes melalui kelas ibu hamil / pertemuan - pertemuan lain, mendampingi ibu hamil yang belum mau bersalin dengan Nakes (hasil P4K), dan mengkoordinasikan dengan pihak desa / Satgas GSI.



**Perkembangan AKI Kabupaten Cilacap dari Tahun 2017 s.d. 2021**

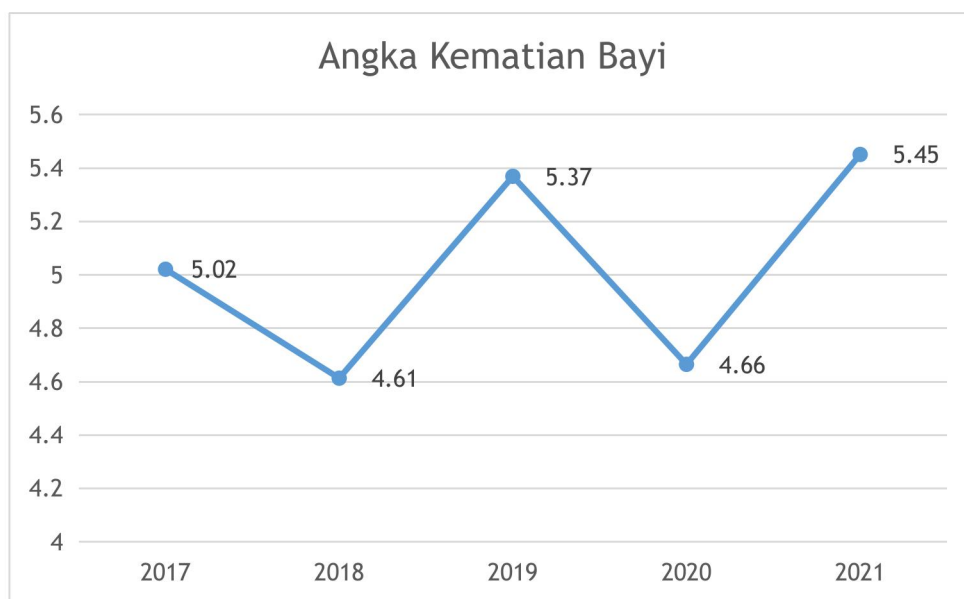
Oleh karena itu harus tetap dilakukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi. Disamping itu perlu upaya dan intervensi kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI.

## Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi di Wilayah Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2021 yaitu 5,45 per 1000 kelahiran hidup dengan target sebesar 4,95 per 1000 kelahiran hidup (tingkat capaian kinerja 89,89%). Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terlambatnya pelayanan Kesehatan serta adanya kasus covid bagi ibu hamil yang menyebabkan kondisi kehamilan tidak baik untuk bayi yang dilahirkan.

Pencapaian realisasi AKB tahun 2021 yaitu 5,45 per 1.000 KH, dengan interpretasi untuk setiap 1.000 bayi usia kurang dari satu tahun yang dilahirkan hidup, 5 sampai 6 diantaranya meninggal dunia. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020 yaitu 4,66 per 1.000 KH. Pada akhir RPJMD tahun 2022 realisasi angka kematian bayi akan diupayakan terus turun sampai dibawah target 4,95 per 1.000 KH.

Tiga penyebab utama kematian bayi neonatal, yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 27 kasus, Asfiksia (bayi tidak dapat bernafas spontan segera setelah lahir) sebanyak 25 kasus, dan Kelainan Kongenital sebanyak 16 kasus. Gabungan ketiga penyebab utama ini memberikan andil bagi 45,3% kematian bayi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021. Penyebab kematian bayi yang lainnya yaitu sepsis, ikterus, kelainan jantung bawaan, infeksi Covid-19, dan penyebab kematian bayi lain-lain. Dalam hal ini pola penyebab kematian bayi tidak banyak terjadi perubahan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



**Perkembangan AKB Kabupaten Cilacap dari Tahun 2017 s.d. 2021**

Secara garis besar faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan angka kematian bayi antara lain :

- Masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan
- Kurangnya fasilitas di RS untuk bayi dengan gangguan nafas (asfiksia) yaitu ketersediaan ventilator CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

- Adanya kasus Covid-19 pada ibu hamil yang menyebabkan kondisi kehamilan tidak baik untuk bayi yang dilahirkan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Cilacap, antara lain melalui :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- Peningkatan kemampuan puskesmas dalam memberikan asuhan persalinan selama 24 jam;
- Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan Peningkatan Surveilans Gizi dan Peningkatan ASI Eksklusif;
- Keharusan pelaksanaan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui SE Bupati Cilacap;
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan kegiatan Audit Perinatal, Bayi dan Balita;
- Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR, dan Pelatihan KN MTBM (Manajemen Tatalaksana Bayi Muda) dan KF;
- Jaminan Persalinan;
- Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat);

### **Prevalensi Gizi Buruk**

Prevalensi balita gizi buruk merupakan kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.

Prevalensi balita gizi buruk pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 mencapai nilai sebesar 0,40% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,0388% dengan target 0,032% (tingkat capaian kinerja 78,75%). Presentase capaian pada tahun 2021 masih melebihi target yang ditentukan, artinya masih tingginya kasus balita gizi buruk di Wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu :

- Penyebab yang kompleks antara lain riwayat BBLR, kemiskinan, pendidikan keluarga yang rendah, perilaku, faktor penyulit (penyakit penyerta : ISPA, BRPN, TB Paru/kelainan : Jantung, CP, hidrocephalus/ microcephalus).
- Keluarga kurang respon terhadap masalah gizi yang dialami keluarga dan hanya mengandalkan bantuan, sehingga selesai bantuan kasus kembali kambuh. Kondisi lingkungan rumah yang kurang baik.
- Kasus 100 % sudah ditangani dan dikonsulkan dgn DSA melalui rawat jalan di RSU, namun kasus kurang memanfaatkan dana ( untuk kontrol) sehingga faktor penyebab (penyakit penyerta) pengobatan belum tuntas).
- Perilaku keluarga dalam Pemberian Makan Bayi Balita (PMBA) masih belum paham dan pemberian ASI Eksklusif.

Rencana Tindak Lanjut :

- Peningkatan sistem surveilans gizi dengan ePPGBM dan laporan perkembangan kasus, peningkatan ASI Eksklusif.
- Penanganan Kasus Gizi Buruk : Perawatan kasus secara komprehensif mulai dari validasi, konsultasi dan pemeriksaan dengan DSA di RS (rawat jalan), rawat inap bagi

kasus dengan faktor penyulit/komplikasi dan pemberian intervensi paska rawat jalan dan rawat inap.

- Penguatan Lintas Program dan Lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dan gizi buruk.
- Pelatihan deteksi dini gizi buruk dan Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah gizi.
- Pemantauan, pendampingan dan evaluasi.



**Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk (%)  
Kabupaten Cilacap dari Tahun 2017 s.d. 2021**



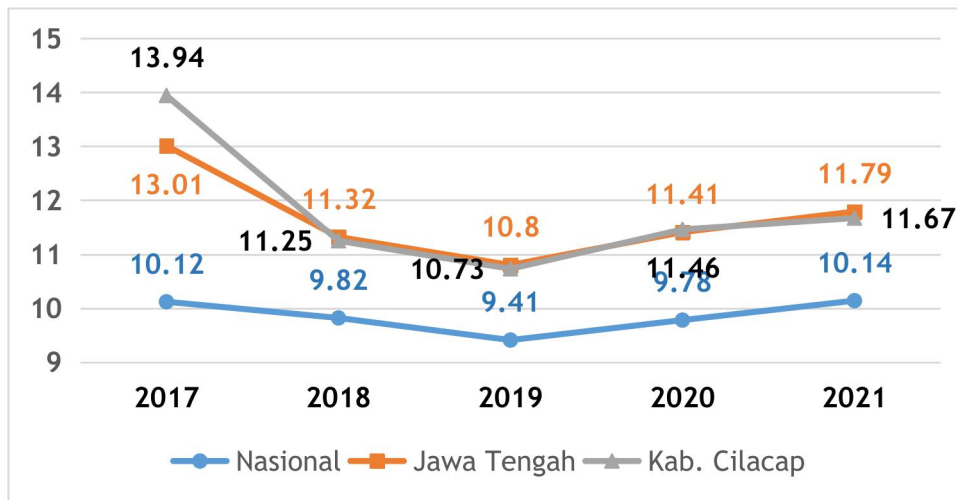
Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2022

### **Angka Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap selama tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar



10,73 persen meningkat menjadi 11,46 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 11,67 persen. Capaian ini menggambarkan perlu diusahakan kembali langkah-langkah yang lebih optimal dalam hal penanggulangan kemiskinan khususnya dampak pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Tahun 2021

#### Persentase Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Kenaikan Angka Kemiskinan pada kondisi tahun 2021 masih berada dalam target capaian akhir masa RPJMD 2017-2022, yaitu target tahun 2022 sebesar 12,94 persen.

Penghitungan angka kemiskinan tidak lepas dari penggunaan standar Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp. 363.367 per kapita per bulan atau sekitar Rp.12.112 per kapita per hari. Artinya penduduk dengan pengeluaran lebih dari angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak miskin.

Salah satu penyebab penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan tersebut adalah intervensi pemerintah dalam bentuk kenaikan dana bantuan sosial, yang naik hingga 41 persen (nasional) dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pengendalian harga pangan yang relatif stabil dan pengendalian harga bahan bakar minyak turut berperan dalam menekan inflasi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin.



Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap Tahun 2022

### a) Jumlah Penduduk Miskin

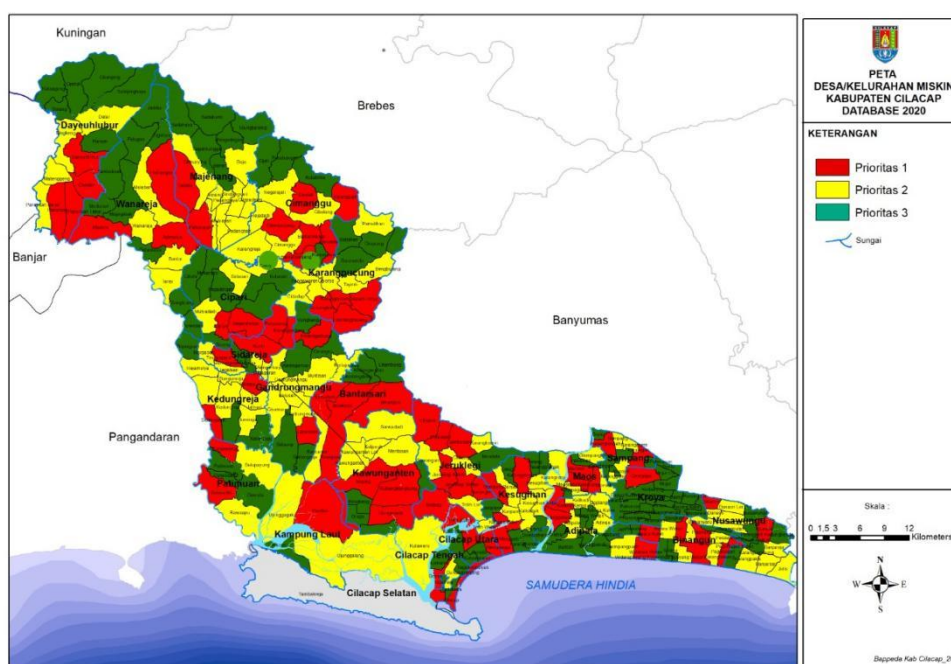
Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2017–2019 menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, walaupun tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap sebesar 13,94 persen atau sebanyak 238.323 orang, dan di tahun 2019 persentase penduduk miskin menurun menjadi 10,73 persen atau sebanyak 185.176 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11,46 persen atau sebanyak 198.596 orang. Begitupun pada tahun 2021, penduduk miskin Kabupaten Cilacap juga mengalami kenaikan menjadi 201.710 orang atau 11,67 persen.

#### Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin
2017	238.323	13,94
2018	193.180	11,25
2019	185.176	10,73
2020	198.596	11,46
2021	201.710	11,67

Sumber : BPS Tahun 2021

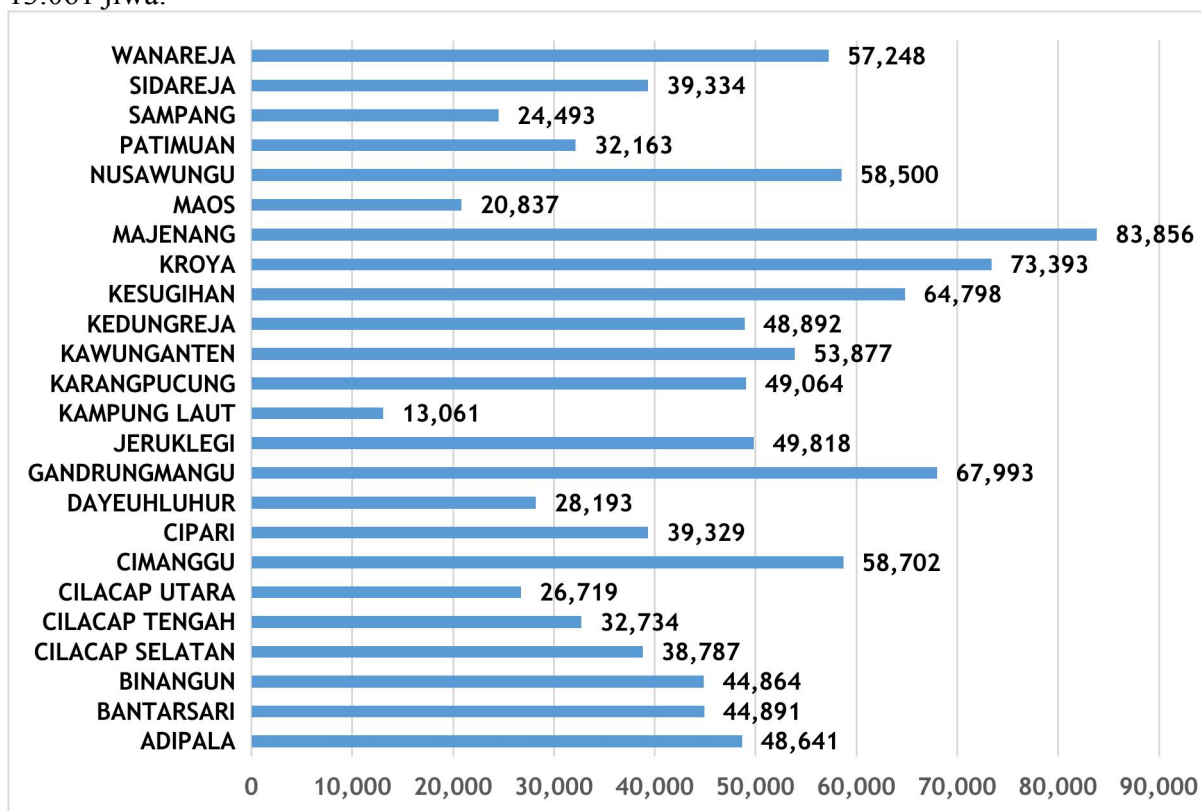
### b) Persebaran Penduduk Miskin



**Peta Desa/Kelurahan Miskin Kabupaten Cilacap Tahun 2020**

Berdasarkan Data DTKS Kepmensos – 146/HUK/2020 yang dirilis pada tanggal 26 Oktober 2020, dari jumlah total 284 desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap hasil pemetaan terdapat 73 desa/kelurahan masuk zona merah (prioritas 1), 97 desa/kelurahan masuk zona kuning (prioritas 2) dan 114 desa/kelurahan masuk zona hijau (prioritas 3) dengan persebaran sebagaimana dapat dilihat pada gambar peta di atas. Sedangkan merujuk pada SK Menteri Sosial Nomor : 109/HUK/2021, di Kabupaten Cilacap pada

tahun 2021 jumlah penduduk miskin dalam DTKS naik 128.483 jiwa dari 871.716 jiwa menjadi 1.000.199 jiwa. Dari data tersebut, Kecamatan Majenang merupakan Kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak berjumlah 83.856 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kecamatan Kampunglaut berjumlah 13.061 jiwa.

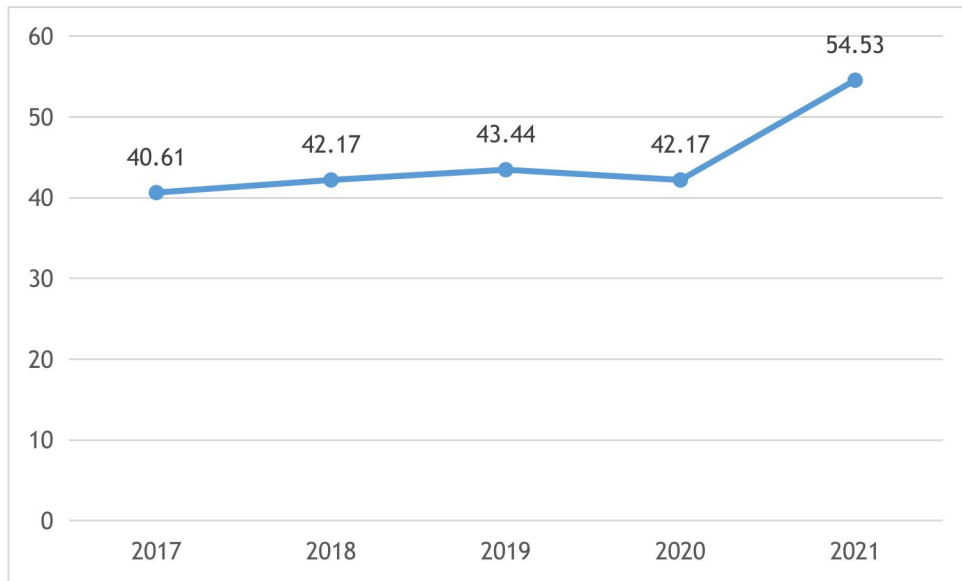


Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021

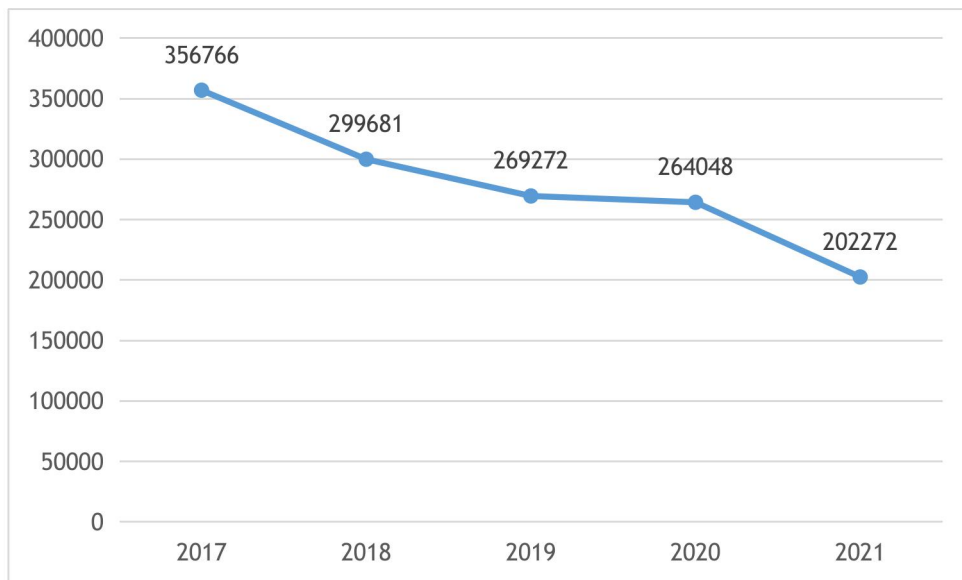
### Persentase PMKS yang ditangani

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Populasi PMKS di Kabupaten Cilacap cenderung menurun, namun demikian capaian penanganan PMKS setiap tahun cenderung mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Penanganan PMKS diupayakan melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Pada tahun 2020 PMKS yang ditangani sebesar 42,17 persen sedangkan pada tahun 2021 dari target PMKS yang ditangani sebesar 42,47 persen telah terealisasi sebesar 54,53 persen yang ditangani (capaian kinerja 128,40 persen).



**PERSENTASE PMKS DI KABUPATEN CILACAP YANG DITANGANI TAHUN 2017-2021**



**JUMLAH PMKS DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 S.D. 2021**

### **Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga**

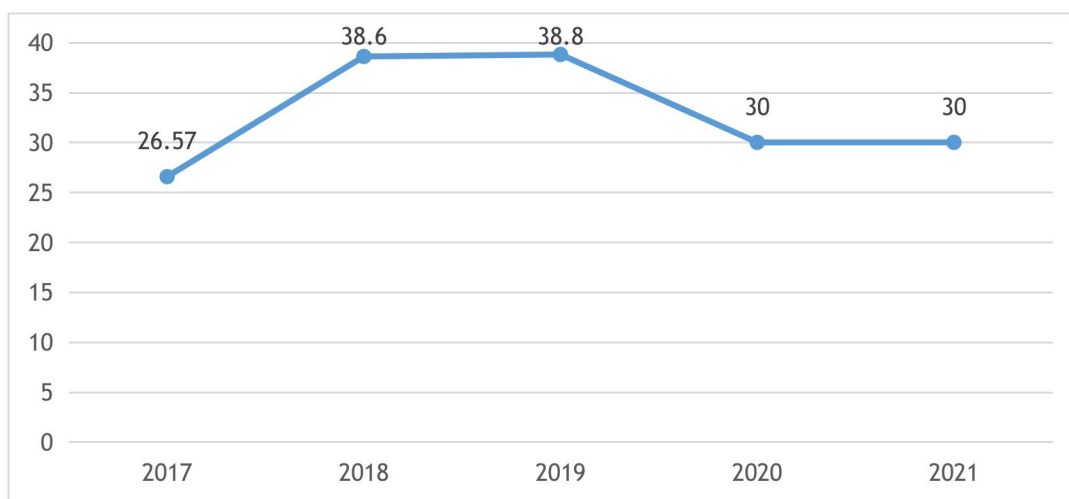
Saat ini, peran perempuan semakin meluas yang tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga. Banyak perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik- pabrik, jualan di pasar, serta ada pula wanita yang sukses menempati sektor-sektor publik, Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah semakin besar.

Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 realisasi Prosentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga secara garis besar mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,8% dari tahun 2019 namun masih diatas target tahun 2020, salah satu penyebab turunnya prosentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dikarenakan wabah covid 19 sehingga perempuan yang bekerja kehilangan

pekerjaannya perempuan cenderung memilih untuk tetap dekat dengan rumah karena adanya tanggung jawab keluarga. Perempuan juga cenderung menolak pekerjaan jika pekerjaan tersebut akan menjauhkan mereka dari rumah. Ada juga persoalan diskriminasi upah. Meski tren besaran upah pekerja Indonesia terus naik, upah yang diterima rata-rata pekerja perempuan selalu lebih rendah ketimbang pekerja laki-laki. Kecenderungan perempuan bekerja di industri yang berupah rendah, tidak seperti laki-laki yang mendominasi bidang kerja berupah tinggi seperti teknologi. Selain itu, perempuan juga lebih mungkin untuk bekerja paruh waktu, karena komitmen untuk merawat keluarga, baik anak maupun orangtua. Perempuan juga cenderung tidak berada di jabatan-jabatan senior dengan bayaran tinggi.

Faktor pendukung capaian ini antara lain dikarenakan banyaknya bisnis online dimana kaum wanita tidak harus bekerja di luar rumah dan dapat mengembangkan usahanya dari rumah, Upaya/Strategi yang harus dilakukan oleh Pemkab Cilacap untuk mempertahankan prosentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga antara lain :

- Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi kaum wanita.
- Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha.
- Membuat regulasi berupa Perda tentang gender, Pemberdayaan dan perlindungan perempuan
- Mendorong sektor swasta agar membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan di sektor formal.
- Mengadakan penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan.
- Mengevaluasi pelaksanaan PUG
- Faktor pendukung capaian ini antara lain dikarenakan banyaknya bisnis online dimana kaum wanita tidak harus bekerja di luar rumah dan dapat mengembangkan usahanya dari rumah.



**Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

### **Persentase Perempuan dalam Legislatif**

Perkembangan persentase keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kabupaten Cilacap dari Tahun 2017-2019 relatif masih sama yaitu 18 persen dan meningkat di tahun 2021 sebesar 39,72 persen. Meskipun prosentase perempuan dalam legislatif di Kabupaten Cilacap lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten sekitar, namun dapat terpenuhi 26 persen dari target 22 persen. Hal ini didukung oleh

beberapa faktor antara lain peran organisasi politik yang mempunyai andil cukup besar terhadap peningkatan motivasi perempuan untuk ikut dalam legislatif serta dukungan dan motivasi dari suami maupun keluarga.

### **Keterwakilan Perempuan yang menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Keterwakilan Perempuan yang menjadi Calon anggota Legislatif	%	18	18	18	26	26

*Sumber: Dinas PP PA KB Kab. Cilacap, 2021*

### **Persentase Kekerasan anak**

Kekerasan terhadap anak menurut Undang –Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua, saudara, tetangga dan guru. Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap paling banyak terjadi di rumah.

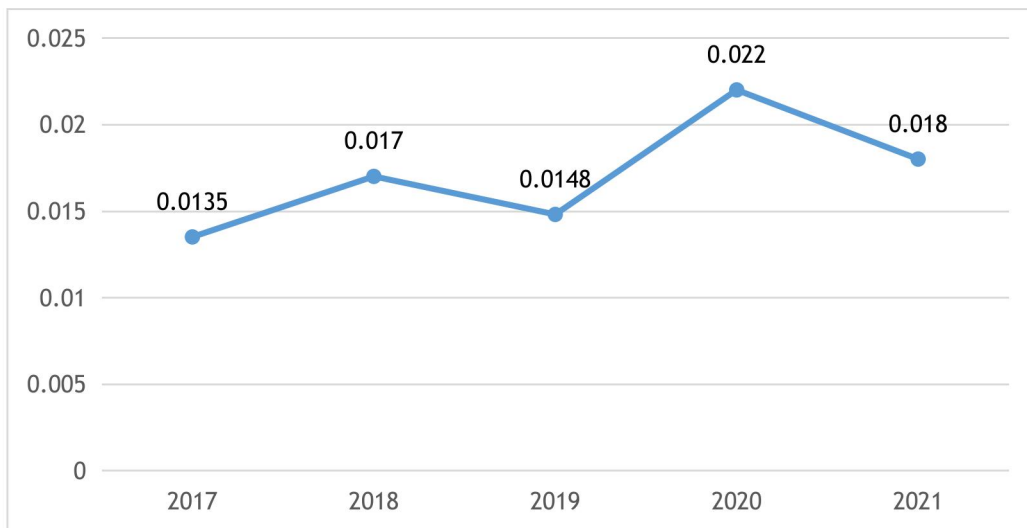
Empat kategori utama kekerasan terhadap anak yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi/penelantaran. Sedangkan Kasus Kekerasan terhadap anak paling banyak yaitu kekerasan seksual

Dari tahun 2017 hingga 2021, jumlah korban kekerasan anak mengalami flutuatif. Jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebanyak 95 korban, capaian indicator prosentase korban kekerasan terhadap anak dari target 0,122 % realisasi tahun 2021 sebesar 0,018%. Ada berbagai macam kasus yang terjadi seperti fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran. Hal ini terjadi akibat kurangnya peran serta ayah dalam pengasuhan, kemiskinan, penyimpangan perilaku seksual dan lemahnya control social primer dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Adapun upaya pencegahan tersebut yaitu melalui sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak, pendidikan seksual sejak dini, serta pengasuhan anak dilingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.

### **Jumlah kasus kekerasan anak , yang tertangani dan jumlah anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2016 - 2021**

Tahun	Jumlah anak	Korban anak	Korban anak yang tertangani
2016	454.672	79	79
2017	492.840	80	80
2018	504.123	84	84
2019	543.918	81	81
2020	553.554	125	125
2021	522.655	95	95

Sumber : Data Dinas KB,PP dan PA Kab. Cilacap



Sumber : Data Dinas KB,PP dan PA Kab. Cilacap

### **Persentase Kekerasan anak**

#### **Persentase Kecamatan Layak Anak**

Kecamatan layak anak merupakan pendukung dalam mewujudkan kabupaten Layak Anak. Sejak tahun 2020, realisasi indikator sudah memenuhi target, dari RPJMD sebesar 100% sudah tercapai 100 % yang berarti bahwa mulai tahun 2020 semua kecamatan di Kabupaten Cilacap sudah mendapatkan predikat kecamatan layak anak. Pencapaian kecamatan layak anak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan desa/kelurahan layak anak.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian ini antara lain adanya komitmen bersama dari para pemangku kebijakan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui Gugus Tugas KLA, peran serta masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan menjadi keluarga pelopor dan pelapor, peran partisipasi dari CSR melalui pembuatan taman ramah anak, peran serta anak dalam pembangunan melalui Musrenbang.

#### **Nilai AKIP**

Hasil nilai evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia masih menggunakan nilai hasil evaluasi Tahun 2020 dikarenakan hasil evaluasi belum keluar. Berdasarkan data hasil evaluasi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh selalu mengalami peningkatan. Nilai AKIP Tahun 2020 atas evaluasi Tahun 2019 sebesar 73,74 dari target yang ditetapkan sebesar 71 dengan prosentase pencapaian 103,85 dengan kategori Sangat Berhasil

### Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
Perencanaan Kinerja	35	22,78	21,47	22,00	23,39	23,49	23,49
Pengukuran Kinerja	20	15,23	16,4	19,73	19,86	19,87	19,87
Pelaporan Kinerja	15	9,80	9,25	11,07	11,36	11,50	11,50
Evaluasi Kinerja	10	4,87	6,18	6,78	6,83	6,99	6,99
Capaian Kinerja	20	11,03	12,12	11,04	11,75	11,91	11,91
Nilai hasil Evaluasi	100	63,71	65,42	70,61	73,19	73,74	73,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	BB	BB	BB

Sumber : Kementerian PAN dan RB Tahun 2020

Faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Pemerintah kabupaten Cilacap antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya; Pemkab Cilacap telah membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi yaitu e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP; pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan dengan berbasis teknologi informasi serta adanya evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi potensi adanya penggunaan anggaran yang kurang efektif dan efisien.

Strategi untuk mendukung upaya penyempurnaan sesuai rekomendasi Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia :

- a. Melakukan perbaikan terhadap komponen perencanaan kinerja dengan memperhatikan kaidah result oriented (hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat) dan integrated development plan (perencanaan terpadu atau terintegrasi)
- b. Memastikan definisi tujuan dan sasaran kinerja yang ada pada dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (outcome) dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Memastikan kualitas indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART (Spesifik/Rinci/Jelas, Measurable/Terukur, Achievable/Realistis, Relevan/Sesuai dengan kondisi, Timely/Bisa diselesaikan tepat waktu) dengan Fokus pada measurable disertai kejelasan formulasi pengukuran dan kecukupan
- d. Menyempurnakan cascading kinerja sampai level individu pelaksana (sudah dilaksanakan) namun kinerja individu ini belum menunjang pencapaian kinerja organisasi dan belum sebagai dasar pemberian reward and punishment

#### Nilai EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagaimana PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota. Capaian Indikator Kinerja nilai EKPPD masih



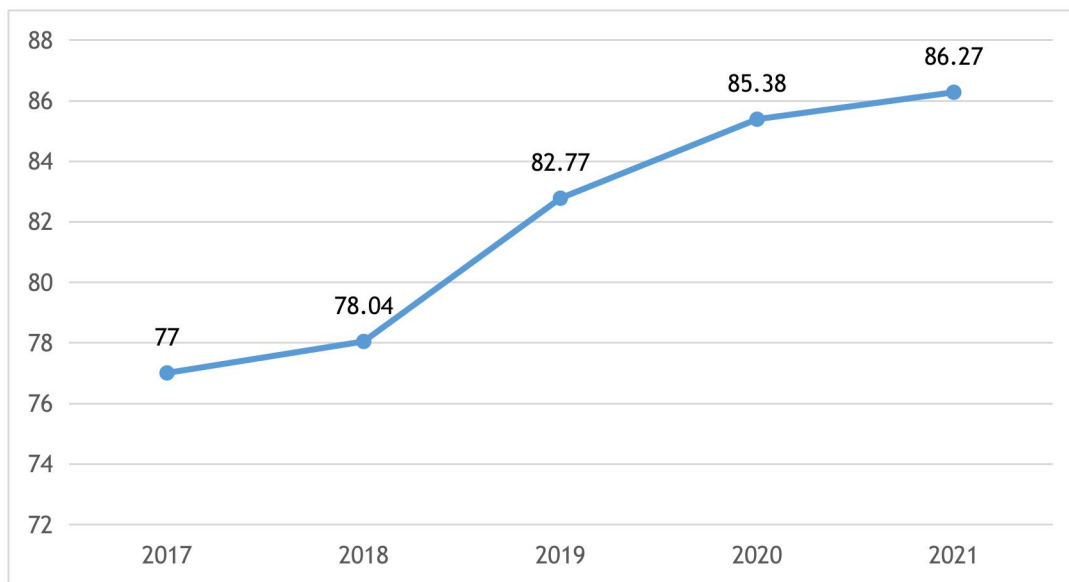
menggunakan nilai capaian tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2019 dikarenakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum keluar dari tim penilai. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2019, atas LPPD 2018 nilai yang dicapai oleh Pemkab Cilacap dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah 3,1104 dengan kategori SANGAT TINGGI atau tercapai sebesar 115,2% dari target yang ditetapkan 2,700.

### Nilai rata-rata SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2021 capaian rata-rata nilai SKM 86,27 atau naik sebesar 1,04% dari realisasi tahun 2020 sebesar 85,38. Keberhasilan ini dikarenakan antara lain: tingkat kepatuhan perangkat daerah/unit kerja penyelenggara terhadap penyusunan dokumen SP yang semakin tinggi; penyediaan sarpras pendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang mensuprot kebutuhan para pengguna layanan; profesionalisme SDM pemberi layanan yang telah sesuai dengan kompetensi dan kode etik pelayanan; tersusunnya mekanisme kerja bagi petugas layanan telah diterapkan aplikasi SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat) dimana aplikasi ini langsung digunakan oleh pengguna layanan sehingga hasil survey lebih akurat.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Cilacap untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai rata-rata SKM antara peningkatan kualitas pelayanan publik dengan e-smart, peningkatan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan terdepan dan menciptakan inovasi- inovasi dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik.



**Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021**

### Kasus Korupsi

Kasus korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemkab Cilacap dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good

governance dan clean government. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, tidak terdapat kasus korupsi di Kabupaten Cilacap (0 kasus).

Hal ini dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien; level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ; pemantauan pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan adanya Tim Saber Pungli yang melibatkan aparat penegak hukum.

### Kasus Korupsi di Kabupaten Cilacap dari Th 2016 - 2020

Kasus Korupsi	2017	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0	0

Strategi / upaya yang harus tetap dilakukan oleh Pemkab Cilacap untuk mempertahankan capaian indikator ini antara lain : koordinasi pengawsan yang lebih komprehensif; meningkatkan Kapasitas APIP (Leveling); melaksnakan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal secara berkala.

### Nilai Kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik

Penilaian Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka mencapai salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional. Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan metode survei ini dimana masing-masing Perangkat Daerah memberikan sample produk pelayanan termasuk instansi yang melakukan pelayanan dalam bentuk administrasi.

Penelitian kepatuhan terhadap layanan Kabupaten/Kota dilakukan terhadap variabel : Standar Pelayanan ; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Sarana, Prasarana, dan Fasilitas; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian Kinerja; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan; dan Atribut. Yang kemudian hasil penelitian pelayanan akan dikategorikan ke dalam 3 zonasi : Zona Hijau ( Nilai 81- 100 predikat Kepatuhan Tinggi); zona Kuning (Nilai 51 - 80 predikat Kepatuhan sedang) dan Zona Merah (Nilai 0 - 50 predikat kepatuhan rendah).

Pada Tahun 2021, OMBUDSMAN melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik capaian nilai kepatuhan terhadap UU pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 sebesar 85,16 dan masuk dalam zona Hijau dengan predikat kepatuhan Tinggi. Pemerintah Kabupaten menduduki peringkat ke 52 dari 415 Kabupaten se Indonesia dan peringkat ke - 2 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dengan demikian capaian untuk indikator Nilai Kepatuhan Terhadap UU Pelayanan Publik dikatakan Sangat Berhasil.

### Nilai Kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik

Nilai Kepatuhan terhadap UU Yanlik	2017	2018	2019	2020	2021
			Kuning	Kuning*	Hijau

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cilacap

## Opini BPK

Opini BPK dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang objektif dapat dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan. Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian yang berhasil (WTP). Diharapkan realisasi ini dapat dipertahankan untuk tahun berikutnya

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain :

### 1) Peningkatan Pengelolaan Aset Tetap

Peningkatan pengelolaan aset tetap yang meliputi : penyajian informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan, aset tetap didukung dengan catatan/data, penatausahaan aset tetap telah memadai, aset tetap diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak ketiga/pihak lain, dan aset tetap didukung dengan bukti kepemilikan. Telah melaksanakan pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik. SDM yang menangani asset selalu meningkat kompeten dan kapasitasnya dan benar-benar menerapkan peraturan pemerintah dan peraturan Mendagri tentang pengelolaan barang milik daerah.

### 2) Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

### 3) Tingkat pengungkapan

Akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara cukup atau memadai dalam CaLK, artinya segala informasi mengenai akun-akun seperti kas, persediaan, aset tetap telah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan disajikan secara informatif sehingga para stakeholder (pemangku kepentingan) mudah dan paham ketika membaca laporan tersebut.

### 4) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap

Opini BPK	2017	2018	2019	2020	2021
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Cilacap

## Partisipasi suara sah pemilih dalam pemilu

Partisipasi suara sah pemilih dalam pemilu sama dengan capaian Tahun 2019 sebesar 98,41. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 tidak diselenggarakan kegiatan pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Pilkada) sehingga tahun 2021 tetap menggunakan capaian tahun 2019.

Sasaran dengan indikator Prosentase pemilih yang berpartisipasi pada pemilu dihitung dari jumlahsuara yang sah dibandingkan dengan jumlah seluruh suara. Capaian ini telah melampaui target hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, selain itu peran KPU yang semakin aktif dalam melakukan sosialisasi Pemilu.

**Persentase Suara Sah Dalam Pemilu/Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Cilacap**

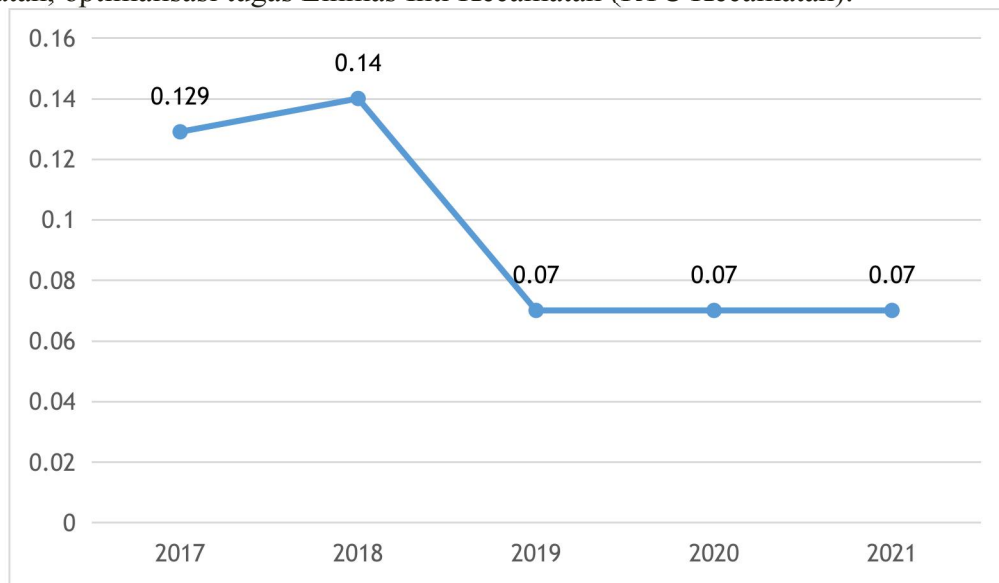
Pemilu tahun	Jumlah suara	Jumlah suara sah	Jumlah suara tidak sah	% suara sah
2017	937,486	913,523	23,963	97.44%
2018	945,840	924,414	21,426	97.73%
2019	1,082,186	1,065,010	17,176	98.41%

Sumber data : KPU Kabupaten Cilacap

**Persentase pelanggaran PERDA**

Indikator Persentase Pelanggaran Perda merupakan indikator yang semakin kecil semakin baik (invert). Realisasi indikator sasaran Prosentase pelanggaran Perda tahun 2021 tercapai sebesar 0,076 atau 91,42% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 0,07 mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan / ketentuan Perda, pelaksanaan persidangan pelaku pelanggaran Perda di PN Cilacap, optimalisasi kegiatan patroli dan operasi penertiban, pemberdayaan kader siaga trantib, peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, optimalisasi tugas Linmas Inti Kecamatan (RTC Kecamatan).



**Persentase Pelanggaran Perda Tahun 2017-2021**

**Persentase penurunan kerugian akibat bencana**

Sebagai daerah rawan bencana, Kabupaten Cilacap harus siap menghadapi segala risiko bencana. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bencana sehingga dapat menurunkan kerugian akibat bencana.

Selama kurun waktu 2017-2021 persentase penurunan kerugian akibat bencana menunjukkan nilai yang fluktuatif, salah satu penyebabnya adalah adanya bencana dengan intensitas yang tinggi dan masif sehingga meningkatkan kerugian akibat bencana, serta kurangnya budaya kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya melakukan upaya-upaya penurunan kerugian akibat

bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Capaian persentase penurunan kerugian akibat bencana pada tahun 2018 menurun sebesar 6,95%, pada tahun 2019 menurun sebesar 45,01% sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 137,16 % yang disebabkan oleh kejadian bencana dengan intensitas yang tinggi dan masif, salah satunya adanya banjir di 5 kecamatan sebanyak 2 kali. Kejadian bencana di tahun 2020 tersebut akibat dari dampak Lanina yang meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia termasuk Cilacap. Pada tahun 2021 persentase kerugian akibat bencana kembali menurun sebesar 84,03 % dari tahun sebelumnya.

### **Persentase desa tangguh bencana**

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Realisasi indikator sasaran Prosentase desa tangguh bencana tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 9,15%, karena pada tahun 2020 tidak ada Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 13,2% melalui Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan di 11 desa yaitu :

1. Desa Wlahar Kecamatan Adipala;
2. Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;
3. Kelurahan Kebon Manis Kecamatan Cilacap Selatan;
4. Desa Kleces Kecamatan Kampung Laut;
5. Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut;
6. Desa Ujung Gagak Kecamatan Kampung Laut;
7. Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut;
8. Desa Sidayu Kecamatan Binangun;
9. Desa Rejamulya Kecamatan Kawunganten;
10. Desa Karangkemiri Kecamatan Maos;
11. Desa Pangadegan Kecamatan Majenang

### **Pengembangan Desa Tangguh Bencana tahun 2017-2021**

Tahun	Kecamatan	Desa	Jenis Bencana
2017	Kroya	Mujur	Banjir
	Dayehuluhur	Cilumping	Longsor
2018	Cimanggu	Cijati	Longsor
	Bantarsari	Rawajaya	Banjir
2019	Karangpucung	Babakan	Longsor
	Nusawungu	Banjarsari	Tsunami
2020	-	-	-
2021	Adipala	Wlahar	Tsunami
	Cilacap Selatan	Cilacap	Tsunami
	Cilacap Selatan	Kebon Manis	Tsunami
	Kampung Laut	Kleces	Tsunami
	Kampung Laut	Ujung Alang	Tsunami
	Kampung Laut	Ujung Gagak	Tsunami

Tahun	Kecamatan	Desa	Jenis Bencana
	Kampung Laut	Panikel	Tsunami
	Binangun	Sidayu	Tsunami
	Kawunganten	Rejamulya	Tsunami
	Maos	Karangkemiri	Tsunami
	Majenang	Pangadegan	Longsor

### Persentase Kontribusi Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar PDRB ADHB dan PDRB ADHK setelah sektor Industri Pengolahan. Realisasi capaian kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB dari target yang ditetapkan 16,28% dapat terealisasi sebesar 15,95% atau sebesar 97,97%.

Dari sektor pertanian, komoditas padi menjadi penyumbang terbesar diikuti ubi kayu dan jagung. Produksi padi Kabupaten Cilacap menempati urutan kedua terbesar se-Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah produksi sebesar 64,87 kuintal/Ha. Sedangkan dari sektor perikanan penyumbang terbesar dari sektor perikanan tangkap dan perairan umum darat.

#### Produksi tanaman pangan

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	897.190	901.113	794.413	896.824	832.443
Jagung	27.758	45.173	45.197	76.662	56.270
Ubi kayu	85.362	84.280	111.200	90.448	87.745
Ubi jalar	7.221	4.053	8.558	12.315	11.303
Kacang hijau	12.121	10.313	6.545	8.207	6.261
Kedelai	1.807	29.260	6.172	3.201	3.849
Kacang tanah	852	1.595	2.014	3.061	3.005

Sumber : Dinas pertanian Th 2021

#### Produksi Perikanan tangkap dan budidaya

Uraian	Produksi (Ton)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perikanan budidaya	8.126	9.846,33	13.384,93	11.306,33	13.887,72	25.759,12
Perikanan tangkap dan perairan umum darat	15.091,93	26.810,46	31.515,71	24.018,30	26.586,99	14.339,04

Sumber : Dinas perikanan Th 2021

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Prosentase Kontribusi Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB antara lain : 80,21 persen luas wilayah Kabupaten Cilacap merupakan wilayah pertanian baik berupa lahan sawah maupun lahan bukan sawah yang meliputi tegal, kebun, ladang, perkebunan, hutan negara, dan lainnya. Tercatat luas lahan pertanian sawah sebesar

66.527 hektar dan lahan pertanian bukan sawah seluas 105.005 hektar. Penyuluhan, bimbingan, maupun bantuan benih dan pupuk mereka berikan untuk petani oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap serta produksi benih yang berkualitas melalui pemberdayaan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta potensi perikanan tambak di Kabupaten Cilacap.

Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Cilacap untuk mempertahankan antara lain : Meningkatkan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian diantaranya JIUT, Jalan

Usaha Tani (JUT), Dam Parit, sumur dalam dan sumur pantek serta menambah jumlah perlatan mesin pertanian (alsintan) dan Membuka kesempatan yang lebih luas bagi investor dibidang budi daya ikan di wilayah kabupaten Cilacap

### **Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB**

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Cilacap dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Sektor Industri dibedakan menjadi industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumahtangga. Industri besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja minimal 100 orang, industri sedang adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, industri kecil adalah perusahaan industri yang jumlah tenaganya 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan industri rumahtangga adalah industri dengan tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang.

Produk utama perusahaan industri di Cilacap bermacam-macam antara lain Semen Dynamix, Pengalengan Ikan Tuna, Tepung Terigu, Gula Rafinasi, Pemintalan Benang Tenun, Krupuk Udang, Sohun, Pengantongan Pupuk Pusri, dll. Sementara industri rumah tangga yang banyak dilakukan oleh sebagian besar rumah tangga di pedesaan dan mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak adalah industri makanan termasuk gula merah, industri anyaman dan lain-lain.

Tahun 2021 realisasi kontribusi industri pengolahan PDRB naik menjadi 33,10% dari tahun 2020 sebesar 31,86%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Prosentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB antara lain lain : meningkatnya jumlah IKM yang dikembangkan melalui pembinaan kemampuan teknologi industri, meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah, dan adanya pembinaan sentra-sentra Industri khususnya industri rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Cilacap untuk mempertahankan antara lain: peningkatan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan produk-produk unggulan daerah dan peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan; peningkatan sentra/kluster industri, ekonomi kreatif dan perluasan pasar; peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal (investasi).

### **Persentase Kontribusi Perdagangan dalam PDRB**

Lapangan usaha perdagangan merupakan penyumbang terbesar keempat dalam perekonomian Kabupaten Cilacap setelah sektor Konstruksi. Disamping itu pengembangan lapangan usaha perdagangan memiliki efek berganda antara lain terkait dengan pemanfaatan potensi dan unggulan hasil pertanian, perkebunan, industri kecil, kerajinan dan perikanan serta penyerapan tenaga kerja. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 10,78% belum dapat memenuhi target 11,46%, dikarenakan belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat, belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, masih terbatasnya produk pasar yang diterima di pasar internasional dan masih rendahnya nilai ekspor.

Faktor-faktor menyebabkan penurunan capaian kinerja dikarenakan antara lain : belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat/pasar tradisional; belum optimalnya pelayanan tera, tera ulang dan perlindungan konsumen serta belum optimalnya pengembangan produk-produk unggulan daerah yang dapat diterima oleh pasar internasional (ekspor) yang ditandai dengan minimnya jumlah kerjasama perdagangan internasional.

Upaya yang dilaksanakan Kabupaten Cilacap guna menaikkan realisasi atas capaian yg akan di capai, antara lain : peningkatan inovasi produk dalam rangka peningkatan kualitas produksi, peningkatan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat, peningkatan volume perdagangan ekspor dan pengembangan usaha pemasaran produk

usaha mikro, kecil, melakukan perbaikan infrastruktur pendukung, mengenakan daerah dengan media promosi, atau dengan mengundang investasi asing. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sehingga meningkatkan PDRB

### **Persentase Kontribusi Pariwisata dalam PAD**

Pada tahun 2021 prosentase kontribusi PAD dari sektor pariwisata sebesar 0,02% . Capaian ini turun dari tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dimana terdapat pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat sehingga banyak event-event kepariwisataan di Kabupaten Cilacap yang tidak diselenggarakan.

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Pendapatan Pariwisata</b>	<b>%</b>
2017	612.077.977.866,00	2.554.048.805,00	0,42%
2018	497.353.613.147,00	2.750.648.470,00	0,55%
2019	553.906.636.361,00	407.648.941,50	0,07%
2020	519.343.787.160,48	228.745.921,50	0,04%
2021	739.133.781.809,00	163.589.165,00	0,02%

Sejak 2019 obyek wisata yang merupakan pendukung pendapatan pariwisata terbesar tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap karena wilayahnya dalam penguasaan TNI AD. Obyek wisata tersebut yaitu Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendem dan Pantai Indah Widarapayung. Hal ini mengakibatkan pendapatan dari sektor pariwisata mulai tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Disamping itu pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata terdampak adanya pandemi Covid-19.

Upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemkab Cilacap antara lain : mengembangkan atau membangun destinasi wisata baru di lahan milik Pemkab Cilacap, yaitu Destinasi Wisata Banyu Panas Cipari, Pulau Momongan dan obyek-obyek wisata lain yang sedang dijalin MoU dengan Pemkab Cilacap; menggalakan promosi pariwisata dengan mengadakan event-event pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara; mendorong warga untuk membuat homestay di sekitar destinasi wisata untuk memperpanjang masa lama berkunjung.

### **Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Cilacap**

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
665.994	481.731	552.396	472.384	846.380

Sumber : Disporapar Kabupaten Cilacap

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

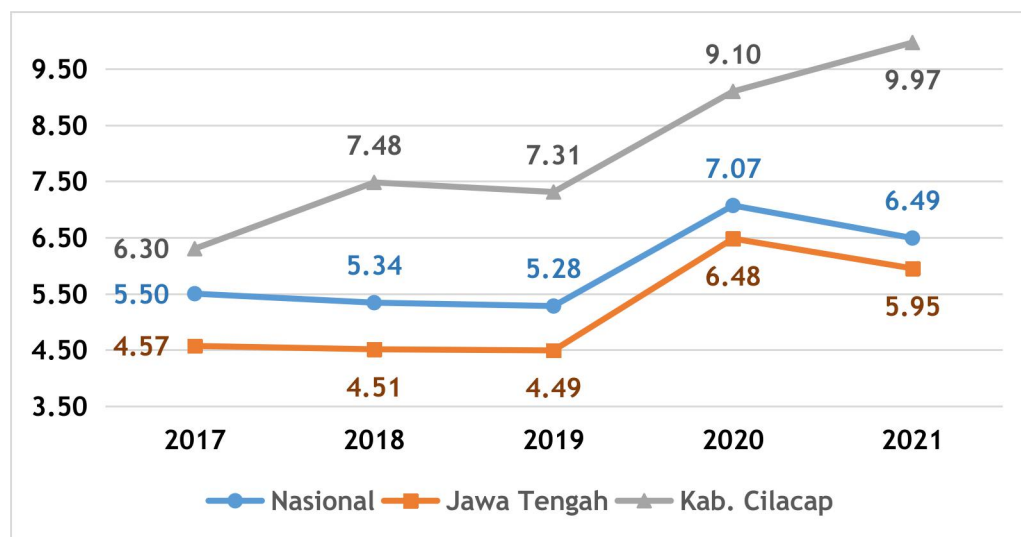
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, terutama tahun 2021 yang mengalami peningkatan signifikan mencapai 9,97 persen. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya penempatan tenaga kerja lokal dan ditutupnya negara tujuan penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri. Selain itu banyaknya usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat pandemi Covid-19.



**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

TPT	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Nasional</b>	5,50	5,34	5,28	7,07	6,49
<b>Jawa Tengah</b>	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95
<b>Kab. Cilacap</b>	6,30	7,48	7,31	9,10	9,97

Sumber : BPS Tahun 2021



Sumber : BPS Tahun 2021

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

**Nilai investasi**

Jumlah nilai investasi Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020. Meskipun jumlah investasi turun namun masih dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 1.351,433 Milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp.968,05 Milyar atau sebesar 139,60%

**Besar Nilai investasi Kab. Cilacap berdasarkan Sektor**

Sektor	Proyek	Nilai investasi (Rp)
Perikanan	3	1.375.100.000,-
Pertambangan	6	102.861.346.081,-
Industri makanan	4	5.764.331.427,-
Industri tekstil	2	8.576.341.594,-
Industri Kayu	1	3.050.000.000,-
Industri kimia dan farmasi	11	1.823.573.500,-
Industry instrument kedokteran,presisi&optic dan jam	3	264.475.336
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	3	3.973.411.561,-
Industri lainnya	3	154.660.739.621,-

Listrik, Gas dan Air	19	907.185.681.812,-
Konstruksi	47	20.576.306.021,-
Perdagangan dan Reparasi	51	20.566.348.478,-
Hotel dan Restoran	10	57.723.293.239,-
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4	1.189.053.081,-
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10	7.225.866.319,-
Jasa lainnya	12	54.607.818.196,-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.351.423.686.266,-</b>

Sumber : DPMPTSP Kab. Cilacap Tahun 2021



Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji membuka Cilacap Business Forum 2021

Faktor pendukung Keberhasilan Pemkab Cilacap dalam pencapaian nilai investasi antara lain : Ketersediaan lahan; kemudahan akses lalu lintas; banyaknya kegiatan usaha besar yang memulai kegiatan usaha di Kabupaten Cilacap, stabilitas keamanan; pelaksanaan promosi potensi daerah untuk menarik investor dan peraturan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

Meskipun realisasi nilai investasi pada tahun 2021 telah melampaui target namun masih ditemukan adanya kendala antara lain : adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan beberapa perusahaan retail terpaksa menunda rencana untuk membuka usaha di Kabupaten Cilacap; tidak ada penambahan investasi dari PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap dimana PT. S2P merupakan salah satu penyumbang investasi terbesar pada tahun 2019; masih ada beberapa perusahaan yang kurang tertib dalam pelaporan PKM Online

Upaya yang harus tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mempertahankan nilai investasi antara lain : memberikan teguran kepada perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pelaporan PKN Online, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan rencana pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP).

### **Persentase ruas jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang dengan lebar perkerasan minimal 5 meter)**

Infrastruktur menjadi sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Cilacap untuk mendukung terwujudnya “Cilacap to be Singapore of Java”. Cilacap to be Singapore of Java

merupakan konsep Kabupaten Cilacap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian Selatan dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri terpadu, yang terhubung dengan fasilitas infrastruktur penunjang. Berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang mendapatkan perhatian intens untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat adalah jalan di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan SK Bupati Cilacap Nomor 620/539/17/2017 Tanggal 27 Desember 2017, ruas jalan di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2021 sebanyak 587 ruas dan panjang jalan Kabupaten Cilacap sepanjang 1.269,202 Km.

Realisasi / capaian indikator Persentase ruas jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang dengan lebar perkerasan minimal 5 meter) sebesar 7,95% dari target sebesar 7,53% atau sebesar 105,57% (sangat berhasil) sepanjang 100.90 km.

**Ruas Jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang dengan lebar perkerasan minimal 5 meter)**

	2018	2019	2020	2021
Jalan kabupaten kondisi mantap (dengan lebar perkerasan minimal 5 meter)	85,92	93,011	96,629	100,90
Panjang jalan kabupaten	1.269,202	1.269,202	1.269,202	1.269,202
%	6,77	7,33	7,61	7,95

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian ini dikarenakan keterpaduan tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk keseimbangan pembangunan serta pembangunan dan pemeliharaan jalan yang tepat sasaran serta dengan diterapkan Inovasi SIMBAJA (Sistem Inovasi Jalan dan Jembatan).

Meskipun telah melampaui target namun masih ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antara lain : Belum fokusnya pelebaran jalan pada ruas-ruas potensi dengan target minimal 5 m dan masih ada ruas jalan dengan lebar > 5 meter dalam kondisi rusak ringan dan berat.

Untuk itu upaya yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kab. Cilacap antara lain :

- a. peningkatan jalan pada kondisi rusak ringan dan berat pada ruas dengan lebar > 5 meter
- b. melakukan update data kondisi jalan dalam rangka usulan dan penanganan pada jalan berpotensi untuk dilebarkan dengan mempertimbangkan akseibilitas untuk peningkatan kapasitas jalan, prioritas peningkatan kondisi jalan Kabupaten sesuai SK Jalan,
- c. Inovasi teknologi bidang perkerasan jalan,
- d. Inovasi teknologi peralatan dan bahan material,
- e. penegakan hukum di bidang Jalan melalui perda jalan serta memfokuskan penanganan (pelebaran dan perbaikan kondisi jalan) pada ruas jalan dengan lebar > 5 meter.

**Persentase jembatan dalam kondisi baik**

Realisasi / capaian indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 83,5% dari target sebesar 82,33% atau sebesar 101.42% (sangat berhasil). Capaian ini didapatkan melalui perhitungan panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi seluruh

panjang jembatan yang ada di Kabupaten Cilacap dikalikan 100%. Capaian Tahun 2021 sebesar 83,5 % meningkat dari capaian Th 2020 sebesar 79.92%.

### **Panjang Jembatan di Kabupaten Cilacap dengan berbagai kondisi dari Tahun 2017-2020**

Tahun	Satuan	Kondisi				Total
		Baik	Sedang	Rusak Berat	Rusak Ringan	
2017	meter	1.537,70	1.534,25	870,50	182,30	4.124,75
	%	37,28	37,20	21,20	4,42	100
2018	meter	1.861,34	1.509,85	834,10	162,40	4367,69
	%	42,62	34,57	19,10	3,72	100
2019	meter	3323,5	909	-	-	4232,50
	%	78,52	21,48	-	-	100
2020	meter	3402,93	829,57	-	-	4232,50
	%	80,4	19,6	-	-	100
2021	meter	5384,89	1.064,08	-	-	6.448,97
	%	83,5	16,5	-	-	100

Sumber : Dinas PUPR Kab. Cilacap Th 2021

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut dikarenakan antara lain : pembangunan jembatan diprioritaskan pada jalur strategis, perbatasan serta kegiatan lanjutan dan tuntas; penataan aset jembatan yang bertujuan optimalisasi data jembatan yang berkelanjutan serta keterpaduan tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk keseimbangan pembangunan.

Meskipun telah melampaui target namun masih ditemukan beberapa faktor penghambat antara lain : belum tersusunnya database jembatan sesuai kewenangan (SK jembatan) yang terintegrasi dengan SK jalan, penanganan jembatan tidak fokus pada jembatan yang berada pada ruas jalan kabupaten saja contoh : jembatan desa,dsb; serta biaya penanganan yang relatif besar, pembangunan jembatan dikerjakan lebih dari satu tahun anggaran sehingga manfaat yang diperoleh semakin lama.

#### **Efisiensi Irigasi**

Realisasi / capaian indikator Efisiensi Irigasi sebesar 0.55% dari target sebesar 0.65% atau sebesar 84,61% (berhasil). Realisasi tahun 2021 naik dari tahun 2020. Capaian ini didapatkan melalui perhitungan debit kebutuhan dibagi debit pengambilan .

Realisasi capaian indikator belum memenuhi target kinerja dikarenakan antara lain : Kondisi bentang alam Kabupaten Cilacap yang beragam dan sangat luas, sehingga membutuhkan strategi dan penanganan khusus dalam hal irigasi; Kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan kerentanan daerah irigasi terhadap bencana dan kerusakan dan Kontur tanah didaerah pegunungan sehingga sering terjadi longsor.

## Tingkat pemenuhan kebutuhan air irigasi Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Debit kebutuhan	26.022	26.022	26.022	26.094
Debit pengambilan	53.106,12	50.042,30	50.042,31	47.444,55
Efisiensi irigasi	0,49 lt/dt/Ha	0,52 lt/dt/Ha	0,52 lt/dt/Ha	0,55 lt/dt/Ha

Meskipun capaian tahun 2021 belum sesuai target, namun masih tergolong dalam kategori “Berhasil” hal ini dikarenakan antara lain : Adanya P3A yang kooperatif dalam kegiatan OP bersama dengan personel OP dinas; Adanya penyelenggaraan kegiatan fisik untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan serta pemeliharaan irigasi baik yang bersifat kontraktual maupun swakelola.

### Persentase Kawasan Kumuh

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka luasan kawasan kumuh diatas 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 Ha menjadi kewenangan Provinsi dan luasan kumuh di bawah 10 Ha menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014 diterbitkan SK Bupati Cilacap terkait Penetapan Wilayah Kumuh dengan jumlah 14 kawasan dan luas area 26,88 Ha, dan pada tahun 2020 diterbitkan kembali SK Bupati Cilacap Nomor : 663/782/19/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cilacap dengan 8 kawasan dan luar area 139,48 Ha.

Target akhir RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sebesar 21,20 % atau seluas 20.84 Ha. Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021 tercapai sebesar 20,84 Ha atau 100 %. Adapun capaian penanganan kumuh dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

### Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

Tahun	Luas (Ha)
2017	1
2018	10,38
2019	8,43
2020	1,03
2021	0

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cilacap, 2021

### Persentase akses penduduk terhadap air bersih layak (perpipaan dan non perpipaan)

Cakupan pelayanan akses air minum yang layak mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Presentase jiwa yang mengakses air minum yang layak pada tahun 2017 sebesar 80,80 persen menjadi 87,74 persen pada tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja air minum di Kabupaten Cilacap pada umumnya terus mengalami kenaikan dan sejalan dengan program Universal Akses 100 0 100 dan Tujuan ke-6 SDGs yaitu : Menjamin Ketersediaan Dan Pengelolaan Air Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang. Dalam rangka menunjang SPM

Pemenuhan Air minum dan Air Limbah, maka capaian kinerja harus terus ditingkatkan sehingga mencapai 100 persen.

### Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jiwa yang mengakses air minum yang layak	%	80,80	84,20	83,56	85,44	87,74

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, 2021

### Persentase akses penduduk terhadap sanitasi yang layak

Persentase jiwa yang mengakses jamban yang layak juga menunjukkan peningkatan dari 82,10 persen pada tahun 2017 menjadi 89,84 persen pada tahun 2021. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari dua kali setahun di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 mencapai 67,60 persen dan naik menjadi 87,60 persen pada tahun 2021.

Sebagaimana capaian air minum, capaian kinerja air limbah di Kabupaten Cilacap pada umumnya terus mengalami kenaikan dan sejalan dengan program Universal Akses 100 0 100 dan Tujuan ke-6 SDGs yaitu : Menjamin Ketersediaan Dan Pengelolaan Air Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang. Dalam rangka menunjang SPM Pemenuhan Air minum dan Air Limbah, maka capaian kinerja harus terus ditingkatkan sehingga mencapai 100 persen.

Ruang lingkup akses layanan sanitasi dalam hal ini merupakan pemenuhan jiwa yang mengakses jamban yang layak (baru sebatas pemenuhan jamban layak). Akses layanan air limbah domestik dalam rencana kerja 2021 (kegiatan Pemeliharaan IPLT Kecamatan Jeruklegi) belum bisa dijadikan standar pemenuhan akses layak untuk saat ini karena masih perlu perbaikan IPLT serta fasilitas armada penyedot tinja yang belum memadai.

### Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jiwa yang mengakses jamban yang layak	%	82,10	84,60	84,60	87,84	89,84
2	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam	%	67,60	72,60	77,60	82,60	87,60

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, 2021

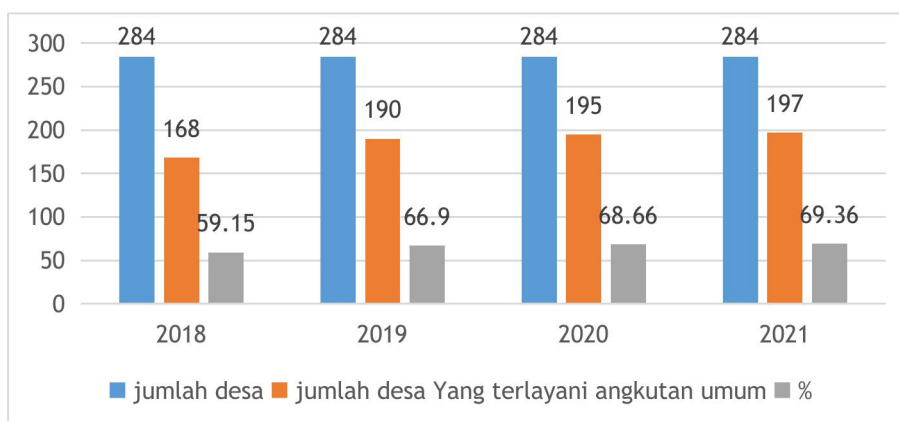
### Persentase layanan transportasi

Pelayanan bidang perhubungan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 terbagi atas 4 sub urusan yaitu lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian. Untuk memberikan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat, Pemkab Cilacap berusaha memenuhi dengan peningkatan jaringan jalan yang terlayani angkutan umum.

Realisasi tahun 2021 sebesar 69,36 % dari target sebesar 72% atau sebesar 95,3%. Realisasi tahun 2021 naik dari tahun 2020 yaitu 68,66%. Realisasi ini didapatkan melalui perhitungan jumlah desa yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah total desa dikali 100.

Faktor pendukung pencapaian ini antara lain : pemberian subsidi bea balik nama kendaraan (BBNKB) dan pajak kendaraan angkutan umum sebesar 70% dan pemberian

fasilitasi kredit KUR BPD Jateng Cabang Cilacap untuk Angkutan KAWasan Tertentu (AKT) dan Bank Surya Yudha Cilacap untuk Angkutan Kota. Meskipun sudah tercapai tetapi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian target antara lain : perubahan regulasi bahwa penyelenggaraan angkutan umum harus berbadan hukum (BUMN, BUMD, PT dan Koperasi); pembatasan umur teknis angkutan umum; pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat tinggi dan adanya operasional angkutan umum ilegal (online).



**Perbandingan antara jumlah desa dengan jumlah desa yang terlayani angkutan umum Tahun 2018-2021**

### Skor Adipura

Program ADIPURA adalah salah satu program yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota dan Kabupaten serta Propinsi, meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (GEG). Sasaran dari Program ADIPURA adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan lingkungan yang baik (good environment). Peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu kategori kota metropolitan (lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001 - 1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001 - 500.000 jiwa), dan kota kecil (sampai dengan 100.000 jiwa). dan untuk Kabupaten Cilacap masuk dalam kategori Kota Sedang.

Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup tidak melaksanakan penilai ADIPURA dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga untuk realisasi nilai ADIPURA Tahun 2020 menggunakan nilai Tahun 2019.

Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian skor adipura antara lain : Telah disusun kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah (Jakstrada), ditetapkan dengan Perbup No. 233 Th 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kab.Cilacap serta adanya dukungan sarpras kebersihan yang memadai.

### Skor Adipura Kabupaten Cilacap

	Th 2015/2016	Th 2016/2017	Th 2017/2018	Th. 2018/2019	Th. 2019-2021
SKOR	74.96	75	75.12	75.12	75.12*

Meskipun telah tercapai, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, mereka masih menggantungkan pada pakeling ataupun truk sampah untuk selanjutnya dibawa ke TPST/TPA serta belum ada perangkat pengawasan optimal terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan .

Upaya yang harus tetap dilakukan Pemkab Cilacap untuk mempertahankan atau meningkatkan Skor Adipura antara lain : meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (kebersihan dan penghijauan) dengan melibatkan kader PKK; pelibatan sekolah melalui program Adiwiyata; menyelaraskan kegiatan internal yang dimiliki perusahaan melalui program CSR dengan program-program yang sejalan dengan kriteria penilaian Adipura serta peningkatan RTH baik oleh Pemkab maupun milik perusahaan.



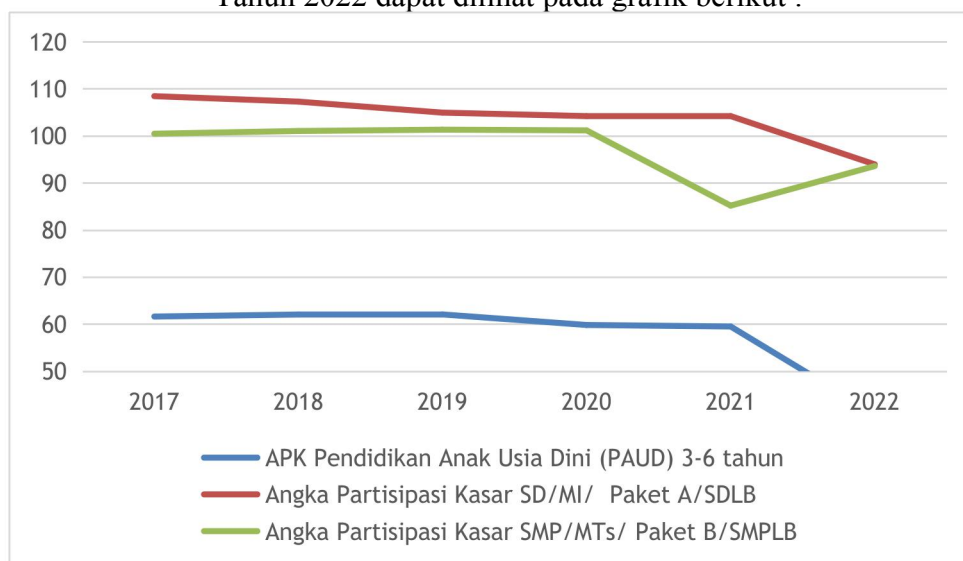
**5.3 Capaian Indikator Program**  
**A. Urusan Pemerintahan Wajib**  
**1. Bidang Pendidikan**

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Indikator Program pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi s/d 2021	Target 2022	Realisasi s.d Triwulan II 2022	% Capaian RKPD s/d Triwulan II 2022	% Capaian RPJMD
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	108,56	93,93	108,56	93,93	86,52%	86,52%
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	73,5	84,57	73,5	84,57	115,06%	115,06%
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,4	94,61	94,4	94,61	100,22%	100,22%
4	APK SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	100,54	93,57	100,54	93,57	93,07%	93,07%
5	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 -6 Tahun	%	63,5	40,96	63,5	40,96	64,08%	64,50%
6	Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi	%	33,6	26,88	33,6	26,88	80,00%	80,00%
7	Persentase Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik	%	70,5	66,01	70,5	66,01	93,63%	93,63%
8	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	%	87,5	86,27	87,5	86,27	98,65%	98,59%
9	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	%	89,6	88,78	89,6	88,78	99,08%	99,08%
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,06	0,02	0,06	-100,00%	-100%
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,24	0,28	0,24	0,28	83,33%	83,33%
12	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya	%	74,19	51,16	74,19	80,87	109,00%	109,00%
13	Persentase Guru PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D-IV	%	92,4	83,15	92,4	83,15	89,99%	89,99%

Pelaksanaan pembangunan Urusan Pendidikan dapat dilihat pada 13 indikator tersebut, dengan hasil sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yaitu 3 indikator telah mencapai target RPJMD dengan tingkat capaian melebihi 100%. Sedangkan 10 indikator yang belum mencapai target akan dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun anggaran.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

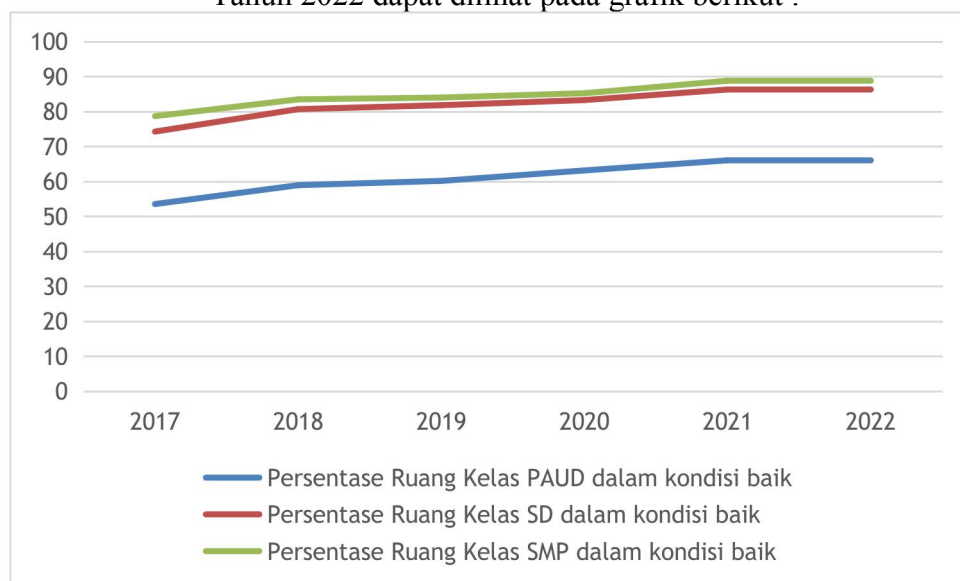


Dari grafik tersebut, terlihat bahwa capaian APK cenderung mengalami penurunan, khususnya di tahun 2019 sampai dengan 2021. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran pada masa pandemi dilakukan secara virtual, juga ada beberapa siswa yang melanjutkan sekolah/pendidikan di luar Kabupaten Cilacap.

Namun demikian, target RPJMD akan diupayakan dicapai melalui langkah-langkah antara lain :

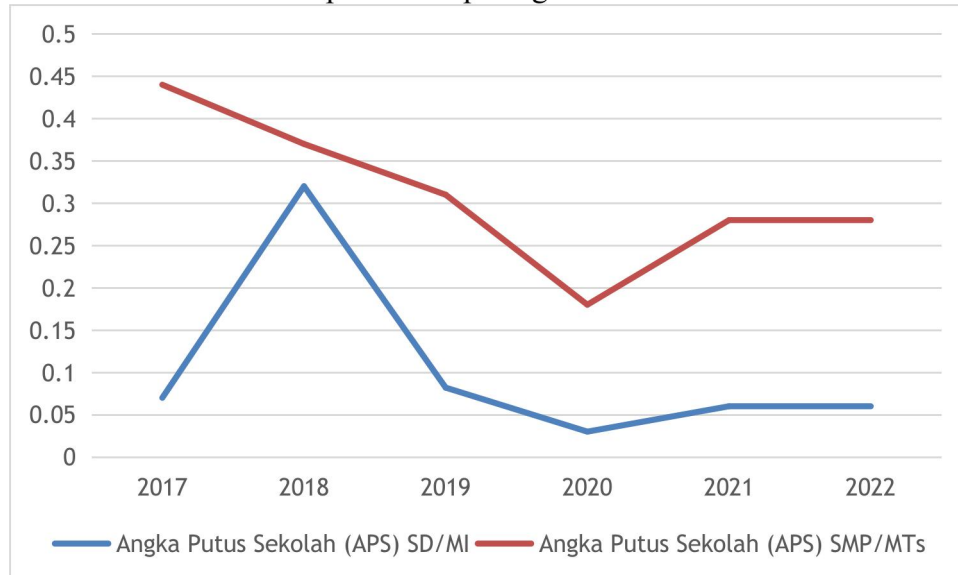
- Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
- Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Pembangunan sarpras sekolah

Capaian Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari grafik tersebut, terlihat bahwa capaian Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik selalu mengalami kenaikan dan sampai akhir tahun 2022 target RPJMD akan tercapai.

Capaian Angka Putus Sekolah (APS) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Dari grafik tersebut, terlihat bahwa capaian Angka Putus Sekolah terlihat fluktuatif. Salah satu yang menjadi kendala atau masalah yang dihadapi anak putus sekolah yaitu keadaan ekonomi, Rendah penghasilan keluarga dan juga banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi terutama kebutuhan sehari-hari seperti misalnya kebutuhan sandang dan pangan yang menjadi kebutuhan utama yang harus terpenuhi dalam sebuah keluarga, apalagi pada masa pandemi dimana pembelajaran dilakukan secara daring dimana tidak semua anak mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar secara daring. Penyebab lain anak tidak menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah dasar dan menengah yaitu keinginan dari anak itu sendiri untuk bekerja, kenakalan dari anak tersebut yang bersifat fatal, Anak itu sendiri yang ingin drop out dan tidak mau sekolah.

## 2. Bidang Kesehatan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Indikator Program pada Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	6	6,39	6	3,23	146,17	93,5
2	Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	85,86	100	25	25	85,86

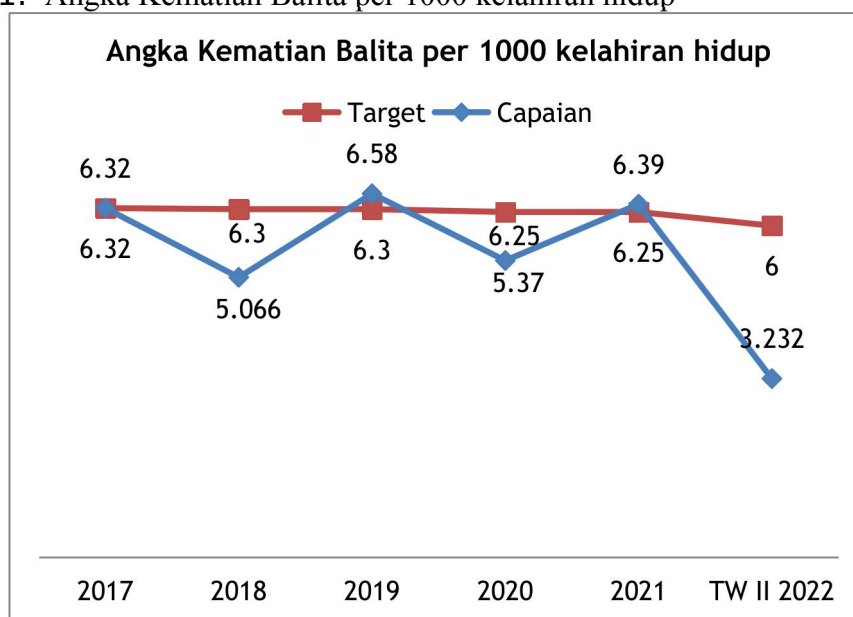
No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	2,12	7,86	2,12	0,96	154,72	-170,75
4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	47	46,64	47	24,87	52,92	99,23
5	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	80	85,75	80	77,03	96,29	107,19
6	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	60,21	60,21	100
7	Cakupan Penjarangan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat)	%	100	99,45	100	0,00	0	99,45
8	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)	%	17	3,97	17	3,62	178,71	176,65
9	Persentase balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi	%	16,5	5,31	16,5	6,03	163,45	167,82
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	55	68,65	55	61,29	111,44	124,82
12	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	8,75	9,35	8,75	2,07	176,34	93,14
13	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)	%	83	82,12	83	77,48	93,35	98,94
15	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	69,72	100	41,20	41,2	69,72
16	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/ Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100
17	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) (CNR)	Per 100.000 penduduk	214	138,52	214	73	34,11	64,73
18	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut	%	80	93,26	80	50,56	63,2	116,58

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
	yang memiliki akses pd obat antiretroviral							
19	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	Per 1000 penduduk	0,019	0,0051	0,019	0,005	173,68	173,16
20	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 penduduk	21	24,87	21	29,75	58,33	81,57
21	Jumlah kasus leptospirosis (dan zoonosis lainnya)	kasus	55	37	55	16	29,09	67,27
22	Cakupan Kanker Serviks	%	35	3,48	35	1,89	5,4	9,94
23	Cakupan DM	%	100	98,45	100	56,05	56,05	98,45
24	Cakupan Hipertensi	%	100	47,88	100	24,61	24,61	47,88
25	Rasio Posbindu	%	45	100	45	100	222,22	222,22
26	Persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah terakreditasi	%	100	97,44	100	97,44	97,44	97,44
27	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,68	0,58	0,68	0,58	85,29	85,29
28	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	94	72,28	94	47,40	50,43	76,89
29	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	95	76,33	95	78,85	83	80,35
30	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	83,98	100	31,43	31,43	83,98
31	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Usila	%	100	67,23	100	33,28	33,28	67,23
32	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	99,95	100	44,72	44,72	99,95
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	95,06	100	44,47	44,47	95,06
34	Cakupan pelayanan nifas	%	98	98,08	98	43,79	44,68	100,08
35	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	55,34	55,34	100
36	Cakupan balita pnemonia yang ditangani	%	50	37,28	50	23,61	47,22	74,56
37	Cakupan Desa ODF (%ODF)	%	100	58,45	100	81,34	81,34	58,45
38	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	Per 1000 penduduk	0,0055	0,007	0,0055	0,007	127,27	127,27
39	Cakupan Puskesmas Rawat Inap	Unit	34	24	34	24	70,59	70,59

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
40	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	99,27	100	50,30	50,30	99,27
41	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	%	100	121,32	100	39,33	39,33	121,32
42	Masyarakat terlindungi dari produk farmasi, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat	%	70	68,61	70	46,55	66,5	98,01
43	Cakupan temuan makanan yang mengandung zat adiktif berbahaya	%	50	39,75	50	25,71	51,42	79,5
44	Angka penemuan kasus kusta baru yang ditatalaksana sesuai standar	kasus	46	20,00	46	16	34,78	43,48
45	Prosentase populasi rawan (WPS, Waria, LSL, Napi dll), nakes dan Ibu Hamil mendapatkan tes dan pengobatan Hepatitis	%	80	66,13	80	28,58	35,73	82,66
46	Puskesmas yang melaksanakan dana Operasional sesuai peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100

### Analisis Data :

#### 1. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup



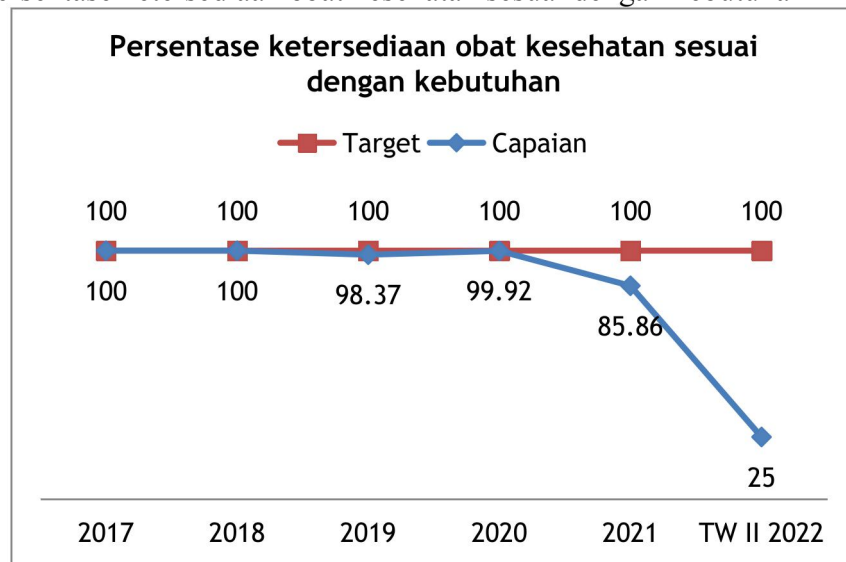
Analisis :

Sama halnya dengan Angka Kematian Bayi, bahwa angka kematian Balita pun mengalami fluktuasi dan keadaan yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Angka Kematian Balita (Akaba) bergerak naik turun dari 5,066 per 1.000 KH pada tahun 2018 naik hingga mencapai 6,58 per 1.000 KH hingga turun lagi menjadi 6,25 per 1.000 KH pada tahun 2021. Akaba tahun 2022 sampai dengan Triwulan II sudah lebih rendah lagi menjadi 3,232 per 1.000 KH. Peningkatan Akaba pada tahun 2019 yaitu 6,58 per 1.000 KH berkaitan dengan masa pandemi Covid-19. Secara umum Akaba di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam menekan Akaba antara lain dengan melaksanakan pelatihan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR, Orientasi SDIDTK bagi tenaga kesehatan, Guru PAUD dan Kader, Pelatihan MTBS dan beberapa Orientasi pelatihan integrasi dari seksi P2 dengan Program Anak, integrasi Program Gizi dan Kesehatan anak yaitu seperti sosialisasi MTBS dengan TB Anak dan Sosialisasi MTBS dengan Gizi Buruk.

Pada tahun 2022 ini juga masih perlu upaya keras untuk terus menekan Akaba agar mencapai target, yaitu dibawah 6 per 1.000 KH.

2. Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan kebutuhan



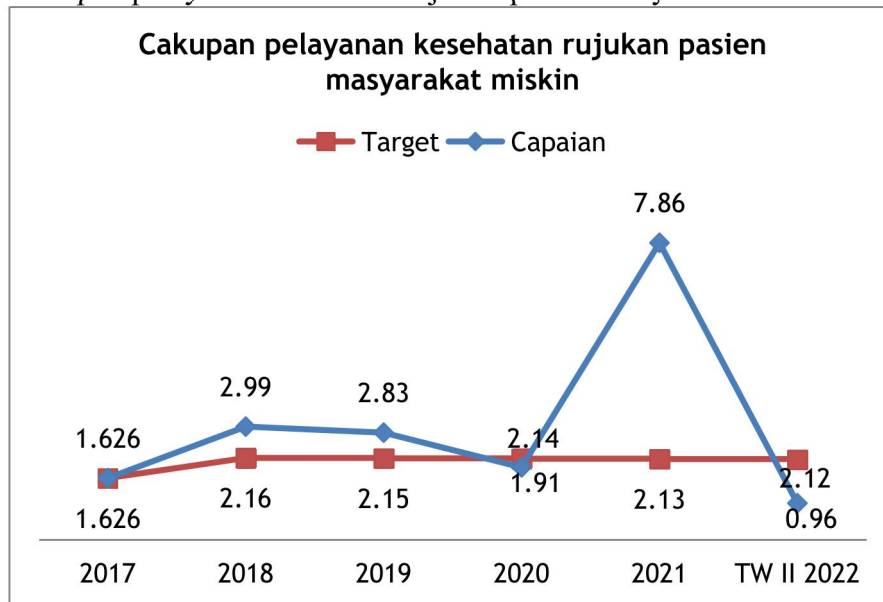
Analisis :

Tahun 2017 sampai dengan 2019 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan berasal dari Dana DAK dengan jumlah yang beragam yaitu untuk tahun 2017 sebesar Rp. 9.486.843.000, Tahun 2018 Dana DAK sebesar Rp. 7.135.401.000, dan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 6.669.139.000. Dimana Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan diutamakan melalui mekanisme e Catalog. Tahun 2020 Alokasi Dana DAK Untuk Pengadaan Obat sebesar Rp. 4.030.359.025,00. Mengingat Usulan Kebutuhan Obat Setiap Tahun Sekitar Kurang Lebih 10 M maka pada tahun 2020 juga mendapat Alokasi Dana APBD 2 Sebesar Rp.5.148.120.300,00. Dan Tahun 2021 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan menggunakan Alokasi Dana DAK sebesar Rp. 4.633.061.000 Dan Alokasi BHP sebesar Rp. 1.563.961.000,00. Tahu 2021 juga mendapat Alokasi Dana APBD 2 sebesar

Rp. 2.196.339.321,00 untuk Pengadaan Obat Dan BHP. Pengadaan Obat dan BHP mengutamakan mekanisme E Katalog. Sedangkan untuk obat-obat diluar E Katalog menggunakan metode Lelang.

Untuk tahun 2022 Alokasi Dana DAK untuk Pengadaan Obat sebesar Rp. 6.141.413.731,00 dan mulai berproses pada bulan April 2022. Pada triwulan II tahun 2022, proses Pengadaan masih berjalan pada Tahap Penerimaan dari Distributor. Angka presentase ketersediaan merupakan gabungan dari capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan. Angka pada triwulan II tersebut masih merupakan capaian realisasi fisik dari obat yang telah dipesan kepada penyedia dan telah dikirimkan oleh distributor. Sementara capaian realisasi keuangan belum dapat dicapai pada triwulan II. Hal tersebut karena pada tahun 2022 anggaran penyediaan obat hanya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kefarmasian yang baru dapat dicairkan pada triwulan III dan IV. Untuk Tahun 2022 tidak mendapat Alokasi Dana APBD II.

3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

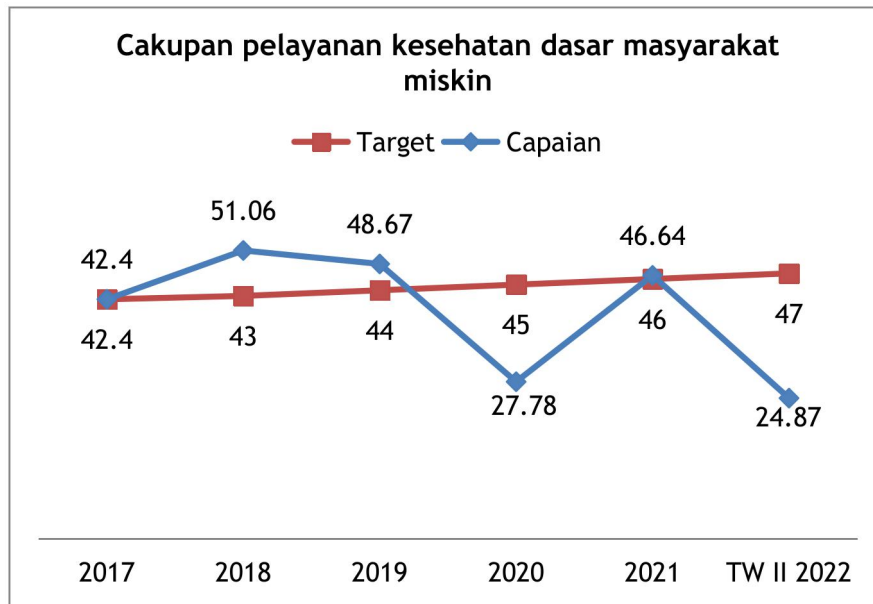


Analisis :

Dari grafik diatas terdapat peningkatan ekstrim pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 sedang terjadi peningkatan kasus yang tinggi dan menyebabkan masyarakat enggan datang ke puskesmas karena takut tertular Covid-19, dan masyarakat datang ke puskesmas sudah dalam kondisi kesehatan yang sudah cukup parah dan membutuhkan rujukan. Tahun 2022 diharapkan bisa mencapai target karena di semester 1 capaiannya adalah 0,96 dan diproyeksikan di akhir tahun bisa mencapai target.

4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

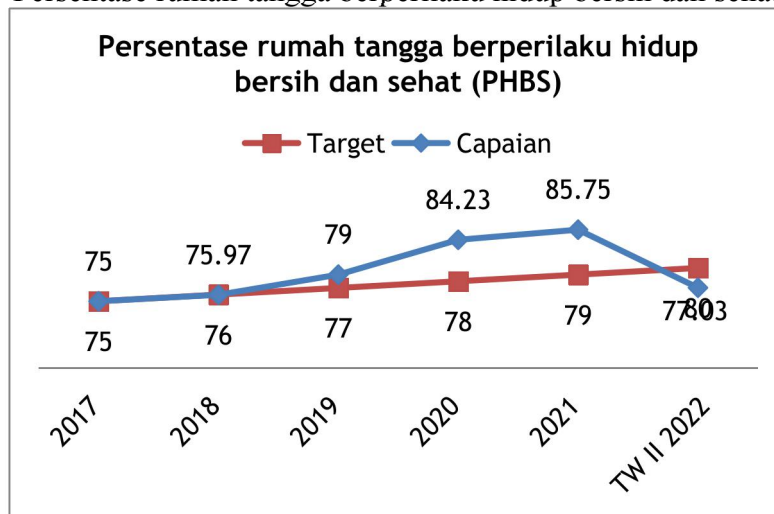




**Analisis :**

Target cakupan kunjungan masyarakat miskin sebagaimana pada grafik diatas adalah bahwa masyarakat miskin yang menjadi sakit dan membutuhkan pertolongan fasilitas pelayanan kesehatan adalah maksimal sebesar 47 %. Jadi semakin sedikit masyarakat miskin yang datang berkunjung ke puskesmas untuk berobat maka berarti kondisi kesehatan masyarakat miskin tersebut baik/sehat. Namun semua masyarakat miskin yang datang ke puskesmas harus dilayani seluruhnya (100 %). Melihat data grafik diatas terutama untuk tahun 2020 dimana kunjungan masyarakat miskin ke puskesmas sangat rendah, hal ini kemungkinan karena terkait kasus Covid-19 meningkat sehingga mereka tidak akan berobat ke puskesmas jika kondisi sakitnya masih bisa ditangani sendiri (belum parah). Masyarakat tidak segera datang berobat ke puskesmas karena takut tertular Covid-19 atau ada asumsi “di-Covid-kan”. Hal inilah yang menjadikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin menjadi rendah. Tahun 2022 dengan melihat capaian di semester 1 potensi untuk mencapai target cukup besar di sisi lain situasi perkembangan Covid-19 terkendali.

**5. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**



Analisis :

Pencapaian presentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dimana cakupan rumah tangga dengan PHBS tahun 2017 sebesar 75% meningkat secara bertahap menjadi 85,75% pada tahun 2021. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 realisasi pencapaian sudah mencapai 77,03%. Secara keseluruhan pencapaian indikator ini sudah memenuhi target persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dimana setiap tahun ada peningkatan cakupan. Capaian TW II tahun 2022 capaian baru mencapai 77% karena masih dilakukannya pendataan sampai akhir tahun, dimana capaian diperkirakan bisa memenuhi target lebih dari 80%.

Angka ini menginterpretasikan situasi rumah tangga yang sudah menerapkan/mempraktikan PHBS didalam rumah tangga yang sudah memenuhi kriteria utama dan paripurna. Rumah tangga yang mempraktikkan PHBS akan berdampak positif pada penerapan PHBS diluar tatanan rumah tangga, seperti tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan. Semakin banyak rumah tangga dengan PHBS berarti semakin banyak warga masyarakat yang telah memanfaatkan tenaga kesehatan untuk pertolongan persalinan, memberikan ASI eksklusif pada bayi, melaksanakan penimbangan balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, mengelola air minum dan makanan sehat di rumah tangga, menggunakan jamban sehat untuk BAB, mengelola limbah cair rumah tangga, membung sampah di tempat sampah, meberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan tidak merokok didalam rumah.

6. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

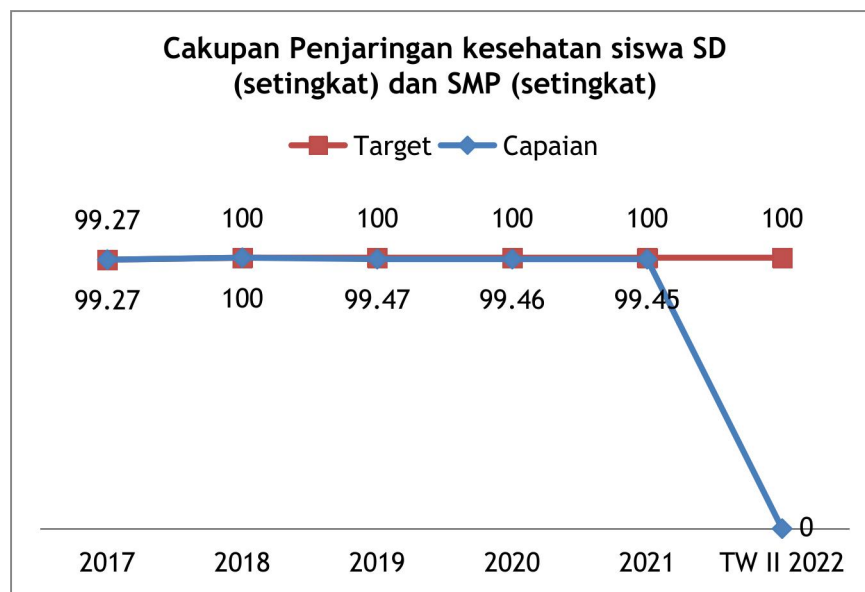


Analisis :

Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat memenuhi target 100%. Hal ini menggambarkan bahwa setiap warga masyarakat di kelurahan/desa di wilayah Kabupaten Cilacap dapat

mengakses pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan melalui sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Puskesmas, Pustu, atau sarana kesehatan yang lainnya. Selain itu di tatanan desa/kelurahan sudah dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Polindes, Posyandu, Posbindu, Pos UKK serta desa/kelurahan telah mampu melaksanakan surveilans berbasis masyarakat seperti peran serta dalam pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, kedaruratan kesehatan, penyehatan lingkungan, serta penerapan PHBS. Keadaan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, cakupan desa/kelurahan siaga aktif mencapai 60.21%, melalui penguatan upaya kemitraan dalam menarik kemandirian, peran aktif dan partisipasi masyarakat di akhir tahun 2022 pencapaian bisa memenuhi target.

7. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat)



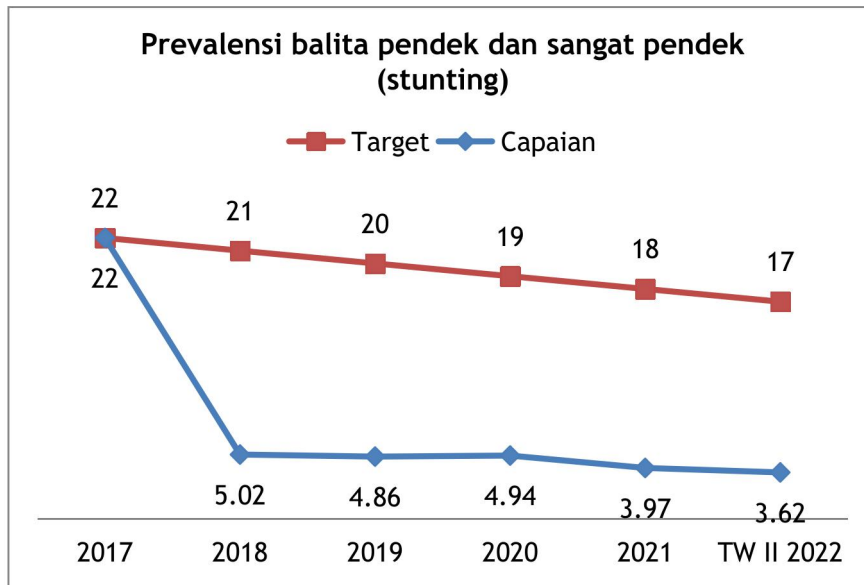
Analisis :

Realisasi pencapaian penjaringan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 relatif bagus dan semakin meningkat, setara dengan target yang ditetapkan (100%). Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat) tahun 2017 sebesar 99,27% meningkat menjadi 99,45% pada tahun 2021, dimana masih ada beberapa siswa yang tidak hadir sekolah pada saat pelaksanaan pelayanan penjaringan kesehatan anak sekolah. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 capaian masih 0%, karena penjaringan anak sekolah dijadwalkan pada Triwulan III. Strategi yang diterapkan untuk memaksimalkan cakupan pelayanan, yaitu dengan penjaringan secara online selain penjaringan langsung di sekolah dan madrasah.

Semakin tinggi cakupan pelayanan penjaringan kesehatan pada anak sekolah, maka akan semakin dini permasalahan kesehatan diketahui pada anak sekolah seperti permasalahan kesehatan secara umum, kesehatan gigi dan mulut, dan tingkat kebugaran anak sekolah. Hasil akhir yang diharapkan yaitu akan tercipta generasi muda dengan kualitas kesehatan

yang tinggi, yang akan mampu bersaing dan menjadi pelaku untuk berperan dalam memajukan bangsa dan negara.

8. Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)

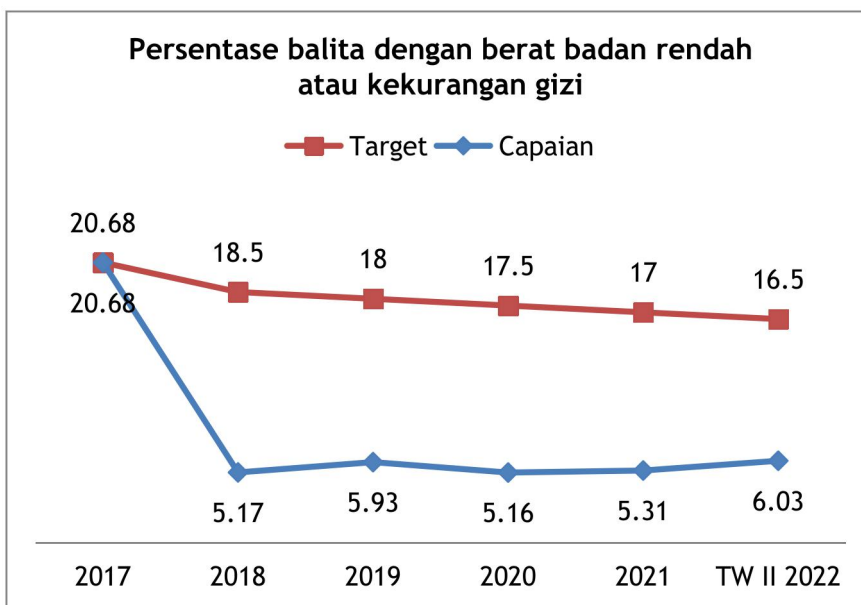


Analisis :

Prevalensi *stunting* (balita pendek dan sangat pendek) pada grafik diatas didapatkan berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan anak balita yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Ada kecenderungan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Cilacap, dimana prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 5,02% menurun menjadi 3,97% pada tahun 2021. Jjika dibandingkan dengan target angka prevalensi ini jauh dibawah dan memenuhi target yang ditetapkan. Demikian juga jika dibandingkan dengan prevalensi stunting berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 32,1% , maupun SSGI ( Survei Status Gizi Indonesia ) tahun 2019 (23,18%) dan 2021 (17,9%).

Faktor penyebab maupun upaya pencegahan dan penanganan stunting sama dengan pencegahan dan penanganan gizi buruk, yaitu masalah spesifik (sektor kesehatan yang bersifat jangka pendek ) dan masalah sensitif (non kesehatan yang bersifat jangka panjang). Fokus pencegahan dan penanganan pada seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK), mengingat penyebab balita gizi buruk ataupun stunting adalah pada asupan makanan, perilaku dan pola asuh orang tua, dan situasi sanitasi lingkungan. Upaya intervensi yang dilakukan sejak tahun 2018 sebagai kabupaten fokus stunting hingga sekarang yang dilaksanakan secara konvergensi dan terintergrasi dengan berpedoman pada delapan aksi stunting, mulai dari analisis situasi, rembuk stunting, sistem manajemen data stunting, hingga evaluasi kinerja.

9. Persentase balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi



**Analisis :**

Persentase balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi (*underweight*) berdasarkan hasil penimbangan serentak di Kabupaten Cilacap menunjukkan telah memenuhi target yang ditetapkan walaupun dilihat dari cakupan per tahun mengalami sedikit peningkatan. Persentase balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi tahun 2018 sebesar 5,17%, angka ini lebih rendah dan telah memenuhi target 18,5%, demikian juga realisasi tahun 2021 sebesar 5,31% lebih rendah dan telah memenuhi target yang ditetapkan 16,5%.

Hal ini disebabkan pada faktor internal yaitu asupan makan yang belum sesuai dengan prinsip Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) yang diberikan terlalu dini, serta pemantauan pertumbuhan yang tidak intensif secara terus menerus, sehingga arah pertumbuhannya beresiko dan potensi untuk menjadi anak balita dengan kekurangan gizi. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain karena kemampuan kader dalam melakukan pemantauan pertumbuhan perkembangan melalui kunjungan rumah dan peran lembaga (Pokjant Posyandu) tingkat desa belum optimal.

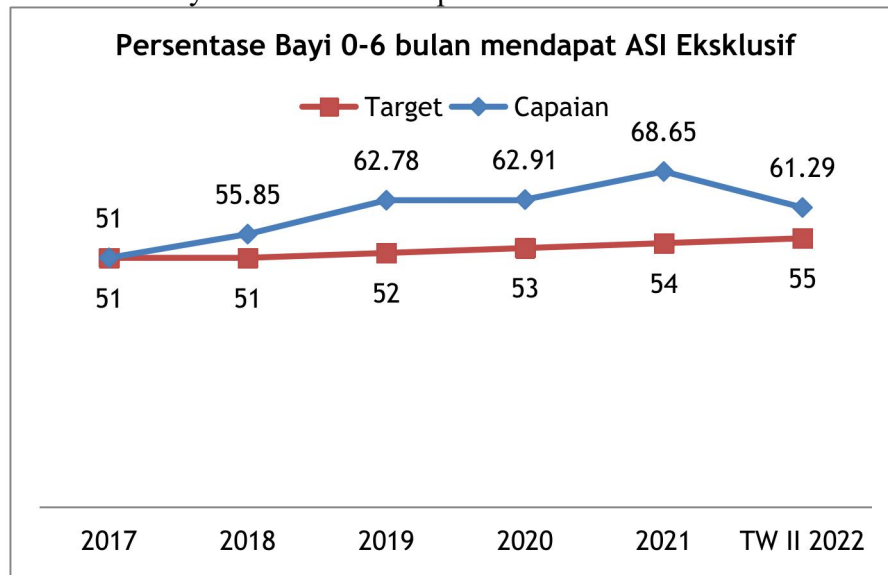
**10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**



Analisis :

Capaian Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 s/d semester 1 sudah mencapai 100% sesuai target. Hal ini menggambarkan bahwa semua kasus gizi buruk ditangani/mendapat perawatan semua. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus gizi buruk sudah dapat mengatasi semua kasus, namun demikian kasus gizi buruk masih ditemukan di Kabupaten Cilacap hal ini disebabkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi sangat kompleks seperti kelainan bawaan, BBLR, kasus kambuhan, penerapan PMBA. Permasalahan kasus gizi buruk perlu penanganan secara intensif, permasalahan gizi buruk harus ditangani bersama baik secara lonpro maupun linsek.

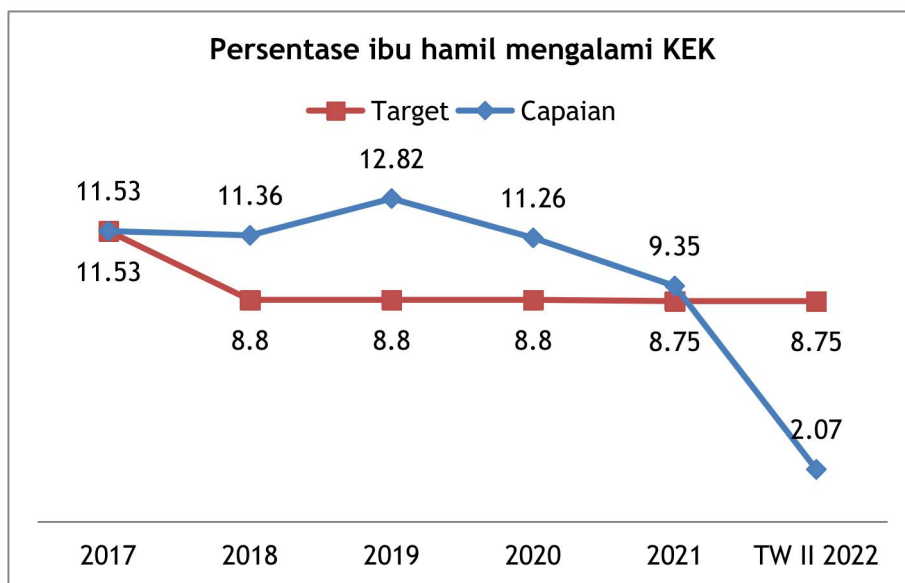
11. Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif



Analisis :

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian ASI Eksklusif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sudah dapat memenuhi target per tahun. Namun jika dilihat capaian dari tahun 2021 sebesar 68,65% , dan tahun 2022 pada kondisi semester I masih lebih rendah. Ada beberapa penyebab diantaranya : pemantauan / pendampingan ASI Eksklusif belum optimal dilakukan di Posyandu, Sistem pencatan dan pelaporan yang kurang optimal (tidak diikuti secara kontinue di buku KIA - KMS/ kohort) serta Faktor perilaku dan pengaruh keluarga disekitarnya (budaya,adat istiadat). Penyebab lain masih ada layanan umum baik pemerintah/ swasta belum menyediakan ruang laktasi guna menunjang/mendukung peningkatan capaian ASI Eksklusif.

12. Persentase ibu hamil mengalami KEK



Analisis :

Capaian Ibu Hamil yang Kurang Energi Kronik (KEK), selama lima tahun mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan target , selama 5 tahun belum bisa memenuhi target. Hal ini terlihat kondisi tahun 2021 masih di angka 9,35% dengan target 8,75%. Sedangkan pada tahun 2022 , pada semester 1 masih dibawah target ( target terpenuhi). Penyebab : riwayat ibu hamil resiko tinggi , riwayat KEK masa remaja ( kurang asupan , diit / gaya hidup remaja ) dan faktor sosial ekonomi. Tahun 2022di semester 1 capaian sebesar 2,07%, diharapkan sampai akhir tahun 2022 masih dibawah target (perhitungan invert).

### 13. Persentase kecamatan bebas rawan gizi

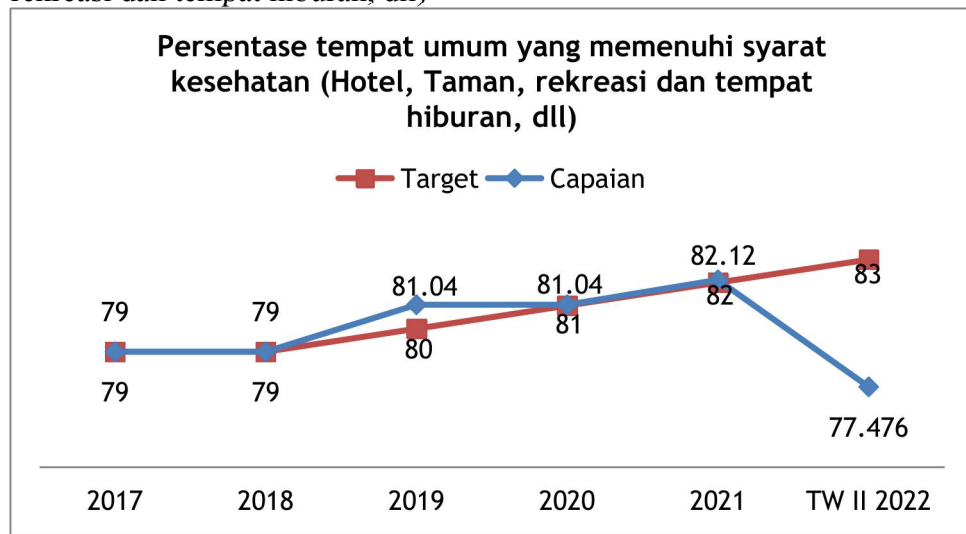


Analisis :

Persentase kecamatan bebas rawan gizi selama lima tahun terakhir telah menunjukkan hal yang positif dalam penanganan gizi pada anak balita, dimana telah memenuhi target yang ditetapkan 100%. Angka ini menggambarkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten

Cilacap tidak mengalami permasalahan gizi pada anak balita, dimana angka Kurang Energi Protein (KEP) total pada anak balita berada dibawah 15%. Hal ini bisa terwujud melalui upaya pemantauan tumbuh kembang balita dimana akan diketahui adanya gangguan pertumbuhan balita sejak dini sehingga penanganan potensi resiko gizi kurang dan atau gizi buruk pada anak balita akan efektif. Upaya ini dilakukan dengan harapan pada setiap wilayah kecamatan setiap anak balita akan terpantau tumbuh kembangnya sehingga terhindar penghambatan pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berfikir yang pada akhirnya akan menjadi generasi yang produktif.

14. Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)

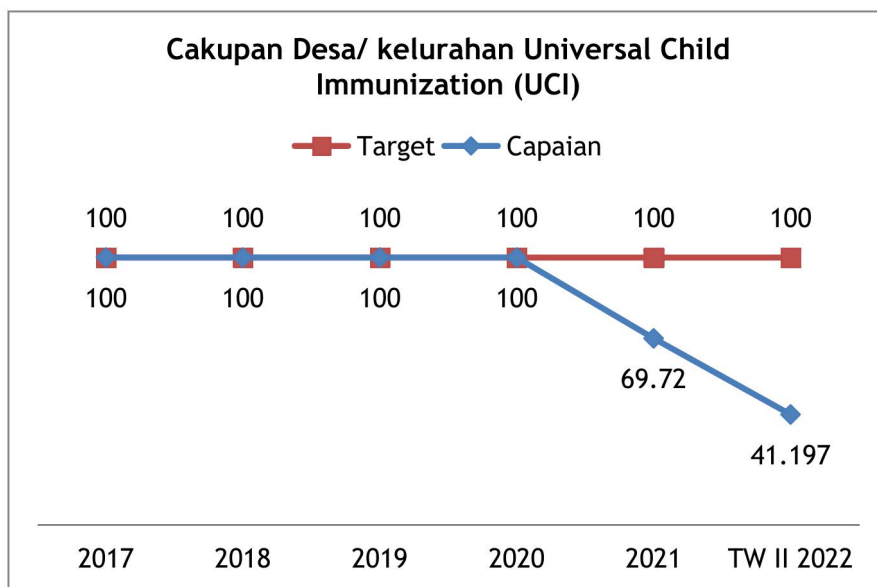


Analisis :

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (hotel, taman rekreasi, dan tempat hiburan, dll) selama lima tahun terakhir ada kecenderungan meningkat, dimana tahun 2017 sebesar 79% meningkat menjadi 82,12% pada tahun 2021 dan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sudah mencapai 77,48%. Angka ini relatif telah memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Indikator ini menggambarkan bahwa sarana umum yang disediakan pemerintah, swasta, dan perorangan yang digunakan untuk aktifitas masyarakat seperti fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, perhotelan, sarana rekreasi, dan ruang publik lain sebagian besar telah memenuhi syarat kesehatan dan aman untuk dimanfaatkan.

15. Cakupan Desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)





Analisis :

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization hingga tahun 2020 dapat mencapai target, namun pada tahun 2021 turun hingga 69,72%, dan capaian s/d tribulan 2 atau semester 1 capaian 41,2%.

Capaian Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization sama halnya dengan capaian Prosentase bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Tahun 2021 capaian turun dengan capaian sebesar 69,72%, hal ini disebabkan karena masa pandemic Covid-19, sehingga Distribusi vaksin dari pusat ke daerah tersendat, karena adanya pandemi Covid-19, disamping itu semua kegiatan terpusat di penanganan Covid-19. Tahun 2022 pandemi Covid-19 mereda, untuk capaian di semester 1 sudah mencapai 41,197%, diperkirakan akhir tahun 2022 capaian bisa mencapai target.

16. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/ Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

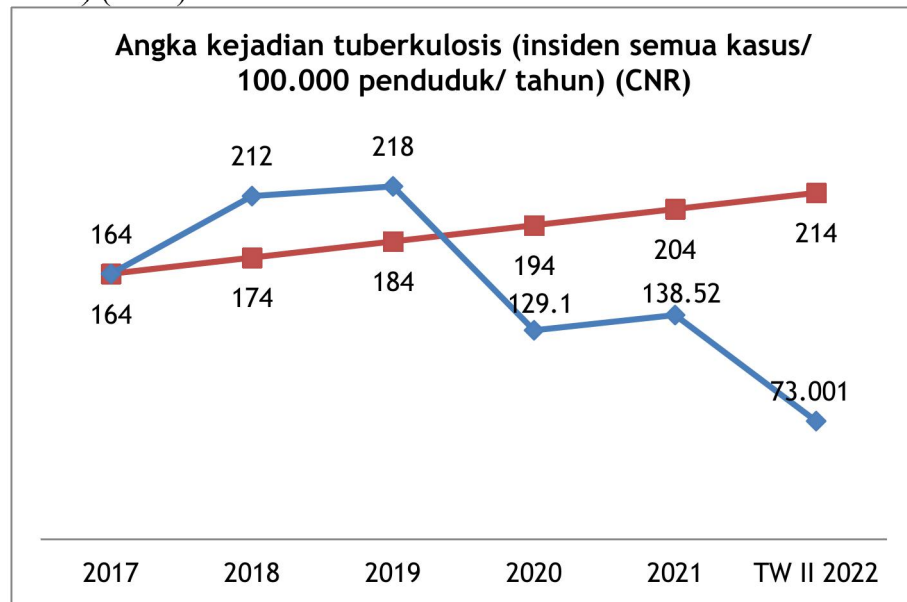


Analisis :

Selama periode lima tahun terakhir angka cakupan desa/kelurahan mengalami KLB/potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam mencapai 100%, serta dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%. Dari angka ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap wilayah desa/kelurahan yang sudah mengalami KLB atau mempunyai potensi terjadi KLB selalu ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pemahamannya bahwa telah dilakukan penanganan/penanggulangan/respon cepat pada setiap KLB atau potensi KLB yang ada. Penanggulangan KLB kurang dari 24 jam dilakukan sejak laporan diterima baik melalui laporan mingguan (W1), *whatsapp* atau telepon diterima sampai tindak lanjut penyelidikan dilakukan.

Tingkat keberhasilan kecepatan dalam penanganan KLB atau potensi KLB antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon), kepatuhan atas adanya pedoman/ petunjuk teknis penanggulangan KLB, pelaksanaan penyelidikan epidemiologi sesuai SOP, serta tersedianya SDM kesehatan yang terstandarisasi.

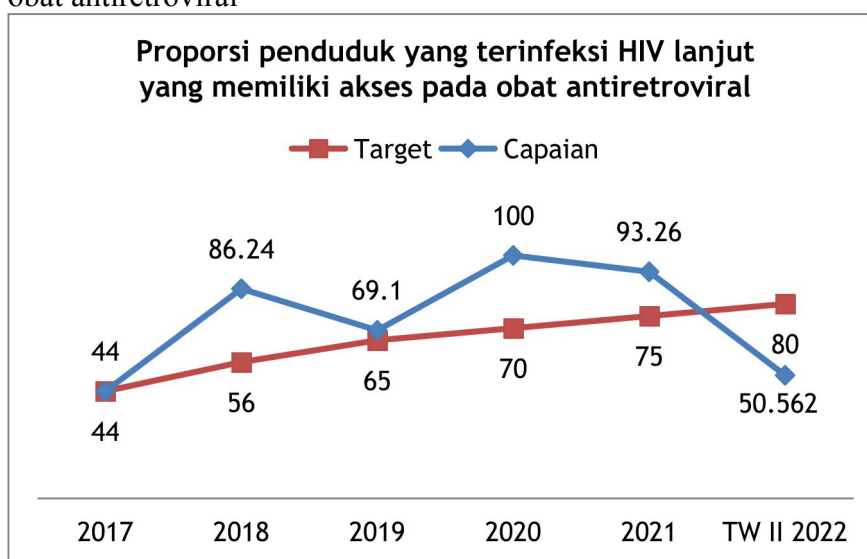
17. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) (CNR)



Analisis :

Angka kejadian tuberkulosis Kabupaten Cilacap periode lima tahun terakhir terlihat fluktuatif setiap tahunnya. Angka kejadian tuberkulosis pada tahun 2017 sebesar 164 per 100.000 penduduk meningkat menjadi 218 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 dan menurun menjadi 138,52 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Pandemi sangat berpengaruh pada capaian program. Kegiatan Aktif Case Finding dan Kampanye TBC tidak dapat dilakukan dengan maksimal, yang berdampak pada rendahnya penemuan terduga TBC. Penemuan pasien TBC hanya secara pasif, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan. Adanya stigma pada pasien dan keluarga TBC mengakibatkan banyak masyarakat yang mencari pengobatan ke luar wilayah Kabupaten Cilacap dan menjadi temuan kabupaten tersebut sehingga mengurangi capaian di Kabupaten Cilacap.

18. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral

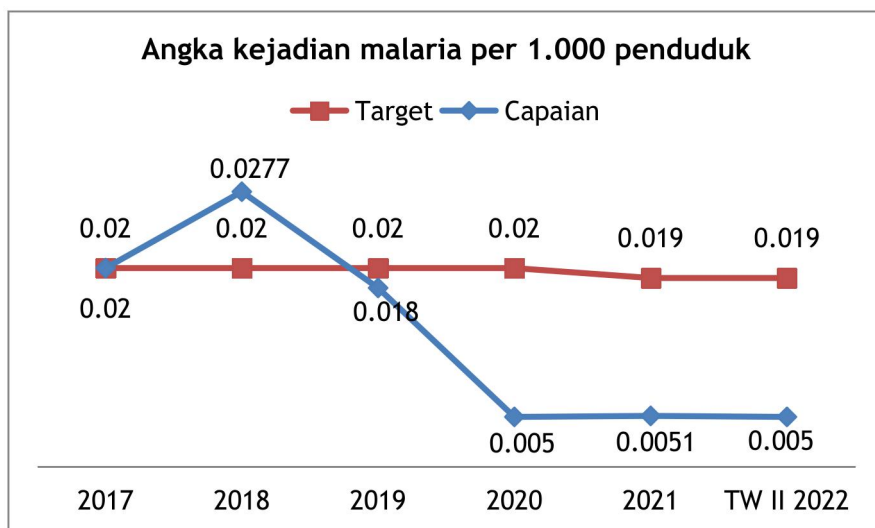


Analisis :

Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral di Kabupaten Cilacap selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Angka ini meningkat dari 44% pada tahun 2017 menjadi 93,26% pada tahun 2021. Indikator ini menggambarkan pelayanan pengobatan pada Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), dimana diharapkan setiap ODHA mendapatkan obat Anti Retroviral Virus (ARV). Pencapaian ini dapat terealisasi memenuhi target karena di Kabupaten Cilacap semua Puskesmas dan RS dapat diakses oleh ODHA untuk mendapatkan obat ARV, dimana sumber daya tenaga kesehatan sudah terlatih untuk memberikan Pelayanan Dukungan dan Pengobatan (PDP) walaupun belum mendapat aktifasi secara pelaporan. Permasalahan yang muncul karena ODHA belum bisa diarahkan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai wilayah tempat tinggal karena masih adanya stigma pada masyarakat tentang HIV.

Upaya akan terus dilakukan dalam peningkatan cakupan proporsi akses terhadap ARV lebih optimal, dengan pengembangan akses PDP teraktivasi pada semua layanan fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat ARV di semua layanan.

19. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk



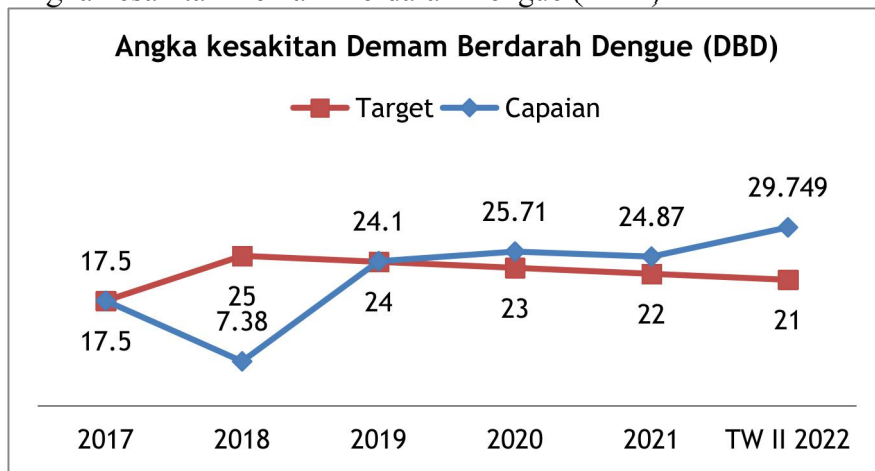
Analisis :

Angka kejadian malaria di Kabupaten Cilacap menunjukkan penurunan yang signifikan serta telah memenuhi target yang ditetapkan, dimana tahun 2017 angka ini sebesar 0,02 per 1.000 penduduk menurun menjadi 0,0051 per 1.000 penduduk pada tahun 2021 dan sudah memenuhi target tahun 2021 yaitu 0,019 per 1.000 penduduk.

Masih ditemukannya kasus malaria di Kabupaten Cilacap karena penyakit malaria yang ada merupakan kasus import (kasus yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cilacap). Pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2022 angka kejadian malaria menurun drastis dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ada pembatasan mobilitas masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya mobilitas masyarakat dari daerah endemis malaria menuju ke wilayah Kabupaten Cilacap.

Keberhasilan penanganan penyakit malaria antara lain melalui upaya penguatan survailans migrasi, yaitu *tracing* kepada warga masyarakat yang telah bepergian dari daerah endemis malaria. Sedangkan untuk program kegiatan rutin pada daerah endemis malaria di Kecamatan Kampunglaut dan Nusawungu adalah dengan pengendalian vektor pada area/spoot perindukan nyamuk penular malaria.

20. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)



Analisis :

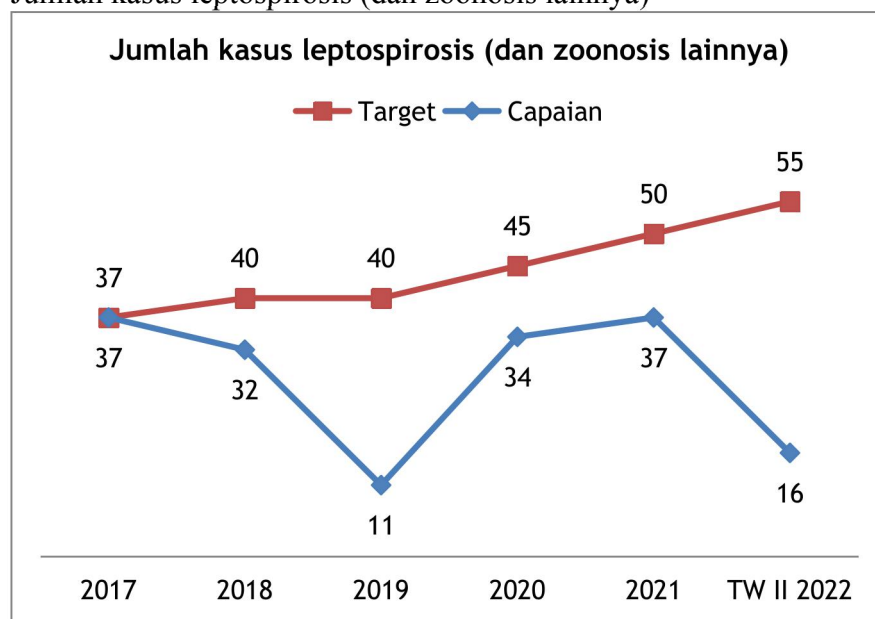
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada rentang tahun 2017 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan kasus, dimana angka kesakitan DBD pada tahun 2017 sebesar 17,5 per 100.000 penduduk meningkat menjadi 24,8 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) menurun, yang diindikasikan dari data angka bebas jentik yang rendah. Situasi seperti ini menjadikan perkembangan nyamuk semakin tidak terkendali, serta adanya perubahan cuaca ekstrim mendukung dalam perkembanganbiakan nyamuk penular virus dengue.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menekan angka kesakitan DBD adalah pengendalian vektor melalui kegiatan PSN secara serentak dengan gerakan satu rumah satu juru pemantauan jentik. Upaya ini sangat efektif untuk menekan laju angka kesakitan DBD di Kabupaten Cilacap, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan PSN serentak.



Peninjauan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Lomanis

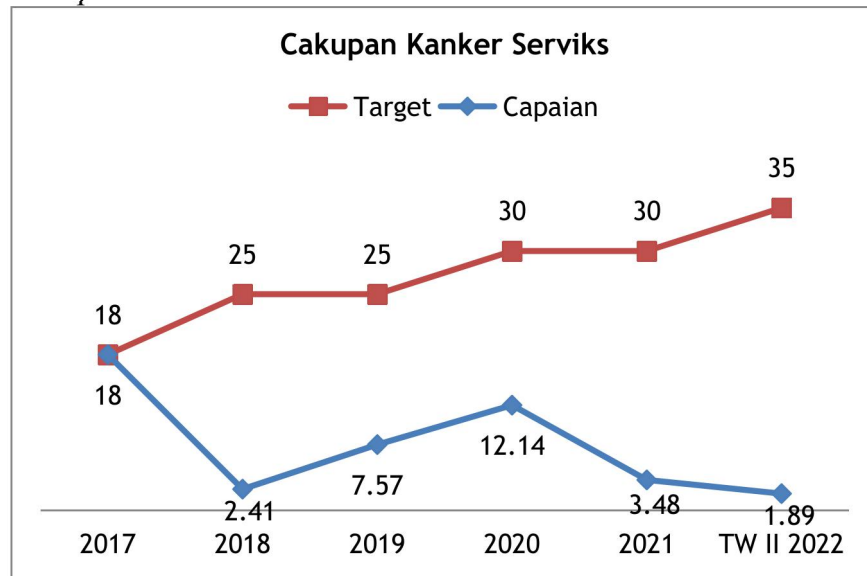
21. Jumlah kasus leptospirosis (dan zoonosis lainnya)



**Analisis :**

Jumlah kasus leptospirosis di Kabupaten Cilacap selama lima tahun terakhir masih belum memenuhi target dan terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah kasus leptospirosis pada tahun 2017 sebesar 37 kasus menurun menjadi 11 kasus pada tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 37 kasus pada tahun 2021. Angka ini menggambarkan bahwa semakin susah untuk menemukan kasus leptospirosis di masyarakat, kasus leptospirosis ditemukan ketika sudah berada pada fasilitas pelayanan kesehatan saat dilakukan pengobatan. Efek positif dari rendahnya penemuan kasus leptospirosis ini mengindikasikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat semakin baik, selain itu upaya pengendalian vektor pembawa leptospirosis semakin maksimal. Hal lain yang dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi tentang bahaya dan pentingnya pencegahan leptospirosis agar masyarakat tetap sehat dan produktif.

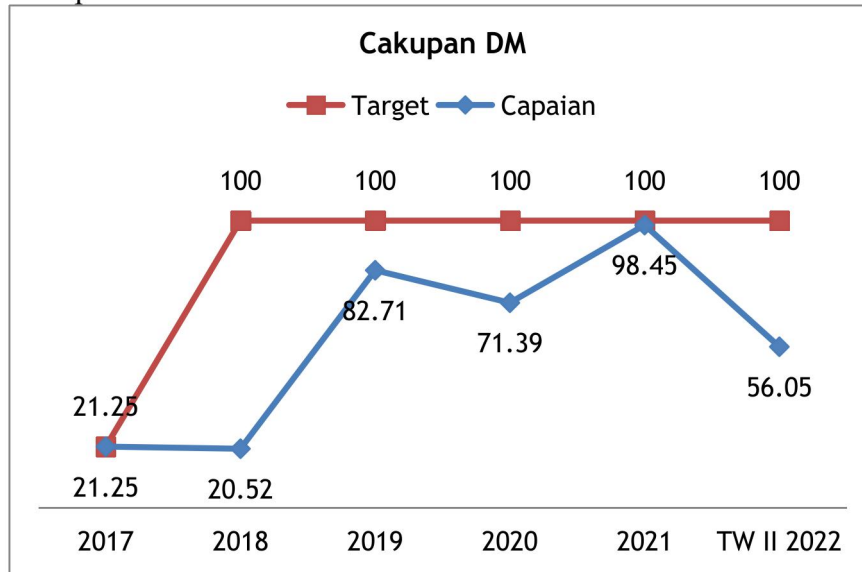
**22. Cakupan Kanker Serviks**



**Analisis :**

Hasil capaian pelayanan deteksi dini kanker leher rahim pada wanita usia subur masih rendah, terlihat naik turun pencapaiannya, dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 cakupan pelayanan deteksi dini kanker leher rahim sebesar 18% menurun pada tahun 2018 dan naik lagi pada tahun 2020 hingga turun kembali menjadi 3,48% pada tahun 2021. Hal-hal yang mempengaruhi situasi tersebut antara lain : a) belum semua puskesmas mampu memberikan pelayanan skrining kanker leher rahim dan payudara melalui IVA tes dan Sadanis, b) jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan terlatih baik dokter dan bidan belum memadai, c) pandemi Covid-19 yang menjadikan pelayanan di luar gedung dalam rangka penjarangan kanker leher rahim dan payudara berbasis masyarakat tidak berjalan maksimal. Upaya yang terus dilakukan yaitu dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dokter dan bidan sebagai provider IVA tes melalui pendidikan dan pelatihan teknis, serta pemenuhan sarana prasarana pemeriksaan dini dan pencegahan kanker leher rahim.

### 23. Cakupan DM

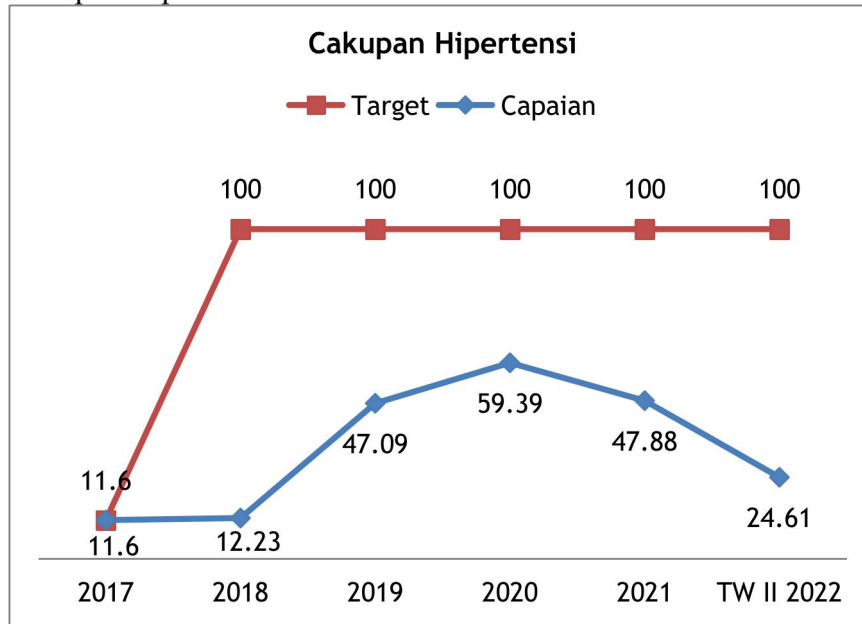


#### Analisis :

Cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Melitus (DM) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih belum memenuhi target, namun demikian data yang ada menunjukkan kecenderungan meningkat pada cakupan pelayanannya. Cakupan pelayanan penderita DM tahun 2017 sebesar 21,25% meningkat menjadi 82,71% pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 98,45% pada tahun 2021. Kecenderungan peningkatan angka cakupan ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan pada penderita DM semakin memenuhi standar pelayanan.

Beberapa upaya akan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk memenuhi target pelayanan pada tahun 2022 sebesar 100%, antara lain melalui penambahan jumlah Posbindu PTM di tingkat desa/kelurahan, memaksimalkan penemuan kasus DM melalui skrining pada kelompok usia produktif, penguatan jaringan dan jejaring kesehatan dalam memperluas akses skrining kesehatan, pemenuhan peralatan dan bahan habis pakai untuk penjangkaran kesehatan usia produktif. Hal lain yang akan diupayakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita DM yaitu dengan meningkatkan kemampuan puskesmas untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU PTM), dimana baru lima puskesmas (13%) yang mempunyai kemampuan melaksanakan Pandu PTM.

## 24. Cakupan Hipertensi



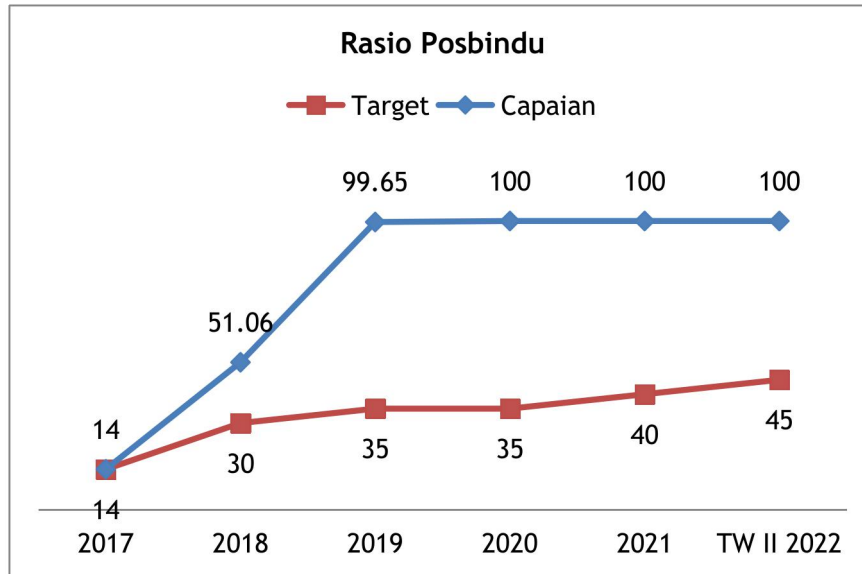
### Analisis :

Cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih belum memenuhi target, dimana cakupan pelayanan penderita hipertensi tahun 2017 sebesar 11,6% meningkat menjadi 59,39% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 47,88% pada tahun 2021. Kecenderungan penurunan angka cakupan ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi masih belum memenuhi standar pelayanan.

Beberapa upaya akan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk memenuhi target pelayanan pada tahun 2022 sebesar 100%, antara lain melalui penambahan jumlah Posbindu PTM di tingkat desa/kelurahan sampai ke jajaran institusi pendidikan dan instansi perkantoran, memaksimalkan penemuan kasus hipertensi melalui skrining pada kelompok usia produktif, penguatan jaringan dan jejaring kesehatan dalam memperluas akses skrining kesehatan, pemenuhan peralatan untuk penjangkaran kesehatan usia produktif. Hal lain yang akan diupayakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu dengan meningkatkan kemampuan puskesmas untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU PTM), dimana baru lima puskesmas (13%) yang mempunyai kemampuan melaksanakan Pandu PTM.



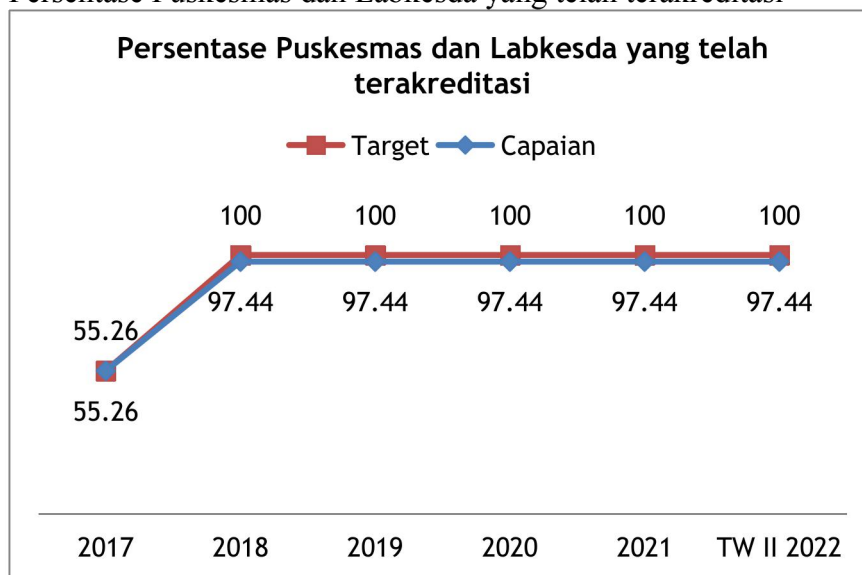
## 25. Rasio Posbindu



### Analisis:

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rasio Posbindu PTM meningkat secara signifikan dan telah memenuhi angka rasio yang ditetapkan. Rasio Posbindu PTM pada tahun 2017 sebesar 14% meningkat menjadi 100% pada tahun 2021. Rasio Posbindu PTM memberikan gambaran besaran desa/kelurahan yang telah memiliki Posbindu PTM dan telah melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan pada kelompok usia produktif, pemeriksaan kesehatan pada kelompok usia lanjut, serta melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi dengan melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten. Peningkatan jumlah Posbindu PTM dengan pelayanan kesehatan yang intensif akan memberikan kontribusi kepada pencegahan kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, DM, gagal ginjal, sehingga masyarakat akan semakin sehat dan produktif.

## 26. Persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah terakreditasi

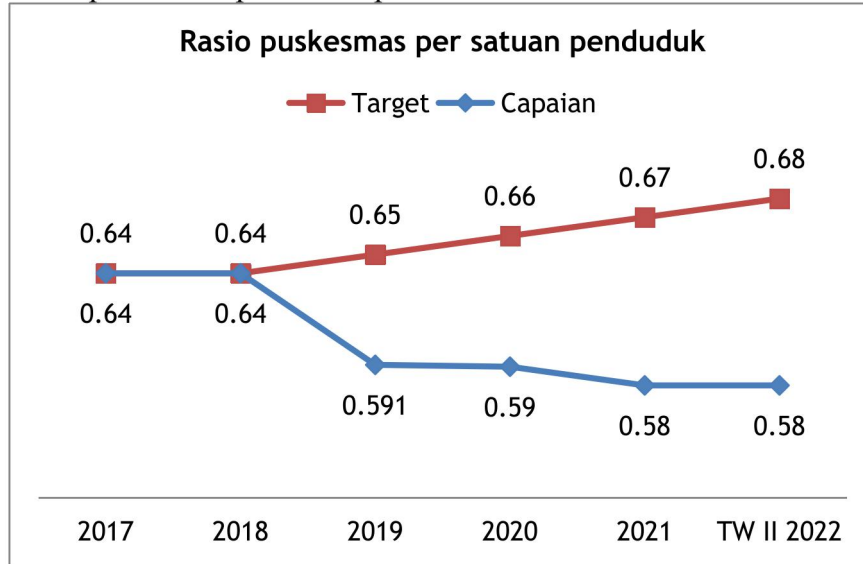


#### Analisis :

Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap telah menetapkan indikator **Puskesmas dan Labkesda Terakreditasi** sebagai salah satu indikator kinerja Dinas Kesehatan. Jumlah sasaran indikator ini adalah sebanyak 39 sasaran yang terdiri dari 38 puskesmas dan 1 labkesda. Dari grafik diatas diketahui bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2022, sasaran yang sudah terakreditasi adalah sebesar 97,44 % (38 sasaran), dan 1 sasaran belum terakreditasi yaitu labkesda. Dengan demikian seluruh puskesmas telah terakreditasi, dan hasil survey akreditasi puskesmas tersebut adalah : Dasar = 2 puskesmas, Madya = 21 puskesmas, Utama = 12 puskesmas dan Paripurna = 3 puskesmas. Pada tahun 2017 sasaran yang terakreditasi baru mencapai 55,26 % artinya baru 21 sasaran yang memiliki sertifikat akreditasi yang berlaku. Kemudian pada tahun 2018 terdapat penambahan puskesmas terakreditasi sebanyak 17 puskesmas, sehingga jumlah seluruh sasaran terakreditasi menjadi 38 sasaran (97,44 %). Masa berlaku sertifikat akreditasi puskesmas adalah 3 tahun, artinya jika puskesmas telah disurvei akreditasi pada tahun 2017 maka harus dilakukan survey re-akreditasi pada tahun 2020, demikian juga puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi pada tahun 2018 maka harus dilakukan survey re-akreditasi pada tahun 2021 dan seterusnya. Akan tetapi dengan ditetapkannya status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020, maka hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan survey re-akreditasi puskesmas dan labkesda sebagaimana tercantum pada Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 29 Juli 2020, dimana salah satu poin penting terkait pelaksanaan akreditasi adalah adanya penundaan pelaksanaan akreditasi sampai status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut. Untuk puskesmas yang telah memiliki sertifikat akreditasi agar membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang digunakan sebagai : 1) persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain; dan/atau 2) persyaratan untuk perpanjangan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, keluar Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/ 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasyankes pada tanggal 18 Februari 2022, dan poin penting terkait akreditasi fasilitas kesehatan adalah bahwa : 1) Sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran ini ditetapkan, 2) Pernyataan

komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan masih tetap dapat digunakan. Hal inilah yang menjadikan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun labkesda belum dapat dilaksanakan, dan indikator **Puskesmas dan Labkesda Terakreditasi belum mencapai 100 %**.

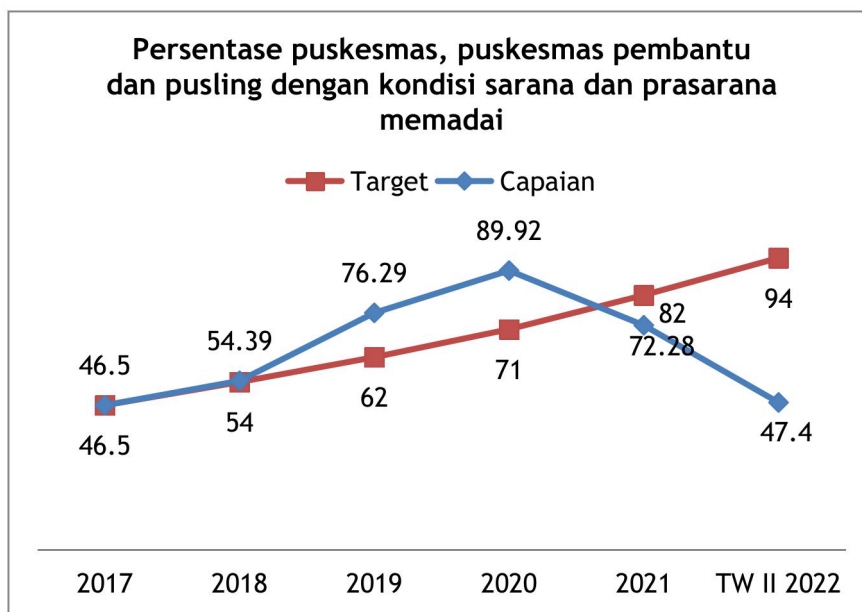
27. Rasio puskesmas per satuan penduduk



Analisis :

Rasio puskesmas per satuan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami sedikit penurunan, dimana rasio pada tahun 2017 sebesar 0,64 per satuan penduduk menjadi 0,58 per satuan penduduk pada tahun 2021. Penurunan rasio ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahunnya tidak diikuti dengan penambahan jumlah puskesmas baru. Kendala yang ditemui dalam penambahan puskesmas baru antara lain sulitnya mendapatkan lahan dengan kondisi geografis dan luasan yang memadai untuk membangun puskesmas baru, serta penyediaan sumber daya tenaga kesehatan, sarana dan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan dan operasional puskesmas baru. Namun demikian rasio puskesmas terhadap satuan penduduk yang ada masih mendekati angka rasio yang ditetapkan, sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai masih mudah untuk diperoleh.

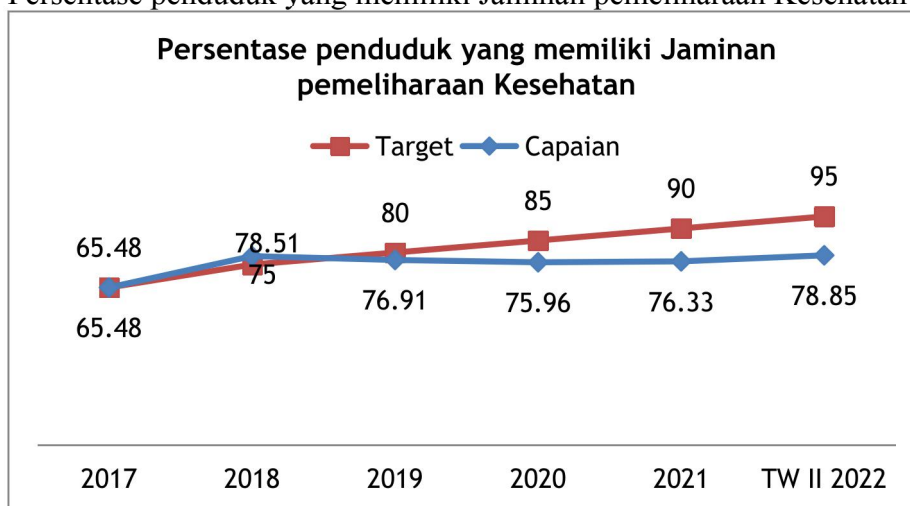
28. Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai



Analisis :

Pencapaian persentase sarana prasarana kesehatan dengan kondisi memadai sudah menunjukkan kecenderungan meningkat dan memenuhi target yang ditetapkan, namun periode dua tahun terakhir mengalami penurunan. Persentase sarana prasarana kesehatan yang memadai pada tahun 2017 sebesar 46,5% meningkat secara bermakna hingga mencapai 89,92% pada tahun 2020. Cakupan pada tahun 2021 menurun menjadi 72,28%, dikarenakan pemenuhan dan penanganan sarana prasarana dengan kondisi rusak ringan menjadi belum diprioritaskan dan ditunda dalam rangka prioritas pada pencegahan, penanganan, dan penanggulangan Covid-19.

29. Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan



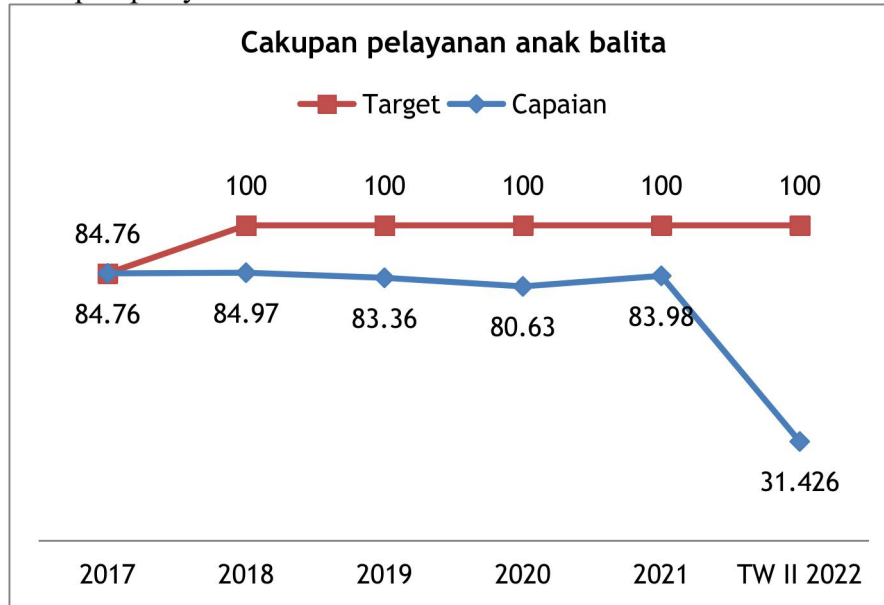
Analisis :

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten Cilacap masih jauh dari target *Universal Health Coverage* (UHC) 95 % karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah adanya penonaktifan data peserta PBI JK yang tidak valid sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan Bulan Oktober Tahun 2021. Dari peserta PBI JK sebanyak 817.710 peserta ternyata yang belum memiliki ID DTKS sebanyak 63.671 peserta dan menjadi non aktif. Akan tetapi dengan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, kepesertaan PBI JK berangsur-angsur terpenuhi sehingga persentase Jaminan Kepesertaan mulai meningkat.

Hal lain yang belum maksimal dalam upaya peningkatan UHC adalah peserta dari kepesertaan Non PBI yaitu yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Masih banyak PPU dan PBPU yang belum menjadi peserta BPJS.

30. Cakupan pelayanan anak balita



Analisis :

Sesuai dengan target SPM di Kabupaten Cilacap bahwa cakupan pelayanan Anak Balita adalah 100%, dimana definisi operasionalnya adalah Balita menimbang minimal 8 x dalam 1 tahun, mendapat skrining tumbuh kembang minimal 2 x dalam 1 tahun, mendapat vit A 1x dalam 1 tahun dan mendapatkan sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Beberapa ketentuan yang berlaku sudah terlaksana dengan baik sebagai contoh yaitu capaian imunisasi Anak dan Capaian pemberian Vit A yang sudah mencapai 100%. Namun persyaratan lain yaitu anak balita menimbang minimal 8 x dalam satu tahun masih menjadi kerja keras di tingkat kabupaten untuk memberikan inovasi dalam menaikkan cakupan kunjungan. Dari target 100% hanya dapat tercapai di kisaran 80% saja dari tahun ke tahun. Dengan berbagai inovasi beberapa diantaranya dengan pemberian PMT, Pemberian obat caceng, penimbangan serentak dan SDIDTK balita melalui dana BOK Puskesmas belum mampu mendongkrak jumlah kunjungan anak balita menjadi 100%. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti keterbatasan waktu dari anak balita yang bekerja. Pada awal masa pandemi Covid 19 dimana kegiatan penimbangan dan berkerumun dihentikan berbagai upaya telah kami lakukan untuk tetap mendapatkan hasil pengukuran dan penimbangan masing-masing anak balita yaitu dengan melaksanakannya secara mandiri dan melaporkannya ke kader posyandu,

dan dengan cara *door to door* melaksanakan pengukuran. Hal tersebut adalah upaya dalam melayani masyarakat yang tidak dapat berkunjung ke posyandu pada saat itu.

Pada Tahun 2017 cakupan anak balita adalah sebesar 84.76 , di tahun 2018 adalah sebesar 84.97 tahun 2019 adalah sebesar 83.36 pada tahun 2020 adalah sebesar 80.63 pada tahun 2021 adalah sebesar 83.36 dan pada tahun 2022 baru tercapai sebesar 31,42 % sampai dengan bulan April tahun 2022. Upaya peningkatan kualitas layanan, seperti melaksanakan SDIDTK baik memakai buku KIA maupun KPSP terus dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Efektifitas dan efisiensi pencatatan pelaporan terus ditingkatkan guna mendapatkan data seluruh Anak balita di Kabupaten Cilacap sehingga Pemerintah terus dapat memantau pertumbuhan dan Perkembangan anak balita dengan baik.

### 31. Proporsi Cakupan Pemeriksaan Usila



Analisis :

Proporsi cakupan pemeriksaan kesehatan pada usia lanjut dari tahun ke tahun cenderung naik turun, dan belum memenuhi target yang ditetapkan namun kisaran angka proporsi ini relatif stabil antara 60 – 68%. Proporsi pada tahun 2017 sebesar 60% dan meningkat menjadi 67,23% pada tahun 2021. Pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut dengan ketentuan standar pelayanannya berupa pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, kadar asam urat, kadar kolesterol, dan pemeriksaan gangguan mental emosional.

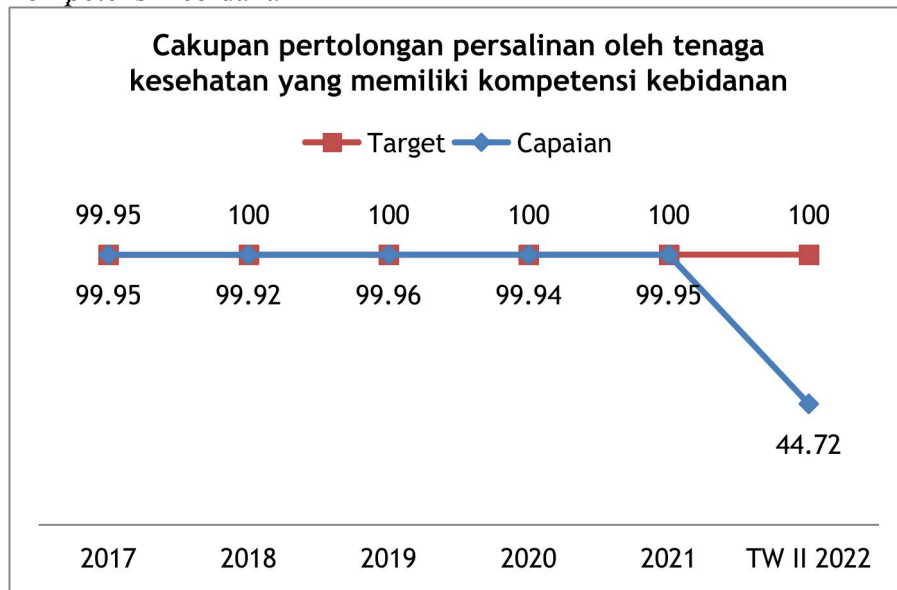
Kendala yang dialami selain ketersediaan bahan medis habis pakai, yaitu tidak semua orang dengan usia lanjut berkunjung secara aktif ke fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas UKBM seperti Posyandu Lansia, Posbindu PTM jika tidak ada keluhan kesehatan. Upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan berbagai orientasi baik kepada tenaga kesehatan maupun kader kesehatan. Beberapa diantaranya adalah pelatihan kader dalam pelayanan kesehatan lanjut usia, orientasi *caregiver* bagi

tenaga kesehatan dan melaksanakan skrining kesehatan pada perayaan hari-hari besar kesehatan termasuk Hari Lanjut Usia. Dengan mengatasi kendala yang ada, maka tahun 2022 dengan data individu yang dimiliki pelayanan kesehatan lanjut usia ini optimis akan memenuhi target.



Peringatan Hari Lansia Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2022

32. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



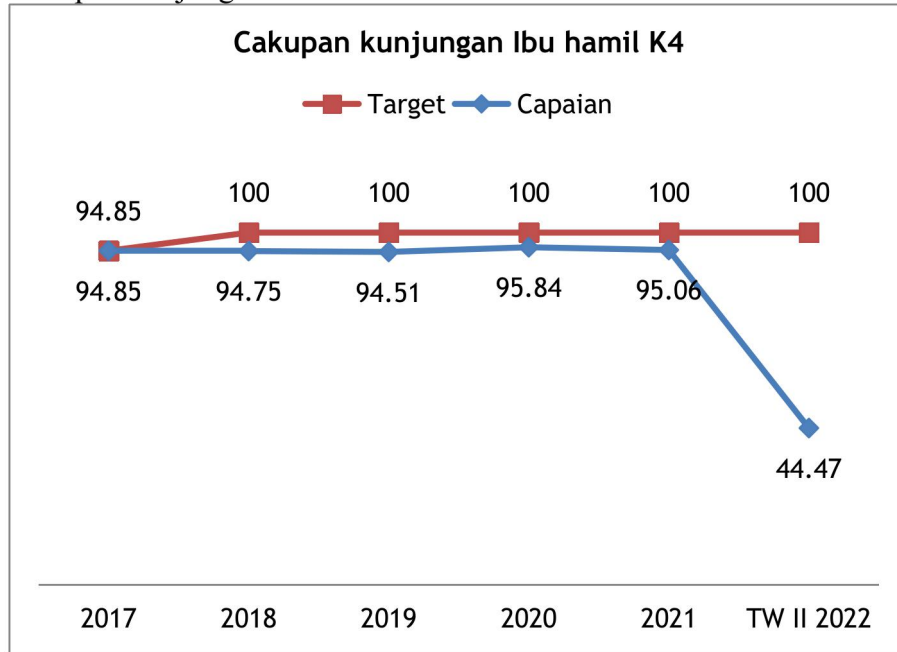
Analisis :

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sudah sangat bagus walaupun belum memenuhi target yang diharapkan (100%). Angka ini menunjukkan bahwa masih ada persalinan ibu hamil yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya intervensi dari lingkungan keluarga (suami, orang tua), dan dukun bayi dalam menentukan tempat untuk persalinan, masih adanya daerah yang sulit untuk mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan

seperti di wilayah Kampunglaut dan daerah perbatasan, serta masih adanya kejadian *partus presipitatus* (persalinan yang berlangsung cepat kurang dari tiga jam) yang tidak memungkinkan ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk itu pada tahun 2022 akan diupayakan bisa memenuhi target sehingga dipastikan setiap persalinan akan selalu ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, peningkatan cakupan ditempuh melalui kerjasama antara tenaga kesehatan yang kompeten, penguatan jaringan dan jejaring kesehatan, partisipasi dan kemitraan lintas sektoral terkait, dan peningkatan peran serta masyarakat.

33. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

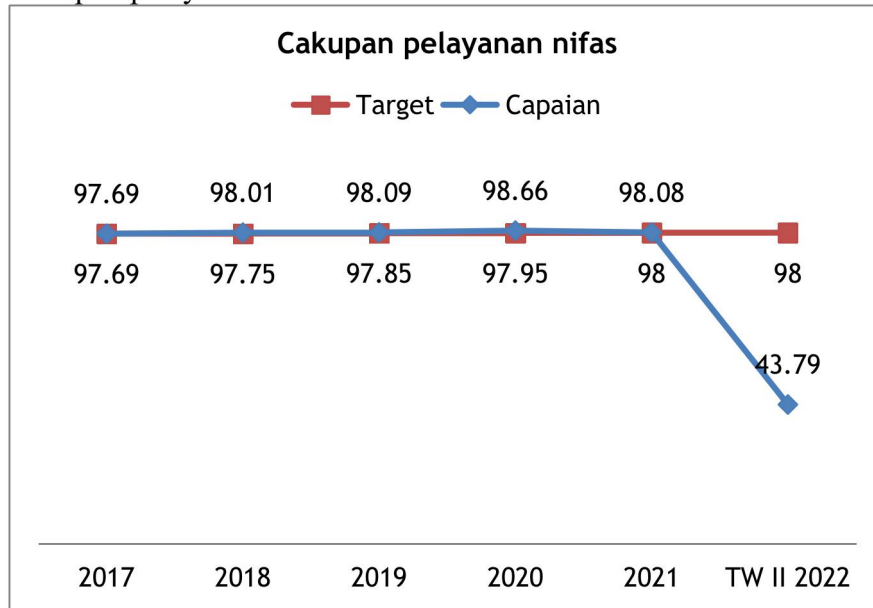


Analisis :

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dari tahun 2017 sampai dengan 2021 walaupun belum memenuhi target, namun mengindikasikan adanya peningkatan setiap tahunnya. Angka cakupan pada tahun 2017 sebesar 94,85% meningkat menjadi 95,06% pada tahun 2021. Untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada ibu hamil dan agar masa kehamilan yang dijalani berkualitas, idealnya setiap ibu hamil mendapatkan akses pada fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak minimal empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan *antenatal care* sesuai standar yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa ibu hamil yang tidak mendapatkan akses pelayanan *antenatal* antara lain karena kejadian prematur, abortus, imatur, pindah tempat tinggal, IUFD, dan belum saatnya K4 pada tahun yang sama. Pencapaian cakupan pada tahun 2022 akan diupayakan bisa memenuhi target melalui peningkatan kerjasama antara tenaga kesehatan yang kompeten, penguatan jaringan dan jejaring kesehatan, partisipasi dan kemitraan lintas sektoral terkait, dan peningkatan peran serta masyarakat.



34. Cakupan pelayanan nifas



Analisis :

Cakupan pelayanan nifas dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sudah memenuhi target yang diharapkan yaitu 97,69% pada tahun 2017 dan meningkat 98% pada tahun 2021. Terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan pada ibu nifas dikarenakan tenaga kesehatan di puskesmas sudah melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu nifas sebanyak empat kali. Pelayanan kesehatan pada ibu nifas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko kesehatan pada ibu pasca persalinan, dengan harapan ibu hamil pasca melahirkan akan tetap sehat dan selamat sehingga akan menekan kejadian kematian ibu.

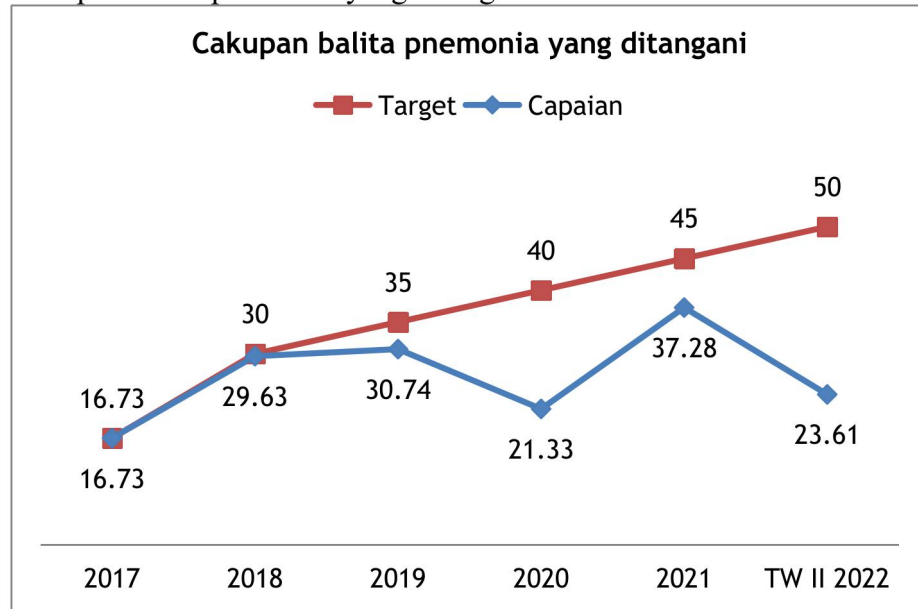
35. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani



**Analisis :**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sudah memenuhi target yang di harapkan yaitu 100%. Angka ini menggambarkan bahwa setiap Ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan dengan angka perkiraan sekitar 15-20% dari total ibu hamil, akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi secara dini dan ditangani secara adekuat. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penanganan komplikasi kebidanan, maka diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari Polindes/Poskesdes, Puskesmas mampu PONEK sampai Rumah Sakit mampu PONEK dalam waktu selama 24 jam. Jika setiap komplikasi kebidanan mendapatkan penanganan yang adekuat, maka akan semakin rendah angka kematian ibu dan bayi, ibu akan menjalani masa kehamilan secara berkualitas dan melahirkan bayi yang sehat.

**36. Cakupan balita pnemonia yang ditangani**



**Analisis :**

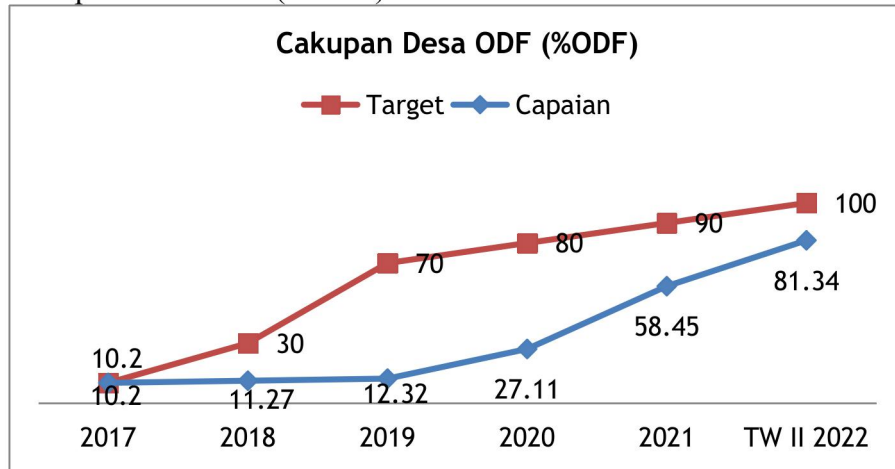
Cakupan balita pnemonia yang ditangani dari Tahun 2017 – 2021 belum bisa memenuhi target dikarenakan belum adanya persamaan persepsi pneumonia balita yang dilaporkan anatar Diagnosa secara klinis dan secara program, dalam hal ini pneumonia yg diharapkan adalah suspek atau tanda gejala pneumonia, sedangkan yang dilaporkan secara data adalah pneumonia secara klinis sehingga pada balita yang dilaporkan adalah sudah masuk dalam Kasus Pneumonia Berat.

Kurangnya sarana pengukuran hitung nafas belum terpenuhi sehingga keterbatasan petugas dalam diagnosis belum maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target cakupan pneumonia adalah penyamaan persepsi dalam analisa diagnosa secara MTBS dan kolaborasi

program dalam pencaian cakupan, sehingga pada penanganan Pneumonia Balita lebih terkendali dengan penemuan lebih awal.

37. Cakupan Desa ODF (%ODF)



Analisis :

Cakupan desa *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Cilacap lima tahun terakhir belum memenuhi target, namun demikian angka cakupan terlihat mengalami kenaikan yang sangat bermakna. Angka cakupan pada tahun 2017 sebesar 10,2% terus meningkat dari tahun ke tahun hingga menjadi 58,45% pada tahun 2021, serta cakupan desa ODF sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sudah mencapai 81,34%. Angka cakupan ini belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih ada beberapa desa/kelurahan yang belum selesai melakukan verifikasi tingkat desa. Diupayakan cakupan desa ODF akan mencapai 100 % pada bulan Oktober 2022, dan akan dilaksanakan deklarasi ODF tingkat Kabupaten Cilacap pada pertengahan bulan November 2022. Angka cakupan ini memberikan gambaran bahwa akses masyarakat terhadap sarana buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan sudah semakin tinggi, sehingga perilaku masyarakat untuk buang air besar sembarangan tidak akan terjadi lagi.

38. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk



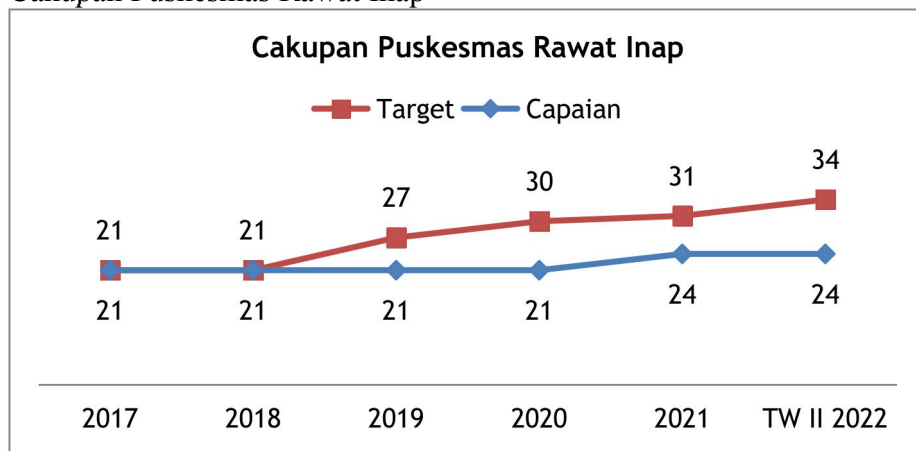
Analisis :

Rasio rumah sakit persatuan penduduk target dapat terpenuhi bahkan diatas target dikarenakan ada penambahan rumah sakit baru (RS Priscilla Medical Center) dan kenakan kelas (RS Aghisna Kroya) dari kelas D naik ke kelas C, dengan terpenuhinya rasio rumah sakit terhadap penduduk Kabupaten Cilacap sehingga kapasitas tempat tidur yang ada di seluruh rumah sakit dapat mencukupi daya tampung layanan rujukan di rumah sakit.



Peresmian Gedung B RSUD Cilacap

39. Cakupan Puskesmas Rawat Inap



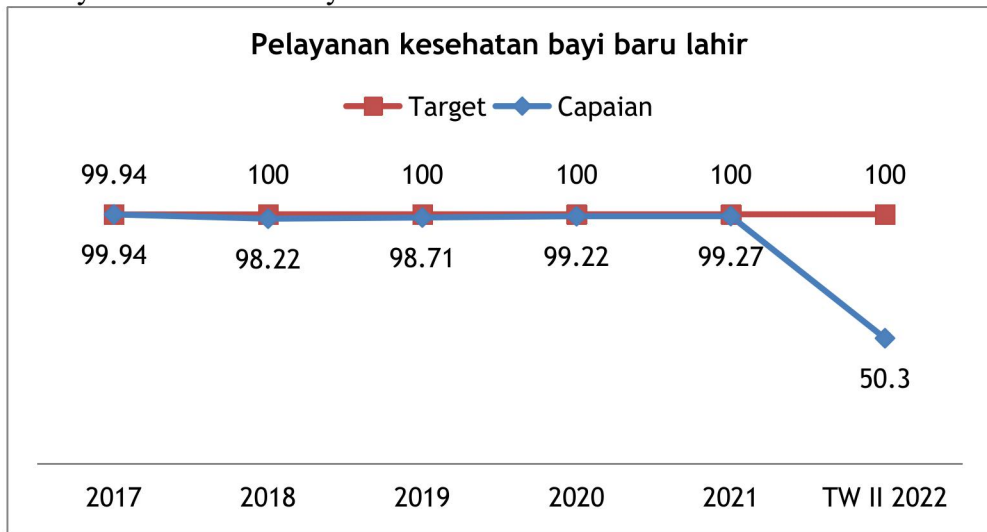
Analisis :

Trend capaian Cakupan Puskesmas Rawat Inap meningkat dari mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 (TW2). Capaian tahun 2018 capaian sebesar 21 unit sama dengan target yaitu 21 unit, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian tetap yaitu 21 unit, namun di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 24 unit.

Capaian untuk cakupan Puskesmas Rawat Inap belum bisa mencapai target dari tahun 2019, hal ini dikarenakan banyak prasyarat dalam pemenuhan Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Inap, Prasyarat yang harus dipenuhi seperti peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur Persyaratan pendirian Puskesmas rawat Inap, Persyaratan, kategori, lokasi Puskesmas;

Sarana Prasarana, SDM Kesehatan untuk memenuhi Puskesmas Rawat Inap; harus memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah nya. Sampai tahun 2022 Puskesmas Rawat Inap yang terealisasi sejumlah 24 Puskesmas.

40. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

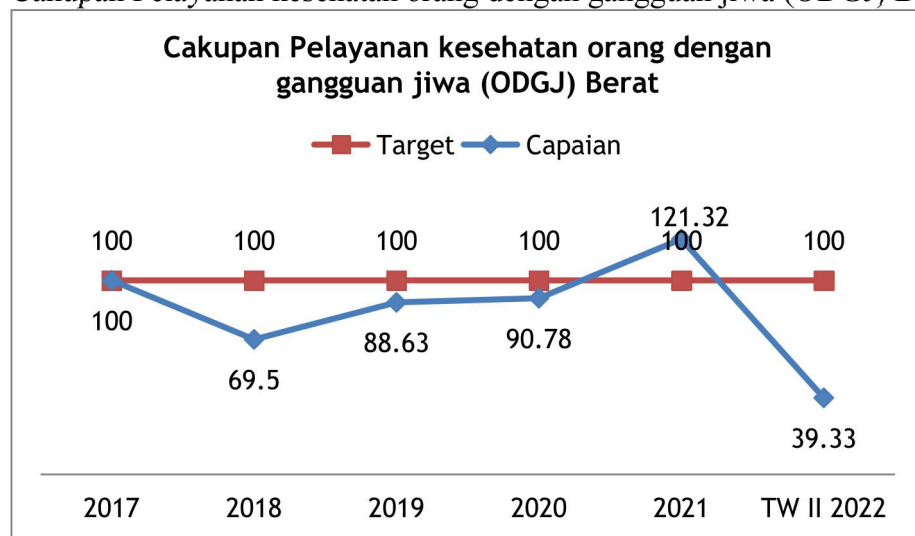


Analisis :

Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan bayi 0 -28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang dari target SPM kesehatan bayi baru lahir adalah 100% dimana dari tahun ke tahun telah tercapai di kisaran 98 % dan belum dapat mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya kematian bayi di rentang usia 0 -28 hari. Sebagai upaya untuk mencapai target pelayanan bayi baru lahir adalah melaksanakan pelatihan KN MTBM dengan KF dan Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR.

Sampai dengan bulan April 2022 capaian Pelayanan Bayi baru lahir adalah sebesar 38.07%, diharapkan di akhir tahun target dapat tercapai. Dari data yang ada bahwa pada tahun 2017 capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 99.94 % , di tahun 2018 adalah 98.2%, di tahun 2019 adalah 98.7%, di tahun 2020 adalah 99.22% dan di tahun 2021 mencapai 99.27%.

41. Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat



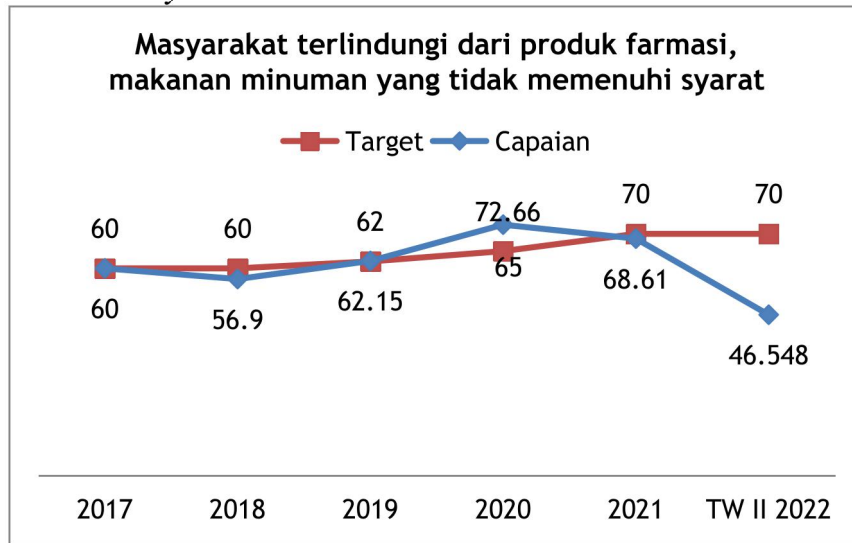
Analisis :

Capaian cakupan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat fluktuatif dari tahun ke tahun, namun terlihat ada kecenderungan peningkatan cakupan. Tahun 2018 terjadi penurunan cakupan menjadi 69,5%, namun tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang bermakna hingga memenuhi target pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat telah mencapai 39,33%, dan diharapkan akhir tahun 2022 bisa memenuhi target yang ditetapkan 100%.

Permasalahan dan solusi yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data Kabupaten Cilacap mempunyai 269 desa dan 15 kelurahan namun jumlah desa/kelurahan yang terbentuk DSSJ (Desa Siaga Sehat Jiwa) ada 22 desa atau sekitar 7,75 %. Petugas mengamati bahwa ada beberapa kemungkinan penyebab diatas :
  - a. Belum mengenal program kesehatan jiwa terutama Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) di pemerintah desa setempat
  - b. Kurangnya informasi tentang DSSJ
  - c. Bukan merupakan program prioritas desa
2. Kebijakan pemerintah  
DSSJ belum menjadi program pemerintah secara nasional maupun daerah sehingga dukungan kebijakan dan dana belum maksimal sehingga perlu penguatan kembali konsep pengembangan tujuan dan manfaat yang diterima
3. Penguatan lintas program dan sektor  
Program dapat berjalan maksimal kalau ditopang program lain, kesehatan jiwa akan lebih baik kalau ada sektor lain yang berkontribusi seperti pendidikan, keamanan lingkungan  
Terkait dengan penanganan pasung yaitu bentuk pembatasan fisik pada ODGJ. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kesehatan melakukan pelarangan dan penanganan serta pencegahan pasung karena melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa alasan keluarga melakukan pemasangan ulang:
  1. Bosan merawat
  2. Tidak tahu melakukan perawatan dan pengobatan
  3. Biaya berobat
  4. Transport
  5. Jarak yang jauh
  6. Pasien tidak sembuh2
  7. Kondisi yang mengancam jiwa kalau mengamuk lahi
  8. Truma
  9. Tidak ada dukungan sosial (keluarga, masyarakat atau pemerintah setempat)Langkah-langkah dinas kesehatan :
  1. Sosialisasi Jateng bebas pasung
  2. Mendekatkan akses obat dan pelayanan
  3. Pembentukan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat)
  4. Pembentukan DSSJ (Desa Siaga Sehat Jiwa)
  5. Pembentukan kader keswa

42. Masyarakat terlindungi dari produk farmasi, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat

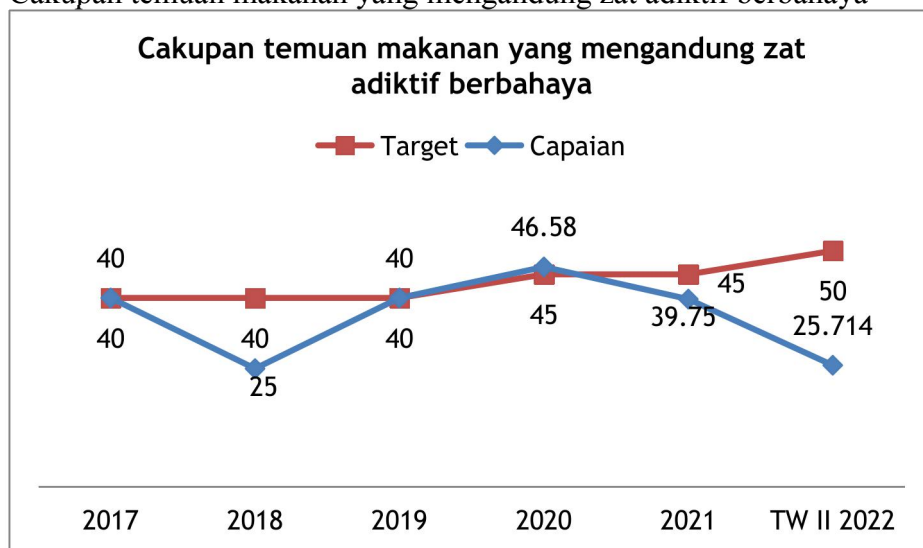


Analisis :

Pada tahun 2017 realisasi capaian 60% sesuai target (60%), tahun 2018 realisasi capaian 56,9%, belum sesuai target (60%), tahun 2019 realisasi capaian 62,15%, melebihi target (62%), tahun 2020 realisasi capaian 65% di bawah target (72%) dan tahun 2021 realisasi capaian 68,61% belum sesuai target (70%). Pada tahun 2022 realisasi capaian sampai dengan semester I adalah 46,55% dan target 70% pada semester 2 dipastikan akan bisa tercapai.

Menurunnya realisasi pada tahun 2018 dan tahun 2021 disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat, serta masih adanya pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) yang belum menerapkan persyaratan keamanan pangan, terutama dari segi higiene sanitasi. Selain itu pandemic Covid-19 juga mempengaruhi penurunan realisasi capaian di tahun 2021.

43. Cakupan temuan makanan yang mengandung zat adiktif berbahaya



Analisis :

Cakupan temuan makanan yang mengandung zat adiktif berbahaya sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik turun. Pada tahun 2017 angka cakupan ini sebesar 40% menurun menjadi 25% pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 46,58% pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 39,75% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi capaian sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 25,71%. Indikator ini memberikan gambaran besaran tingkat perlindungan masyarakat dari konsumsi makanan yang mengandung zat adiktif berbahaya.

Menurunnya realisasi pada tahun 2018 dan tahun 2021 disebabkan karena masih kurangnya pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang menguji produk pangannya ke laboratotium untuk mengetahui kandungan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau bahan lain yang tidak memenuhi syarat dan berbahaya. Selain itu pandemic Covid-19 juga mempengaruhi penurunan realisasi capaian di tahun 2021.

44. Angka penemuan kasus kusta baru yang ditatalaksana sesuai standar

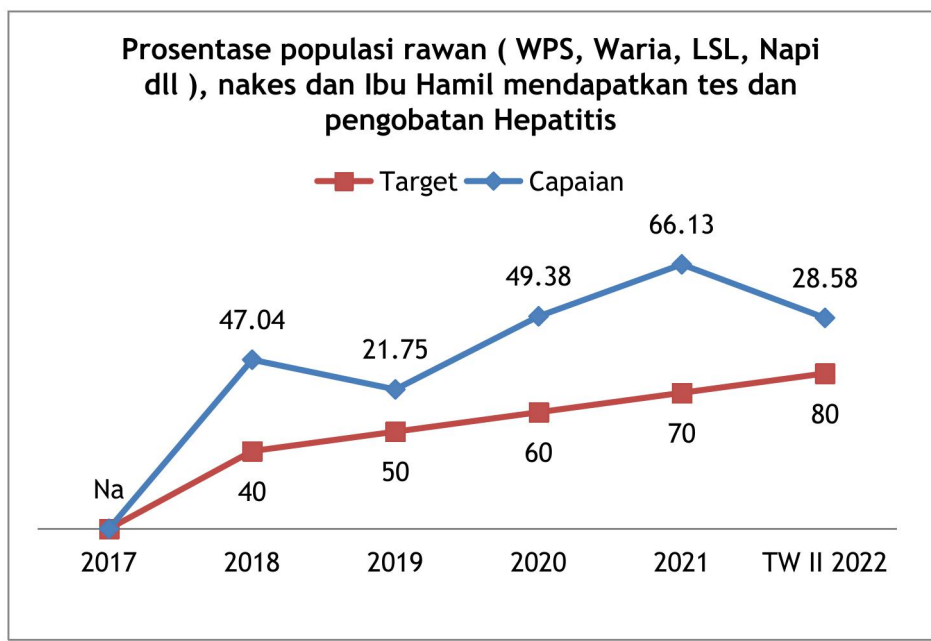


Analisis :

Penemuan kasus kusta sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka penemuan kasus kusta baru tahun 2017 sebesar 38 kasus meningkat menjadi 46 kasus pada tahun 2018 dan seterusnya menurun menjadi 20 kasus pada tahun 2021. Penurunan angka cakupan ini disebabkan semakin sulitnya menemukan kasus kusta baru di masyarakat. Hal positif atas penurunan penemuan kasus mengindikasikan semakin meningkat praktik hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Disisi yang lain peningkatan penemuan kasus semakin ditingkatkan melalui program Rapid Village Survey (RVS), sehingga penemuan aktif kusta di masyarakat, terutama pada daerah-daerah kantong-kantong kusta terus digalakan. Upaya ini akan terus digalakan terutama menysasar pada kelompok anak sekolah, melalui skrining kulit pada pelaksanaan penjarangan kesehatan anak sekolah.

45. Prosentase populasi rawan (WPS, Waria, LSL, Napi dll), nakes dan Ibu Hamil mendapatkan tes dan pengobatan Hepatitis



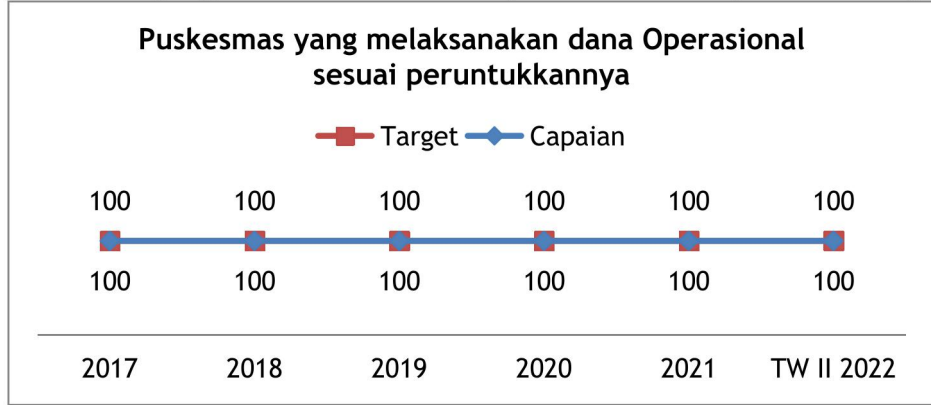


**Analisis :**

Prosentase populasi rawan, tenaga kesehatan, dan ibu hamil mendapatkan tes dan pengobatan hepatitis di Kabupaten Cilacap menunjukkan kenaikan cakupan secara bermakna dimana angka ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Prosentase populasi rawan, nakes dan ibu hamil mendapatkan tes dan pengobatan hepatitis tahun 2018 sebesar 47,04% meningkat menjadi 66,13% pada tahun 2021. Indikator ini menggambarkan besaran populasi beresiko yaitu Wanita Pekerja Seksual, waria, Laki-laki Suka Laki-laki, narapidana, tenaga kesehatan, dan ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan skrining sekaligus mendapatkan pengobatan hepatitis.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ini yaitu melalui skrining penyakit hepatitis untuk populasi rawan secara terus menerus, terutama pada ibu hamil dan populasi rawan lainnya, dan berbarengan dengan skrining tiga eliminasi. Komitmen juga semakin tergalang pada stakeholder dan elemen masyarakat yang didukung dengan Perda tentang penanganan HIV, termasuk koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan Lembaga Masyarakat. Hal lain yang telah dilakukan yaitu program VCT mobile yang sangat efektif bagi pemeriksaan dan pengobatan terutama pada wilayah yang sulit mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

**46. Puskesmas yang melaksanakan dana Operasional sesuai peruntukkannya**



Analisis :

Indikator puskesmas yang melaksanakan dana operasional sesuai peruntukannya telah memenuhi target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini memberikan gambaran bahwa anggaran dari berbagai sumber yang ada pada puskesmas di Kabupaten Cilacap, telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan layanan pokok dan prioritas.

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

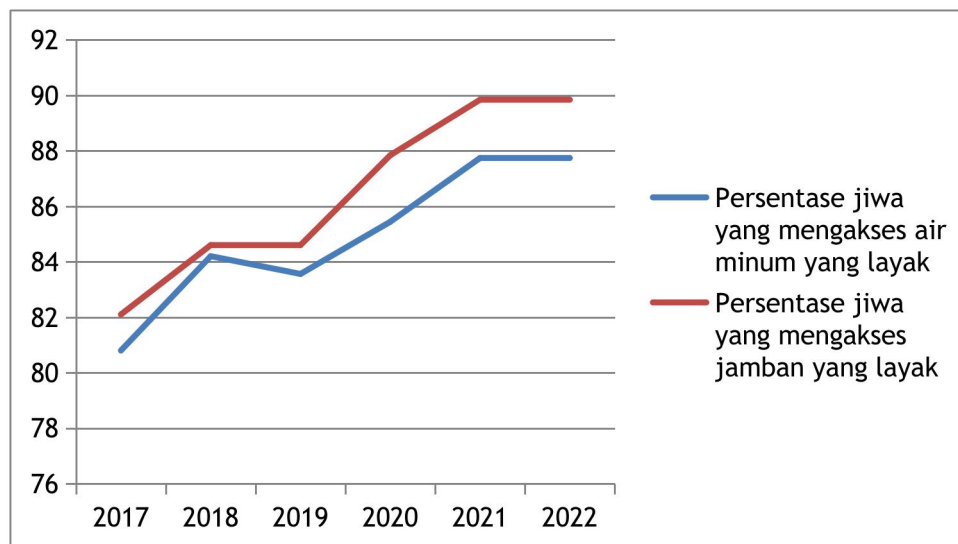
Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu : Disperkimta Kabupaten Cilacap, Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, dan Dinas PUPR Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Indikator Program pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Disperkimta Kabupaten Cilacap

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi .d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
	<b>Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase jiwa yang mengakses air minum yang layak	%	89.20	87.74	89.20	87.74	98.36	98.36
2	Persentase jiwa yang mengakses jamban yang layak	%	94.60	89.84	94.60	89.84	94.97	94.97

Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang salah satu indikator keberhasilannya ditunjukkan oleh 2 indikator yang tingkat capaiannya sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah Sangat Tinggi. Indikator tersebut yaitu Persentase jiwa yang mengakses air minum yang layak dan Persentase jiwa yang mengakses jamban yang layak. Diharapkan pada akhir tahun 2022, target RPJMD akan tercapai 100%. Dengan melihat grafik berikut pencapaian 2 indikator ini sudah sangat baik.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jiwa yang mengakses air minum yang layak	80,8	84,2	83,56	85,44	87,74	87,74
Persentase jiwa yang mengakses jamban yang layak	82,1	84,6	84,6	87,84	89,84	89,84



Cakupan pelayanan akses air minum yang layak mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Presentase jiwa yang mengakses air minum yang layak pada tahun 2017 sebesar 80,80 persen menjadi 87,74 persen pada tahun 2021 dan akan terus naik pada tahun 2022.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja air minum di Kabupaten Cilacap pada umumnya terus mengalami kenaikan dan sejalan dengan program Universal Akses 100 - 0 - 100 dan Tujuan ke-6 SDGs yaitu: Menjamin Ketersediaan Dan Pengelolaan Air Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang. Dalam rangka menunjang SPM Pemenuhan Air minum dan Air Limbah, maka capaian kinerja harus terus ditingkatkan sehingga mencapai 100 persen.

Persentase jiwa yang mengakses jamban yang layak juga menunjukkan peningkatan dari 82,10 persen pada tahun 2017 menjadi 89,84 persen pada tahun 2021 dan akan terus naik pada tahun 2022. Sebagaimana capaian air minum, capaian kinerja air limbah di Kabupaten Cilacap pada umumnya terus mengalami kenaikan dan sejalan dengan program Universal Akses 100 - 0 - 100 dan Tujuan ke-6 SDGs yaitu : Menjamin Ketersediaan Dan Pengelolaan Air Serta Sanitasi Yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang. Dalam rangka menunjang SPM Pemenuhan Air minum dan Air Limbah, maka capaian kinerja harus terus ditingkatkan sehingga mencapai 100 persen. Ruang lingkup akses layanan sanitasi dalam hal ini merupakan pemenuhan jiwa yang mengakses jamban yang layak.

#### **b. Dinas PUPR Kabupaten Cilacap**

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	%	67	67,24	67	67,24	100,35	100,35
2	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	75	90	75	90	120	120
3	Persentase ruang publik perkotaan	%	5	5	5	5	100	100

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
	yang berubah peruntukannya							
4	Persentase bangunan pemerintah/publik dalam kondisi baik	%	65	60	65	60	92,3	92,3
5	Persentase tenaga terampil terdidik dan terbina	%	20,43	13,97	20,43	13,97	68,37	68,37

#### c. Dinas PSDA Kabupaten Cilacap

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	85,5	86,3	85,5	86,37	101,02	101,02

#### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

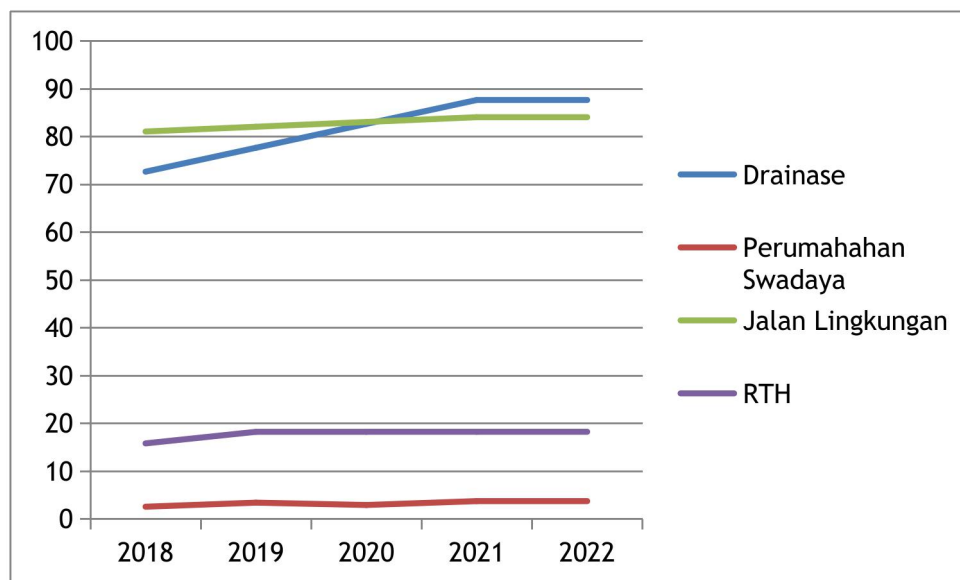
Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Disperkimta Kabupaten Cilacap. Adapun Capaian Indikator Program pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
	<b>Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							
1	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	bulan	72	60	72	66	91.67	91.67
2	Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam	%	92.60	87.60	92.60	87.60	94.60	94.60
3	Persentase fasilitas umum terbangun penerangan	%	15.50	8.80	15.50	8.80	56.77	56.77
4	Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi	%	3.20	3.66	3.20	3.67	114.69	114.69
5	Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi	%	3.20	3.66	3.20	3.67	114.69	114.69

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
6	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	85	84	85	84	98.82	98.82
7	Persentase ruang terbuka hijau		21	18.18	21	18.18	86.57	86.57

Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 6 (enam) indikator antara lain : tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan, persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam, persentase fasilitas umum terbangun penerangan, persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi, persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik, dan persentase ruang terbuka hijau. Diharapkan pada akhir tahun 2022, target RPJMD dari ke 6 (enam) indikator tersebut akan tercapai 100%. Progres capaian masing-masing indikator mulai tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam	72,6	77,6	82,6	87,6	87,6
Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi	2,5	3,35	2,86	3,67	3,67
Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	81	82	83	84	84
Persentase ruang terbuka hijau	15,75	18,17	18,18	18,18	18,18





Penyerahan Bantuan Rumah Swadaya bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

## 5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu : Satpol PP Kabupaten Cilacap, BPBD Kabupaten Cilacap, dan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Indikator Program pada ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Satpol PP Kabupaten Cilacap

#### 1) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1.	Rasio Linmas dengan per 10.000 penduduk	Rasio	1	0,898	1	0,898	89,8%	89,8%
2.	Cakupan pengamanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
3.	Presentasi patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan patroli petugas satpol PP	Kali	3	3	3	3	3	100

Capaian Indikator Program pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk indikator program Rasio Linmas per 10.000 penduduk terdapat kesalahan dalam penghitungan target akhir RPJMD yang hanya 1 orang linmas per 10.000, dikarenakan rasio linmas Kabupaten Cilacap per 10.000 penduduk pada saat sekarang sebanyak 45 orang lebih. Perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas se-Kabupaten Cilacap}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap}} \times 10.000 = \frac{8.980}{1.963.824} \times 10.000 = 45,72$$

## 2) Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1.	Tingkat Respon Time Penanganan Kebakaran	Menit	15	8,2	15	8,9	168,53%	168,53

Capaian Indikator Program pada Sub Urusan Kebakaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat response time penanganan kebakaran yang tertangani rata-rata lebih cepat dari target waktu minimal yaitu 15 menit. Namun demikian masih terdapat kejadian kebakaran yang tidak dapat tertangani dikarenakan berada di luar jangkauan wilayah manajemen kebakaran (WMK), mengingat lokasinya jauh dari Pos Pemadam kebakaran terdekat.



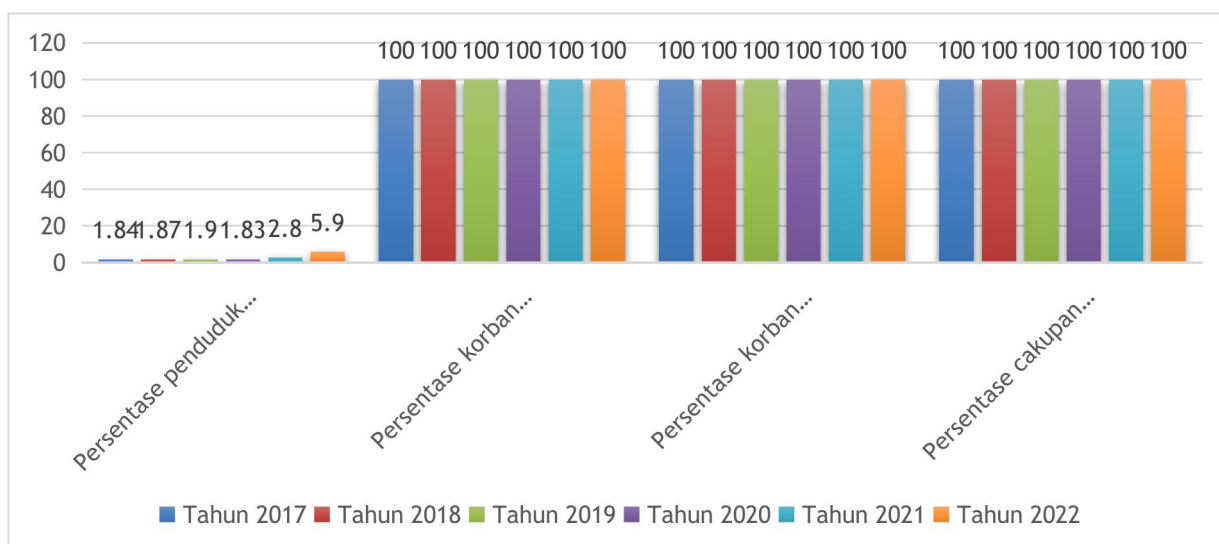
Peringatan HUT Damkar ke-103 Tahun 2022

## b. BPBD Kabupaten Cilacap

### 1) Sub Urusan Bencana

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d.TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	1,99	2,8	1,99	5,9	300	300

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	100	100	100	100	100	100



Penjelasan :

1. Pada Indikator program “Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana” tertulis pada tahun 2017 capaian sebesar 1,84% dari yang ditargetkan sebesar 1,84%. Total jumlah penduduk yang tersosialisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 1.001.583 penduduk dari total penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2017 sebesar 1.842.913. sedangkan pada tahun 2018 ada penambahan capaian program sebesar 0.03% sehingga menjadi 1,87 %, pada tahun 2019 juga mengalami penambahan capaian sebesar 0.03% sehingga menjadi 1,90%. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.83% dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan untuk menunjang program mengalami refocusing, dan kegiatan yang seharusnya dilakukan melalui tatap muka harus melalui zoom meeting. Pada tahun 2021 dengan seiringnya kasus covid-19 yang



mengalami penurunan BPBD Kabupaten Cilacap memulai melakukan sosialisasi dengan tetap melaksanakan protokol Kesehatan dan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu 2,8%. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II kegiatan-kegiatan yang mendukung program sudah selesai dilaksanakan, dan akan terus bertambah hingga akhir tahun. Penambahan yang sangat tinggi dikarenakan antusias para stakeholder terkait dan dunia usaha ingin mengetahui tentang kesiapsiagaan bencana.

2. Pada indikator program “persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat” pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 capaiannya mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh korban bencana selama masa tanggap darurat diberikan bantuan oleh BPBD Kabupaten Cilacap diantaranya adalah pemberian bantuan air bersih, pemberian logistik non permakanan, pelayanan pusdalops PB.
3. Pada indikator program “Persentase korban bencana yang evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap” pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 capaiannya 100% kegiatan kegiatan yang mendukung capaian program adalah pengadaan alat pelindung diri (APD) kebencanaan, pengadaan sarpras kebencanaan, dan pelaksanaan simulasi penanganan darurat.
4. Pada indikator program yang terakhir yaitu “Persentase cakupan daerah yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi” dengan capaian 100% dari tahun 2017 sampai dengan 2022, kegiatan yang mendukung program tersebut diantaranya adalah pembangunan turap/talud penahan tanah longsor, pengadaan Bronjong pabrikasi, pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR), Pelatihan DaLA (*Damage and Loss Assessment*) dan JituPasma (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana).



Pemberikan bantuan kepada korban terdampak banjir di Desa Bojong, Desa Kalijeruk dan Desa Cilibang

**c. Bakesbangpol Kabupaten Cilacap**

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	27	20	7	5	71,42	92,59
2	Tersedianya Administrasi Keuangan Setiap Bulan	Bulan	72	60	12	6	50	91,67
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	72	60	12	6	50	91,67
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50	100
5	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Bela Negara	%	0,55	0,5	0,55	0,084	15,4	92,18
6	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu	%	65	71	-	71	109	109
7	Jumlah Kasus Kriminalitas (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya)	Kasus	0	0	0	0	100	100
8	Prosentase Terbentuknya Kapa/Kama Narkoba (Kelompok Pelajar Anti Narkoba/ Kelompok Mahasiswa AntiNarkoba) Tingkat Kecamatan	%	100	80	100	21,12	21,12	84,2



Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2020

## 6. Bidang Sosial

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Adapun Capaian Indikator Program pada Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

No	Indikator Program	Sat	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase TKSK, PSM, orsos, LKS, dan kelembagaan lainnya yang dibina	%	100	100	100	50	50,00	50,00
2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100,00	100,00
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE	%	2,23	1,59	2,23	1,59	71,30	71,30
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	45,38	63,45	45,38	64,45	142,02	142,02
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia	%	3,63	3,43	3,63	4,19	115,43	115,43

No	Indikator Program	Sat	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
	tidak potensial yang menerima bantuan sosial							
6	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan	%	68,06	57,78	68,06	59,89	88,00	88,00
7	Persentase anak telantar yang dibina	%	1,01	1,06	1,01	1,12	110,89	110,89
8	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	0,33	0,39	0,33	0,40	121,21	121,21
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	%	100	100	100	50	50,00	50,00
10	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	50	50,00	50,00
11	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	%	100	100	100	50	50,00	50,00
12	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	%	100	100	100	50	50,00	50,00
13	Terpenuhinya sarpras kantor sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50,00	50,00

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap melaksanakan 5 (lima) program kerja dengan indikator program sebanyak 13 (tiga belas) indikator. Program-program tersebut, adalah:

#### 1) Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yakni persentase TKSK, PSM, orsos, LKS, dan kelembagaan lainnya yang dibina; persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; serta persentase PMKS yg menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, 1 (satu) indikator sudah tercapai 100% yakni persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Persentase TKSK, PSM, orsos, LKS, dan kelembagaan lainnya yang dibina sudah terlaksana 50% sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan diperkirakan akan tercapai 100% pada triwulan III.

Sementara itu, persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE baru terealisasi 1,59% dari target

2,23% (tercapai 71,30%) pada tahun 2022. Hal ini disebabkan anggaran untuk KUBE berasal dari APBN dan anggaran tersebut dialihkan guna pemberian bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Namun, dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi, indikator program ini diperkirakan akan tercapai pada tahun 2022.

## 2) Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial; serta persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, terdapat 2 (dua) indikator program yang sudah tercapai melampaui target, yakni persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terealisasi 64,45% dari target 45,38% (tercapai 142,02%) dan persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial yang terealisasi 4,19% dari target 3,63% (tercapai 115,43%).

Sementara itu, persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sudah terealisasi 59,89% dari target 68,06% (tercapai 88,00%) dan diperkirakan akan tercapai pada triwulan III tahun 2022.

## 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase anak telantar yang dibina dan persentase PMKS yang direhabilitasi. Kedua indikator ini sudah tercapai melampaui target pada triwulan II tahun 2022. Persentase anak telantar yang dibina terealisasi 1,12% dari target 1,01% (tercapai 110,89%); sedangkan persentase PMKS yang direhabilitasi terealisasi 0,40% dari target 0,33% (tercapai 121,21%).

## 4) Program Penanganan Bencana

Indikator kinerja Program Penanganan Bencana adalah persentase korban bencana yang menerima bantuan. Capaian kinerja Program Penanganan Bencana selalu tercapai 100% setiap tahunnya. Seluruh korban bencana alam maupun sosial telah menerima bantuan permakanan pada saat dan setelah terjadi bencana alam/sosial.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, capaian kinerja baru 50% karena adanya perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga memerlukan proses yang memakan waktu. Selain itu, terdapat perubahan harga kebutuhan pokok yang akan diserahkan kepada masyarakat, yakni minyak goreng, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga.

## 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yakni terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah; tersedianya administrasi keuangan setiap bulan; tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan; dan terpenuhinya sarpras kantor sesuai kebutuhan. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, keempat indikator tersebut sudah tercapai 50% dan akan tercapai 100% pada akhir tahun 2022.



Penyerahan Bantuan Beras PPKM untuk PKH

## 7. Bidang Tenaga Kerja

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Adapun Capaian Indikator Program pada Bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Cakupan Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	80	45,96	80	74,17	92,71	92,71
2	Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	80	80	80	14,81	18,5	18,5
3	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80	83,8	80	22,89	28,61	28,61
4	Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	98,2	95,58	98,2	95,58	97,33	97,33
5	Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta	%	97	93,32	97	93,32	96,20	96,20

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
	program BPJS Kesehatan							
6	Upah Rill Tenaga UMK	Rp.	2.217.083	2.228.904	2.217.083	2.230.731	100,61	100,61
7	Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100

Keterangan :

- a. Capaian indikator program Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi sampai Triwulan II Tahun 2022 hanya sebesar 14,81% dari target 80% akan tercapai karena kebanyakan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022.
- b. Capaian indikator program Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sampai Triwulan II Tahun 2022 hanya sebesar 22,89% dari target 80% akan tercapai karena kebanyakan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022.



Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan

## 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Cilacap. Adapun Capaian Indikator Program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Rasio Program dan kegiatan responsif gender di SKPD	%	100	83	100	86,8	86,8	86,8
2	Persentase Perempuan yang menjadi calon anggota legislatif	%	22	39,72	22	39,72	180,55	180,55
3	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha	%	47,5	46,49	47,5	46	96,84	96,84
4	Persentase organisasi wanita yang aktif	%	96	94	96	97,14	101,19	101,19
5	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan	%	0,00025	0,0003	0,00025	0,0001	160	40
6	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab,Kecamatan dan Kelurahan)	%	19,37	44,8	19,37	44,8	231,29	231,29



## 9. Urusan Pangan

Pada Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perkebunan. Adapun Capaian Indikator Program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

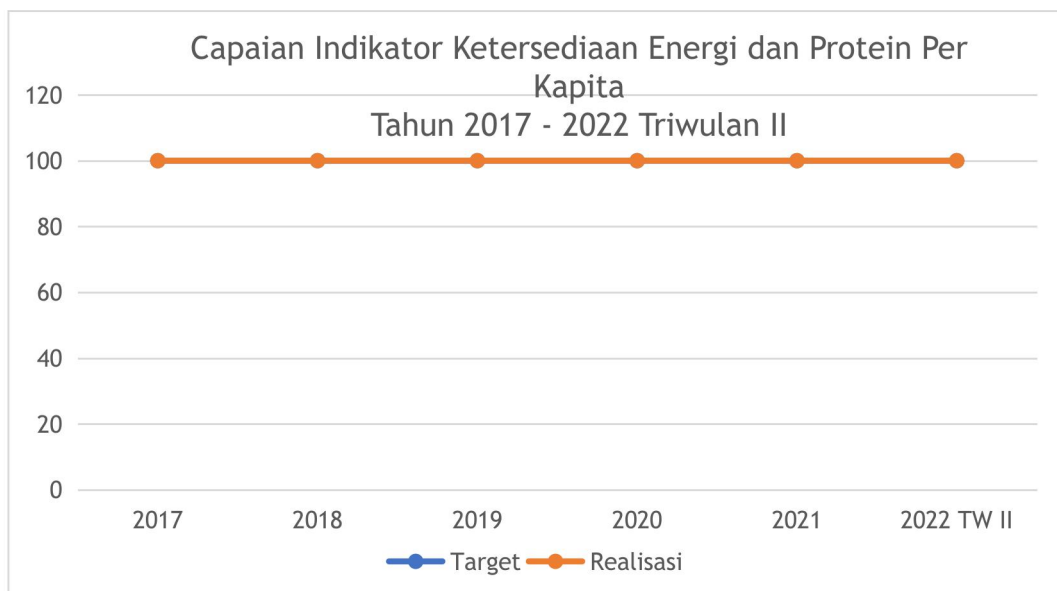
No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1.	Ketersediaan energi dan protein per kapita.	%	100	100	100	100	0	100
2.	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani.	%	95	94	95	32,96	34,69	98,95
3.	Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat	Unit	53	50	53	50	94,34	94,34
4.	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3	85,00	94,3	0	0	90,14
5.	Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya	%	75	35	75	35	156,25	156,25
6.	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Teregistrasi	%	20	180	20	180	900	900
7.	Cakupan Kelompok Tani perkebunan yang dibina.	%	24,36	25,12	7,3	13,87	190	160,05
8.	Persentase kelompok tani yang diikutsertakan dalam promosi hasil perkebunan	%	7,33	2,78	2,33	0	0	57,98
9.	Persentase petani dan kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna.	%	27,33	20,22	9,33	0,65	6,97	73,98
10.	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	243.035,67	184.364,78	61.071,55	31.384,64	51,39	88,77
11.	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50	100
12.	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%	100	100	0	0	0	100
13.	Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/Pendidikan/pelatihan	%	100	100	0	0	0	100

14.	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan.	%	100	100	100	50	50	100
15.	Terpenuhiya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	50	50	100

**a. Analisis Capaian Indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita**

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Tahun 2017 – 2021 dan prakiraan di Tahun 2022 ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Cilacap masih melebihi dari target (100%) artinya ketersediaan energi dan protein tercukupi/tersedia. Sedangkan Tahun 2022 ketersediaan energi dan protein perkapita akan dihitung di akhir Tahun 2022 dengan menunggu data ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari Data Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

Tahun	Capaian Indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022 TW II	100	100

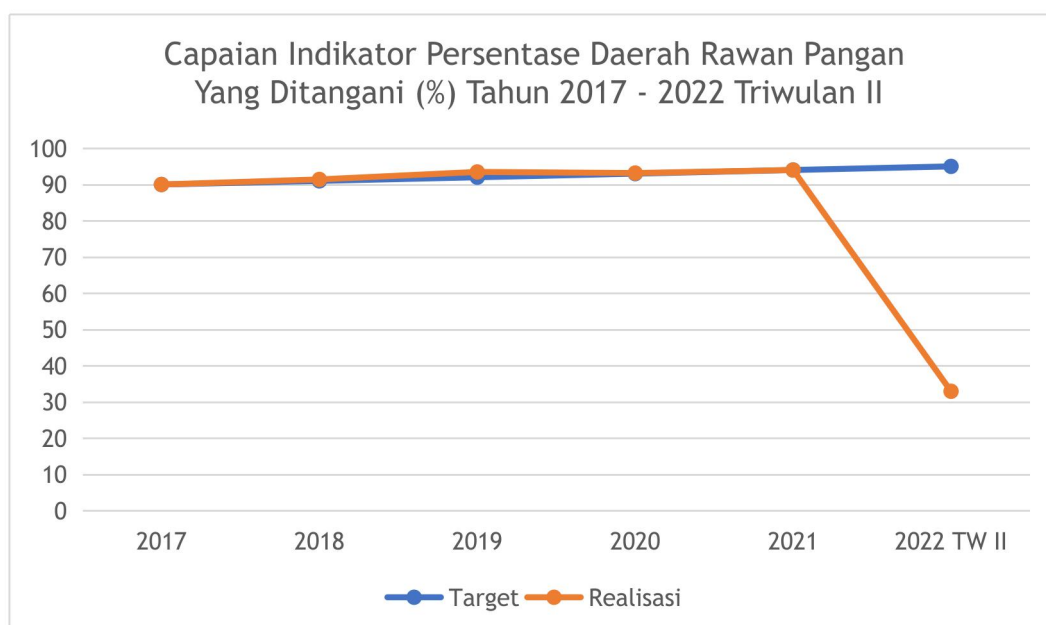


**b. Analisis Capaian Indikator Persentase Daerah Rawan Pangan yang Ditangani**

Indikator Persentase Daerah Rawan Pangan yang ditangani menunjukkan data jumlah permohonan penanganan daerah rawan pangan dibagi dengan jumlah

permohonan rawan pangan yang ditangani dikalikan 100%. Capaian Realisasi indikator Tahun 2017 – 2021 sudah menunjukkan angka yang melebihi dari target. Tahun dari 2017 target 90% terealisasi 90%, Target Tahun 2018 sebesar 91%, realisasi 91,40%. Tahun 2019 target 92% realisasi 93,47%. Tahun 2020 target 93% realisasi 93,16%. Tahun 2021 target 94% dengan realisasi 94%. Sedangkan Tahun 2022 target 95%, realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 32,96%, hal ini karena masih akan ada realisasi di Tahun 2022.

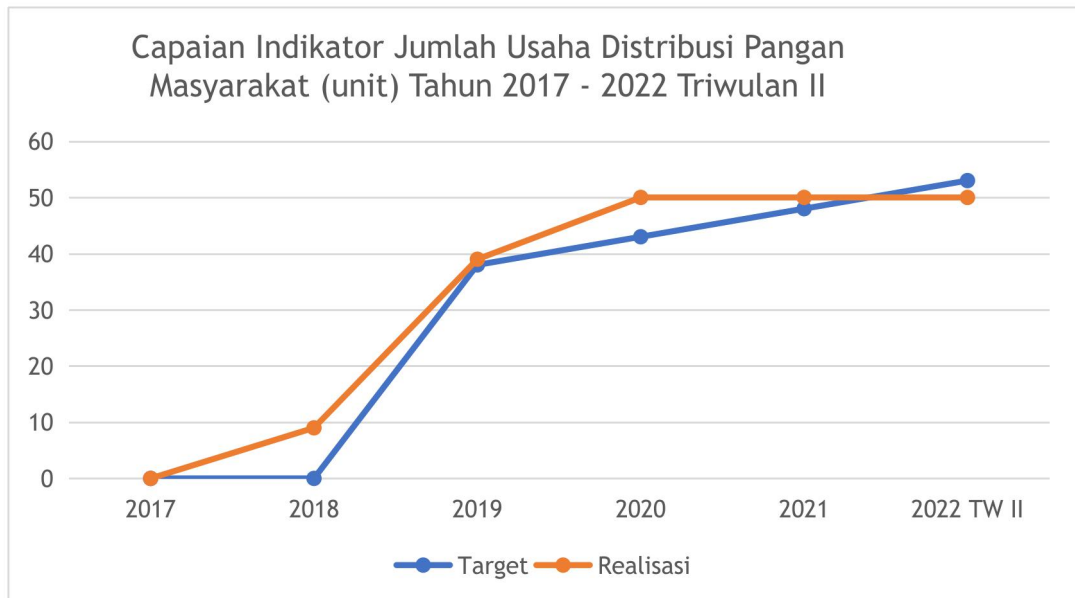
Tahun	Capaian Indikator Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Ditangani (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	90	90
2018	91	91,4
2019	92	93,47
2020	93	93,16
2021	94	94
2022 TW II	95	32,96



### C. Analisis Capaian Indikator Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat

Capaian realisasi Indikator Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat dari Tahun 2017 – 2022 menunjukkan angka sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 dan 2018 tidak ada target karena masih mempergunakan RENSTRA yang lama dari OPD DISHUTBUN dan BP2KP. Realisasi Tahun 2018 ada 9 (Sembilan) unit Lembaga Usaha Distribusi Pangan yang telah terbentuk di Kab. Cilacap. Target Tahun 2019 sebesar 38 unit, realisasi 39 unit. Tahun 2020 dengan target 43 unit, terealisasi 50 unit. Target Tahun 2021 target 48 unit, realisasi 50 unit. Tahun 2022 target 53 unit, realisasi Triwulan II masih sebanyak 50 unit.

Tahun	Capaian Indikator Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (unit) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	0	0
2018	0	9
2019	38	39
2020	43	50
2021	94	94
2022 TW II	95	32,96



Sidak ke Pasar Gede Cilacap guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443H

**d. Analisis Capaian Indikator Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya**

Merupakan Jumlah makanan yang sudah tidak mengandung bahan berbahaya dibagi jumlah makanan yang masih mengandung bahan berbahaya dikalikan 100 persen. Adapun jenis makanan yang disampel sebagai data dasar ada 20 (duapuluh) jenis yang banyak beredar di pasaran yaitu nugget stick ayam, kwetiauw, cimol, mie basah kecil, otak-otak, ikan asin slindri, teri adem, cumi kering, agar merah, bleng, telur gabus, krupuk soto, bolu empurit, klanting angka 8, cantor, kuping gajah, sekuteng, pacar aci, jipang beras, permen tape. Beberapa makanan tersebut berasal dari produsen luar kota cilacap (ciamis, banjar, kutoarjo, ajibarang, wangon, tegal, sukoharjo, gombong) dan beredar di pasar-pasar Kabupaten Cilacap. Jenis bahan berbahaya yang masih dipergunakan dalam proses pembuatan makanan tersebut adalah pengawet Formalin, Boraks, pewarna Rhodamin B.

Tahun 2017 dan 2018 karena masih menggunakan RENSTRA OPD DISHUTBUN dan BP2KP sehingga belum ada target dan realisasi. Sedangkan Tahun 2019 dengan target 90%, realisasi 55% (masih ada 11 jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya). Tahun 2020 target 85%, realisasi 55%. Tahun 2021 target 80%, realisasi 35% (masih ada 7 jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya). Sedangkan Tahun 2022 dengan target 75%, realisasi Triwulan II masih 35%. Angka realisasi dengan semakin menurun angkanya akan semakin baik indikator kinerjanya.

Tahun	Capaian Indikator Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	0	0
2018	0	0
2019	90	55
2020	85	55
2021	80	35
2022 TW II	75	35

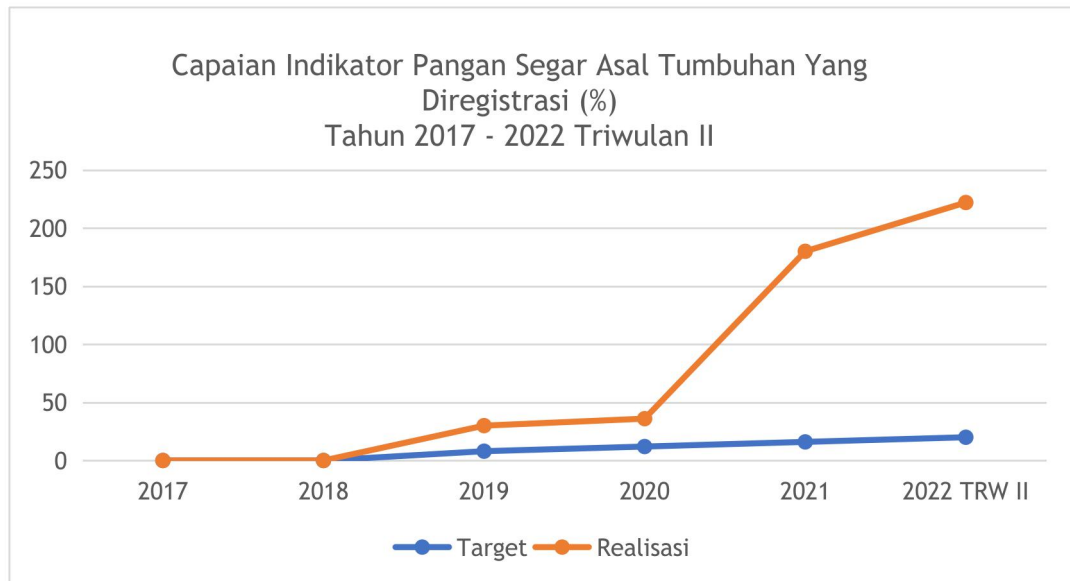


#### e. Analisis Capaian Indikator Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diregistrasi

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan, minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan lainnya. Dalam PSAT terdapat Keamanan PSAT dimana Keamanan PSA adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 53/Permentan/KR.40/12/2018 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Peraturan Bupati Cilacap No. 181 Tahun 2020 tentang Tata Cara pendaftaran PSAT produksi dalam negeri usaha kecil di Kabupaten Cilacap, maka Dinas Pangan dan Perkebunan memiliki payung hukum dalam melakukan registrasi PSAT yang ada di Kabupaten Cilacap.

Tahun 2017 dan 2018 karena masih menggunakan RENSTRA OPD DISHUTBUN dan BP2KP sehingga belum ada target dan realisasi. Tahun 2019 target 8%, realisasi 30% (ada 15 PSAT yang sudah diregistrasi). Tahun 2020 target 12%, realisasi 36% (ada 18 PSAT). Tahun 2021 target 16%, realisasi 180% (ada 90 PSAT). Tahun 2022 Target 20%, realisasi Triwulan II 222% (ada 111 PSAT yang telah diregistrasi). Capaian realisasi indikator yang jauh diatas target karena didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

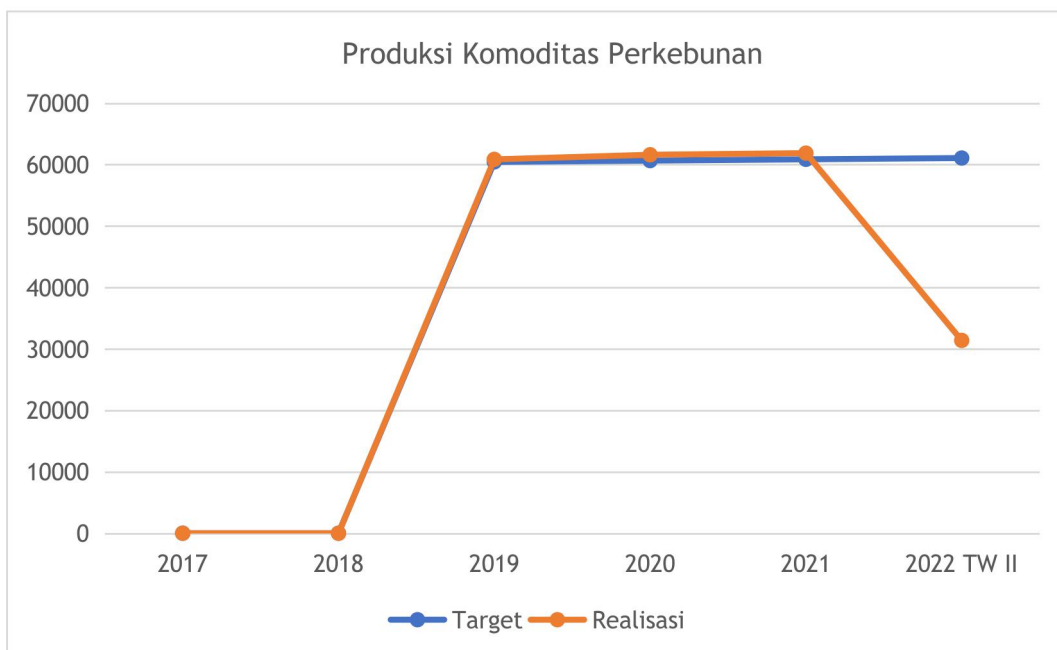
Tahun	Capaian Indikator Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diregistrasi (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	0	0
2018	0	0
2019	8	30
2020	12	36
2021	16	180
2022 TW II	20	222



#### f. Analisis Capaian Indikator Produksi Komoditas Perkebunan

Indikator Produksi Komoditas Perkebunan terdiri dari produksi 8 (delapan) komoditas perkebunan yaitu Kelapa dalam, kelapa deres, cengkeh, pala, kopi, kakao, lada dan karet. Tahun 2017 dan 2018 karena masih menggunakan RENSTRA OPD DISHUTBUN dan BP2KP sehingga belum ada target dan realisasi. Realisasi produksi komoditas perkebunan Tahun 2019 – 2021 sudah memenuhi target dan Tahun 2022 masih akan ditambahkan lagi dengan produksi Semester II. Tahun 2019 target 60.447,01 ton, realisasi 60.855 ton. Tahun 2020 target 60.654,48 ton, realisasi 61.602,63 ton. Tahun 2021 target 60.862,63 ton, realisasi 61.871,25 ton. Tahun 2022 target 61.071,55 ton, realisasi Triwulan II sebesar 31.384,64 ton.

Tahun	Capaian Indikator Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	0	0
2018	0	0
2019	60.447,01	60.855
2020	60.654,48	61.602,63
2021	60.862,63	61.871,25
2022 TW II	61.071,55	31.384,64

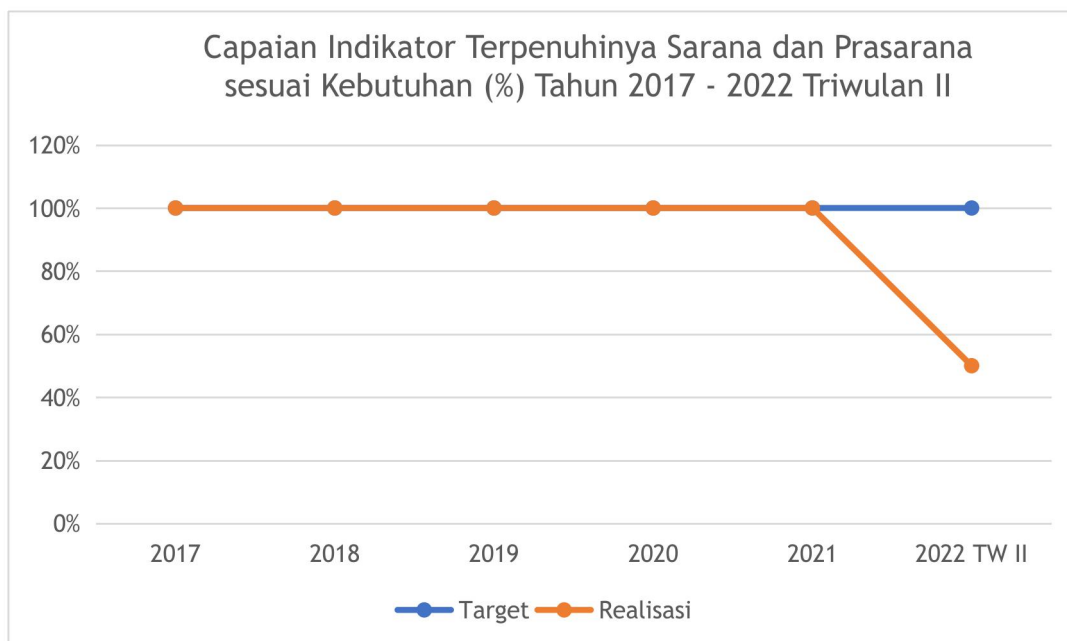


**g. Analisis Capaian Indikator Terpenuhi Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan**

Indikator Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan mencapai angka realisasi sesuai target sebesar 100% dari Tahun 2017-2021 karena merupakan program ex rutin yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor (pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan Gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala dan rehabilitasi Gedung kantor). Tahun 2022 capaian indikator ini masih 50%, karena masih akan dilakukan kegiatan pemeliharaan di Semester II.

Tahun	Capaian Indikator Terpenuhi Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022 TW II	100	50

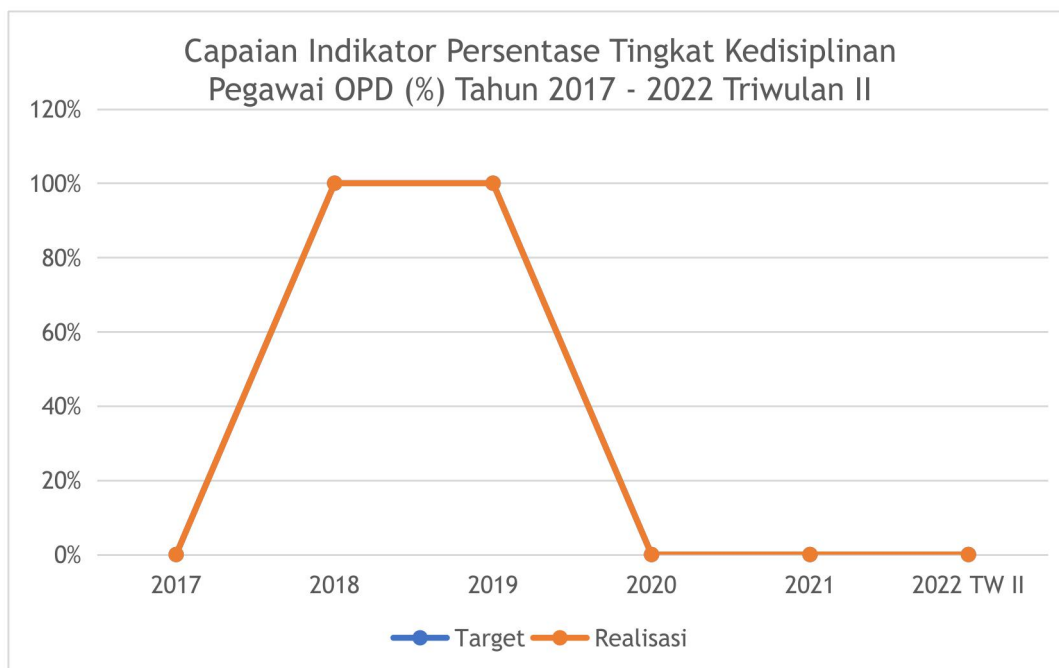




**h. Analisis Capaian Indikator Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD**

Indikator Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD mencapai angka realisasi sesuai target sebesar 100% di Tahun 2018 dan 2019 karena merupakan program ex rutin yang dialokasikan untuk pemenuhan penyediaan pengadaan pakaian seragam pegawai DISPABUN. Pada Tahun 2017 karena masih peralihan dan awal penggabungan dua OPD (DISHUTBUN dan BP2KP), sehingga belum mengalokasikan untuk kegiatan penyediaan pakaian dinas seragam pegawai OPD. Sedangkan di Tahun 2020-2022 tidak ada alokasi kegiatan pada program ini karena adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 sehingga tidak ada capaian kinerja.

Tahun	Capaian Indikator Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai OPD (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	0	0
2018	100	100
2019	100	100
2020	0	0
2021	0	0
2022 TW II	0	0



**i. Analisis Capaian Indikator Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat /Pendidikan/Pelatihan**

Indikator Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan mencapai angka realisasi sesuai target sebesar 100% di Tahun 2020 karena merupakan program ex rutin yang dialokasikan untuk penyediaan biaya pengiriman diklat/Pendidikan/pelatihan pegawai OPD. Pada Tahun 2017 dan 2018 karena masih peralihan dan awal penggabungan dua OPD (DISHUTBUN dan BP2KP), sehingga belum mengalokasikan untuk kegiatan diklat/Pendidikan/pelatihan pegawai OPD. Sedangkan di Tahun 2019, 2021 dan 2022 tidak ada alokasi kegiatan pada program ini karena adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 sehingga tidak ada capaian kinerja.

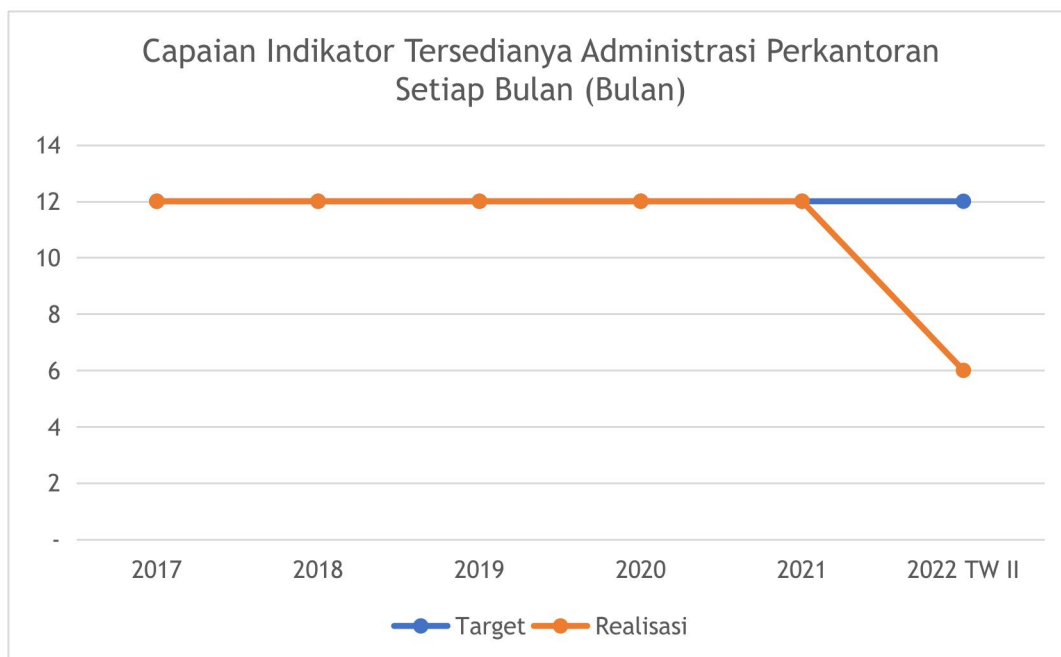
Tahun	Capaian Indikator Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
2020	100	100
2021	0	0
2022 TW II	0	0



**j. Analisis Capaian Indikator Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap Bulan**

Indikator Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap Bulan mencapai angka realisasi sesuai target sebesar 12 Bulan dari Tahun 2017-2021, sedangkan di Tahun 2022 Triwulan II capaian kinerja masih 50% karena masih akan dilaksanakan di Semester II. Capaian indikator program ini dengan didukung oleh kegiatan ex. Rutin yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan makanan dan minuman kantor (logistik kantor).

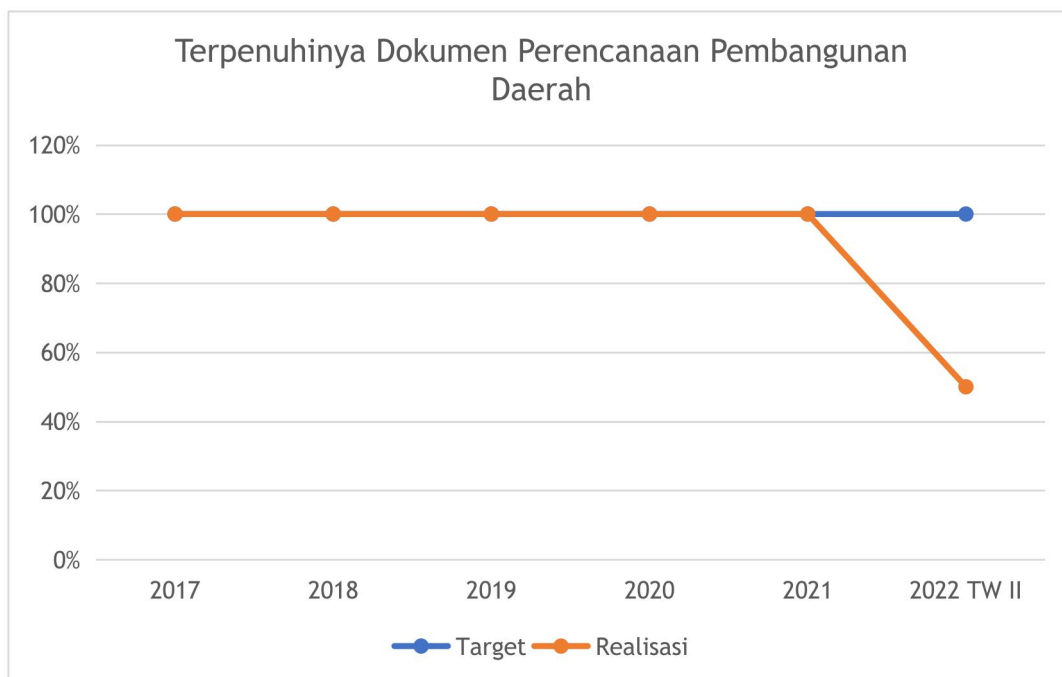
Tahun	Capaian Indikator Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap Bulan (Bulan) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	12	12
2018	12	12
2019	12	12
2020	12	12
2021	12	12
2022 TW II	12	6



**k. Analisis Capaian Indikator Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

Indikator Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai angka realisasi sesuai target sebesar 100% dari Tahun 2017-2021, sedangkan di Tahun 2022 Triwulan II capaian kinerja masih 50% karena masih akan ada yang dilaksanakan di Semester II. Capaian indikator program ini dengan didukung oleh kegiatan ex. Rutin yaitu penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renja, Renstra, RKA/DPA/DPPA) dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kinerja (SAKIP).

Tahun	Capaian Indikator Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%) Tahun 2017 – 2022 Triwulan II	
	Target	Realisasi
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022 TW II	100	50



## 10. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan dengan indikator program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase kasus/permasalahan tanah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

Pelaksanaan Urusan Pertanahan dengan indikator : Persentase kasus/permasalahan tanah yang ditindaklanjuti sudah sangat baik dengan pencapaian 100% pada setiap tahunnya.

## 11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase penanganan sampah	%	62,59	65,05	62,59	61,49	98,24	103,93
2	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	60	48	60	54	90	80

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
4	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
5	Nilai pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	80,19	80,09	80,19	80,09	99,88	99,88
6	Nilai pengukuran indeks kualitas air	Indeks	50,44	49,40	50,44	49,40	97,94	97,94
7	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah	%	9,0	8,38	9,0	8,38	93,11	93,11
8	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	%	12	16,5	12	16,5	137,5	137,5
9	Persentase pengaduan masyarakat / kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase sekolah adiwiyata	%	61,11	64,1	61,11	64,1	104,89	104,89



Kabupaten Cilacap Raih Penghargaan Adipura

## 12. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan indikator program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	95,82	100	95,82	95,82	95,82
2	Rasio penduduk per KTP persatuan penduduk	%	100	99,4	100	99,09	99,09	99,09
3	Persentase fasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
4	Rasio bayi berakta kelahiran	%	75	78,82	75	76,35	101,8	101,8
5	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	60	42,68	60	43,54	72,57	72,57
6	Rasio jumlah perkawinan yang dicatat di catatan sipil	%	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	%	83	88,24	83	91,77	110,57	110,57
8	Cakupan penerbitan akta kematian	%	50	33,99	50	58,26	116,52	116,52
9	Persentase sistem informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100



Peluncuran Paket Three in One Pelayanan Administrasi Kependudukan

### 13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator program dalam RPJMD sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	PKK aktif	%	100	100	100	50	50	50
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	100	100	42	42	42
3	Posyandu aktif	%	100	100	100	45	45	45
4	LPM Berprestasi	%	100	100	100	34	34	34
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	100	100	100	55	55	55
6	Cakupan kelompok BP SPAM yang dibina	%	100	93,13	100	94	94	94
7	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase BUMDES yang terbentuk	%	100	85,25	100	82,25	82,25	82,25
9	Persentase posyantek aktif	%	85	100	85	100	117,65	117,65
10	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	55	55	55
11	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki profil	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes.	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Desa yang melakukan Penataan Aset Desa	%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Desa yang memiliki MoU antar desa	%	100	100	100	100	100	100

Dari 15 indikator Program Dispermades hanya 1 indikator yang belum tercapai yaitu Cakupan Kelompok BPSMAM yang dibina yaitu dari 160 kelompok BPSMAM baru 149 kelompok yang dibina. Yang sudah tercapai semua diantaranya Indikator PKK Aktif sudah tercapai 100% karena jumlah lembaga PKK se Kabupaten Cilacap sebanyak 12.860 sudah aktif semua. Rata-rata jumlah binaan PKK tercapai 100% dari jumlah kelompok PKK binaan sebanyak 38.515. Dari jumlah Posyandu se Kabupaten Cilacap sebanyak 2.192 sudah aktif semua sehingga indikator Posyandu aktif 100% tercapai. Jumlah LPM se Kabupaten Cilacap sebanyak 284 Desa dan Kelurahan berprestasi semua karena sudah menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan telah menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM tercapai 100% dari 269 LPM didesa masing - masing desa sudah membina 1 kelompok. Cakupan Kelompok BPSMAM yang dibina dari 165 kelompok BPSMAM sudah terbina semua sehingga capaian 100%. Persentase Lembaga Keuangan Mikro sudah aktif semua yang ada di desa capaian 100%. Prosentase Bumdes yang terbentuk sudah tercapai 100% karena



269 desa sudah membentuk Bumdes. Prosentase Posyantek Aktif sudah 100% dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap telah memiliki Posyantek dan aktif semua. Kemudian Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat tercapai 100%. Untuk Persentase desa/ kelurahan yang memiliki profil dari 269 desa semua sudah memilik profil tercapai 100%. Indikator Persentase desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes. juga tercapai 100% karena dari 269 desa semua sudah mempunyai dokumen perencanaan. Untuk Persentase Desa yang melakukan Penataan Aset Desa semua desa sebanyak 269 desa telah menata aset di desa mereka. Indikator Persentase Desa yang memiliki MoU antar desa tercapai 100% karena 269 desa sudah membentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

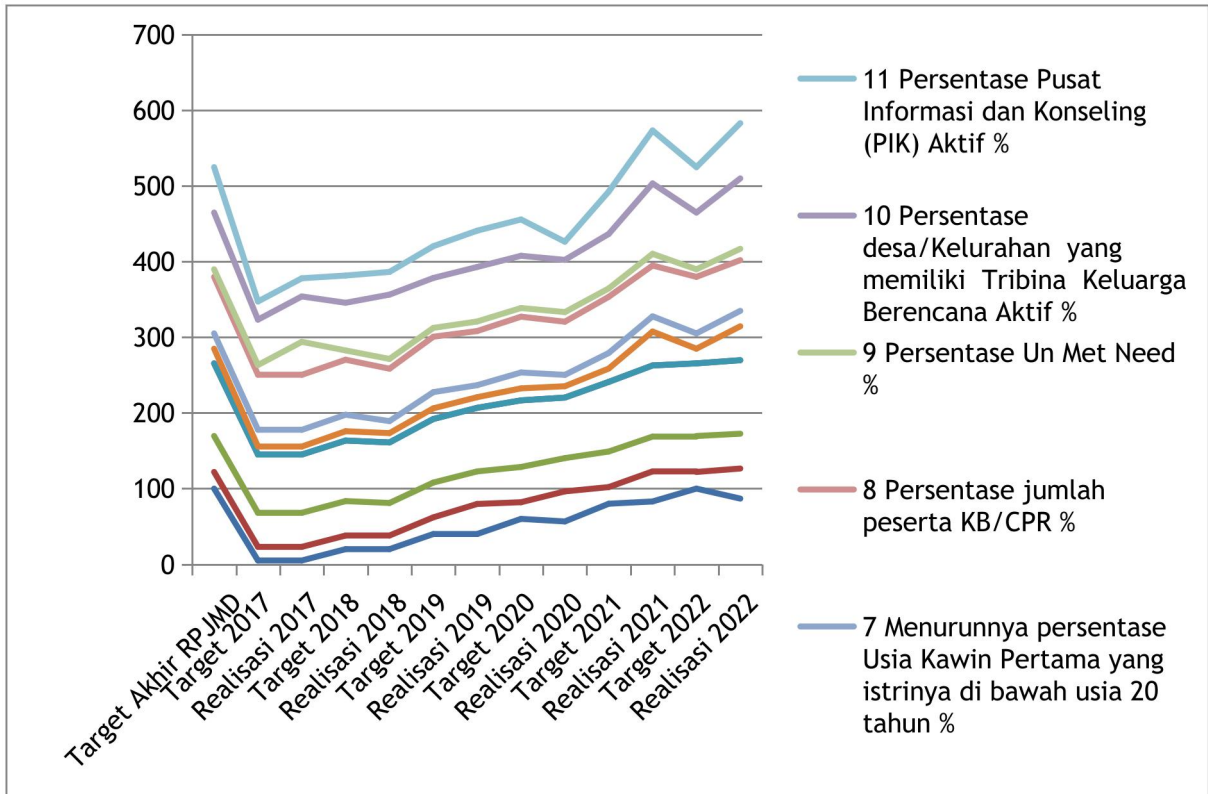


Pemantauan Pelaksanaan Pilkades

#### 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian indikator program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Menurunnya persentase Usia Kawin Pertama yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	20,2	20,14	20,2	19,36	104,16	95,84
2	Persentase jumlah peserta KB/CPR	%	10	15,46	10	15,46	45,40	154,60
3	Persentase Un Met Need	%	74,71	67,13	74,71	67,13	89,85	89,85
4	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana Aktif	%	75	93	75	93	124,00	124,00
5	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Aktif	%	60	75	60	70	116,67	116,67



**Capaian Indikator Program 2017-2018 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



Penghargaan Manggala Karya Kencana atas dedikasi dan komitmennya dalam menyukkseskan Program Bangga Kencana

**15. Urusan Perhubungan**

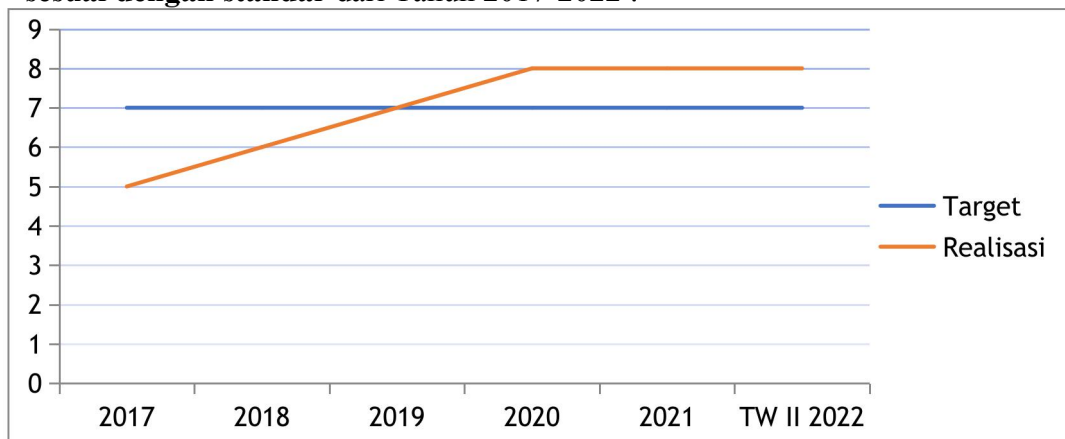
Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebagai perangkat daerah pengampu Urusan Perhubungan, dengan indikator keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar	Unit	7	8	7	8	114,29%	114,29%
2	Jumlah Dermaga yang beroperasi di Kabupaten Cilacap	Unit	15	15	15	15	100,00%	100,00%
3	Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia	%	42	47	42	47	111,90%	111,90%
4	Rasio ijin trayek	%	75	69,51	75	37,80	50,40%	50,40%
5	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan	%	29,68	29,68	29,68	29,68	100,00%	100,00%
6	Jumlah KIR Kendaraan	Kendaraan	13535	12807	13535	6144	45,39%	45,39%
7	Persentase Kendaraan wajib uji yang memenuhi ambang batas emisi	%	99,01	98,28	99,01	97,71	98,69%	98,69%
8	Penurunan jumlah kasus pelanggaran kendaraan wajib uji yang seharusnya laik jalan	Kendaraan	246	251	246	174	70,73%	70,73%
9	Jumlah Balai pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang layak operasi	Unit	2	2	2	2	100,00%	100,00%
10	Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	29	30,30	29	30,30	104,48%	104,48%

### Penjelasan :

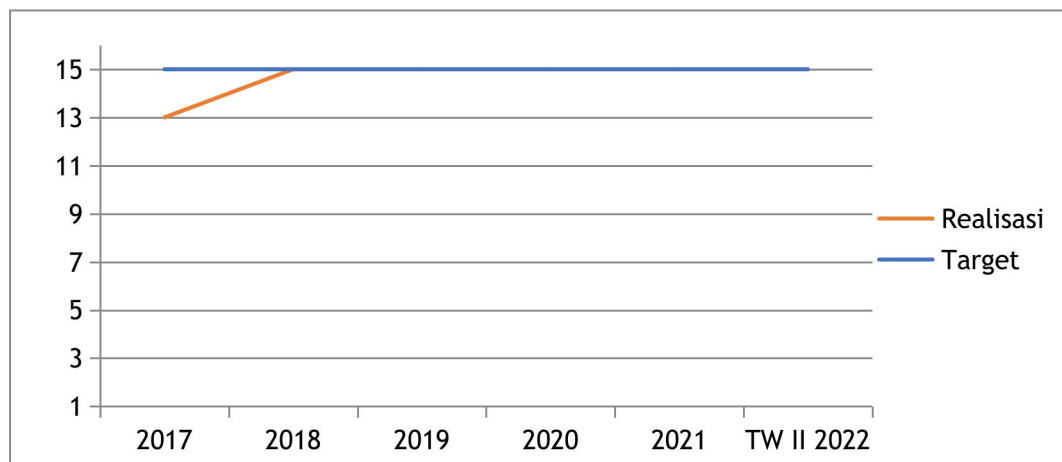
- a. Indikator Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar merupakan indikator program yang didapat dari jumlah unit terminal tipe C yang beroperasi di Kabupaten Cilacap. Target akhir RPJMD adalah 7 unit. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 8 unit, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 114,29%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar** dari Tahun 2017-2022 :



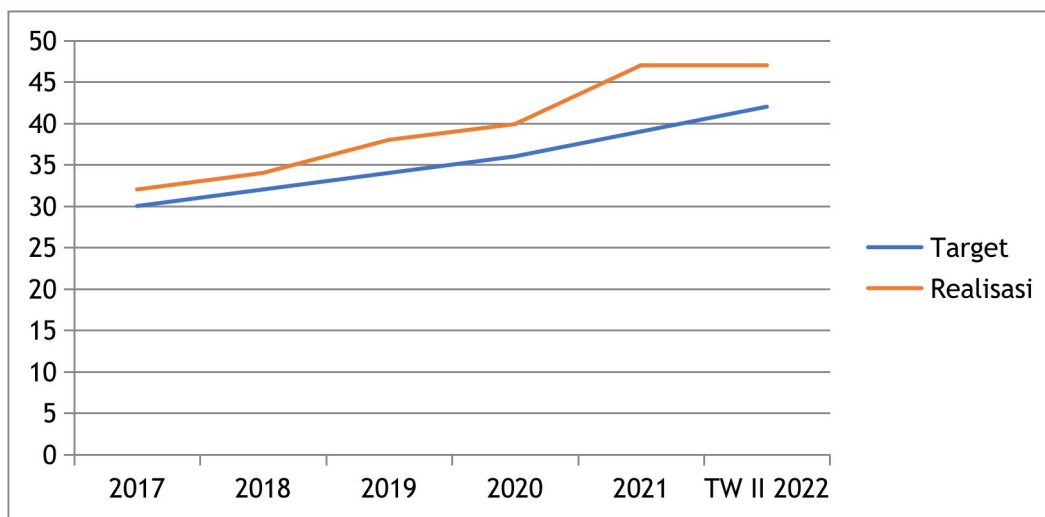
b. Indikator Jumlah Dermaga yang beroperasi di Kabupaten Cilacap merupakan indikator program yang didapat dari jumlah unit dermaga di Kabupaten Cilacap. Target akhir RPJMD adalah 15 unit. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 15 unit, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Jumlah Dermaga yang beroperasi di Kabupaten Cilacap** dari Tahun 2017-2022 :



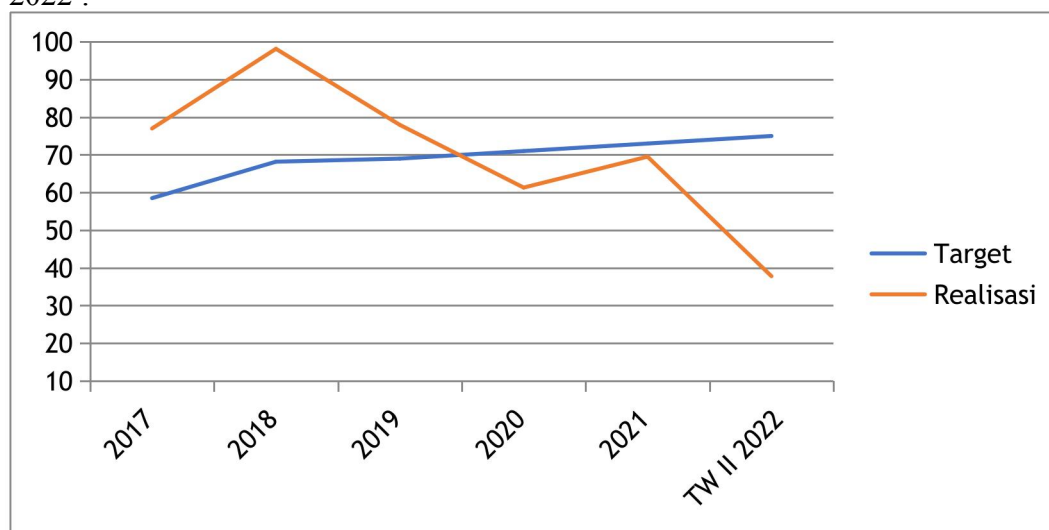
c. Indikator Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia merupakan indikator program yang didapat dari rumus jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan kab/ kota dibagi (:) jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kab/ kota dikali (x) 100%. Target akhir RPJMD adalah 42%. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 47%, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 111,90%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia** dari Tahun 2017-2022 :



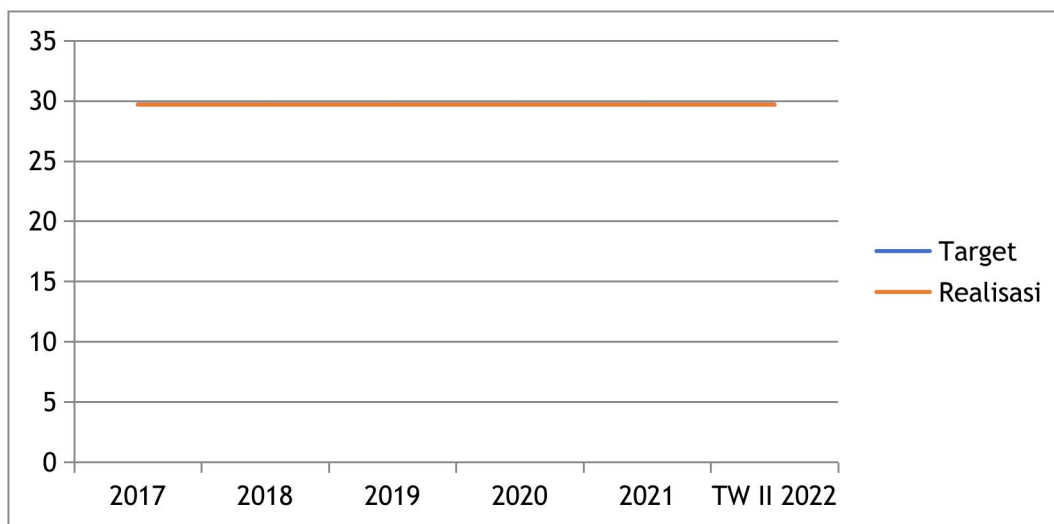
d. Indikator Rasio Ijin Trayek merupakan indikator program yang didapat dari rumus jumlah ijin trayek tahun n dibagi (:) jumlah ijin trayek tahun (n-1) dikali (x) 100%. Target akhir RPJMD adalah 75%. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 37,80%, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 50,40%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD belum tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Rasio Ijin Trayek** dari Tahun 2017-2022 :



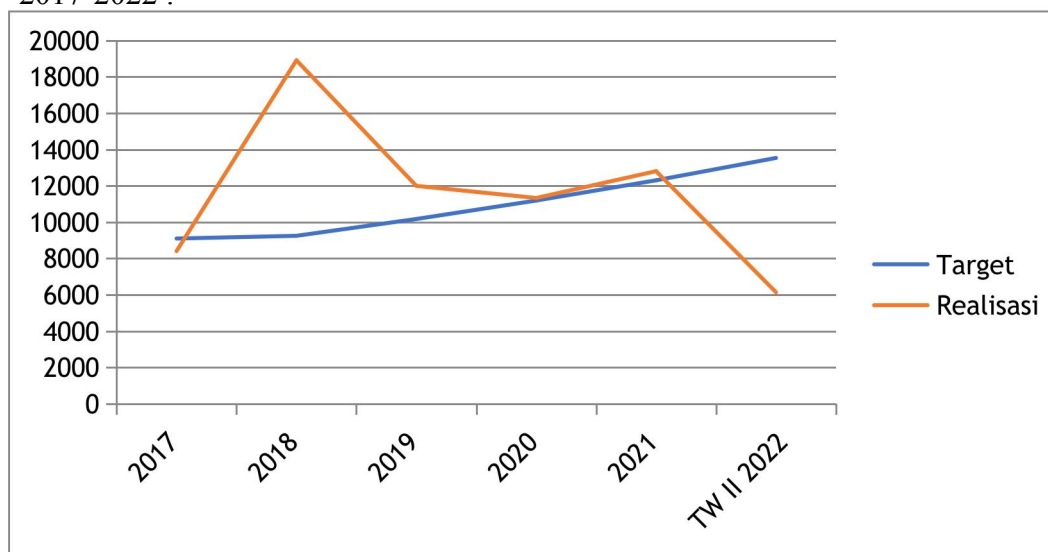
e. Indikator Rasio panjang terhadap jumlah kendaraan merupakan indikator program yang didapat dari rumus panjang jalan yang terlayani angkutan umum dibagi (:) panjang jalan kabupaten dikali (x) 100%. Target akhir RPJMD adalah 29,68%. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 29,68%, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Rasio panjang terhadap jumlah kendaraan** dari Tahun 2017-2022 :



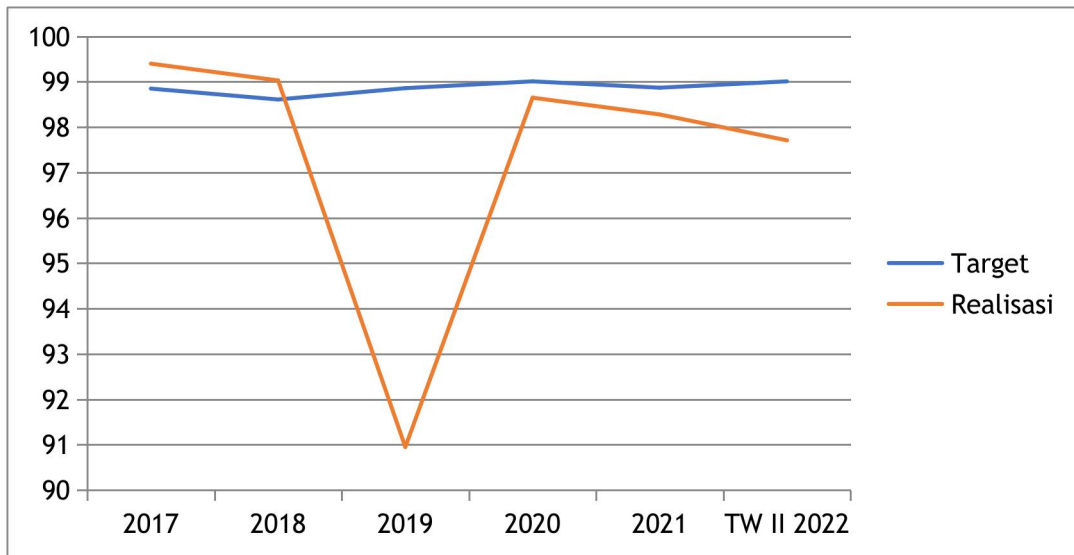
- f. Indikator Jumlah KIR Kendaraan merupakan indikator program yang didapat dari jumlah kendaraan bermotor wajib uji. Target akhir RPJMD adalah 13.535 kendaraan. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 6.144 kendaraan, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 45,39%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD belum tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Jumlah KIR Kendaraan** dari Tahun 2017-2022 :



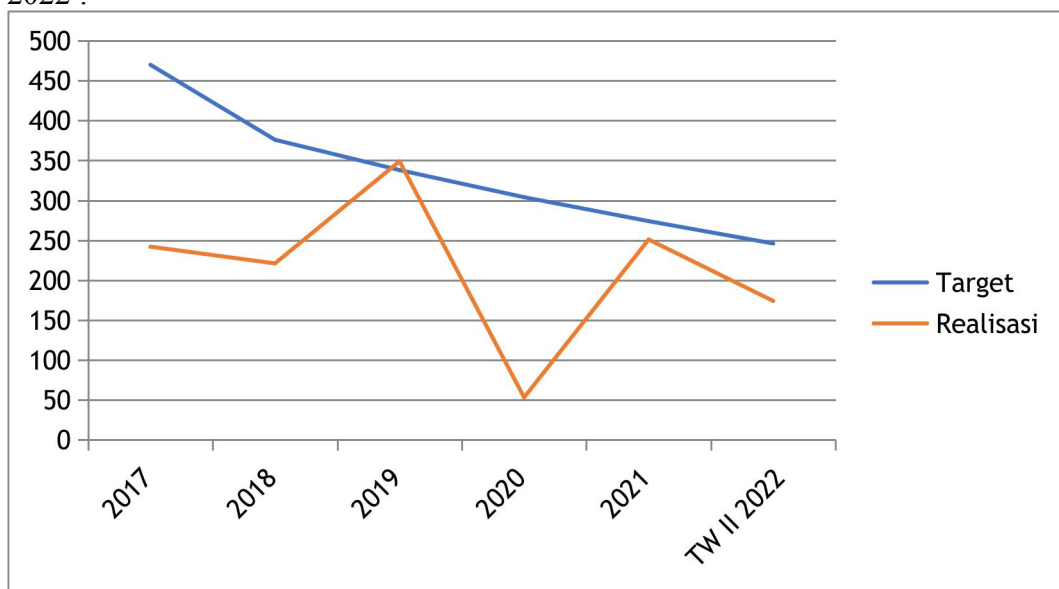
- g. Indikator Persentase Kendaraan wajib uji yang memenuhi ambang batas emisi merupakan indikator program yang didapat dari rumus jumlah kendaraan bermotor umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang dibagi (:) jumlah kendaraan bermotor umum yang diuji dikali (x) 100%. Target akhir RPJMD adalah 99,01%. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 97,71%, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 98,69%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD belum tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Persentase Kendaraan wajib uji yang memenuhi ambang batas emisi** dari Tahun 2017-2022



- h. Indikator Penurunan jumlah kasus pelanggaran kendaraan wajib uji yang seharusnya laik jalan merupakan merupakan indikator program yang didapat dari jumlah kasus pelanggaran lalu lintas. Target akhir RPJMD adalah 246 kendaraan. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 174 kendaraan, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 70,73%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD belum tercapai.

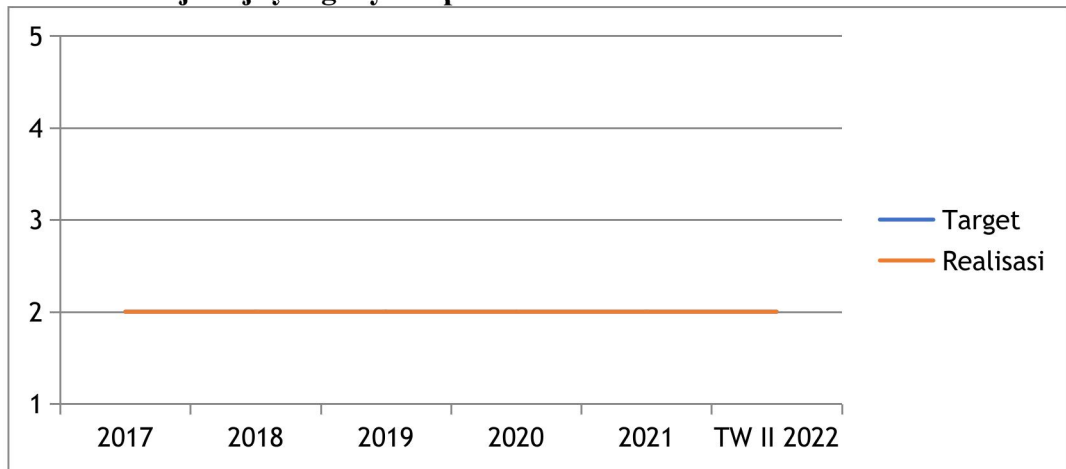
Berikut info capaian setiap tahun indikator **Penurunan jumlah kasus pelanggaran kendaraan wajib uji yang seharusnya laik jalan** dari Tahun 2017-2022 :



- i. Indikator Jumlah Balai pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang layak operasi merupakan merupakan indikator program yang didapat dari jumlah balai pengujian kendaraan bermotor yang layak beroperasi. Target akhir RPJMD adalah 2 unit. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 2 unit, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan

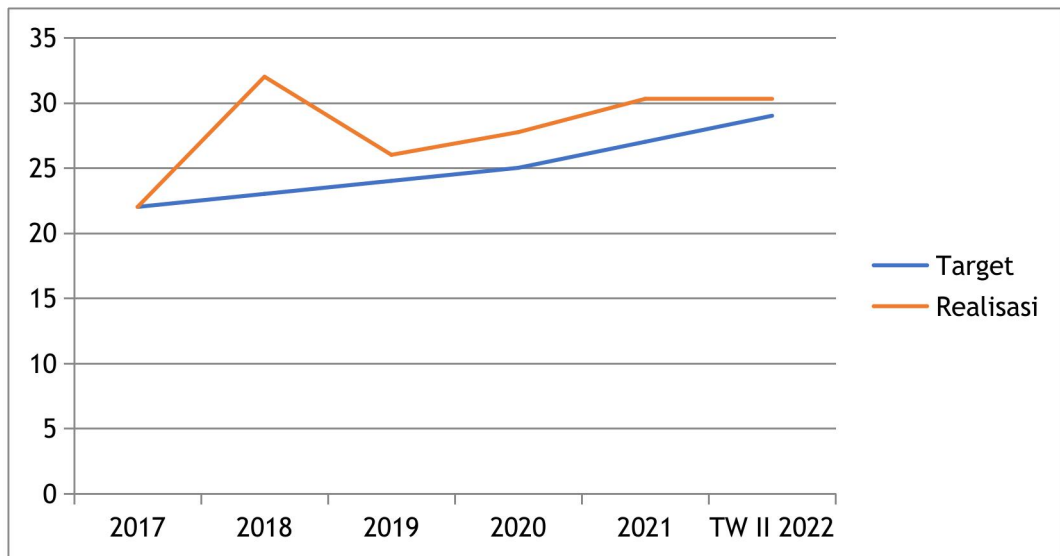
persentase capaian RPJMD adalah 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Jumlah Balai pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang layak operasi** dari Tahun 2017-2022 :



- j. Indikator Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik merupakan indikator program yang didapat dari rumus jumlah pemasangan rambu-rambu dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik sampai tahun n (:) jumlah rambu-rambu dan perlengkapan jalan yang seharusnya tersedianya dikali (x) 100%. Target akhir RPJMD adalah 29%. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah 30,30%, dengan persentase capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan persentase capaian RPJMD adalah 104,48%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai.

Berikut info capaian setiap tahun indikator **Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik** dari Tahun 2017-2022 :



## 16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator sebagai berikut :



No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TWII 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Presentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi	%	75	58	75	75	100	100
2	Persentase Website update	%	80	70	80	75	93,75	93,75
3	Persentase Kecamatan yang memiliki KIM	%	71	58	71	100	141	141
4	Persentase Penyebaran Informasi melalui Mass Media	%	100	100	100	50	90	90

Pelaksanaan program telah sesuai dengan tahapan target yang ditetapkan, diharapkan akhir tahun 2022 seluruh target dapat tercapai.



Penyusunan Master Plan Smart City Cilacap

### 17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan capaian indikator sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Prosentase koperasi aktif	%	89,5	68,58	89,5	68,56	76,60	76,60
2	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,8	3,31	0,8	1,21	151,56	151,56
3	Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	%	2,55	NA	2,55	NA	NA	NA
4	Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar baik	%	75,75	66,69	75,75	0	0	0

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
5	Ketersediaan Informasi harga dan distribusi	%	100	100	100	66	66	66
6	Nilai ekspor non migas	US\$ (000)	32485	62363	32485	17330	53,35	53,35
7	Cakupan ukur takar timbang dan perlengkapan yang ditera	%	50	40	50	25	50	50
8	Nilai ekspor non migas	US\$ (000)	32485	62363	32485	17330	53,35	53,35
9	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	bulan	12	12	12	6	50	50
10	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	6	50	50
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	12	6	50	50
12	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50	50
13	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	%	100	100	100	57,14	57,14	57,14



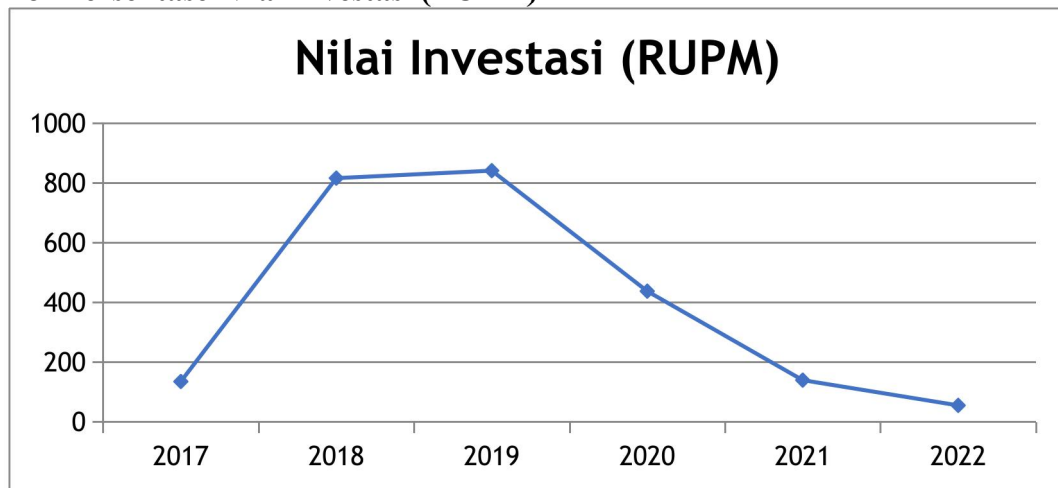
Launching Produk UMKM Kabupaten Cilacap

## 18. Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal dengan indikator sebagai berikut :

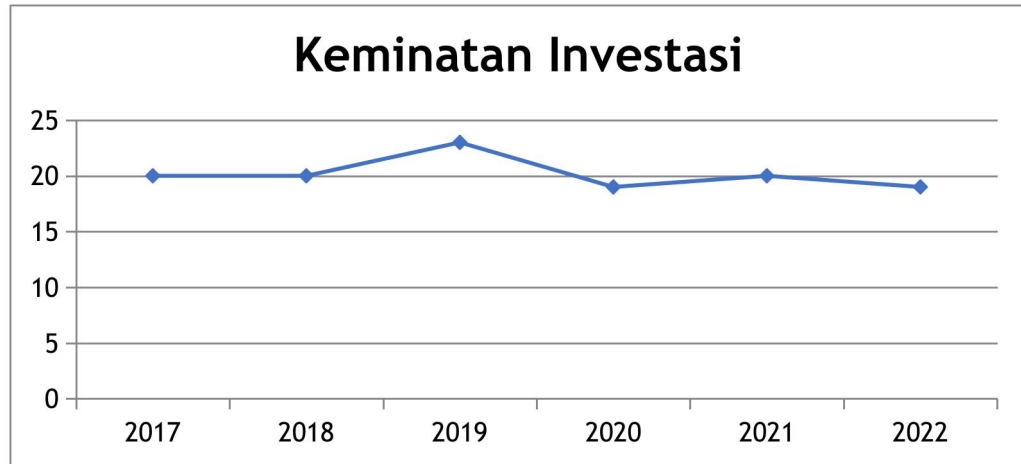
No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realsasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase Nilai Investasi (RUPM)	%	100	139,6	100	55,04	55,04	194,64
2	Jumlah Keminatan Investasi	Buah	120	102	28	19	67,86	100,83
3	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	22	53	22	7,18	32,64	273,54

#### a. Persentase Nilai Investasi (RUPM)



Pada tahun 2017, capaian realisasi investasi yang masuk di Kabupaten Cilacap sebesar 135% dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2018-2019 capaian realisasi investasi mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya proyek berskala besar yang masuk Ke Kabupaten Cilacap yakni pembangunan PLTU. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 capaian realisasi investasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena proyek PLTU sudah memasuki tahap penyelesaian. Selain itu, penurunan capaian realisasi investasi tersebut juga disebabkan mewabahnya pandemi *covid-19* yang menyebabkan para investor menunda investasinya di Kabupaten Cilacap. Namun demikian, realisasi investasi tetap dapat melampaui target yang ditetapkan meskipun capaiannya mengalami penurunan. Pada tahun 2022, pandemi *covid-19* mulai mereda, sehingga diharapkan potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap dan capaian realisasi investasi dapat meningkat lagi. Hingga triwulan II, penerimaan investasi sudah mencapai 55.04% dari target.

## b. Jumlah Keminatan Investasi

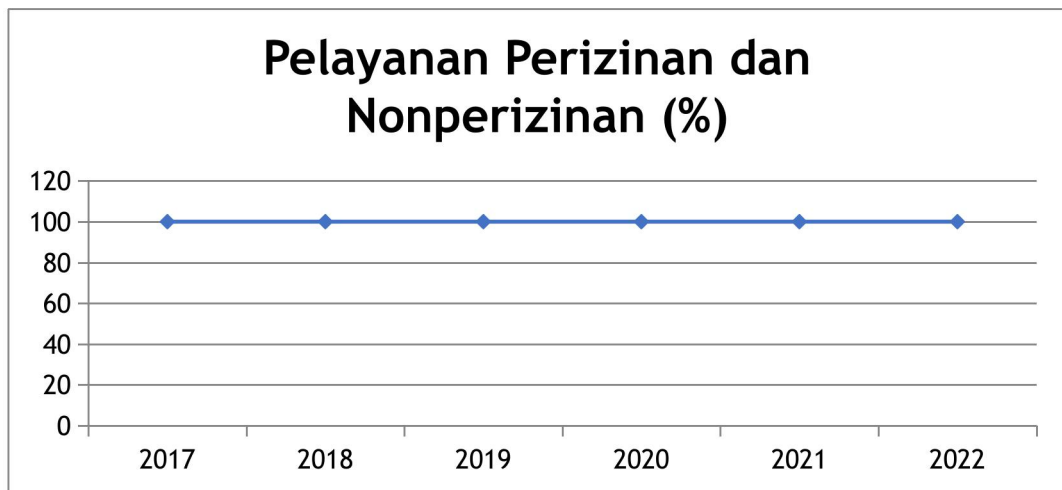


Keminatan investasi yang masuk ke Kabupaten Cilacap, salah satunya diindikasikan dengan terlaksananya rapat teknis pelayanan dalam rangka membahas dan mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait, berkenaan dengan pengajuan perizinan dari pemohon. Tahun 2017 dan 2018 jumlah keminatan investasi tercapai sebanyak 20 buah. Kemudian pada tahun 2019 jumlah keminatan investasi mengalami peningkatan sebanyak 23 buah. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah keminatan investasi mengalami penurunan, sebagai dampak mewabahnya pandemi *covid 19*, dimana ada larangan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Tahun 2020 dari target 24 jumlah keminatan investasi yang ditetapkan tercapai 19 buah, sedangkan pada Tahun 2021 dari target 26 jumlah keminatan investasi yang ditetapkan tercapai 20 buah keminatan investasi. Untuk Tahun 2022 target jumlah keminatan investasi ditetapkan sebanyak 28 buah. Dengan mulai meredanya pandemi *covid 19*, kegiatan rapat teknis pelayanan dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Sampai dengan triwulan II Tahun 2022 jumlah keminatan investasi telah tercapai 19 buah, dengan situasi dan kondisi yang semakin baik maka target akhir Renstra periode 2017 – 2022 dapat diusahakan tercapai.



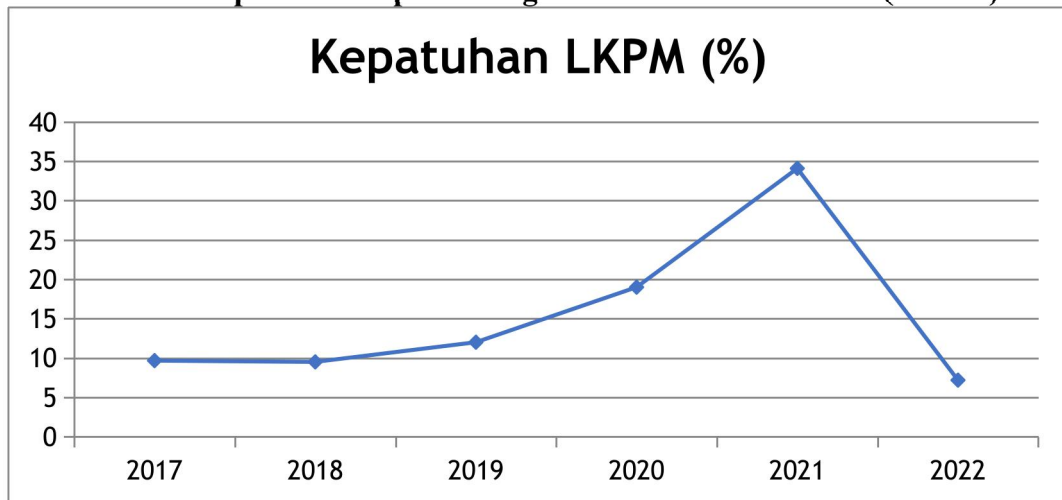
Penandatanganan LOI Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Kawasan Industri Cirebon untuk Investasi Rp57,8 Trilyun

### c. Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu berkomitmen memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat secara optimal. Wujud dari komitmen tersebut adalah telah diberikannya pelayanan yang maksimal pada 42 jenis perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

### d. Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)



Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi salah satu tolak ukur pengendalian kegiatan penanaman modal. Grafik persentase kepatuhan LKPM menunjukkan tren yang selalu meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya kesadaran para pelaku usaha di Kabupaten Cilacap untuk membuat LKPM. Pada tahun 2021 persentase LKPM mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di angka 34,13%. Hal ini salah satunya disebabkan adanya himbauan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cilacap untuk membuat LKPM, dampaknya apabila tidak dilaksanakan maka perizinan yang diberikan kepada perusahaan akan dibekukan. Pada triwulan II tahun 2022, capaian kepatuhan LKPM masih sebesar 7,17%. Namun, hal ini belum dapat menjadi

acuan mengingat masih berlangsungnya periode 2022 dan sampai dengan Bulan Agustus 2022 persentase kepatuhan LKPM sudah tercapai sebesar 24,10 %. Sampai dengan akhir Tahun 2022 capaian presentase kepatuhan LKPM diusahakan meningkat dan memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu usaha untuk meningkatkan presentase kepatuhan LKPM adalah melalui sosialisasi-sosialisasi pentingnya mengirimkan LKPM kepada para pelaku usaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

### 19. Urusan Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan capaian indikator program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	80	80	80
2	Partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	orang	110	110	110	80	80	90
3	Persentase Wirusaha Muda	%	100	16,42	16,42	10	10	75
4	Cakupan pembinaan cabang olahraga	%	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	82	67	82	-	-	-
6	Cakupan atlet yang berprestasi di bidang olahraga	Orang	212	217	212	212	100	212
7	Persentase sarana prasarana keolahragaan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100



Pengukuhan Paskibra Kabupaten Cilacap Tahun 2022

## 20. Urusan Statistik

Urusan Statistik dengan 1 indikator program yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase Pemanfaatan Dokumen Statistik	%	100	396	100	0	0	79,2

## 21. Urusan Persandian

Begitupun dengan urusan Persandian, yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap dengan capaian sebagai berikut :

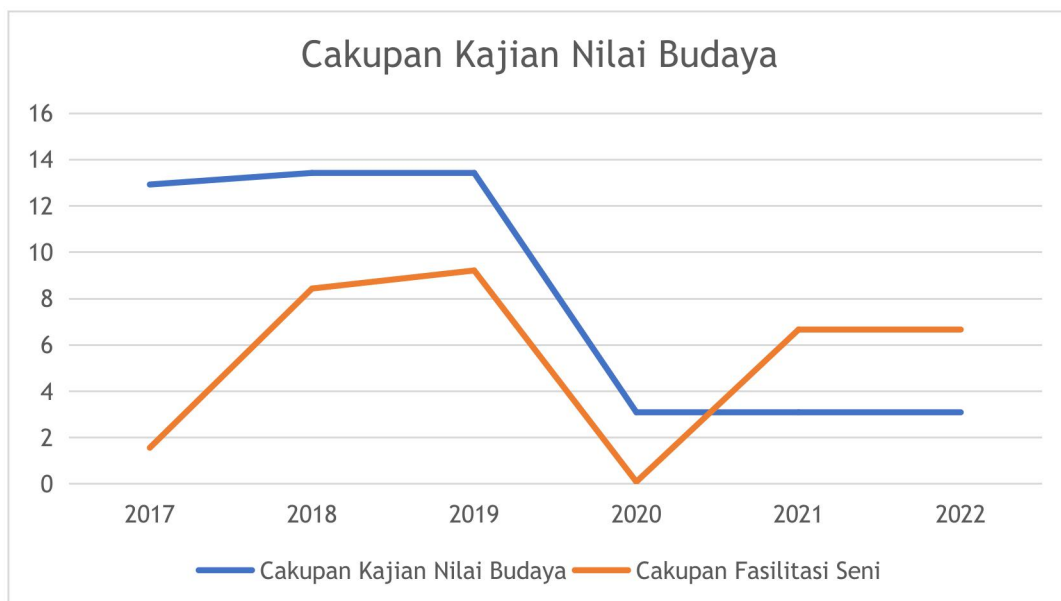
No	Indikator Program	Sat	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase Pemanfaatan Persandian dalam Komunikasi antar Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pusat dan Provinsi	%	100	100	100	50	90	90

## 22. Urusan Kebudayaan

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Cakupan Kajian Nilai Budaya	%	13,91	3,08	13,91	3,08	22,14	22,14
2	Cakupan Fasilitasi Seni	%	10,67	6,65	10,67	6,65	62,32	62,32
3	Prosentase Pelestarian Cagar Budaya	%	7,38	21,87	7,38	21,87	296,3	296,3

Pelaksanaan pembangunan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada 3 indikator tersebut, dengan hasil sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yaitu 1 indikator telah mencapai target RPJMD dengan tingkat capaian melebihi 100%. Sedangkan 2 indikator yang belum mencapai target akan dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun anggaran.

Capaian Cakupan Kajian Nilai Budaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari grafik tersebut, terlihat bahwa capaian Cakupan Kajian Nilai Budaya cenderung mengalami penurunan di tahun 2020 sampai dengan 2021. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran, begitu juga dengan capaian Cakupan Fasilitasi Seni mengalami penurunan khususnya di Tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran. Namun demikian, target RPJMD akan diupayakan dicapai dengan menganggarkan kembali kegiatan yang mendukung indikator kajian nilai budaya



Pelepasan Kirab Budaya Sedekah Laut



### 23. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan capaian indikator program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	%	2,83	4,11	2,83	0,27	9,54	9,54
2	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	%	0,4	0,49	0,4	0,48	120,00	120,00
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	%	0,61	0,64	0,61	0,64	104,92	104,92
4	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	%	51,00	43,49	51,00	43,49	85,27	85,27

Dari pencapaian 4 indikator program sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 pada di atas, sebanyak 3 indikator status capaiannya Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator status capaiannya Sangat Rendah (SR) yaitu “Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk.” Hal itu disebabkan karena data pengunjung perpustakaan Tahun 2022 belum masuk rekap perhitungan semua serta jumlah penduduk Kabupaten Cilacap bertambah dari 1.977.638 jiwa menjadi 1.996.985 jiwa. Indikator Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk dihitung dengan perbandingan jumlah pengunjung per tahun dengan jumlah penduduk dikalikan 100.

Adapun perbandingan capaian indikator program urusan perpustakaan dari Tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	2,50%	2,73%	3,49%	2,55%	4,11%
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,54%	0,53%	0,51%	0,50%	0,49%
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,56%	0,55%	0,61%	0,65%	0,64%

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	0,39%	12,12%	19,15%	33,36%	43,49%



Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2021

**a. Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun per Satuan Penduduk**



Indikator rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum mengalami peningkatan, penurunan pada Tahun 2020 pada saat Pandemi COVID 19.

### **b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**



Indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dihitung dari perbandingan total judul buku dengan total koleksi. Realisasi dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum mengalami penurunan dimaksudkan agar perputaran buku lebih cepat.

### **c. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk**



Indikator rasio perpustakaan per satuan penduduk berdasarkan perbandingan jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Realisasi dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum mengalami peningkatan, penurunan pada

Tahun 2018 disebabkan pertumbuhan perpustakaan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.

#### d. Rasio Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat



Indikator rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan.

#### 24. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mencapai target indikator program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Cakupan Arsip yang berhasil dikelola	berkas	109000	98000	104000	102907	98,95	98,95
2	Prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	88,13	100	94,36	94,36	94,36
3	Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100	88,13	100	94,36	94,36	94,36
4	Tingkat kunjungan layanan dan wisata arsip	pengunjung	5.000	5248	5.000	5923	118,46	118,46
5	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	70	70,00	70,00
6	Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan	bulan	72	60	72	66	91,67	91,67
7	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100,00	100,00
8	Terpenuhinya administrasi	bulan	72	60	72	66	91,67	91,67

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
	perkantoran setiap bulan							
9	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%	100	100	100	100	100,00	100,00
10	Prosentase aparat yang mengikuti diklat/ pendidikan/ pelatihan	%	100	100	100	100	100,00	100,00

Adapun perbandingan capaian indikator program urusan kearsipan dari Tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Arsip yang berhasil dikelola	23000 berkas	24000 berkas	17000 berkas	17000 berkas	17000 berkas
2	Prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	64,00%	64,76%	80,00%	79,00%	88,13%
3	Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	64,00%	64,76%	80,00%	79,00%	88,13%
4	Tingkat kunjungan layanan dan wisata arsip	-	1018 pengunjung	1186 pengunjung	1747 pengunjung	1315 pengunjung

#### a. Cakupan Arsip yang Berhasil Dikelola



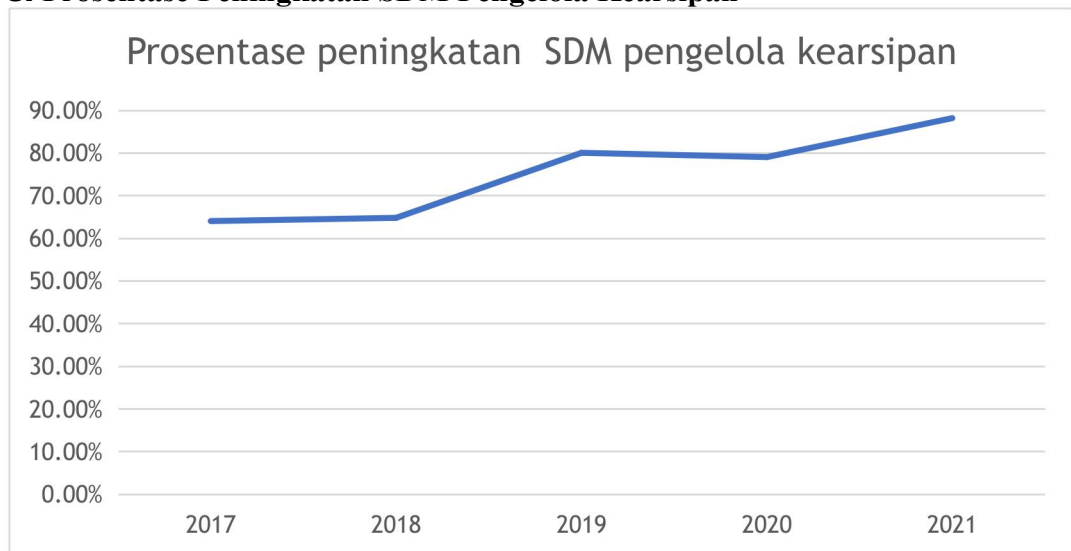
Indikator cakupan arsip yang berhasil dikelola dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan disebabkan dari tahun ke tahun volume arsip dinamis dan statis yang menjadi kewenangan LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) semakin menurun.

**b. Prosentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**



Indikator prosentase perangkat daerah yang mengelola secara baku dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum mengalami peningkatan, penurunan pada Tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi COVID 19 sehingga banyak kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut mengalami refocusing.

**c. Prosentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**



Indikator prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum mengalami peningkatan, penurunan pada Tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi COVID 19 sehingga banyak kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut mengalami refocusing.

#### d. Tingkat Kunjungan Layanan dan Wisata Arsip



Indikator tingkat kunjungan layanan dan wisata arsip dari Tahun 2017 sampai dengan 2021, capaiannya mengalami fluktuatif. Peningkatan pada Tahun 2020 karena layanan wisata arsip yang konsep secara offline dialihkan secara online melalui youtube yang capaiannya dihitung dari jumlah pengunjung yang menonton.



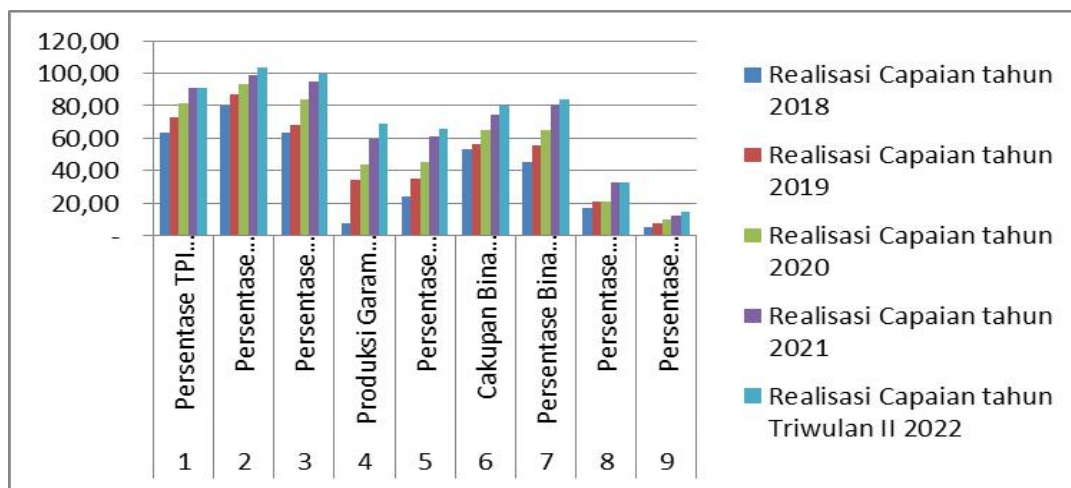
Pembukaan Pameran Arsip Kabupaten Cilacap dalam Lintasan Sejarah Tahun 2019

## B. Urusan Pemerintahan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase TPI yang memiliki pelayanan minimal	%	100	90,91	100	90,91	90,91	90,91
2	Persentase Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	99,10	100	103,88	103,88	103,88
3	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif	%	100	94,74	100	100,00	100,00	100,00
4	Produksi Garam (ton)	ton	20	59,18	20	69,19	345,95	345,95
5	Persentase Penyedia benih (UPR dan Balai Benih ikan) yang mampu menyediakan benih berkualitas	%	75	61,29	75	66,13	88,17	88,17
6	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	79,22	74,20	79,22	79,68	100,58	100,58
7	Persentase Bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	85,15	80,89	85,15	84,16	98,84	98,84
8	Persentase Kelompok pengolah dan pemasar yang mendapat fasilitasi memperoleh ijin	%	38,61	32,67	38,61	32,67	84,62	84,62
9	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi gemar makan ikan	%	12,32	12,68	12,32	14,44	117,21	117,21

Bahwa Indikator Program pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap telah tercapai dengan realisasi capaian Sangat Tinggi (ST), yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :







Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyederhanaan  
Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan

## 2. Pariwisata

No.	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Jumlah Obyek Wisata dalam keadaan baik	OW	1	1	1	1	100	100
2	Jumlah Desa Wisata Yang dikembangkan	Desa	10	22	10	10	10	10
3	Jumlah kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata	MoU	24	23	24	24	100	100
4	Persentase Sertifikasi kompetensi / profesi dan sertifikasi usaha pariwisata.	%	0,15	0,15	0,15	0,15	100	100
5	Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	10	10	10	7,2	72	63%

Kabupaten Cilacap pada urusan Pariwisata mempunyai 3 Program dengan 5 indikator, Berdasarkan program dan indikator tersebut, capaian kinerja urusan Pariwisata masih ada indikator program yang belum tercapai atau dibawah 100%. Diharapkan pada akhir tahun 2022 seluruh target RPJMD pada urusan Pariwisata dapat tercapai 100% atau lebih.



Kunjungan ke stand UMKM produk unggulan Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi pada acara Pengukuhan Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2022

### 3. Pertanian

No	Indikator Program	Sat	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	6.350.797	5.265.826	1.084.971	523.761	48,27	82,92
2	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	113.834	117.658	19.924	8.874,71	44,54	103,36
3	Populasi ternak	Ekor	8.808.491	8.571.257	8.808.491	5287405	60,03	97,31
4	Produksi Hasil Ternak :							
	Jumlah produksi daging	Ton	8.981	8.292	8.981	3444	38,35	92,33
	Jumlah produksi telur	Ton	10.048	4.228	10.048	2.132	21,22	42,08
5	Angka Kesakitan Ternak	%	11,825	11,68	12	5,39	45,58	98,77
6	Persentase luas pelayanan jaringan irigasi	%	10	9	9,5	8	84,21	94,74
7	Jumlah teknologi pertanian yang diterapkan	Buah	15	15	15	3	20,00	100,00
8	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	45	34,75	11	-	-	77,22
9	Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida tepat Sasaran	%	100	100	100	50	50,00	100,00
10	Persentase Petani yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	%	1,113	1,060	1,113	0	17,79	95,24
11	Jumlah teknologi Peternakan yang diterapkan	Buah	10	8	2	0	-	80,00

Berdasarkan indikator tersebut, capaian kinerja urusan Pertanian terdapat indikator yang belum tercapai atau masih dibawah 100%, diharapkan pada akhir tahun 2022 seluruh indikator dapat tercapai.



Panen padi menggunakan mesin panen padi modern (Combine Harvester)

#### 4. Perdagangan

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar baik	%	75,75	66,69	75,75	0	0	0
2	Ketersediaan Informasi harga dan distribusi	%	100	100	100	66	66	66
3	Nilai ekspor non migas	US\$ (000)	32485	62363	32485	17330	53,35	53,35
4	Cakupan ukur takar timbang dan perlengkapan yang ditera	%	50	40	50	25	50	50
5	Nilai ekspor non migas	US\$ (000)	32485	62363	32485	17330	53,35	53,35
6	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	bulan	12	12	12	6	50	50
7	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	6	50	50
8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	12	6	50	50
9	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50	50
10	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	%	100	100	100	57,14	57,14	57,14

Berdasarkan indikator tersebut, capaian kinerja urusan Perdagangan terdapat indikator yang belum tercapai atau masih dibawah 100%, diharapkan pada akhir tahun 2022 seluruh indikator dapat tercapai.



Peresmian pasar tradisional Tanjung Sari Cilacap sebagai percontohan Pasar Siaga Covid-19

## 5. Perindustrian

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	8	8,01	8	4,17	52,12	52,12
2	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pembinaan kemampuan teknologi industri	unit	85	105	85	62	72.94	72.94
3	One Product One Village	unit	7	8	8	8	100	114.29
4	Persentase sentra industri terbina	%	100	100	100	100	100	100

Tingkat capaian indikator program persentase pertumbuhan industri sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 4,17% dari target 8% untuk pencapaian berikutnya akan dilaksanakan kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV

## C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### 30. Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. 2021	Target 2022	Capaian TW. II 2022	% Tahun 2022	% Capaian RPJMD
1	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	100	0	0,00%	100,00%
2	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50,00%	100,00%
3	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan (+)	Naskah	45	12,25	5	0	0,00%	108,89%
4	Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai dengan ketentuan	%	62,5	22	62,5	50	80,00%	35,20%
5	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan	%	100	90,25	100	50	50,00%	90,25%
6	Persentase penyerapan APBD	%	85	88,75	85	77,35	91,00%	104,41%
7	Persentase OPD memiliki RKA dan DPA sesuai dengan dok. RKPD dan APBD	%	100	100	100	100	100,00%	100,00%

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. 2021	Target 2022	Capaian TW. II 2022	% Tahun 2022	% Capaian RPJMD
8	Persentase realisasi penyaluran hibah infrastruktur terhadap rekomendasi	%	85	70,3	85	15,86	18,66%	82,71%
9	Persentase naskah kehumasan yang diterbitkan	%	100	93,75	100	50	50,00%	93,75%
10	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	%	100	93,75	100	0	0,00%	93,75%
11	Persentase Perangkat Daerah & unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan, SOP dan inovasi pelayanan publik	%	100	84,5	100	100	100,00%	84,50%
12	Persentase perangkat daerah/ unit kerja yang telah menetapkan jabatan ASN sesuai ANJAB, ABK, EVJAB dan standar kompetensi jabatan	%	100	71,75	100	85	85,00%	71,75%
13	Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang melaksanakan SKM	%	100	97,5	100	100	100,00%	97,50%

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. 2021	Target 2022	Capaian TW. II 2022	% Tahun 2022	% Capaian RPJMD
14	Persentase ketersediaan koordinasi bidang organisasi sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50,00%	100,00%
15	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	%	63	81,84	63	200	317,46%	129,90%
16	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan	%	100	75	100	50	50,00%	75,00%
17	Persentase perolehan prestasi bidang Kesra (+)	%	9,4	9,035	9,4	50	531,91%	96,12%
18	Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti (+)	%	80	65	80	50	62,50%	81,25%
19	Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD	%	4,95	4,45	4,95	0	0,00%	89,90%
20	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan	%	100	87,5	100	50	50,00%	87,50%

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. 2021	Target 2022	Capaian TW. II 2022	% Tahun 2022	% Capaian RPJMD
21	Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan	%	100	92,5	100	50	50,00%	92,50%
22	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	%	100	50	100	50	50,00%	50,00%
23	Persentase kebutuhan Kepala Daerah yang terlayani sesuai standar	%	100	100	100	50	50,00%	100,00%
24	Persentase kinerja SKPD di bidang pembangunan sesuai dengan target fisik yang direncanakan	%	100	86,25	100	100	100,00%	86,25%
25	Persentase penyerapan anggaran Setda	%	85	83,2025	85	0	0,00%	97,89%
26	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	%	100	93,625	100	0	0,00%	93,63%





Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

### Sekretariat DPRD

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	100	83.33	100	50	50	92
2	Tersedianya Administrasi perkantoran setiap bulan	Poin	72	60	12	6	50	92
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	Poin	100	83.33	100	50	50	92
4	Prosentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	Poin	100	83.33	100	50	50	92
5	Prosentase aparat yang telah mengikuti bintek/pelatihan/pendidikan/Diklat	Poin	100	83.33	0	0	0	83
6	Prosentase fasilitasi rapat- rapat tepat jadwal	Poin	100	80	100	41	41	90



Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap

### 32. PENGAWASAN

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							
	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	50	50	92
	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap bulan	Bulan	72	60	12	6	50	92
	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai OPD	%	100	100	100	50	50	92
	Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap bulan	Bulan	72	60	12	6	50	92
	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	50	50	92
	Persentase APIP yang telah mengikuti BIMTEK/PKS	%	100	80	100	80	80	80
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	Prosentase Perangkat Daerah dengan Predikat Evaluasi LAKIP Minimal BB	%	100	96,36	100	98,18	98,18	98,18
	Prosentase Penyelesaian Tindaklanjut hasil Pemeriksaan di wilayah I,II,III,IV	%	91	91,08	91	91,91	101	101
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani di wilayah I,II,III,IV,V	%	100	100	100	50	50	92



Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Cilacap 2019

### 33. PERENCANAAN

No	Indikator Program	Sat	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
URUSAN PERENCANAAN								
1	Persentase program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	%	100	100,00	100	100	100	100
2	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RT RW	%	50	45,00	50	50	100	100
3	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	90	85,00	90	90	100	100
4	Persentase Kegiatan yang Didanai TP, Dana Dekonsentrasi, Urusan Bersama, APBN Sektoral, dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang realisasinya lebih dari 75%	%	100	100,00	100	100	100	100
5	Persentase program dan kegiatan pembangunan daerah yang realisasi capaiannya >75%	%	100	100,00	100	100	100	100
6	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	100,00	100	100	100	100
7	Persentase aparatur perencana yg memiliki kompetensi di bidang perencanaan	%	70	56,00	70	56	80	80
8	Tingkat ketercukupan data/informasi untuk perencanaan	%	100	95,00	100	100	100	100
9	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%	100	100,00	100	100	100	100

No	Indikator Program	Sat	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
10	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	%	100	100,00	100	100	100	100
11	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100,00	100	100	100	100
12	Persentase Pemanfaatan Dokumen Pengembangan Wilayah Perbatasan	%	100	100,00	100	100	100	100
13	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	100	100,00	100	100	100	100
<b>URUSAN KELITBANGAN</b>								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	60	65,79	60	66	110	110
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	40,62	50	45	90	90
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	40,00	50	45	90	90
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	100,00	50	100	200	200
5	Persentase lembaga pendidikan yang melaksanakan penelitian/ pengabdian masyarakat	%	100	100,00	100	90	90	90
6	Persentase hasil penelitian di Kabupaten Cilacap	%	75	63,07	75	69	92	92



Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023

### 34. KEUANGAN

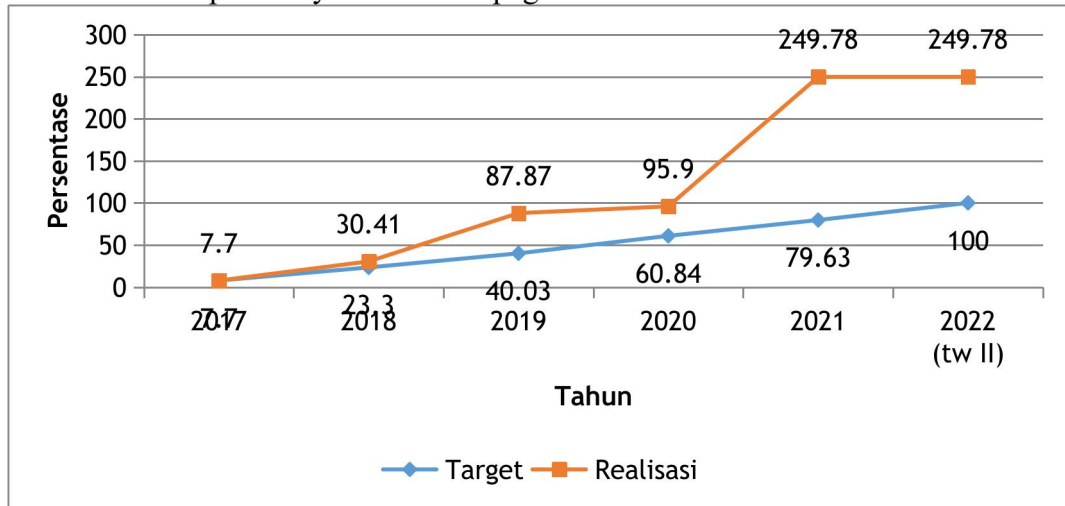
No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	67,86	67,86	67,86
2	Persentase Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Akuntabel	%	100	100	100	50	50	50
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bln	72	60	12	6	50	91,6
4	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	%	100	100	100	31,83	31,83	31,83
5	Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	53,57	53,57	53,57
6	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pencairan Dana	%	100	100	100	83,51	83,51	83,51
7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	7,87	7,87	7,87
8	Persentase Meningkatnya Tertib Pengelolaan Aset/Barang milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	16,72	16,72	16,72
9	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	10	9,8	10	-21,92	-219,3	-219,3

### 35. KEPEGAWAIAN

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
	URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN							
1	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	%	100	249,78	100	249,78	249,78	249,78

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. 2021	Target 2022	Realisasi s.d. TW II 2022	% Capaian s.d. TW II 2022	% Capaian RPJMD
2	Persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online	%	100	92	100	92	92	92
3	Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi	%	96	99,52	96	99,78	103,94	103,94
4	Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian	%	99,7	99,88	99,7	99,96	100,26	100,26
5	Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan	%	97	93,57	97	97,02	100,02	100,02
6	Indeks Profesional Pegawai (Struktural)	nilai	91,5	76,3	91,5	76,3	83,39	83,39
7	Rasio jumlah PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun	rasio	1	0,98	-	0,98	98,04	98,04
8	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural		612	624,24	-	624,24	102	102
9	Rasio pegawai pemerintah menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan (PNS)							
	S3	%	0	0	-	0	0	0
	S2	%	0,05	0,05	-	0,05	100	100
	S1	%	0,60	0,58	-	0,58	97,25	97,25
	D3	%	0,11	0,12	-	0,12	104,98	104,98
	D1/2	%	0,08	0,09	-	0,09	110,27	110,27
	SMA	%	0,14	0,14	-	0,14	100	100
	SMP	%	0,02	0,02	-	0,02	100	100
	SD	%	0,01	0,01	-	0,01	93,32	93,32
10	Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)		0,341	0,358	-	0,358	104,99	104,99
11	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	380	380	-	380	100	100
12	Prosentase pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian	%	99,87	99,91	-	99,91	100,04	100,04
13	Prosentase terisinya formasi pegawai	%	100	97,2	-	97,2	97,2	97,2
14	Prosentase jabatan yang terisi	%	100	86,43	-	86,43	86,43	86,43

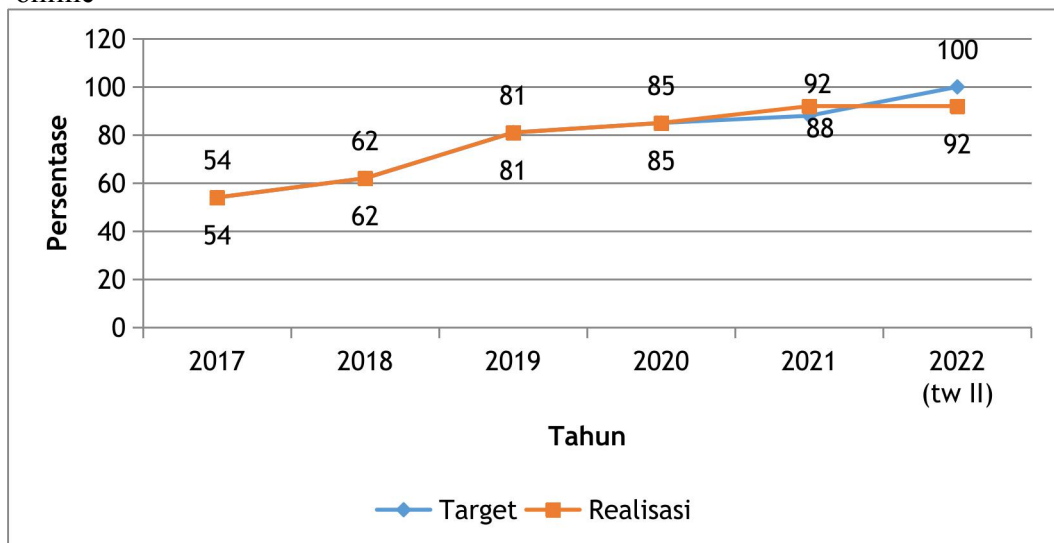
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN



Realisasi persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN diperoleh dengan membandingkan jumlah akumulasi usulan formasi setiap tahun (*baseline* tahun 2017) dengan proyeksi BUP selama kurun waktu tahun 2017 s.d. 2022. Capaian tahun 2022 hingga triwulan II sebesar 249,78%, dengan jumlah usulan formasi sejak tahun 2017 hingga triwulan II tahun 2022 sebanyak 9.799 formasi, sedangkan proyeksi BUP tahun 2017 s.d. 2022 sejumlah 3.923.

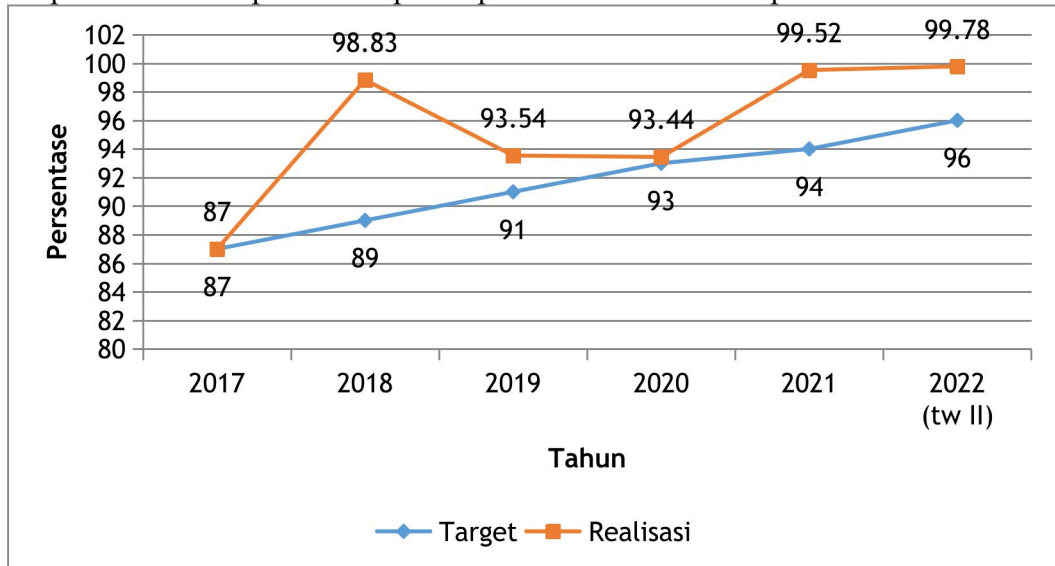
Pencapaian yang jauh melebihi target ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam pengusulan formasi ASN. Semula usulan formasi hanya mempertimbangkan jumlah ASN yang BUP pada tahun berjalan. Namun melihat kekurangan pegawai yang mencapai 9.423 orang (data tahun 2019), maka kebijakan usulan formasi (khususnya formasi guru) didorong/ diupayakan sebanyak mungkin dengan tetap mempertimbangkan peta jabatan, kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan pegawai.

b. Capaian indikator persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online



Realisasi persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online diperoleh dengan membandingkan jumlah pelayanan kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan simpeg (online) dengan jumlah pelayanan kepegawaian. Sampai dengan triwulan II tahun 2022 pelayanan kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan simpeg (online) sebanyak 24 pelayanan dari 26 pelayanan kepegawaian yang ditargetkan.

C. Capaian indikator persentase penempatan ASN sesuai kompetensi



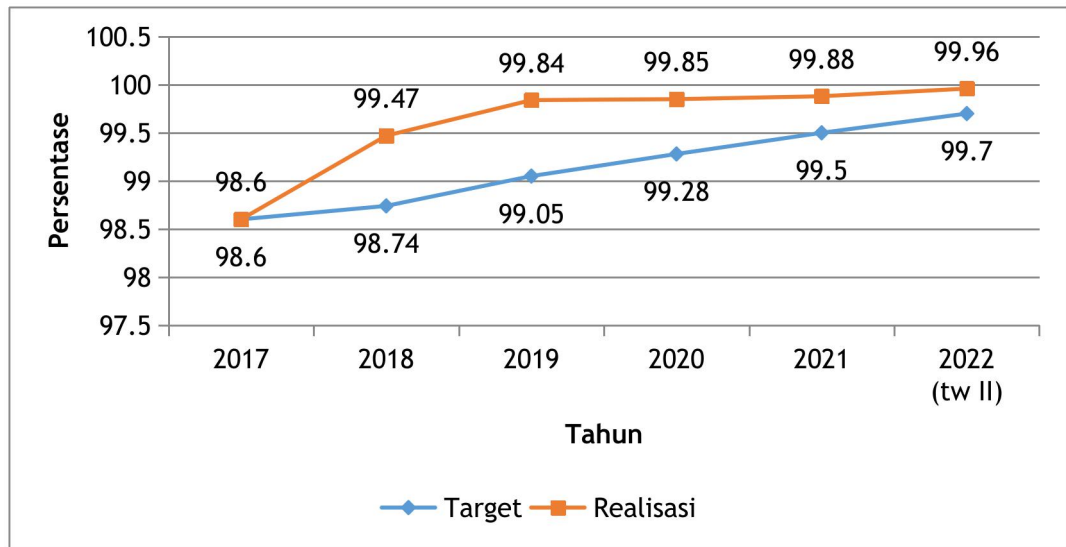
Realisasi persentase penempatan ASN sesuai kompetensi diperoleh dengan membandingkan jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dengan jumlah seluruh ASN. Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 14.739 orang dari total ASN 14.771 orang. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 persentase capaian mengalami penurunan dikarenakan banyaknya ASN memasuki masa purna tugas yang mencapai 1.472 orang, sehingga mempengaruhi jumlah perhitungan.



Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

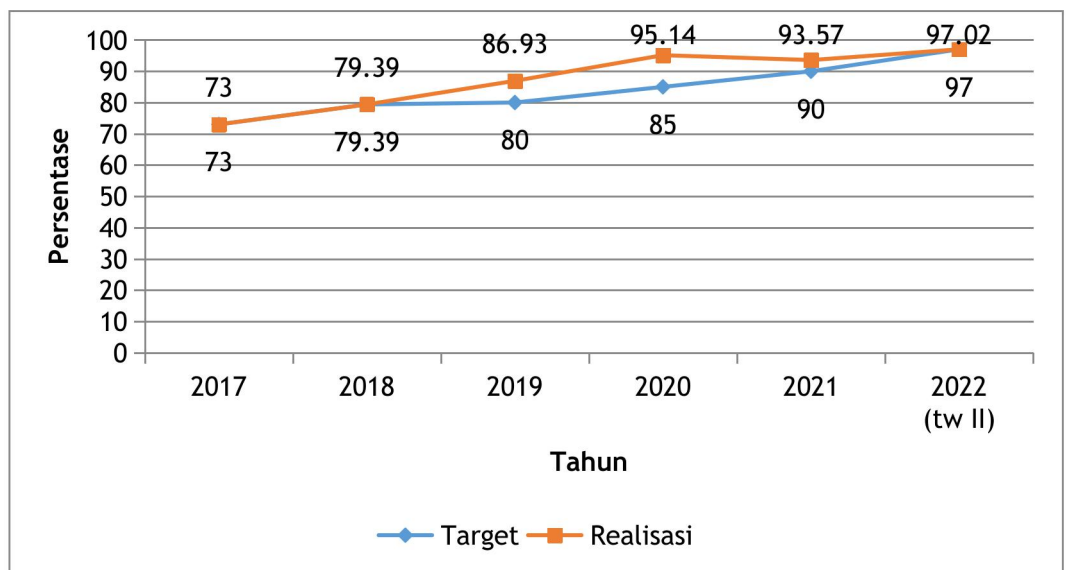


- d. Capaian indikator persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian



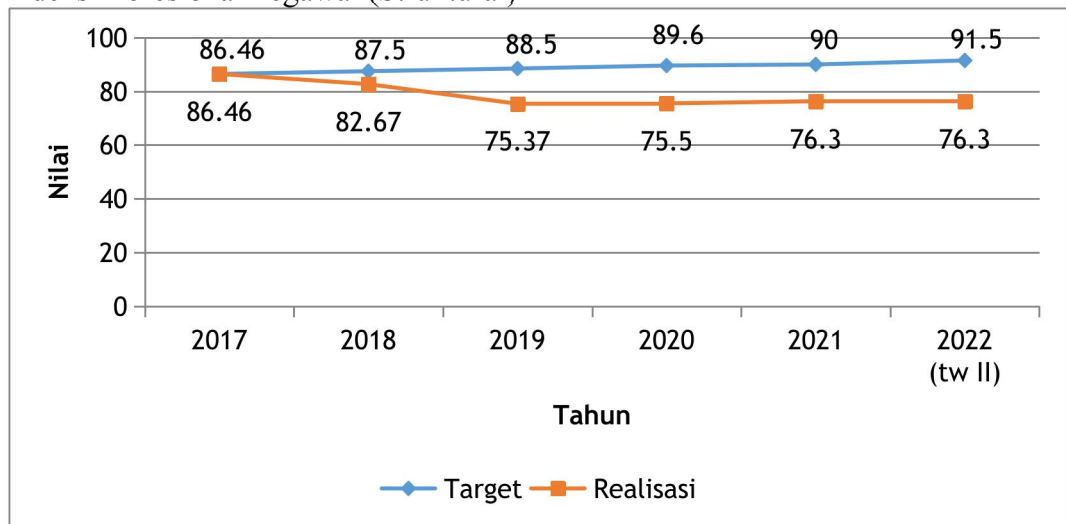
Realisasi persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian diperoleh dengan membandingkan jumlah ASN yang sudah mematuhi peraturan perundangan dibidang kepegawaian dengan jumlah seluruh ASN. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2022, capaian selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kepegawaian yang dilakukan oleh BKPPD berhasil meningkatkan kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian. Pada triwulan II tahun 2022 sebanyak 14.765 orang dari total ASN 14.771 orang (99,96%) telah mematuhi peraturan perundangan dibidang kepegawaian.

- e. Capaian indikator persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan



Realisasi persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan diperoleh dengan membandingkan jumlah ASN yang memenuhi kompetensi sesuai standar jabatan dengan jumlah seluruh ASN. Jumlah ASN(PNS) yang memenuhi kompetensi sesuai standar jabatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 9.855 orang dari 10.158 orang. Pada tahun 2021 capaian sempat mengalami penurunan dikarenakan rendahnya jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun tersebut akibat adanya pandemi covid-19.

f. Indeks Profesional Pegawai (Struktural)



Realisasi Indeks Profesional Pegawai (Struktural) diperoleh dari hasil pengukuran Indeks profesionalitas pegawai struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap oleh BKN yang dimensi pengukurannya meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang dilakukan setiap akhir tahun. Realisasi Indeks Profesional Pegawai (Struktural) tahun 2021 sebesar 76,3. dari target yang ditetapkan sebesar 90. Tren capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan rumusan perhitungan.

## 1. Kecamatan Cilacap Utara

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi \ s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	80	100	85	100	100
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	80	100	94	94	94
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	80	100	90	90	90

## 2. Kecamatan Cilacap Tengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s .d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Presentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Kelurahan yang Memiliki Kelembagaan Aktif	%	100	100	100	50	50	95

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
3.	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100	50	50	95
4.	Presentase fasilitasi forkopimcam	%	100	100	100	50	50	95

### 3. Kecamatan Cilacap Selatan

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	80	100	90	90	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	80	100	90	90	90
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	80	100	90	90	90

#### 4. Kecamatan Nusawungu

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	12	12	66,6	66,6	100
2	Presentase sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100
3	Presentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%	100	100	100	100	100	100
4	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
5	Presentase aparatur yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100
6	Presentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
7	Presentase Terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
8	Presentase Implementasi Pelimpahan Kewenangan	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
9	Presentase Desa Yang Memiliki Kelembagaan Aktif	%	100	100	100	100	100	100
10	Presentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100	100	100	100
11	Presentase Fasilitasi Forkopimcam	%	100	100	100	100	100	100
12	Presentase Desa yang Difasilitasi Terkait Tata Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100

## 5. Kecamatan Binangun

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	72	60	12	6	66	91,66
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	72	60	12	6	66	91,66
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	63,98	63,98	92,8

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	62,12	62,12	92,42

## 6. Kecamatan Kroya

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	90	90	90
	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
	Presentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%	100	100	100	90	90	90
	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	90	90	90
2	Presentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	90	90	90
3	Presentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	90	90	90

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
4	Presentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	90	90	90

## 7. Kecamatan Sampang

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	80	100	90	90	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	80	100	90	90	90
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	80	100	90	90	90



## 8. Kecamatan Maos

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	94	94	94
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	94	94	94
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	90	90	90

## 9. Kecamatan Adipala

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	50	50	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	83,33
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	83,33

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	65	65	90
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	65	65	90

## 10. Kecamatan Kesugihan

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	72	12	12	6	50%	91,67%
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	80	80%	91,67%
3	Presentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%	100	100	-	-	0%	100%
4	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	80	80%	96,67%
5	Presentase aparatur yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan	%	100	-	-	-	0%	0%
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	62	62%	93,67%

## 11. Kecamatan Jeruklegi

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	76,9	76,9	95,4
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	63,98	63,98	92,8
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	62,12	62,12	92,42

## 12. Kecamatan Kampung Laut

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	52,74	52,74	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	59	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	56,51	90

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	64,73	64,73	94
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	70,89	70,89	93

### 13. Kecamatan Kawunganten

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	90	90	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	60	54	90	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	60	54	90	90
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	90	90	90
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	90	90	90

#### 14. Kecamatan Bantarsari

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	66,77	66,77	93,35
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90,00
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90,00
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	66,22	66,22	93,24
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	37,33	37,33	87,47

#### 15. Kecamatan Gandrungmangu

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100		100	90	90	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	72	60	12	6	92	92
3	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	72	60	12	6	92	92

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100		100	90	90	90
4	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	72	60	12	6	92	92
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100		100	90	90	90
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100		100	90	90	90

## 16. Kecamatan Patimuan

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	52,18	52,18	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	56,95	56,95	91

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	46,66	46,66	89

## 17. Kecamatan Kedungreja

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	80	100	90	90	90
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
3	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	48	12	54	90	90
4	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	54	90	90
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	80	100	90	90	90
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	80	100	90	90	90

## 18. Kecamatan Sidareja

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	35	35	83,3
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	91,67
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	91,67
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	51,4	51,4	84,8
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	50	50	90

## 19. Kecamatan Cipari

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	40	40	65
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	51	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90



No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	60	60	92
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	61	61	92

## 20. Kecamatan Karangpucung

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	75,03	75,03	95
2	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	48	12	6	50	90
3	Tersedianya Administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	60	48	12	6	50	90
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	96,28	96,28	99,2
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	48,34	48,34	89,66

## 21. Kecamatan Cimanggu

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	48	12	6	50	90
3	Tersedianya Administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	60	48	12	6	50	90
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	78,34	78,34	99,2
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	78,33	78,33	89,66

## 22. Kecamatan Majenang

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	48	12	6	50	90

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
3	Tersedianya Administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	60	48	12	6	50	90
5	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	78,34	78,34	99,2
6	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	78,33	78,33	89,66

### 23. Kecamatan Wanareja

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap Bulan	%	100	100	100	100	100	100
2	% Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100
3	% Tingkat Kedisiplinan Pegawai OPD	%	100	100	100	100	100	100
4	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
5	% Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
6	Desa Kelurahan Dengan Kategori Berkembang	%	-	100	100	100	100	100
7	Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum ditangani	%	100	100	100	100	100	100
8	Koordinasi Forkompincam yang dilaksanakan	%	-	-	-	100	100	-
9	Peringatan Hari Nasional	%	100	100	100	100	100	100
10	Desa yang memiliki RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	%	100	100	100	100	100	100

## 24. Kecamatan Dayeuluhur

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2021	Target 2022	Realisasi s.d TW II 2022	% Capaian s.d TW II 2022	% Capaian RPJMD
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	56,59	56,59	91,31
2	Tersedianya Administrasi Keuangan setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
3	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	Bulan	60	48	12	6	50	90
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	100	54,85	54,85	90,97
5	Presentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	60,40	60,40	92,08

## BAB VI

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### 6.1. Peraturan Daerah yang Diterbitkan

##### A. PERDA TAHUN 2017

NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1	1	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap
2	2	2017	PENDIDIKAN KEAGAMAAN
3	3	2017	Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	4	2017	BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
5	5	2017	HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
6	6	2017	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016
7	7	2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penempatan Rekening Kas Umum Daerah Dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
8	8	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap
9	9	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
10	10	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11	11	2017	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
12	12	2017	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
13	13	2017	Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cilacap
14	14	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
15	15	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal
16	16	2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	17	2017	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap
18	18	2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
19	19	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMN di Kabupaten Cilacap

#### B. PERDA TAHUN 2018

<b>No</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2018	Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Cilacap
2	2	2018	Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
3	3	2018	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
4	4	2018	Penyelenggaraan Kearsipan
5	5	2018	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6	6	2018	Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Cilacap
7	7	2018	Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap
8	8	2018	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
9	9	2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2017
10	10	2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomer 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Cilacap
11	11	2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap
12	12	2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Cilacap
13	14	2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Th 2012 Tentang Retribusi Terminal Di Kabupaten Cilacap
14	15	2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Th 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di

No	NOMOR	TAHUN	TENTANG
			Kabupaten Cilacap
15	16	2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Th 2012 Tentag Retribusi Pelayanna Perkir Di Tepi Jalan umum Di Kabupaten Cilacap
16	17	2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Th 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Cilacap
17	18	2018	Perubahan Kedau Atas Peraturan DAerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak DAerah Di Kabupaten Cilacap
18	19	2018	Penyertaan Modal Daerah Kepda Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap
19	20	2018	Anggaran Pendaptan Belanja Daeah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019

#### C. PERDA TAHUN 2019

NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1	1	2019	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2	2	2019	Penataan Dan Pengendalian Tempat Hiburan Dan Rekreasi
3	3	2019	Perusahaan umum daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
4	4	2019	Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap
5	5	2019	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
6	6	2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
7	7	2019	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
8	8	2019	Pencabutan Perturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan
9	9	2019	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
10	10	2019	Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020

#### D. PERDA TAHUN 2020

NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1	1	2020	Perlindungan Penyandang Disabilitas
2	2	2020	Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi ulang

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
3	3	2020	Perubahan Atas Peraturan DAerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemebntukan Lembaga Penyiaran Punlik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap
4	4	2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
5	5	2020	Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Cilacap
6	6	2020	Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cilacap TA 2020
7	7	2020	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

#### E. PERDA TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2031
2	2	2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
3	3	2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG AJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP
4	4	2021	PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	5	2021	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
6	6	2021	PELESTARIAN BAHASA DAERAH
7	7	2021	Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
8	8	2021	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022

#### F. PERDA TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2022	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap
2	2	2022	Kabupaten Layak Anak
3	3	2022	Kepemudaan
4	4	2022	Kawasan Tanpa rokok



NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
5	5	2022	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
6	6	2022	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TA 2021

## 6.2 Peraturan Bupati yang Diterbitkan

### A. PERBUP TAHUN 2017

NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1	1	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Cilacap
2	3	2017	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
3	4	2017	Pedoman Pemberian Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap
4	5	2017	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
5	6	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor Dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017
6	7	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017
7	8	2017	Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017
8	9	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
9	11	2017	Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017
10	12	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut
11	13	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Di Kecamatan Kampung Laut

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
12	14	2017	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap
13	16	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun 2017
14	17	2017	Pemberian Bantuan Transoprtasi Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dan Pegawai/Guru Swasta pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Cilacap Tahun 2017
15	18	2017	Pemberian Bantuan Transportasi Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap
16	19	2017	Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
17	20	2017	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Selaku Kepala Perangkat Daerah dan/atau Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Kepada Para Kepala Bagian Selaku Kuasa Pengguna ANggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
18	21	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
19	26	2017	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus, Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat Serta Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Dieklola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017
20	27	2017	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang Ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
21	28	2017	Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
22	29	2017	Pencapaian Targe Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
23	30	2017	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
24	31	2017	Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Penggunaan PBB Perdesaan Dan Perkotaan
25	32	2017	Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
26	33	2017	Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
27	34	2017	Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
28	35	2017	Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
29	36	2017	Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap
30	37	2017	Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Malabar Kecamatan Wanareja untuk Kegiatan TMMD Sengkuyung I dan Desa Palugon Kecamatan Wanareja untuk Kegiatan TMMD Sengkuyung II Tahun 2017
31	38	2017	Penyelenggaraan Pasar Murah
32	39	2017	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
33	40	2017	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Lingkungan Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
34	41	2017	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2017
35	42	2017	Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
36	43	2017	Standar Isi Konten Situs Web Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
37	44	2017	Perubahan atas peraturan bupati cilacap no.63 tahun 2016 tentang standar satuan harga di lingkungan pemerintah kabupaten cilacap
38	45	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
39	46	2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
40	47	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap No.95 th 2011 tentang Penetapan TARif Sewa Lahan Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan Atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusda KIC Kabupaten Cilacap
41	48	2017	Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dan APBD dan Tertib Adminitrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol di Kabupaten Cilacap
42	51	2017	Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cilacap
43	52	2017	Pendelagasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan Persertifikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap
44	53	2017	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pemakaian Tanah, Rumah Dinas, Gedung Dan/Atua Bangunan, Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemkab Cilacap Kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
45	54	2017	Penetapan Besaran Honorarium DEwan Pengurus dan Sekretaris DEwan Pengawas pada BLUD RSUD Majenang Kabupaten Cilacap
46	56	2017	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
47	58	2017	Perubahan Kedua Atas Perbup Cilacap No.3 Th 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada UPT Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
48	61	2017	Perubahan Atas Perbup Cilacap No.2 Th 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminana Kesehatan Daerah Di Kabupaten Cilacap
49	66	2017	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir untuk Umum di Kabupaten Cilacap
50	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap
51	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 4567)
52	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 3)
53	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2g)
54	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2f)
55	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2e)
56	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2d)
57	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2c)
58	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2b)
59	67	2017	Pedoman TAta Naskah Dinas Di Lingkungan Pemkab Cilacap (lampiran 2a)
60	68	2017	Penghapusan Biaya sanksi Administrasi Kependudukan Berupa Denda Keterlambatan Pelaporan Bagi Pemohon Dokumen Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil
61	70	2017	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap
62	71	2017	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Cilacap
63	73	2017	Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan untuk Kegiatan TMMD Sengkuyung III Th 2017
64	74	2017	Perubahan Atas Perbup Cilacap No.47 Th 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Th 2017
65	75	2017	Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
66	76	2017	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 216

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
67	77	2017	Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
68	78	2017	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati No.113 Th 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2017
69	79	2017	Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sisematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Cilacap
70	80	2017	Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Th 2017
71	81	2017	Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga kerja Luar Negeri Kabupaten Cilacap
72	82	2017	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Kusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan TA 2017
73	83	2017	Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap
74	84	2017	Perubahan Kedua Atas Perbup Cilacap No. III Th 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
75	85	2017	Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa
76	86	2017	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Perubahan Anggaran Th 2017
77	87	2017	Standar Satuan Harga Di Lingkungan Kabupaten Cilacap Th 2018
78	88	2017	Pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (Car Free Night) Di Kabupaten Cilacap
79	89	2017	Petunjuk Teknis Subsidi Beras Sejahtera Di Kabupaten Cilacap
80	90	2017	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 Pemerintah Kabupaten Cilacap
81	91	2017	Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Cilacap
82	93	2017	Pengundangan Perbup tentang Tata cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan BHPR di Kabupaten Cilacap
83	94	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap No.34 Th 2017 tentang Tatacara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Desa di Kabupaten Cilacap TA 2017
84	95	2017	Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap
85	96	2017	Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional Rt Dan Rw Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
86	97	2017	Peraturan Internal Pada Rumah Sakit Umum DAerah Majenang
87	98	2017	Pencarian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Memepekerjakan Tenaga Asing Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
88	100	2017	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
89	101	2017	Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak yang bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
90	102	2017	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
91	103	2017	Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
92	104	2017	Pembakuan Kode Lokasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap
93	105	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017
94	106	2017	Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cilacap
95	107	2017	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cilacap
96	108	2017	Pedoman Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Cilacap
97	109	2017	Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017
98	112	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
99	113	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap
100	114	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
101	115	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cilacap
102	116	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
103	117	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
104	118	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
105	119	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
106	120	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap
107	121	2017	Pendelegasian Wewenang Panandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Taman Kanak-kanak negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
108	122	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap



<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
109	123	2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap

#### B. PERBUP TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2018	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Cilacap
2	2	2018	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
3	3	2018	Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Di Kabupaten Cilacap Partai Politik
4	4	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Izin Medirikan Bangunan T.A 2018
5	5	2018	Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap T.A 2018
6	6	2018	Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
7	7	2018	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
8	8	2018	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
9	9	2018	Anggaran Belanja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap T.A 2018
10	10	2018	Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap
11	11	2018	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Dan Isi Karcis, Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
12	12	2018	Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Cilacap Tahun
13	13	2018	Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap Tahun 21018
14	14	2018	Bentuk, Ukuran, Warna , Seri dan Isi Karcis Reribusi Pelayanan Pasaar Tahun 2018
15	15	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
16	16	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
17	17	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
18	18	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
19	19	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap
20	20	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
21	21	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
22	22	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
23	23	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
24	24	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
25	25	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
26	26	2018	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
27	27	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
28	28	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
29	29	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
30	30	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
31	31	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
32	32	2018	Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD di Kabupaten Cilacap
33	33	2018	Petunjuk Teknis Pendataan Usaha Mikro Dan Kecil, Prosedur, Tata Cara Pelayanan, Aplikasi Manajemen Izin Usaha Mikro Dan Kecil
34	35	2018	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
35	36	2018	Pemberian Insentif Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Pemberian Insentif Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018
36	37	2018	Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Yang Bertugas Di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Dan Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2018
37	38	2018	Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2018
38	39	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Cilacap T.A 2018
39	40	2018	Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata Di Kabupaten Cilacap
40	41	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilaca Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Pengenaan Sangsi Administrasi di Bidang Perlindungan dan PLH Kepada Kapala DLH Kabupaten Cilacap
41	42	2018	Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap
42	43	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
43	44	2018	Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor Dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir Dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi Di Kabupaten Cilacap
44	45	2018	Kebijakan Akuntansi Keuangan Pada Bagian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
45	46	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 3 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
46	47	2018	Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincaian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
47	48	2018	Tatacara Penghitungan , Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupten Cilacpa Tahun Anggarn 218
48	49	2018	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
49	51	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
50	52	2018	Target Kinerja Penerima Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2018
51	53	2018	Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
52	54	2018	Dewan Riset Daerah Kabupaten Cilacap
53	55	2018	Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Pengadegan Kecamatan Majenang Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II Dan Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Th 2018
54	56	2018	Rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten cilacap th 2017-2022
55	57	2018	Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam LH di kabupaten cilacap
56	58	2018	Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten cilacap no.16 th 2014 tentang pendirian perusahaan daerah serba usaha kabupaten cilacap sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten cilacap no.8 th 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten cilacapno.16 th 2014 tentang pendirian perusahaan daerah seba usaha kabupaten cilacap
57	61	2018	Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Cilacap
58	62	2018	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap
59	63	2018	Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
60	64	2018	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
61	65	2018	Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Dan Tanah Longsor Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
62	66	2018	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan Dan surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
63	67	2018	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
64	68	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Izin Trayek Yang diKelola Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
65	69	2018	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
66	70	2018	Perubahan ke 4 Atas Peraturan Bupati Nomer 3 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
67	71	2018	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
68	72	2018	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Cilacap
69	73	2018	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Cilacap
70	74	2018	Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Cilacap
71	75	2018	Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik (Online) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
72	76	2018	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
73	77	2018	Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dan Pedman Penggunaan Bagian DARI Hasil PAjak Dan Retribusi DAerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
74	78	2018	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Yang Berlokasi Di Wilayah Kecamatan Sidareja Yang Tidak Digunakan Oleh Satuan Kerja Perangkat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Kepada Camat Sidareja
75	79	2018	Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
76	80	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
77	81	2018	Penyelenggaraan Pasar Murah
78	82	2018	Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap
79	83	2018	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Status Hak Pakai Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 1994 Yang Berlokasi Di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Kepada Camat Bantarsari
80	84	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
81	85	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap
82	86	2018	Perubahan ke 5 Atas Peraturan Bupati Nomer 3 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
83	87	2018	Perubahan ke 6 Atas Peraturan Bupati Nomer 3 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
84	88	2018	Pewrubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomoer 8 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cilacap TAHUN 2018
85	90	2018	Pengembangan Kampung Keluarga Berencanaan Di Kabupaten Cilacap
86	92	2018	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
87	93	2018	Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Cilacap 2017-2022
88	94	2018	Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
89	95	2018	Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
90	96	2018	Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
91	97	2018	Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
92	98	2018	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
93	99	2018	Rencana Strategis Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
94	100	2018	Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
95	101	2018	Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
96	102	2018	Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
97	103	2018	Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
98	104	2018	Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
99	105	2018	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
100	106	2018	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
101	107	2018	Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
102	108	2018	Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
103	109	2018	Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
104	110	2018	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
105	111	2018	Rencana Strategis Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022



<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
106	112	2018	Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
107	113	2018	Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
108	114	2018	Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
109	115	2018	Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
110	116	2018	Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
111	117	2018	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
112	118	2018	Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
113	119	2018	Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
114	120	2018	Rencana Strategis Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
115	121	2018	Rencana Strategis Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
116	122	2018	Rencana Strategis Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
117	123	2018	Rencana Strategis Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
118	124	2018	Rencana Strategis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
119	125	2018	Rencana Strategis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
120	126	2018	Rencana Strategis Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
121	127	2018	Rencana Strategis Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
122	128	2018	Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
123	129	2018	Rencana Strategis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
124	130	2018	Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
125	131	2018	Rencana Strategis Kecamatan Kumpanglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
126	132	2018	Rencana Strategis Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
127	133	2018	Rencana Strategis Kecamatan Kawunganen Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
128	134	2018	Rencana Strategis Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
129	135	2018	Rencana Strategis Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
130	136	2018	Rencana Strategis Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
131	137	2018	Rencana Strategis Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
132	138	2018	Rencana Strategis Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
133	139	2018	Rencana Strategis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
134	140	2018	Rencana Strategis Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
135	141	2018	Rencana Strategis Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
136	142	2018	Rencana Strategis Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
137	143	2018	Rencana Strategis Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
138	144	2018	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
139	145	2018	Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
140	146	2018	Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
141	147	2018	Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
142	148	2018	Pencabutan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap Di Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
143	149	2018	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Penyediaan/Penyedotan, Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat Serta Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
144	150	2018	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 219
145	151	2018	Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
146	152	2018	Pengelolaan Lumpur Tinja
147	153	2018	Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
148	154	2018	Pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap
149	156	2018	Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap
150	157	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2 016 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2 015 tentang tatacara Penclonan Pemilihan Kepala Desa
151	158	2018	Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2019
152	159	2018	Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
153	160	2018	Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
154	161	2018	Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2019
155	162	2018	Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap Tahun 2019
156	163	2018	Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
157	164	2018	Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
158	165	2018	Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
159	166	2018	Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2019
160	167	2018	Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
161	168	2018	Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
162	169	2018	Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
163	170	2018	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
164	171	2018	Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2019
165	172	2018	Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019
166	173	2018	Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
167	174	2018	Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2019
168	175	2018	Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2019
169	176	2018	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2019
170	177	2018	Rencana Kerja Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
171	178	2018	Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
172	179	2018	Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun 2019
173	180	2018	Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019
174	181	2018	Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
175	182	2018	Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
176	183	2018	Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2019
177	184	2018	Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
178	185	2018	Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
179	186	2018	Rencana Kerja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tahun 2019
180	187	2018	Rencana Kerja Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Tahun 2019
181	188	2018	Rencana Kerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
182	189	2018	Rencana Kerja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
183	190	2018	Rencana Kerja Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
184	191	2018	Rencana Kerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
185	192	2018	Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
186	193	2018	Rencana Kerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019
187	194	2018	Rencana Kerja Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Tahun 2019
188	195	2018	Rencana Kerja Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
189	196	2018	Rencana Kerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019
190	197	2018	Rencana Kerja Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2019
191	198	2018	Rencana Kerja Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Tahun 2019
192	199	2018	Rencana Kerja Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun 2019
193	200	2018	Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
194	201	2018	Rencana Kerja Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
195	202	2018	Rencana Kerja Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2019
196	203	2018	Rencana Kerja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
197	204	2018	Rencana Kerja Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2019
198	205	2018	Rencana Kerja Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
199	206	2018	Rencana Kerja Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
200	207	2018	Rencana Kerja Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
201	208	2018	Rencana Kerja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
202	209	2018	Rencana Kerja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
203	210	2018	Rencana Kerja Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun 2019
204	211	2018	Rencana Kerja Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
205	212	2018	Rencana Kerja Kecamatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
206	213	2018	Rencana Kerja Kecamatan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
207	214	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
208	215	2018	Perubahan ke 8 Atas Peraturan Bupati Nomer 3 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018
209	216	2018	Pengelolaan Ambang Batas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum DAerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
210	217	2018	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap
211	218	2018	Nomenklatur dan tugas Jabaan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Unsur Staf, Unsur Pengawasan Serta Kecamatan dan Kelurahan
212	219	2018	Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada UPTD BLUD RSUD
213	221	2018	Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Deerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Keagamaan
214	222	2018	Tata Cara Pemberian DAN PErtanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
215	223	2018	Nomenklatur dan Tugas Jabaran Pelaksana pada Perangkat Daerah yang Melaksanakaan Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
216	224	2018	Nomenklatur dan Tugas Jabaran Pelaksana pada Perangkat Daerah yang Melaksanakaan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Penanggulangan Bencana serta Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
217	225	2018	Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap
218	226	2018	Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap
219	227	2018	Jenjang Nilai Dan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
220	229	2018	Pengelolaan Investasi Dan Jaminan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
221	230	2018	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 218
222	233	2018	Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga DAN Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Cilacap
223	235	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
224	236	2018	Penataan Identitas Kendaraan Dinas/Operasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
225	247	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Cilacap
226	248	2018	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
227	250	2018	Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2018
228	253	2018	Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
229	255	2018	Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Dengan Pihak Lain
230	256	2018	Rencana Aksi Daerah ujuan Perubahan Berkelanjutan dan Sustainable Development Goals Kabupaten Cilacap TA 2018-2022
231	257	2018	Pengelolaan Keuangan Desa

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
232	258	2018	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
233	260	2018	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
234	262	2018	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaen Cilacap Tahun Anggaran 2019
235	263	2018	Peraturan Bupati Cilacap tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
236	264	2018	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 230 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
237	265	2018	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, Dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan, Dan Izin Trayek Di Kabupaten Cilacap
238	269	2018	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
239	270	2018	Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
240	271	2018	Tata cara penghitungan, pembagian, penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa dan pedoman penggunaan alokasi dana desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
241	272	2018	Tata cara pembagian, penetapan rincian dan pedoman penggunaan dana desa setiap desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2019
242	273	2018	Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi, Dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
243	274	2018	Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
244	275	2018	Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
245	276	2018	Mekanisme Perforasi di Kabupaten Cilacap
246	277	2018	Pedoman dan Mekanisme Keberatan Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanki Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
247	278	2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pemunguan Pajak



<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Daerah Kabupaten Cilacap
248	279	2018	Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap
249	280	2018	Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Cilacap
250	281	2018	Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten cilacap Tahun Anggaran 2019
251	282	2018	Pencapaian TArgrt Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Penyediaan/Penyedotan KaKus, Temat Pemakaman Dan Pengabuan Mayar Serta Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019

### C. PERBUP TAHUN 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2019	Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupatne Cilacap Tahun 2019
2	2	2019	Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap
3	3	2019	Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Cilacap
4	4	2019	Pemberian Honorarium Pengelola Dana Bantuan Operasioal Sekolah Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2019
5	5	2019	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
6	6	2019	Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata Di Kabupaten Cilacap
7	7	2019	Benuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor, dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
8	8	2019	Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
9	9	2019	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
10	10	2019	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2019
11	11	2019	Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Palayanan Kesehatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019
12	12	2019	Anggaran Belanja Kepala DAerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
13	13	2019	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Palayanana Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribuso Pelayanan Kepelabuhanan Dan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kab.cilacap Tahun Anggran 2019
14	14	2019	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Cilacap
15	15	2019	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, Dan Isi Karcis Retribuysi Pelayanan Pasar TAHUN 2019
16	16	2019	Perubahan Lampiran Perauran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan tera/tera Ulang
17	17	2019	Pendistribusian Dan Penetapan Harga Eceran TERtinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Cilacap
18	18	2019	Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II Dan Kepala Desa Cilibang Kecamatan Jaruklegi Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun desa Reguler Ke-106 Tahun 2019
19	19	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Cilacap
20	20	2019	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
21	21	2019	Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
22	22	2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung Atau Bangunan, Uang Pemasukan Atas Penyerahan Penggunaan Tanah Dan Pass Masuk Kendaraan Pada Perusahaan Daerah Kawasan Indusri Cilacap Kabupaten Cilacap
23	23	2019	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap
24	24	2019	Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cilacap
25	25	2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatta Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
26	26	2019	Perubahan Atas Perbup Nomor 12 tahun 2016 tentang tarif pelayanan kesehaan pada BLUD RSUD Cilacap
27	27	2019	Pencapaian Targt Kinerja Atas Pennerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomuniasi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019
28	28	2019	Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
29	29	2019	Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
30	31	2019	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
31	32	2019	Pencapain Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Palayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2019
32	33	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 262 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapaan Belanja Daerah Kabupaen Cilacap tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
33	34	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Cilacap
34	35	2019	Pengundangan Peraturan Bupati tentang Juklak Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
35	36	2019	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
36	37	2019	Penyelenggaraan Pasar Murah
37	38	2019	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
38	39	2019	Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019
39	40	2019	Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
40	42	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 260 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
41	43	2019	Pemberdayaan Petani Melalui Lapak Petani Di Kabupaten Cilacap
42	44	2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 262 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2019
43	45	2019	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
44	46	2019	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
45	47	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 tentang Penj. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018
46	48	2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
47	49	2019	Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Taman Kanak-

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2019
48	50	2019	Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Yang Bertugas Di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2019
49	51	2019	Pedoman Tata Cara Penghungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap
50	53	2019	nilai Perolehan Air Dan Harga dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan air Tanah Di Kabupaten Cilacap
51	54	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan DAerah Di Kabupaten Cilacap
52	55	2019	Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
53	56	2019	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
54	57	2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 260 tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
55	58	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari Kabupaten Cilacap
56	60	2019	Penurunan Stunting
57	61	2019	Surat Pemberitahuan Pajak DAerah Secara Elektronik
58	62	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
59	63	2019	Pedoman Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran Dan Satuan Relawan Kebakaran Di Kabupaten Cilacap
60	64	2019	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
61	65	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan Dan Surat-surat Lainnya Di bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
62	66	2019	Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada taman kanak, SD dan SMP di Kabupaten Cilacap
63	68	2019	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2020
64	69	2019	Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri Di Kabupaten Cilacap
65	70	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2019
66	74	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjamna Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
67	75	2019	Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
68	76	2019	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Cilacap tahun 2019
69	78	2019	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
70	79	2019	Pencapaian Target Kinerja Atas Pennerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada Disnakerin Kabupaten Cilacap Tahun 2019
71	80	2019	Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (lanjut3)
72	80	2019	Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (lanjut4)
73	80	2019	Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (lanjut3)
74	80	2019	Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
75	80	2019	Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (lanjut1)

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
76	81	2019	Tatacara Pelaporan, Pengelolaan dan Tindak lanjut Pengaduan serta Perlindungan Pelapor Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
77	83	2019	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
78	84	2019	Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
79	85	2019	Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Dinamis Dan Statis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
80	86	2019	Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Cilacap
81	87	2019	Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
82	88	2019	Tata Cara Akuisisi Arsip Statis Di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Cilacap
83	89	2019	Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik Di Kabupaten Cilacap
84	90	2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
85	91	2019	Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Cilacap
86	92	2019	Penerapan Standar Pelayanan Mininal Di Kabupaten Cilacap
87	93	2019	Rencana strategis Badan Layanan Umum DAerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2017-2020
88	97	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 225 tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap
89	99	2019	Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
90	100	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
91	101	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 181 Tahun 2018 tentang Renca Kerja Dinas Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
92	102	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 162 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Inspekora Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Tahun 2019
93	103	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2019
94	104	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Sekrearia Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
95	105	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
96	106	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2019
97	107	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 159 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
98	108	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2019
99	109	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
100	110	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
101	111	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 174 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2019
102	112	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 164 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
103	112	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 164 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
104	113	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 183 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2019



<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
105	114	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 175 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2019
106	115	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 184 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
107	116	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 182 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
108	117	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 182 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2019
109	118	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 190 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
110	119	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 198 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Tahun 2019
111	120	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 211 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
112	121	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 169 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
113	122	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun 2019
114	123	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 172 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019
115	124	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 199 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun 2019
116	125	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 173 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
117	126	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 185 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
118	127	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 180 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019
119	128	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 161 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
120	129	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 167 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
121	130	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 176 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2019
122	131	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 159 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun 2019
123	132	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
124	133	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
125	134	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 200 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
126	135	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 150 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
127	136	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 191 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
128	137	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 187 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Tahun 2019
129	138	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 205 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
130	139	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 196 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
131	140	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 202 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2019
132	141	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 197 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2019
133	142	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja DPKUKM Kabupaten Cilacap Tahun 2019
134	143	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2019
135	144	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 189 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Tahun 2019
136	145	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019
137	146	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 203 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
138	147	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 193 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019
139	148	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 165 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
140	149	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2019
141	150	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 186 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tahun 2019
142	151	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 151 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Tahun 2019
143	152	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Patimuan Kabupaten

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Cilacap Tahun 2019
144	154	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2019
145	156	2019	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
146	157	2019	Pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaen Cilacap
147	158	2019	Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
148	159	2019	Petunjuk Teknis Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cilacap
149	160	2019	Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Untuk Penghitungan Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan Di Kabupaten Cilacap
150	161	2019	Tatacara Pembayaran Dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektronik Di Kabupaten Cilacap
151	162	2019	Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Cilacap
152	163	2019	Perubahan Tarif Retribusi Pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Cilacap
153	164	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap nomor 273 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Rincian Alokasi, Dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak DAerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
154	169	2019	Pedoman Penyaluran Bibit Tanaman Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Cilacap
155	170	2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
156	171	2019	Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
157	172	2019	Akselerasi Pengembangan Akses Internet Melalui Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Serta Fiber Optik Di Kabupaten Cilacap
158	174	2019	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019
159	175	2019	Nilai Jual Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Di Wilayah Kabupaten Cilacap
160	176	2019	Strategi Penanganan Kemiskinan Melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di Kabupaten Cilacap
161	179	2019	Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah
162	182	2019	Program Kampung Iklim
163	183	2019	Petunjuk Pelaksanaan DAN Petunjuk Teknis Peraturan DAerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
164	184	2019	Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektronik Di Kabupaten Cilacap
165	185	2019	Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Cilacap
166	190	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
167	191	2019	Tatacara Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan
168	192	2019	Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap
169	193	2019	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
170	196	2019	Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Cilacap
171	197	2019	Standar dokumen Pemilihan Pada Pelaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
172	198	2019	Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
173	199	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
174	200	2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat Di Kabupaten Cilacap
175	201	2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati cilacap Noomr 87 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Cilacap
176	203	2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasaran Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dalam wilayah Kabupaten Cilacap
177	206	2019	Kebijakan Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
178	207	2019	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
179	208	2019	Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
180	209	2019	Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Pada Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
181	210	2019	Pelaksanaan Anggaran Dan Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis DAerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
182	211	2019	Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana bisnis Dan anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
183	213	2019	Bentuk Formulir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
184	214	2019	Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyaratan Desa
185	215	2019	Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintahana Kabupaten Cilacap Tahun 2020
186	216	2019	Tata Cara Penghitungan Pembagian Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa DAN Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020
187	217	2019	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
188	218	2019	Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi, dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020
189	220	2019	Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
190	221	2019	Analisis standar Belanja
191	223	2019	Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehaan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
192	224	2019	Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
193	225	2019	Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perindustrian, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Ketransmigrasian, Urusan Perpustakaan, Urusan Pendidikan Dan Pelatihan, Urusan Kearsipan Dan Urusan Kepegawaian

#### D. PERBUP TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2020	Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
2	2	2020	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
3	3	2020	Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2020
4	4	2020	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, REtribusi Pengujian Kendaraan

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Dan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
5	6	2020	Anggaran Belanja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
6	7	2020	Target Kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan DAerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
7	8	2020	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Th 2020
8	9	2020	Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020
9	10	2020	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Penyediaa / Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat Serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
10	11	2020	Pedoman Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program, Jaminan Kesehatan Nasional DI Kabupaten Cilacap
11	12	2020	Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata Di Kabupaten Cilacap
12	13	2020	Bentuk Ukuran Warna Kode nomor dam Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan REtribusi MCK Tempat Rekreasi Di Kabupaten Cilacap
13	14	2020	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai HASil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
14	16	2020	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinana di Kabupaten Cilacap
15	17	2020	Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepsda Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangn Desa Sengkuyung II, Dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kesuguhan Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Tahun 2020
16	18	2020	Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten



<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Cilacap Tahun Anggaran 2020
17	19	2020	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten cilacap Tahun 2018-2022
18	19	2020	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten cilacap Tahun 2018-2022 (lampiran)
19	20	2020	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025
20	21	2020	Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
21	23	2020	Penugasan Kepda Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta wijaya Kabupaten Cilacap DAN Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap Guna Melaksanakan Kerja Sama Investasi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama Untuk Optimalisasi Pelayanan Kota Cilacap
22	24	2020	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
23	27	2020	Organ, Kepegawaian, Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
24	28	2020	Organ Kepegawaian Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
25	36	2020	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
26	37	2020	Pencapaian Target kinerja Atas Penerimaan REtribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2020
27	39	2020	Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cilacap
28	41	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
29	43	2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
30	44	2020	Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2020

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
31	46	2020	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DAN Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
32	47	2020	Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
33	48	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati cilacap Nomor 277 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
34	49	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Cilacap
35	52	2020	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap nomor 204 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
36	54	2020	Penyelenggaraan Pasar Murah Dan Operasi Pasar
37	56	2020	Pedoman Umum Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Pemberian Bantuan Pangan Bagi Warga TERkena Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020
38	57	2020	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
39	66	2020	Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Kekeringan, DAN Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
40	67	2020	Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir
41	68	2020	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi
42	69	2020	Pedoman Penerimaan Peserta Didik BARu Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/5254
43	70	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,

NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
			KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
44	71	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
45	72	2020	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
46	73	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Cilacap
47	74	2020	Perubahan Atas peraturan Bupati Cilacap Nomor 216 Tahun 2019 Tentang Cara penghitungan, pembagian, Penetapan Rincian alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2020
48	75	2020	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
49	78	2020	Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasaran Minimal, Serta Pembinaan Teknis Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
50	79	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
51	81	2020	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di KLingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber DARI Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
52	82	2020	Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar
53	85	2020	Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting Lainnya Di Kabupaten Cilacap Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19)

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
54	86	2020	Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
55	87	2020	Pedoman Pemberian REMunerasi Pada unit Pelaksana Teknis Daerah BADan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DAerah Majenang Kabupaten Cilacap
56	88	2020	Perubahan Atras Peraturan Bupati Cilacap Nomor 221 Th 2019 Tentang Analisis Standar Belanja
57	89	2020	Tata cara Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap
58	90	2020	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan Dan Pengajuan Proses Penyertipikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap
59	91	2020	Bantuan Keuagn pada Pemerintahan Desa yang Bersifat Khusus Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
60	92	2020	Perubahan ke Lima Atas Peraturan Bupati Cilacap No.59 th 2014 ttg Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap
61	93	2020	Pelaksana Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
62	94	2020	Tata Cara Pelaksana Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
63	95	2020	Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap
64	96	2020	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kabupaten Cilacap
65	97	2020	Tatacara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
66	98	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020
67	99	2020	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin / Rentan Terkena Dampak Corona Viruse Disease 2019 (CIVID-19) Di Kabupaten Cilacap Tahun 2020
68	101	2020	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
69	102	2020	Peraturan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2019 Tentang sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
70	106	2020	Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri sipil Di Lingkungagn Pemerintah Kabupaten Cilacap
71	107	2020	Standar Operasional Prosedur Evaluasi Dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap
72	108	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap
73	109	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 279 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cilacap
74	114	2020	Pemberdayaan perkumpulan petani pemakain air
75	119	2020	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Cilacap
76	120	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
77	121	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati cilacap Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Muiskin/Rentan Terkena Dampak Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) Di Kabupaten Cilacap
78	122	2020	Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
79	123	2020	Penjabaran Petanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
80	125	2020	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021
81	126	2020	Penerapan, Peningkatan Disiplin, Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian corona Virus Desease 2019
82	127	2020	Etika Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
83	130	2020	Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Deseasde 2019 ( Covid 19 ) DI Kabupaten Cilacap
84	131	2020	Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris DAerah Kabupaten Cilacap Selaku Pengguna anggaran Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sumbangan Uang Dan BArang Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
85	132	2020	Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Cilacap
86	133	2020	Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap
87	134	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
88	139	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
89	140	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pemimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap
90	141	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
91	142	2020	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Cilacap
92	143	2020	Pembentukan Alat Kelengkapan, Struktur Organisasi Dan Penetapan Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap
93	144	2020	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
94	147	2020	Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik DAerah Pada Satuan Kerja Perangkat Dearah /unit Kerja Di Lingkungan Pemeritnah Kabupaten Cilacap
95	148	2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2020

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
96	150	2020	PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT PENGELOLA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
97	151	2020	Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
98	152	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap
99	158	2020	Perubahan Kedua Atas Nomor 99 Th 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi WArga Miskin / Rentan Terkena Dampak Corona Viruse Disease 2019 (CIVID-19) Di Kabupaten Cilacap Tahun 2020
100	159	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
101	160	2020	Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020
102	161	2020	Pengelolaan Keuangan Pada Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
103	163	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomr 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
104	164	2020	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
105	165	2020	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap
106	166	2020	Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
107	167	2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas DAN fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
108	169	2020	Hasil Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
109	170	2020	Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Kerja unit Pelaksana Teknis DAerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
110	174	2020	Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
111	176	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Viruse Disease 2019 ( Covid-19) Di Kabupaten Cilacap
112	178	2020	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
113	179	2020	Tata Cara Penghitungan Pembagian Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2021
114	180	2020	Tata Cara Pengalokasian Bagian Darian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
115	181	2020	Tata Cara Pendaftaran pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Di Kabupaten Cilacap
116	182	2020	Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
117	183	2020	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
118	184	2020	Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Pengelolaan Dan Pendistribusian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Cilacap
119	185	2020	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, Dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021
120	186	2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DAerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap



## E. PERBUP TAHUN 2021

NO	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1	1	2021	Bentuk, Ukuran, Warna Kode, Nomor Dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, Dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap
2	2	2021	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Cilacap
3	3	2021	Anggaran Belanja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DAerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2021
4	4	2021	Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependudukan Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2021
5	5	2021	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
6	6	2021	Tunjangan komunikasi Insentif, tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
7	9	2021	Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Cilacap
8	11	2021	Perubahan Atas PARaturan Bupati Cilacap Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan Pembagian Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
9	13	2021	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribuysi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan PADA Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
10	14	2021	Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2021
11	15	2021	Target Kinerja Penerima Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
12	17	2021	Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
13	19	2021	Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
14	20	2021	Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa
15	21	2021	Penataan Identitas Kendaraan Dinas Operasional Roda empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
16	22	2021	Petunjuk Teknis Mekanisme Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Data Fakir Miskin Dan Orang tidak Mampu Di Kabupaten Cilacap
17	23	2021	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan sosial Tunai Jaring Pengaman sosial bagi warga miskin/Rentan Terkena Dampak Corona Viruse Disease (covid 19) Di Kabupaten Cilacap
18	24	2021	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
19	25	2021	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
20	26	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Cilacap
21	27	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
22	29	2021	Penyelenggaraan Pasar Murah Dan Operasi Pasar
23	30	2021	Tata Cara Kerja Sama Desa
24	32	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Organ, Kepegawaian, Dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
25	33	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Cilacap
26	34	2021	Perubahan Tarif Retribusi Pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Cilacap
27	35	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
28	37	2021	Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap
29	38	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Cilacap
30	39	2021	Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar Di Kabupaten Cilacap
31	40	2021	Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Balongtapa Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tahun 2021
32	41	2021	Pedoman Penerima Peserta Didik Baru Pada Taaman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2021/2022
33	42	2021	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
34	43	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Organ, Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
35	44	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
36	49	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Organ, Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
37	56	2021	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
38	59	2021	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap Untuk Menyelenggarakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Cilacap
39	60	2021	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
40	64	2021	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
41	65	2021	Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
42	70	2021	Pedoman Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Mendukung Keberhasilan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Cilacap
43	71	2021	Pedoman Pembentukan Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu Di Kabupaten Cilacap
44	72	2021	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
45	73	2021	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Tingkat Desa/Keluarhan Di Wilayah Kabupaten Cilacap
46	74	2021	Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Cilacap nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap
47	75	2021	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041
48	77	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
49	78	2021	Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap
50	80	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap, Nomor 178 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
51	81	2021	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
52	84	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Cilacap
53	87	2021	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
54	89	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
55	90	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
56	91	2021	Master Plan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
57	92	2021	Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Sosial, Urusan Kesehatan, Urusan Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Urusan Bencana, Kecelakaan Dan Kondisi Bahaya
58	93	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 208 Tahun 2019 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
59	95	2021	Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
60	96	2021	Strategi Mewujudkan Service Excellent Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Melalui Sistem Digitalisasi
61	97	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2012-2025
62	98	2021	Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
63	99	2021	Sistem Pengelolaan Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
64	100	2021	Tata Kelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Dan Terintegrasi
65	103	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap nomor 198 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum DAerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
66	104	2021	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
67	105	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap nomor 69 Tahun 2019 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri Di Kabupaten Cilacap
68	107	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
			Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
69	109	2021	Pedoman Penyelenggaraan Forum konsultasi Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
70	110	2021	Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
71	111	2021	Perubahan Tarif Retribusi Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Cilacap
72	113	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 180 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
73	115	2021	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap
74	116	2021	Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Cilacap
75	118	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 270 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Peringatan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap
76	119	2021	Pembinaan Disiplin Dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
77	120	2021	Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor Dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, Dan Retribusi Mandi Cuci Kakus Tempat Rekreasi Di Kabupaten Cilacap
78	121	2021	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cilacap Tahun 2018 - 2038
79	122	2021	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
80	123	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
81	124	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
82	125	2021	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
83	126	2021	Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
84	127	2021	Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Dan Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Cilacap
85	129	2021	Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
86	132	2021	Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
87	133	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
88	134	2021	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Cilacap
89	135	2021	Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
90	136	2021	Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
91	138	2021	Rencana Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022 - 2026
92	139	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap
93	140	2021	Pencabutan Peraturan Bupati Cilacap
94	141	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
95	142	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap
96	143	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap
97	144	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
98	145	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
99	146	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
100	147	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
101	148	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
102	149	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap
103	150	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
104	151	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
105	152	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
106	153	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap
107	154	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
108	155	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cilacap
109	156	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
110	157	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap
111	158	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
112	159	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap



<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
113	160	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
114	161	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
115	162	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cilacap
116	163	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap
117	164	2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
118	167	2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap
119	168	2021	Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap
120	170	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap
121	171	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
122	172	2021	Pedoman Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
123	173	2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 208 Tahun 2019 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
124	174	2021	Pencabutan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap
125	175	2021	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, Dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022
126	176	2021	Anggaran Belanja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
127	177	2021	Analisis Standar Belanja

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
128	178	2021	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap

#### F. PERBUP TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
1	1	2022	Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Cilacap
2	3	2022	Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Dan Sanggar Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2022
3	5	2022	Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
4	6	2022	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
5	9	2022	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
6	11	2022	Mal Pelayanan Publik
7	14	2022	Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Insentif Bagi Vaksinator Dan/Atau Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Cilacap
8	21	2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9	26	2022	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
10	27	2022	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
11	30	2022	Rincian Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap
12	32	2022	Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Kabupaten Cilacap

<b>NO</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TENTANG</b>
13	39	2022	Tata Cara Pengadaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
14	40	2022	Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Insentif Bagi Vaksinator Dan/Atau Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Cilacap
15	41	2022	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
16	44	2022	Logo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
17	46	2022	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022
18	48	2022	Pembentukan Sekolah Bersih Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya Di Kabupaten Cilacap
19	52	2022	Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat Serta Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kabupaten Cilacap
20	62	2022	Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
21	69	2022	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman
22	74	2022	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021

## BAB VII

### CATATAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

#### 7.1 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$47,50\% \leq$	Sangat tinggi (ST)
(2)	$38,76\% \leq 47,50\%$	Tinggi (T)
(3)	$31,26\% \leq 38,75\%$	Sedang (S)
(4)	$22,51\% \leq 31,25\%$	Rendah (R)
(5)	$\leq 22,50\%$	Sangat Rendah (SR)

Sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### A. Urusan Pemerintahan Wajib

##### 1. Urusan Pendidikan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

##### a. Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II	
		K	Rp	K	RP
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72,7	36,8	ST	S
2	Program Pengelolaan Pendidikan	35,64	13,74	S	SR
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	49,99	39,79	ST	T
	<b>Rata-rata</b>	<b>52,78</b>	<b>30,11</b>	<b>ST</b>	<b>R</b>

Capaian anggaran Program Pengelolaan Pendidikan di Triwulan II masih “Sangat Rendah” disebabkan karena untuk kegiatan non fisik pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan pada Tri Wulan III (awal Tahun Pelajaran Baru) sedangkan untuk kegiatan Fisik masih rendah karena proses pengadaan barang jasa pada tri wulan II dan Kontrak di bulan Juni.

##### b. Permasalahan

Capaian anggaran Program Pengelolaan Pendidikan di Triwulan II masih “Sangat Rendah” disebabkan karena untuk kegiatan non fisik pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan pada Tri Wulan III (awal Tahun Pelajaran Baru) sedangkan untuk kegiatan Fisik masih rendah karena proses pengadaan barang jasa pada tri wulan II dan Kontrak di bulan Juni

## 2. Urusan Kesehatan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

### a. Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	56,13	37,73	Sangat Tinggi	Sedang
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36,62	29,11	Sedang	Rendah
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44,76	13,79	Tinggi	Sangat Rendah
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman	48,90	29,33	Sangat Tinggi	Rendah
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	60,31	60,28	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

### b. Permasalahan dan Solusi

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Realisasi capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota mencapai 56,13% dengan status capaian kinerja “Sangat Tinggi”, sedangkan realisasi anggaran mencapai 37,73% (Rp 51.891.924.629) dengan status capaian anggaran “Sedang”. Adapun permasalahan yang menyebabkan status capaian anggaran masih sedang yaitu :

#### a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Realisasi anggaran masih rendah karena pelaksanaannya tidak tepat di setiap tribulannya, misalnya tribulan 1 data dari programer di bulan maret belum mengumpulkan semua sehingga pelaksanaan evaluasi mundur di bulan april, karena yang akan diajukan NPD hanya 1 kode rekening, maka akan digabungkan di NPD bulan Juli.
- Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Memberikan informasi ke programer kabupaten supaya mengirimkan data yang akan dievaluasi agar tepat waktu.

#### b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Realisasi anggaran masih sangat rendah karena difocusing sampai 0.

#### c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Realisasi anggaran masih rendah karena beberapa kendaraan dinas beserta suku cadangnya masih dalam kondisi yang baik dan belum membutuhkan pergantian suku cadang maupun servis kendaraan.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Pengguna kendaraan dinas diharapkan untuk lebih rajin mengecek kondisi kendaraannya sehingga ketika terjadi kerusakan kecil bisa langsung dilaporkan untuk dilakukan perbaikan.
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Realisasi anggaran masih rendah karena beberapa perangkat komputer dan peralatan lainnya saat ini belum membutuhkan perbaikan, sehingga biaya pemeliharaan masih minim.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Segera menginventarisir komplain atau masukan jika ada perangkat yang membutuhkan perbaikan.
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Realisasi anggaran masih sangat rendah karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di Triwulan III.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan dengan seefektif dan seefisien mungkin
- f) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Realisasi anggaran masih rendah karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan kalibrasi di TW IV (Oktober dan November) sesuai jadwal klien. Jumlah limbah yang diproduksi setiap bulannya tidak selalu sama sehingga biaya pengolahan limbah disesuaikan dengan jumlah limbah yang diproduksi.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi capaian kinerja program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat mencapai 36,62% dengan status capaian kinerja “Sedang”, sedangkan realisasi anggaran mencapai 29,11% (Rp 28.047.827.367) dengan status capaian anggaran “Rendah”. Adapun permasalahan yang menyebabkan status capaian kinerja fisik masih sedang dan anggaran masih rendah yaitu :

a) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah dikarenakan renovasi gedung Labkesda tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh :
- Lokasi Renovasi gedung labkesda masih dalam bangunan yang baru selesai dibangun dengan anggaran APBD tahun 2021 dan masih dalam masa pemeliharaan.
- Tidak ada dana terkait belanja umum untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta dikhawatirkan bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi/kebutuhan User (UPTD Labkesda).
- Anggaran Renovasi gedung Labkesda masuk dalam pengadaan secara lelang, dan waktu yang dimiliki untuk proses review gambar konsultan perencana, proses pengesahan gambar dan RAB, serta

- proses lelang anggaran tersebut kurang lebih 1 - 2 bulan, sedangkan batas waktu untuk entry omspan adalah 20 Juli 2022.
- b) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah dikarenakan pengadaan yang menggunakan dana DAK masih dalam proses review inspektorat. Karena proses penyusunan kontrak membutuhkan langkah yang kompleks sehingga memakan waktu yang cukup lama.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Dengan melakukan langkah-langkah penyusunan kontrak seefektif dan seefisien mungkin.
  - c) Pengadaan Obat, Vaksin
    - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah dikarenakan proses penyelesaian paket pekerjaan masing-masing kontrak membutuhkan waktu yang beragam. Sebagian besar kontrak berakhir kontrak pada bulan Oktober 2022, sehingga proses pencairan juga menunggu barang lengkap yang biasanya mendekati batas akhir waktu pekerjaan.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Mengingat ke pihak rekanan untuk segera menyelesaikan kontrak.
  - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah dikarenakan transportasi rujukan jampersal senilai 503.793.000 belum ada yang menggunakan karena juknis dan Inpres penggunaan Jampersal dari Kemenkes baru turun sekitar bulan Agustus 2022 sehingga transportasi jampersal belum bisa digunakan sedangkan sampai sekarang di e-kohort jampersal belum ada klaim persalinan dengan jampersal.
  - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
    - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena difocusing sampai 0/anggaran ditiadakan/dihapuskan.
  - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - Realisasi fisik dan anggaran masih rendah karena mengejar kegiatan ODF Tingkat Kabupaten yang merupakan RPJMD Tahun 2022
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Pelaksanaan kegiatan di bulan Juli, Agustus, dan September.
  - g) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
    - Realisasi fisik dan anggaran masih rendah karena pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli, Agustus, dan September (TW III).
  - h) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
    - Realisasi fisik dan anggaran masih rendah karena nominal 11.655.000 (BTT tahap 1) dihapus dan dialihkan untuk belanja lain di BTT tahap 2.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Kegiatan pertemuan evaluasi surveilans akan dilaksanakan pada TW 4
  - i) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
    - Realisasi fisik dan anggaran masih rendah karena SPJ belum selesai, sehingga anggaran belum bisa dicairkan.

- Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober, November, dan Desember (TW IV).
- j) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena pelaksanaan uji fungsi baru akan dilaksanakan di bulan September sehingga ada penundaan dalam proses pembayaran.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Menjalin komunikasi yang aktif dengan penyedia untuk memastikan barang berikut proses penyelesaian pembayaran dapat tepat waktu sesuai jadwal.
- k) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena menyelesaikan kegiatan Ijin Operasional Rumah Sakit yang harus diperpanjang sebelum bulan Agustus.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Kegiatan Rumah Sakit PONEK akan dilaksanakan Bulan September.
- l) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Realisasi fisik dan anggaran masih rendah karena pengadaan untuk bahan kimia masih menunggu proses lelang belum pembayaran.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Masih menunggu konfirmasi.
- m) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena belum bisa terlaksana, masih menunggu konfirmasi dari klien.
- n) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena hibah PMI senilai 300.000.000 sedang dalam proses penandatanganan BA pemeriksaan karena saat itu terkendala PPKOM tengah melaksanakan tugas TKHD
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Melengkapi berkas kemudian memproses ketahap selanjutnya.
- o) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena adanya perubahan DPA sehingga dilakukan penundaan pelaksanaan kegiatan.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, November, dan Desember (TW IV)
- p) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena menyelesaikan kegiatan Ijin Operasional klinik yang harus diperpanjang sebelum bulan Agustus.
  - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Akan dilaksanakan kegiatan pertemuan pada tanggal 19 September 2022.
- q) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - Realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah karena sedang dalam proses perubahan rincian DPA sehingga belum bisa dilaksanakan, saat ini sedang dalam tahap merubah rincian DPA.



- Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Kegiatan akan dilaksanakan di bulan September setelah DDPA disahkan.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  
 Realisasi capaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan mencapai 44,76% dengan status capaian kinerja “Tinggi”, sedangkan realisasi anggaran mencapai 13,79% (Rp 216.199.800) dengan status capaian anggaran “Sangat Rendah”. Adapun permasalahan yang menyebabkan status capaian anggaran masih sangat rendah yaitu :
- a) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
    - Realisasi anggaran masih rendah karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kegiatan Ukom yang mendesak.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Sebagian Kegiatan Sedang Berjalan, Kurang 2 kali pertemuan yang akan dilaksanakan di bulan Oktober (TW IV).
  - b) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
    - Realisasi anggaran masih rendah karena Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kegiatan Ukom yang mendesak.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Sebagian Kegiatan Sedang Berjalan, kurang 4 kali pertemuan yang akan dilaksanakan di bulan Oktober (TW IV).
  - c) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
    - Realisasi anggaran masih sangat rendah karena insentif nakes Puskesmas sedang dalam proses menunggu perubahan anggaran, sehingga insentif nakes Puskesmas belum bisa dicairkan.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Segera mencairkan setelah DPPA disahkan.
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan , Makanan Dan Minuman  
 Realisasi capaian kinerja program sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman mencapai 48,90% dengan status capaian kinerja “Sangat Tinggi”, sedangkan realisasi anggaran mencapai 29,33% (Rp 126.796.100) dengan status capaian anggaran “Rendah”. Adapun permasalahan yang menyebabkan status capaian anggaran masih rendah yaitu :
- a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
    - Realisasi anggaran masih rendah karena sedang dilakukan peningkatan kegiatan tersebut / penjadwalan ulang.
    - Solusi / Rencana Tindak Lanjut : Kegiatan akan dilaksanakan di bulan September Oktober (TW III & IV).
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
 Realisasi capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mencapai 60,31% dengan status capaian kinerja “Sangat Tinggi”, sedangkan realisasi anggaran mencapai 60,28% (Rp 244.598.000) dengan status capaian anggaran “Sangat Tinggi”.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu : Disperkimta Kabupaten Cilacap, Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, dan Dinas PUPR Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Disperkimta Kabupaten Cilacap

##### 1) Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.29	10.33	SR	SR
2	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	14.81	16.31	SR	SR

##### 2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menyebabkan status kinerja fisik (K) sangat rendah (SR) adalah penentuan target di awal tahun terlampau besar, karena mengacu pada aliran kas di masing-masing DPA. Sedangkan pekerjaan baru bisa dilaksanakan pada pertengahan triwulan ke dua.

Solusinya adalah menghitung secara lebih rinci aliran kas di masing-masing program dan kegiatan pada awal tahun anggaran, sehingga deviasi tidak melenceng terlalu besar. Dan juga mempercepat dokumen perencanaan untuk pengadaan lelang, sehingga diharapkan sebelum masuk triwulan ke dua, semua pekerjaan sudah spk dan pekerjaan bisa segera dilaksanakan.

#### b. Dinas PSDA Kabupaten Cilacap

##### 1) Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,05	44,05	ST	T
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	68,18	27,14	ST	R
	Rata-rata	60,62	35,60	ST	S

##### 2) Permasalahan dan Solusi

Program Pengelolaan SDA Anggaran Rp. 54.314.582.000, Realisasi fisik sampai dengan bulan Juli/ TW II Sebesar 68,18 %, belum tercapainya target fisik karena kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatan tender APBD sebanyak 25 paket tanggal spk 22 Juni proses pelaksanaan masih

berjalan sampai akhir kontrak 20 November 2022, sedangkan belum tercapainya target untuk realisasi keuangan karena masih dalam proses pencairan untuk pihak ketiga. TINDAK LANJUT :

- a) Melakukan rapat rutin internal dan melaksanakan monev percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Dan memberikan pengertian kepada pihak ketiga agar melakukan pencairan setelah pekerjaan fisik dilapangan selesai.

**c. Dinas PUPR Kabupaten Cilacap**

1) Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	50,08	44,51	ST	T
2	Program Penyelenggaraan Jalan	%	100,36	13,47	ST	R
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	120	7,20	ST	R
4	Program Penataan Bangunan Gedung	%	92,31	19,86	ST	R

2) Permasalahan dan Solusi

Kegiatan fisik memiliki realisasi keuangan rendah dikarenakan masih banyaknya rekanan yang belum melakukan penagihan. Setelah proses pelelelangan selesai, PPTK menghimbau kepada seluruh rekanan agar secepatnya menyelesaikan proses penagihan.

**4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Disperkimta Kabupaten Cilacap. Adapun Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50	41.49	ST	T
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	11.35	4.09	SR	SR

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	44.28	32.18	T	S
4	Program Pengembangan Perumahan	0	0.14	SR	SR
5	Program Kawasan Permukiman	82.24	78.43	ST	ST
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	17.02	4.45	SR	SR
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	19.10	12.53	SR	SR

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menyebabkan status kinerja fisik (K) sangat rendah (SR) adalah penentuan target di awal tahun terlampaui besar, karena mengacu pada aliran kas di masing-masing DPA. Sedangkan pekerjaan baru bisa dilaksanakan pada pertengahan triwulan ke dua.

Solusinya adalah menghitung secara lebih rinci aliran kas di masing-masing program dan kegiatan pada awal tahun anggaran, sehingga deviasi tidak melenceng terlalu besar. Dan juga mempercepat dokumen perencanaan untuk pengadaan lelang, sehingga diharapkan sebelum masuk triwulan ke dua, semua pekerjaan sudah spk dan pekerjaan bisa segera dilaksanakan.

**5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu : Satpol PP Kabupaten Cilacap, BPBD Kabupaten Cilacap, dan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 pada ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Satpol PP Kabupaten Cilacap**

Pada Satpol PP, untuk ntuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

1) Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d TW 2		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d TW II	
		K	Rp.	K	Rp.
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53,9%	55,81%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	74,85%	63,89%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	62,87%	42,19%	Sangat Tinggi	Tinggi

## 2. Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

#### 1) Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) :

- Belum optimalnya Persentase Penegakan PERDA;
- Belum optimalnya Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;

Hal ini disebabkan :

- Belum terjangkaunya penegakan perda di wilayah perbatasan kabupaten;
- Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap menurut Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pentetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk SATPOL PP Kabupaten Cilacap dengan Tipe A anggota minimal 301 – 400 orang sedangkan jumlah anggota SATPOL PP Kabupaten Cilacap saat sebanyak 132 orang sehingga jumlah anggota SATPOL PP Kabupaten Cilacap masih sangat kurang.

#### 2) Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, yaitu belum optimalnya Persentase Linmas yang mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan adanya refocusing dan realokasi anggaran pada tahun anggaran 2020 terkait penanganan dan vaksinasi Covid-19 sehingga mengurangi tingkat pencapaian target kegiatan pelatihan bagi anggota Linmas.

#### 3) Penyelenggaraan sub Urusan Kebakaran :

- Belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
- Belum terpenuhinya tingkat waktu tanggap (Respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran,

Hal ini disebabkan :

- Masih tingginya potensi ancaman kebakaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- Penanggulangan dan pengendalian kebakaran masih menimbulkan kerugian yang besar akibat terbatasnya jumlah pos sektor di tingkat kecamatan;
- Terbatasnya sarpras pencegahan dan penanggulangan kebakaran di pos sektor di tingkat kecamatan;
- Kurangnya SDM berbasis kompetensi teknis kebakaran akibat minimnya bimtek dan diklat kompetensi petugas;
- Penambahan unit layanan pemadam kebakaran yang memadai standar minimal (2 unit damkar tiap pos sektor)
- Keterlibatan Corporate Sociality Responsibility (CSR) yang memiliki Unit Layanan Kebakaran masih perlu dioptimalkan;
- Masih kurangnya jumlah dan kapasitasn anggota UPT Pemadam Kebakaran pada SATPOL PP Kabupaten Cilacap menurut Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran, bahwa setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran dioperasikan

oleh 6 (enam) petugas selama 24 jam. Sehingga dibutuhkan petugas damkar untuk 8 unit x 6 petugas x 3 *shift*: 144 petugas, sedangkan jumlah saat ini sebanyak 53 orang sehingga jumlah anggota UPT Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kabupaten Cilacap masih sangat kurang.

b) Solusi

Penambahan personil, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

**b. BPBD Kabupaten Cilacap**

1) Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	61,87	45,92	ST	T
2	Program Penanggulangan Bencana	51,07	26,87	ST	R
Rata – Rata		80,93	72,55	ST	ST

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berdasarkan pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Juni untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota BPBD Kabupaten Cilacap dengan capaian fisik sudah mencapai 61.87%, capaian keuangan mencapai 45,92% dan untuk Program Penanggulangan Bencana capaian fisik sudah mencapai 51.07%, capaian keuangan mencapai 26,87%. Permasalahan yang terjadi untuk capaian fisik yaitu banyak kegiatan yang dilakukan pada triwulan iii dan triwulan iv. Sedangkan permasalahan untuk capaian keuangan yaitu proses pembuatan SPJ yang belum selesai.

b. Solusi

Kegiatan yang belum selesai akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV sehingga capaian pada tahun 2022 mencapai target. Sedangkan untuk memenuhi target pada capaian keuangan yaitu dengan mempercepat pembuatan SPJ.

**c. Bakesbangpol Kabupaten Cilacap**

1) Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	49,81	41,43	Tinggi	Tinggi
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	15,40	15,23	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80,32	80,32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	98,95	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	21,12	21,13	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	44,48	44,49	Tinggi	Tinggi

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.9.068.570.397,-. Realisasi Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Trwiiwulan II terdapat 2 program yang masuk dalam kategori sangat rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan Program/ Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah :

- 1) Anggaran belum tersedia di masing-masing OPD pada awal tahun dan baru tersedia dibulan Februari atau Maret, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan setelah anggaran tersedia
- 2) Dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami kendala sehingga dimungkinkan berdampak pada pencapaian target kinerja program/kegiatan yang sudah ditetapkan;
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas

b. Solusi

- 1) Memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien terutama pada kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan sehingga target indikator tercapai.

- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap untuk memenuhi target Program yang telah ditetapkan.

## 6. Urusan Sosial

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

### a. Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Pemberdayaan Sosial	38,09	27,28	Sedang	Rendah
2	Program Rehabilitasi Sosial	62,80	36,08	Sangat Tinggi	Sedang
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85,27	23,97	Sangat Tinggi	Rendah
4	Program Penanganan Bencana	49,17	0,00	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,34	42,58	Sangat Tinggi	Tinggi

### b. Permasalahan dan Solusi

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun, seiring dengan perubahan kondisi di lapangan, terdapat program/kegiatan/sub kegiatan dengan realisasi capaian kinerja fisik maupun capaian realisasi keuangan (anggaran) berstatus Sangat Rendah/ Rendah/Sedang, yakni:

#### 1) Program Pemberdayaan Sosial

Realisasi capaian kinerja fisik Program Pemberdayaan Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2022 tercapai 38,09% (Sedang) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penetapan sasaran/peserta kegiatan pembinaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kelangkaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait senantiasa dilakukan oleh bidang-bidang pengampu di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Sementara itu, realisasi anggaran Program Pemberdayaan Sosial baru tercapai 27,28% (Rendah) karena menunggu berkas/dokumen administrasi yang perlu dilengkapi sebagai syarat pencairan dana keuangan.

#### 2) Program Rehabilitasi Sosial

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, capaian kinerja fisik Program Rehabilitasi Sosial tercapai 62,80% (Sangat Tinggi). Capaian realisasi anggaran sebesar 36,08% (Sedang) karena menunggu berkas/dokumen administrasi yang perlu dilengkapi sebagai syarat pencairan dana keuangan.



3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Realisasi capaian kinerja fisik Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2022 tercapai 85,27% (Sangat Tinggi). Sementara itu, capaian realisasi anggaran baru sebesar 23,97% (Rendah). Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

4) Program Penanganan Bencana

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, capaian kinerja fisik Program Penanganan Bencana telah terealisasi sebesar 49,17% (Sangat Tinggi). Sedangkan, capaian realisasi anggaran masih 0% (Sangat Rendah) yang disebabkan oleh perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga memerlukan proses yang memakan waktu. Selain itu, terdapat perubahan harga kebutuhan pokok yang akan diserahkan kepada masyarakat, yakni minyak goreng, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga.

## 7. Urusan Tenaga Kerja

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 Bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.99%	44.96%	Tinggi (T)	Tinggi (T)
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0%	0%	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.00%	34.17%	Tinggi (T)	Sedang (S)
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	36.80%	36.40%	Sedang (S)	Sedang (S)
5	Program Hubungan Industrial	39.77%	39.77%	Tinggi (T)	Tinggi (T)

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.279.187.177,-. Realisasi Program pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sampai dengan Trwiwulan II terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan Program/ Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Pemenuhan capaian kinerja dan anggaran akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah :

- a) Anggaran belum tersedia di masing-masing OPD pada awal tahun dan baru tersedia dibulan Februari atau Maret, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan setelah anggaran tersedia

- b) Dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami kendala sehingga dimungkinkan berdampak pada pencapaian target kinerja program/kegiatan yang sudah ditetapkan;
  - c) Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas
- 2) Solusi
- a) Memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien terutama pada kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan sehingga target indikator tercapai.
  - b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap untuk memenuhi target Program yang telah ditetapkan.

## 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Cilacap. Untuk Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

### a. Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	51,02	48,33	ST	ST
2	Program Perlindungan Perempuan	85,25	51,21	ST	ST
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	78,58	44,38	ST	T
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	86,23	34,46	ST	S
5	Program Perlindungan Khusus Anak	70,97	19,65	ST	SR
	Rata-rata	74,41	39,61	ST	T

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi anggaran Rp. 108.746.500 atau 48,33 % sedangkan realisasi fisiknya 51,02 %.
  - 2) Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi anggaran Rp. 411.516.760 atau 51,21 % sedangkan realisasi fisiknya 85,25 %
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan realisasi anggaran Rp. 95.410.250 atau 44,38 % sedangkan realisasi fisiknya 78,58 %
  - 4) Program Pemenuhan Hak Anak dengan realisasi anggaran Rp150.715.500 atau 34,46 % sedangkan realisasi fisiknya 86,23 %
  - 5) Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi anggaran Rp. 105.133.633 atau 19,65 % sedangkan realisasi fisiknya 70,97 %
- b. Permasalahan dan Solusi
- Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 secara rata - rata sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, diharapkan pada akhir tahun 2022, seluruh target dapat tercapai 100% atau lebih.

## 9. Urusan Pangan

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp.	K	Rp.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46,12	41,61	Tinggi (T)	Tinggi (T)
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1,31	0,11	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	21,96	17,17	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	23,82	19,23	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	44,43	41,19	Tinggi (T)	Tinggi (T)
	Rata-rata	27,53	23,86	Rendah (R)	Rendah (R)

### b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan realisasi capaian kinerja yang rata-rata Rendah, adalah :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan status capaian kinerja dan anggaran sangat rendah karena pada program ini terdapat alokasi pekerjaan DAK FISIK Bidang Pertanian (Pembangunan Lumbung Pangan 4 unit @ Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 4.000.000.000,-) yang terkendala pada DPA definitif termuat pembangunan rumah bed dryer pada kode rekening Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD), namun berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor. B.1096/RC.240/A.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian TA. 2022 bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan DAK pada pembangunan rumah bed dryer dengan metode pengadaan dilaksanakan secara penyedia berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Menindaklanjuti Surat Ka.Biro Perencanaan tersebut, maka DISPABUN membuat DPPA mendahului perubahan untuk melakukan pindah kode rekening dari semula TKDD menjadi Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada

- 2) masyarakat serta perubahan sub rincian untuk mengalokasikan anggaran untuk Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Bed Dryer. Sehubungan dengan hal ini maka pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dilaksanakan mulai pada Bulan Juli 2022 (masuk Triwulan III).
- 3) Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan status capaian kinerja dan anggaran sangat rendah karena :  
Pada Program ini terdapat pekerjaan yang mengalokasikan bantuan bibit tanaman perkebunan dan bibit tanaman buah-buahan serta benih sayuran yang pengadaannya pada Semester II (menjelang musim tanam/musim hujan).
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan status capaian kinerja rendah dan anggaran sangat rendah karena :  
Pada Program ini terdapat pengadaan bahan pangan (beras dan kacang hijau) untuk penanganan rawan pangan yang penyaluran dan pencairan anggaran akan dilakukan pada Semester II.

Solusi yang akan dilakukan adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Semester II Tahun 2022 dengan baik.

## 10. Urusan Pertanahan

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	38.66	44.16	Sedang (S)	Tinggi (T)
	Rata-rata	38.66	44.16	Sedang (S)	Tinggi (T)

### b. Permasalahan dan Solusi

-

## 11. Urusan Lingkungan Hidup

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,15	42,35	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	55,37	9,83	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	25	0,92	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	43,91	7,1	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya DanBeracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	45	0	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40	6,25	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	49,88	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	35	6,42	Sedang (S)	Sangat Rendah (SR)
9	Program Pengelolaan Persampahan	56,69	23,29	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)
	Rata-rata	50,12	16,23	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)

#### b. Permasalahan dan Solusi

-

## 12. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	43,24	41,99	Tinggi (T)	Tinggi (T)
2	Program pendaftaran penduduk	98,30	57,65	Tinggi (T)	ST
3	Program pencatatan sipil	103,63	81,58	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)

4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	0	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
5	Program pengelolaan profil kependudukan	100	3,2	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	89,03	36,88	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Capaian kinerja keuangan dengan status “sedang” disebabkan karena kegiatan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dianggarkan pada triwulan 3.

**13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

**a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp.	K	Rp.
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56,09	45,18	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Penataan Desa	52,50	40,68	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
3	Administrasi Pemerintahan Desa	94,05	49,78	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
4	Peningkatan Kerjasama Desa	0	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	32,55	11,46	Sedang (S)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-Rata	58,80	36,78	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)

**b. Permasalahan dan Solusi**

-

## 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II (Keuangan)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II (Fisik)	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Pengurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	51,02	47,53	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
2	Program Perlindungan Perempuan	51,02	49,73	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	74,65	35,96	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	82,17	33,59	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
5	Program Perlindungan Khusus Anak	51,53	14,99	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
6	Program Pengendalian Penduduk	59,21	25	Sangat Tinggi (ST)	Rendah ( R )
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	56,56	25,80	Sangat Tinggi (ST)	Rendah ( R )
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	60,20	6,22	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Rata - rata	60,88	29,85	Sangat Tinggi (ST)	Rendah ( R )

### b. Permasalahan dan Solusi

-

## 15. Urusan Perhubungan

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,49	40,59	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	53,77	20,04	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	56,13	30,32	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), status capaian kinerja keuangan masih “sangat rendah” dikarenakan masih adanya kendala di administrasi. Proses pencairan anggaran dilakukan setelah pekerjaan selesai.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target adalah mempercepat proses administrasi sehingga proses pencairan dapat segera dilakukan.

## 16. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	R p	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42,90	42,90	Tinggi (T)	Tinggi (T)
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	42,83	38,59	Tinggi (T)	Sedang (S)
3	Program Aplikasi Informatika	43,87	18,03	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	43,20	33,17	Tinggi (T)	Sedang (S)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja fisik dan keuangan dalam kategori Tinggi (T) dikarenakan antara penyelesaian pekerjaan dan pencairan dana berjalan secara relevan. Program Informasi dan Komunikasi Publik capaian realisasi fisik masuk dalam kategori Tinggi (T) karena kegiatan sudah dilaksanakan namun proses pencairan dana belum terselesaikan sehingga capaian realisasi keuangan masih dalam kategori Sedang (S). Program Aplikasi Informatika capaian realisasi fisik masuk dalam kategori Tinggi (T) karena kegiatan sudah dilaksanakan namun proses pencairan dana belum terselesaikan sehingga capaian realisasi keuangan masih dalam kategori Sangat Rendah (SR).

b. Permasalahan dan Solusi.

**Permasalahan :**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sebagaimana penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022 yaitu Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata Bangga Mbangun Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi ke 2 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang professional



bersifat enerpreneur dan dinamis dengan mengedepankan Good Governance dan Clear Government”.

Untuk melaksanakan misi ke 2, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan rencana strategis tahun 2017-2022, Renstra tersebut memuat 5 (lima) program dengan 6 (enam) indikator program yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, guna mengukur capaian kinerja program diukur dengan tingkat capaian indikator program, dari 6 (enam) indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022 masih ada satu indikator program yang belum tercapai yaitu indikator Persentase Website Update yang semestinya target 80% dari 55 OPD baru tercapai 75%.

Indikator program ini terkait dengan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik sesuai amanat undang-undang tersebut wajib menyampaikan informasi publik, antara lain :

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

Capaian indikator program Persentase Website Update belum mencapai target disebabkan belum optimalnya kinerja pengelola informasi dan komunikasi publik pada OPD.

**Solusi :**

1. Peningkatan kapasitas pengelola informasi publik pada OPD;;
2. Peningkatan kapasitas SDM teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk menangani website OPD.

**17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

**a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	76,51	0,00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
2	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	76,51	10,25	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	75,00	6,20	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Pengembangan Umkm	NA	12,56	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
5	Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah	51,43	43,71	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)

6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	50,66	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	66,00	96,90	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
8	Program Pengembangan Ekspor	53,35	45,55	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	55,56	20,37	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Rata - rata	56,80	31,80	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)

**b. Permasalahan dan Solusi**

**- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

Permasalahan :

Sesuai dengan arus kas, anggaran ada pada bulan juni, namun kami melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi pada 16 koperasi di kecamatan Sampang, Adipala, Kroya, Binangun, Nusawunggu, dan juga persiapan pelaksanaan peringatan hari Koperasi ke-75, sehingga program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilaksanak baru dapat dilaksanakan pada triwulan III bulan Juli.

Solusi :

Memperbaiki perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja dan target anggaran dapat diserap sesuai target perencanaan

**- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

Permasalahan :

Proses pengadaan barang yang mundur dari jadwal yang telah direncanakan

Solusi :

Mendorong penyedia barang dan jasa untuk lebih cepat dalam pelaksanaan pekerjaan

**- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Permasalahan :

Disesuai dengan anggaran kas pelaksanaan kegiatan ada di triwulan III

Solusi :

Kegiatan dimaksimalkan di triwulan III

**- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

Permasalahan :

Capaian Kinerja NA (not available) karena indikator Pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil sulit dicapai dikarenakan adanya perubahan regulasi dimana sebelumnya menggunakan UU No 20/2008 usaha mikro modalnya ≤ 50 Juta berganti dengan PP No. 7/2021 usaha mikro modalnya ≤ 1

Milyar. Perubahan regulasi ini menyebabkan usaha mikro kesulitan untuk menjadi usaha kecil bahkan yang tadinya usaha kecil turun menjadi usaha mikro

Capaian anggaran disesuaikan dengan anggaran kas, kegiatan dilaksanakan di riwulan III

Solusi :

Mengubah indikator program disesuaikan dengan PP terbaru untuk renstra 2023-2027

Capaian anggaran Kegiatan dimaksimalkan di triwulan III untuk mencapai target

- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Permasalahan :

1.) Proses pembangunan atau rehabilitasi pasar masih berjalan dan belum selesai sehingga capaian fisik belum dapat dihitung menunggu proses pembangunan/ rehabilitasi pasar selesai

2.) Proses tender yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dikarenakan proses perencanaan gambar dan RAB yang tidak matang sehingga membutuhkan penyesuaian Kembali

Solusi :

Penyusunan gambar dan RAB untuk dapat dipersiapkan lebih awal sehingga proses pengadaan (tender) dapat dilaksanakan di triwulan I sehingga pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi pasar dapat selesai sesuai dengan target atau capaian yang telah ditetapkan

## 18. Urusan Penanaman Modal

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,4	43,4	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	45	21,22	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Promosi Penanaman Modal	85	76,02	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	25,23	27,9	Rendah (R)	Rendah (R)
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	40,78	13,57	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)

6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	41,74	30,35	Tinggi (T)	Rendah (R)

**b. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal: realisasi fisik tinggi, tetapi realisasi keuangan sangat rendah karena masih dalam proses pengadministrasian keuangan.
- 2) Program Pelayanan Penanaman Modal: realisasi fisik dan realisasi anggaran masih rendah karena pelaksanaan pekerjaan di program tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: realisasi fisik tinggi, tetapi realisasi keuangan sangat rendah karena masih dalam proses pengadministrasian keuangan.
- 4) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: adanya pergeseran rekening belanja, sehingga pelaksanaan pekerjaan baru bisa dilaksanakan pada Triwulan IV.

**19. Urusan Pemuda dan Olahraga**

**a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.6	57.61	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	68.56	65.22	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	62.36	46.17	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)
	Rata-rata	62,84	56,33	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

- 1) Kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor yang pada awalnya akan di laksanakan pada tanggal 15 s.d. 21 Juli 2022 di undur menjadi tanggal 20 s.d. 26

September 2022 yang mengakibatkan tidak keluarnya anggaran yang sudah di tetapkan.

- 2) Adanya kegiatan fisik dan non-fisik yang aliran kasnya dikeluarkan di triwulan II, tetapi realisasinya tidak di triwulan II melainkan di triwulan III. Kegiatan fisik yang sedang berjalan belum dicairkan. Karena pencairannya di triwulan III. Aliran kas yang seharusnya untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan III yaitu kegiatan updating data dengan counterpart ternyata tidak bisa dilaksanakan di triwulan III karena anggarannya dipakai oleh bidang lain.

## 20. Urusan Statistik

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0,00	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	0,00	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)

### b. Permasalahan dan Solusi

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih belum dapat dilaksanakan karena menunggu pelaksanaan rapat koordinasi pengumpulan data statistik dengan OPD lain, sehingga realisasi fisik dan keuangan masih dalam kategori Sangat Rendah (SR).

## 21. Urusan Persandian

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0,00	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	0,00	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi masih belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesepakatan dengan pihak ketiga terkait audit keamanan informasi, sehingga realisasi fisik dan keuangan masih dalam kategori Sangat Rendah (SR).

**22. Urusan Kebudayaan**

**a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II	
		K	Rp	K	RP
1	Program Pengembangan Kebudayaan	10.22	29.86	Sangat Rendah (SR)	Rendah (R)
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	25	0	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Pembinaan Sejarah	10	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	10	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	13,8	7,47	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Capaian anggaran Program Pengelolaan Kebudayaan di Triwulan II masih “Sangat Rendah” dan “Rendah” disebabkan karena untuk pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi dilaksanakan pada Tri Wulan III.

**23. Urusan Perpustakaan**

**a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	79,88	47,70	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Rata-rata capaian indicator Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 79,88% dengan serapan anggaran sebesar 47,70% dengan status capaian kinerja dan anggaran tahun 2022 Triwulan II dikategorikan Sangat Tinggi (ST). Akan

tetapi, yang perlu mendapat perhatian yakni indikator kinerja “Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun per Satuan Penduduk dimana capaiannya masih Sangat Rendang (SR) sebesar 9,54%. Hal itu terjadi karena layanan perpustakaan secara langsung belum sepenuhnya normal seperti sebelum Pandemi COVID 19 serta perhitungan pengunjung perpustakaan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2022 belum semuanya masuk. Adapun upaya yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indicator tersebut antara lain :

- Mulai melaksanakan layanan jemput bola seperti layanan perpustakaan keliling dan floating library
- Meningkatkan promosi perpustakaan baik secara langsung, leaflet maupun media sosial
- Memberikan penghargaan untuk duta baca dan pegiat literasi
- Melayani pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan secara online.

## 24. Urusan Kearsipan

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	72,82	22,59	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	92,22	41,22	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)

### b. Permasalahan dan Solusi

#### 1) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Rata-rata capaian indikator Program Pengelolaan Arsip sebesar **72,82%** dengan serapan anggaran sebesar **22,59%** dengan status capaian kinerja tahun 2022 Triwulan II dikategorikan Sangat Tinggi (ST), sementara capaian anggaran masih Rendah (R). Meskipun capaian indikator prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sudah Sangat Tinggi, tetapi hanya sampai tahap penciptaan dan penggunaan arsip aktif saja, masih belum memenuhi NSPK. Oleh karena itu, pembinaan dan peningkatan SDM kearsipan tetap dilaksanakan karena pengelolaan arsip perangkat daerah juga menjadi bagian penilaian audit kearsipan dari ANRI. Sementara capaian keuangan yang masih Rendah terjadi karena adanya perubahan rencana kegiatan, yang semula akan dilaksanakan di akhir dilaksanakan di awal menyesuaikan jadwal dari pusat.

## 2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

Rata-rata capaian indikator Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota indikator sebesar 92,22% dengan serapan anggaran sebesar 41,22% dengan status capaian kinerja tahun 2022 Triwulan II dikategorikan Sangat Tinggi (ST) dan capaian anggaran Tinggi (T). Meskipun secara perhitungan capaian kinerja sudah tinggi, akan tetapi masih ada permasalahan terkait sarana dan prasarana yakni :

- Belum mempunyai Gedung kantor yang representative
- Keterbatasan sarana dan prasarana kerja dan layanan baik perpustakaan maupun kearsipan

Adapun upaya sudah dan akan dilakukan sebagai berikut :

- Mengajukan usulan penambahan sarpras baik melalui usulan rancangan awal Rencana Kerja, permohonan ke BPPKAD maupun pengajuan DAK.
- Mengajukan usulan Rehab Gedung dan Pembangunan Gedung baru.



## B. URUSAN PILIHAN

### 25. Urusan Kelautan dan Perikanan

#### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,00	43,26	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	97,40	70,97	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)
3	Program Pengeioiaan Perikanan Budidaya	94,38	47,30	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)
4	Program Pengawasan Sumber Daya Keiautan Dan Perikanan	100,00	87,67	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	161,65	20,64	Sangat tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	100,69	53,97	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)

#### b. Permasalahan dan Solusi

##### ➤ Permasalahan

Dalam melaksanakan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada hambatan tantangan dan rintangan serta permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain :

- Pandemi Covid -19 dan pemberlakuan PPKM menyebabkan banyak kegiatan yang dicancel maupun di ulang penjadwalannya Karena belum memungkinkan dilaksanakan. Terlebih untuk kegiatan yang mengumpulkan masa harus benar benar diperhatikan pelaksanaannya.
- Beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan mengalami recofusing karena devisit anggaran, ataupun anggaran digunakan untuk penstabilan bidang kesehatan dan ekonomi.

##### ➤ Solusi

Solusi yang dilakukan mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui update data realisasi anggaran dan fisik
- Melakukan evaluasi kinerja secara periodik
- Mempercepat realisasi kegiatan yang tidak tergantung pada kondisi tertentu

## 26. Urusan Pariwisata

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	32.46	30.01	Sedang (S)	Rendah (R)
2	Program Pemasaran Pariwisata	55.41	36.16	Sangat tinggi (ST)	Sedang (S)
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	65.42	65.37	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)
	Rata-rata	51,10	43,85	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)

### b. Permasalahan dan Solusi

-

## 27. Urusan Pertanian

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran tahun 2022 TWII		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	19,02	5,44	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	46,00	49,12	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten Kota	26,83	2,48	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,00	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	59,02	24,38	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)
	Pengembangan Prasarana Pertanian	70,00	-	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Pembangunan Prasarana Pertanian	25,22	58,64	Rendah (R)	Sangat Tinggi (ST)
3	Program Penyuluh Pertanian	24,42	8,38	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran tahun 2022 TWII		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	24,42	8,38	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,96	-	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,00	-	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,86	43,15	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,13	22,99	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,00	45,11	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49,04	33,06	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,00	35,30	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,00	11,81	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)

#### b. Permasalahan dan Solusi

##### > Permasalahan

Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 78.822.628.839 Realisasi Program pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sampai triwulan II terdapat dua Program yang masuk ke dalam kategori sangat rendah, dan satu program terkena refocusing.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah:

- 1) Anggaran belum tersedia di masing-masing OPD pada awal tahun dan baru tersedia dibulan Februari atau Maret, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan setelah anggaran tersedia
- 2) Dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami kendala dan refocusing sehingga dimungkinkan berdampak pada pencapaian target kinerja program/kegiatan yang sudah ditetapkan;

##### > Solusi

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap untuk memenuhi target Program yang telah ditetapkan.

- 2) Memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien terutama pada kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan sehingga target indikator tercapai

## 28. Urusan Perdagangan

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	50,66	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	66,00	96,90	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
3	Program Pengembangan Ekspor	53,35	45,55	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	55,56	20,37	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
Rata - Rata		43,73	53,37	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)

### b. Permasalahan dan Solusi

#### PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

##### > Permasalahan :

- 1.) Proses pembangunan atau rehabilitasi pasar masih berjalan dan belum selesai sehingga capaian fisik belum dapat dihitung menunggu proses pembangunan/ rehabilitasi pasar selesai
- 2.) Proses tender yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dikarenakan proses perencanaan gambar dan RAB yang tidak matang sehingga membutuhkan penyesuaian Kembali

##### > Solusi :

Penyusunan gambar dan RAB untuk dapat dipersiapkan lebih awal sehingga proses pengadaan (tender) dapat dilaksanakan di triwulan I sehingga pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi pasar dapat selesai sesuai dengan target atau capaian yang telah ditetapkan

## 29. Urusan Perindustrian

### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	44.99	44.96	Tinggi (T)	Tinggi (T)

2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.00	34.17	Tinggi (T)	Sedang (S)
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	36.80	36.40	Sedang (S)	Sedang (S)
5	Program Hubungan Industrial	39.77	39.77	Tinggi (T)	Tinggi (T)
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	31.00	27.70	Rendah (R)	Rendah (R)
	Rata-rata	32.26	30.50	Sedang (S)	Rendah (R)

**b. Permasalahan dan Solusi**

➤ Permasalahan

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.279.187.177,-. Realisasi Program pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sampai dengan Trwiyulan II terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan Program/ Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Pemenuhan capaian kinerja dan anggaran akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah :

1. Anggaran belum tersedia di masing-masing OPD pada awal tahun dan baru tersedia dibulan Februari atau Maret, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan setelah anggaran tersedia
2. Dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami kendala sehingga dimungkinkan berdampak pada pencapaian target kinerja program/kegiatan yang sudah ditetapkan;
3. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas

➤ Solusi

1. Memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien terutama pada kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan sehingga target indikator tercapai.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap untuk memenuhi target Program yang telah ditetapkan.

## C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### 30. Urusan Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH

#### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	75,43	29,08	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	62,75	46,11	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,53	43,96	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
	Rata-rata	60,33	40,78	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)

#### b. Permasalahan dan Solusi

-

### SEKRETARIAT DPRD

#### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No.	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50	46.89	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41	34.14	Tinggi (T)	Sedang(S)
	Rata - rata	45.50	40.52	Tinggi (T)	Tinggi (T)

b. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Status Capaian Kinerja Anggaran dari 2 ( dua ) Program, disimpulkan terdapat program yang memiliki status " Sedang " yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Cilacap. Adapun beberapa sub kegiatan yang mendukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Cilacap namun memiliki capaian anggaran kurang dari 50 % yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah realisasi kerjanya sebesar 20 % karena di tahun 2022 sedang memprioritaskan raperda yang bersifat segera dan/atau raperda yang merupakan instruksi dari pemerintah pusat.
- 2) Pelaksanaan Reses realisasi kerjanya sebesar 33.3 % dikarenakan pelaksanaannya yang direncanakan di triwulan III dilaksanakan pada triwulan IV.
- 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan realisasi kerjanya sebesar 33 % dikarenakan kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV.

Dari permasalahan yang terjadi sehingga perlu adanya ketelitian dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

### 32. Urusan Pengawasan

a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp.	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap	50	47,31	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	56	17,30	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	50	14,55	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	52	26,39	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)

b. Permasalahan dan solusi

➤ **Program Penyelenggaraan Pengawasan :**

Program Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja sampai dengan TW II Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 56% status capaian Sangat Tinggi (ST) dan untuk Anggaran capaian 17,30% status capaian Sangat Rendah (SR)

➤ **Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**

Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi sampai dengan

TW II Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 50% status capaian Sangat Tinggi (ST) dan untuk penyerapan Anggaran capaiannya 14,55% status capaiannya Sangat Rendah (SR)

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Asistensi akan ditindaklanjuti sampai dengan TW III dan TW IV

### 33. Urusan Perencanaan BAPPEDA

#### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	56,45	32,92	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	46,42	12,04	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	50,02	13,99	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,43	44,21	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
	Rata-rata	50,83	25,79	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)

#### b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cilacap sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah:

- 1) Dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami kendala sehingga dimungkinkan berdampak pada pencapaian target kinerja program/kegiatan yang sudah ditetapkan;
- 2) Keterbatasan sumberdaya manusia secara kualitas dalam bidang perencanaan pembangunan;
- 3) Masih belum memadai sarana prasarana yang dimiliki terutama ketersediaan gedung kantor sehingga berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 4) Perubahan kebijakan dalam pengelolaan system perencanaan pembangunan yang memerlukan waktu untuk proses penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Solusi agar target kinerja program dapat tercapai di akhir periode RPJMD adalah:



- 1) Memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien terutama pada kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan sehingga target indikator tercapai.
- 2) Menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dengan kondisi pandemi Covid-19 agar kegiatan dapat terlaksana.
- 3) Jika kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 tidak dapat mencapai target maka agar dapat teranggarkan kembali pada periode selanjutnya agar target akhir periode Renstra dapat dicapai.
- 4) Memaksimalkan anggaran yang ada pada kegiatan dimulai dari perencanaan rincian anggaran kegiatan anggaran yang dilakukan melalui verifikasi secara selektif dan ketat.

### 34. Urusan Keuangan BPPKAD

#### a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan BPPKAD

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,92	33,46	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	48,32	18,89	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	16,72	21,06	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-21,92	3,47	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	23,26	19,22	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)

#### b. Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

- 1) Masih banyak tanah dan bangunan milik Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat
- 2) Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya
- 3) Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan

Solusi :

- 1) Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional
- 2) Melakukan sosialisasi, penagihan dan pemeriksaan pajak
- 3) Melakukan bimtek penyusunan laporan keuangan

**35. Urusan Kepegawaian  
BKPPD**

**a. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50	46,02	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
	Indikator:				
	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	50			
	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	50			
	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	50			
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	138,5	18,51	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
	Indikator:				
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	249,78			
	Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi	103,94			
	Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan	100,02			
	Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian	100,26			
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,02	32,11	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
	Indikator:				
	Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan				
	Rata-rata	96,17	32,11	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)

**b. Permasalahan dan Solusi**

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 ada program yang capaian kinerja fisik (K) dan/atau keuangannya (Rp) masih Sangat Rendah / Rendah / Sedang antara lain:

➤ Program Kepegawaian Daerah

Capaian keuangan pada Program Kepegawaian Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 18,51% (sangat rendah). Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya capaian keuangan pada program ini, antara lain:

- Belum adanya surat edaran Menpan RB tentang usulan formasi ASN sehingga kegiatan penyusunan rencana kebutuhan belum dapat dilaksanakan.
- Belum adanya penetapan formasi ASN Tahun 2022 dari Menpan RB sehingga kegiatan pengadaan calon ASN belum dilaksanakan.
- CPNS Formasi Tahun 2020 masih mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, sehingga kegiatan Sumpah Janji PNS belum dapat dilaksanakan.
- Beberapa kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, BKPPD telah melakukan beberapa langkah diantaranya berkoordinasi dengan Menpan RB terkait surat edaran usulan formasi dan penetapan formasi, serta melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan III dan IV.

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian keuangan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 32,11% (sedang). Hal ini dikarenakan ada kegiatan yang pelaksanaannya baru dimulai pada akhir triwulan II dan ada pula kegiatan yang memang dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan III.

## 1. Kecamatan Cilacap Utara

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	71,41%	60,88%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88,75%	33,60%	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	21,64%	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91,33%	63,49%	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94,37%	59,39%	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
	<b>Rata-rata</b>	<b>77,94%</b>	<b>51,22%</b>	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>	<b>Tinggi (T)</b>

### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

1. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocussing untuk beberapa kegiatan di Tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA Tahun 2022.
  - a. Untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 2 (dua) sub kegiatan. Capaian kinerja keuangan (Rp) pada program ini masih "rendah" yaitu sebesar 21,64%. Penyebab rendahnya capaian kinerja keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut:
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dirasionalisasi karena kegiatan Posko PPKM Mikro tidak dilaksanakan sejak Bulan Mei 2022. Kasus *Covid-19* di Kecamatan Cilacap Utara sudah berkurang/tidak ada;
    - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sub kegiatan ini berisi sub rincian belanja Jogo Tonggo untuk penanganan *Covid-19*. Sehubungan kasus *Covid-19* tidak ada, maka belanja Jogo Tonggo tidak direalisasikan
  - b. Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sedang" dikarenakan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (ADK) terkendala pada tahap RAB yang harus mendapat persetujuan dari Disperkimta. Proses verifikasi yang membutuhkan ketelitian.
- Pemberdayaan Masyarakat pada triwulan 2 belum terserap optimal. Sub rincian belanja pada sub kegiatan ini adalah Honorarium Tim Pelaksana Tribumtranmas yang baru dicairkan pada Triwulan III.

**Solusi:**

1. Kegiatan yang terkena dampak covid yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV) untuk memenuhi target indikator, dengan cara melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan 5M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran *Covid-19*.
2. Anggaran definitif Tahun 2022 terdapat sub kegiatan dengan sasaran penanganan kasus *covid-19*. Jika sub rincian belanja bersifat dan bertujuan untuk penanganan covid-19 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka selanjutnya anggaran tersebut dirasionalisasi untuk efisiensi anggaran.
3. Mempercepat proses administrasi keuangan
4. Jika rasionalisasi sudah dilakukan, selanjutnya di tuangkan pada DPA-Perubahan Tahun 2022. Anggaran perubahan yang sudah diverifikasi dan disyahkan digunakan untuk dasar Pelaporan Operasional Kegiatan (POK) setiap bulan. Laporan POK digunakan untuk mengukur seberapa besar serapan anggaran OPD pada tahun berjalan

**2. Kecamatan Cilacap Tengah**

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	65,03%	45,59%	ST	T
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	44,69%	5,25%	T	SR
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	38,92%	2,53%	T	SR
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58,11%	58,91%	ST	ST
	Rata-rata	51,7%	28,07%	ST	R

### Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;	- Mengajukan permohonan tambahan pegawai ke BKPPD - Memerintahkan/mengusulkan aparatur untuk mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas Kecamatan;	- Mengajukan anggaran untuk pengadaan Sarana dan Prasarana
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;	- Dilaksanakan rapat internal secara berkala
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;	- Melakukan sosialisasi dan ikut terjun langsung ke lapangan
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;	- Melakukan sosialisasi pentingnya nilai-nilai wawasan kebangsaan
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa/kelurahan	- Melaksanakan Rakor tingkat Kecamatan dengan kelurahan
7. Belum optimalnya pelayanan publik	- Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan tempat yang nyaman, SOP pelayanan yang lebih baik, serta memperbaiki sikap petugas pelayanan dalam melayani masyarakat

### 3. Kecamatan Cilacap Selatan

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	50,29%	42,93%	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	63,44%	11,39%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85,06%	14,55%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,72%	15,28%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	98,05%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
	<b>Rata-rata</b>	<b>75,70%</b>	<b>36,44%</b>	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>	<b>Sedang (S)</b>

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

1. Ada 3 program yang capaian kinerja keuangan masih sangat rendah (SR) salah satunya dikarenakan adanya pandemic COVID-19 dan ada beberapa kendala di pencairan Anggaran Dana Kelurahan sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA Tahun 2022.
  - Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sangat Rendah (SR)" dikarenakan kegiatan Anggaran Dana Kelurahan melalui Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan belum dapat dilaksanakan pencairan anggaran dikarenakan menunggu dokumen ceklist yang disyaratkan dari dinas yang terkait dan beberapa kegiatan berlangsung pada triwulan 3 dan 4.
  - Untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sangat Rendah" dikarenakan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat masih berhubungan dengan kegiatan Anggaran Dana Kelurahan yang belum bisa berjalan karena menunggu ceklist dan beberapa kegiatan berjalan di triwulan 3 dan 4.
  - Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sangat Rendah" dikarenakan karena beberapa sub kegiatan dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.

##### Solusi:

1. Kegiatan Anggaran Dana kelurahan dapat dilaksanakan setelah ada dokumen ceklist atau persetujuan dari dinas terkait.
2. Mempercepat proses administrasi keuangan.

#### 4. Kecamatan Nusawungu

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	54,62	45,62	Sedang	Sedang
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72	65,53	Sedang	Sedang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56,88	54,14	Sedang	Sedang
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50,04	50,04	Sedang	Sedang
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26,36	30,92	Sedang	Sedang
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38,89	38,16	Sedang	Sedang
	Rata-rata				

Catatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota akan tercapai di akhir tahun 2022
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayana Publik akan tercapai di akhir Tahun 2022
3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa Dan Kelurahan akan tercapai di akhir Tahun 2022
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum akan tercapai di akhir Tahun 2022
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum akan tercapai di akhir Tahun 2022
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan DEsa akan tercapai di akhir Tahun 2022



## 5. Kecamatan Binangun

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	54,86	44,28	Sangat tinggi	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72,17	64,82	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,00	36,51	Sangat tinggi	Sedang
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60,27	38,89	Sangat tinggi	Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53,26	49,03	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	<b>Rata-rata</b>	<b>63,11</b>	<b>46,70</b>	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Tinggi</b>

### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Binangun yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 63,11% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 46,70% dengan kriteria penilaian "Tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya sebesar 36,51% dan termasuk kriteria penilaian "Sedang". Capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi fisik sebesar 53,26% termasuk kriteria "Sangat Tinggi" dan penyerapan anggaran sebesar 49,03% termasuk kriteria "Sangat Tinggi";
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

#### Solusi:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Binangun yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 63,11% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 46,70% dengan kriteria penilaian "Tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum hanya sebesar 36,51% dan termasuk kriteria penilaian "Sedang" dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan September). Adapun capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi fisik sebesar 53,26% termasuk kriteria "Sangat Tinggi" dan penyerapan anggaran sebesar 49,03% termasuk kriteria "Sangat Tinggi" dikarenakan sub kegiatan pada program tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan September);

2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan dengan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna

## 6. Kecamatan Kroya

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	50,00%	40,71%	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60,09%	54,37%	Sangat tinggi (ST)	Sangat tinggi (ST)
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50,00%	42,57%	Sangat tinggi (ST)	Tinggi (T)
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32,20%	6,42%	Sedang (S)	Sangat rendah (SR)
	Rata-rata	48,07%	36,02%	Sangat tinggi (ST)	Sedang (S)

### > Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

- Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan kegiatan sosial yang mana berpengaruh terhadap beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Kecamatan Kroya, namun berakhir dengan tidak terealisasinya kegiatan tersebut. Kegiatan yang telah masuk ke dalam DPA TA 2022 dan tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2022 triwulan II masuk ke dalam

kategori Sedang dan Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar subkegiatan yang ada pada program tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022, sehingga hingga triwulan II belum ada realisasi fisik dan anggaran.

- Selain itu, terdapat subkegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II namun belum masuk ke dalam SPJ hingga bulan Juni 2022 (masuk ke SPJ bulan Juli) yaitu subkegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. Hal tersebut juga menyebabkan status capaian anggaran menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

**Solusi:**

- Refocussing anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19
- Pelaksanaan subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada Triwulan IV Tahun 2022.
- Melakukan pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi anggaran subkegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya pada Triwulan III Tahun 2022 agar data realisasi anggaran lebih aktual.

**7. Kecamatan Sampang**

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	54,63%	46,52%	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	67,89%	66,23%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	66,04%	66,04%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24,7%	24,7%	Rendah (R)	Rendah (R)

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60,55%	57,81%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
	Rata-rata	54,762	52,26	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)

#### Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) program yang dilaksanakan, rata rata capaian kinerja dan rata-rata capaian anggarannya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST). Adapun ada 1 (satu) program yang capaiannya tergolong rendah yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Hal ini dikarenakan kegiatan Peringatan HUT RI dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 (Semester ke 2), sehingga serapan anggaran dan fisiknya masih rendah.

#### 8. Kecamatan Maos

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	55,48%	44,32%	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	44,89%	34,63%	Tinggi (T)	Sedang (S)
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,68%	69,30%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50,17%	36,01%	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33,86%	20,40%	Sedang (S)	Sangat Rendah (SR)
	<b>Rata-rata</b>	<b>52,02%</b>	<b>40,93%</b>	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>	<b>Tinggi (T)</b>

## Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan:

1. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocussing untuk beberapa kegiatan di Tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA Tahun 2022.
  - Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sedang" dikarenakan sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Penyelenggaraan BBGRM) tidak dapat direalisasikan sehingga anggaran direfocussing.
  - Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sedang" dikarenakan sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama untuk Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan lebih sederhana karena adanya Pandemi Covid sehingga anggaran tidak dapat diserap.
  - Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian kinerja fisik (K) dan keuangan (Rp) masih "Sangat Rendah" dikarenakan beberapa sub kegiatan dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.

### Solusi:

1. Kegiatan yang terkena dampak covid yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV) untuk memenuhi target indikator, dengan cara melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan 5M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
2. Mempercepat proses administrasi keuangan

## 9. Kecamatan Adipala

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	52,72	41,03	Sangat tinggi	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	62	38,89	Sangat tinggi	Rendah

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49,95	47,71	Sangat tinggi	Sangat tinggi
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34,98	20,71	Sedang	Rendah
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62,77	58,32	Sangat tinggi	Tinggi
	Rata-rata	52,48	41,33	Sangat tinggi	Sangat tinggi

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Adipala yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 52,48% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 41,33% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 34,98% dan termasuk kriteria penilaian "sedang";
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

##### Solusi:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Adipala yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 52,48% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 41,33% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 34,98% dan termasuk kriteria penilaian "sedang" dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan Agustus);
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

## 10. Kecamatan Kesugihan

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	54,41%	63,69%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	76,70%	53,87%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54,66%	31,28%	Sangat Tinggi	Sedang
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66,08%	52,99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

### Permasalahan dan Solusi

Capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan fisik semuanya sudah Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja realiasi keuangan masih sedang karena kegiatan dapat dilaksanakan walau penyerapan anggaran tidak maksimal.

### Solusi :

- Beberapa anggaran yang tidak terserap akan digeser untuk kegiatan lain / APBD Perubahan
- Memaksimalkan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya

## 11. Kecamatan Jeruklegi

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	53,14	43,53	Sangat tinggi	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64,8	52,91	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	Sangat tinggi	Sangat tinggi

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	30,75	Sangat tinggi	Rendah
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33,66	28,37	Sedang	Rendah
	<b>Rata-rata</b>	<b>60,32</b>	<b>51,11</b>	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Sangat tinggi</b>

### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Jeruklegi yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 60,32% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 51,11% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 30,75% dan termasuk kriteria penilaian "rendah". Capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi fisik sebesar 33,66% termasuk kriteria "sedang" dan penyerapan anggaran sebesar 28,27% termasuk kriteria "sedang";
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

#### Solusi :

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Jeruklegi yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 60,32% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 51,11% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 30,75% dan termasuk kriteria penilaian "rendah" dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan Agustus). Adapun capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi fisik sebesar 33,66% termasuk kriteria "sedang" dan penyerapan anggaran sebesar 28,27% termasuk kriteria "sedang" dikarenakan sub kegiatan pada program tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan September);
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.



## 12. Kecamatan Kampung Laut

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	62,53%	59,57%	Tercapai	Belum Tercapai
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,90%	70,89%	Tercapai	Belum Tercapai
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	-	-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37,78%	37,60%	Tercapai	Tercapai
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41,88%	41,7%	Tercapai	Tercapai
	Rata-rata	54,52%	52,44%	Belum Tercapai	Belum Tercapai

### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

1. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocussing dan rasionalisasi untuk beberapa kegiatan di Tahun 2020 s/d 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana kerja.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

#### Solusi:

1. Kegiatan yang terkena dampak covid-19 yang belum dapat dilaksanakan akan disesuaikan dengan keadaan keuangan yang ada, sedangkan Tahun Anggaran 2022 pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV) dengan menyesuaikan kondisi keuangan dan tingkat kepentingan dari masing masing kegiatan yang ada.
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan

harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

### 13. Kecamatan Kawunganten

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	52,62%	38,14%	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69,11%	69,04%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,68%	73,55%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34,52%	31,62%	Sedang (S)	Sedang (S)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57,67%	56,93%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
	<b>Rata-rata</b>	<b>58,92%</b>	<b>53,86%</b>	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

- Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocussing untuk beberapa kegiatan di Tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA Tahun 2022.
  - Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja fisik (K) Sangat Tinggi dan keuangan (Rp) masih "Sedang" dikarenakan karena beberapa sub kegiatan dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.
  - Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, capaian kinerja keuangan (Rp) masih "Sedang" dikarenakan karena beberapa sub kegiatan dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.

##### Solusi:

- Kegiatan yang terkena dampak covid yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV) untuk memenuhi target indikator, dengan cara melaksanakan

kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan 5M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

2. Mempercepat proses administrasi keuangan

#### 14. Kecamatan Bantarsari

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	50	41	Tinggi	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	60	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	44	Tinggi	Tinggi
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	32,5	Tinggi	Sedang
	<b>Rata-rata</b>	<b>56,25</b>	<b>44,37</b>	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Tinggi</b>

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Bantarsari yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 56,25% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 44,37% dengan kriteria penilaian "tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar 32,5 % dengan kategori “ sedang “
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

##### Solusi:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Bantarsari yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 56,32% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 44,37% dengan kriteria penilaian "tinggi".

Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar 32,5 % dengan kategori “ sedang “dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan Agustus).

2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

### 15. Kecamatan Gandrungmangu

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	53,69	45,56	Sangat tinggi	Sangat tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	86,43	73,17	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	82,14	65,36	Sangat tinggi	Sangat tinggi
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48,19	36,65	Sangat tinggi	Sedang
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72,19	58,44	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	Rata-rata	68,53	55,84	Sangat tinggi	Sangat tinggi

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan.

1. Adanya pandemi covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocusing untuk beberapa kegiatan di tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA tahun 2022.
  - Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, capaian kinerja keuangan (Rp) sudah termasuk “sedang” namun ada sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara yang tidak dapat di realisasikan karena kegiatan Parade Seni dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap yang Rencana dapat dilaksanakan tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya Pandemi Covid – 19 , sehingga Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan lebih sederhana.

- Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa walaupun Realisasi Kegiatan dan Keuangan sudah “Sangat Tinggi” akan tetapi terdapat Sub Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana sampai Triwulan II yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan desa, Sehingga Sub Kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada Triwulan III , dikarenakan adanya Pandemi Covid - 19

**Solusi :**

1. Kegiatan yang terkena dampak Covid-19 yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan II) telah dilaksanakan pada triwulan berikutnya (III) untuk memenuhi target indikator dengan cara melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan 5M :
  - a. Mencuci tangan dengan Sabun.
  - b. Memakai Masker
  - c. Menjaga Jarak
  - d. Menjauhi Kerumunan
  - e. Mengurangi mobilitas.
 Sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran Virus Covid-19.
2. Mempercepat proses administrasi Keuangan.

**16. Kecamatan Patimuan**

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	52,18%	47,22%	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	44,85%	44,84%	Tinggi	Tinggi
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	56,67%	56,59%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17,98%	17,99%	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67,04%	67,04%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata</b>	47,74%	46,74%	Sangat Tinggi	Tinggi

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

1. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocussing untuk beberapa kegiatan di Tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

##### Solusi:

1. Kegiatan yang terkena dampak covid yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV) untuk memenuhi target indikator, dengan cara melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan 5M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19.
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

#### 17. Kecamatan Kedungreja

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	56,09	47,17	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54,76	47,38	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)

3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	Sangat Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35,05	25,8	Sedang (S)	Rendah (R)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)
	<b>Rata-rata</b>	<b>29,18</b>	<b>24,07</b>	<b>Rendah (R)</b>	<b>Rendah (R)</b>

### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan.

1. Adanya pandemi covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocusing untuk beberapa kegiatan di tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA tahun 2022.
  - Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, capaian kinerja keuangan (Rp) sudah termasuk “Tinggi” namun ada sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Penyelenggaraan BBGRM) tidak dapat direalisasikan sehingga anggaran di refocussing.
  - Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum , capaian kinerja keuangan (Rp) masih ”Rendah” dikarenakan sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama untuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan lebih sederhana karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran dana tidak dapat terserap.
2. Untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian Kinerja Fisik (K) dan Keuangan (Rp) masih ”Sangat Rendah” dan memang belum terlaksana karena rencana kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.

#### Solusi :

1. Kegiatan yang terkena dampak Covid-19 yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (III dan IV) untuk memenuhi target indikator dengan cara melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan 5M :
  - a. Mencuci tangan dengan Sabun.
  - b. Memakai Masker
  - c. Menjaga Jarak
  - d. Menjauhi Kerumunan

e. Mengurangi mobilitas.

Sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran Virus Covid-19.

2. Mempercepat proses administrasi Keuangan.

### 18. Kecamatan Sidareja

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	50%	40%	Tercapai	Belum Tercapai
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56,5%	87,81%	Tercapai	Tercapai
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50%	12,04%	Tercapai	Belum Tercapai
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51%	38%	Tercapai	Belum Tercapai
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32%	27%	Belum Tercapai	Belum Tercapai
	Rata-rata	47,9%	40,97%	Belum Tercapai	Belum Tercapai

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

1. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan dilakukannya refocussing untuk beberapa kegiatan di Tahun 2022 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya beberapa target indikator program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

##### Solusi:

1. Kegiatan yang terkena dampak covid yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan sebelumnya (Triwulan I dan II) akan segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV) untuk memenuhi target indikator, dengan cara melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan 5M



(mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) sehingga kegiatan tetap dapat berjalan namun tetap bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19.

2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

### 19. Kecamatan Cipari

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	50	40	Tercapai	Belum tercapai
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50	60	Tercapai	Tercapai
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	61	Tercapai	Tercapai
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32	24	Belum tercapai	Belum tercapai
	<b>Rata-rata</b>	<b>45,5</b>	<b>46,25</b>	<b>Belum tercapai</b>	<b>Belum tercapai</b>

#### Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Cipari yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 45,5% dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 46,25%. Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 40%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 60%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 61% sedangkan Capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi fisik sebesar 24%.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

**Solusi:**

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Cipari akan segera ditingkatkan pada Triwulan selanjutnya, mengingat kegiatan dan sub kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan di triwulan mendatang (triwulan III dan IV)
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

**20. Kecamatan Karangpucung**

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	61,98	51,51	Sangat tinggi	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	96,28	Sangat tinggi	Sangat tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71,49	56,97	Sangat tinggi	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42,11	33,68	Sedang	Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45,24	26,22	Sedang	Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56,55	54,38	Tinggi	Tinggi
	<b>Rata-rata</b>	<b>62,91</b>	<b>53,17</b>	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Sangat tinggi</b>

## Permasalahan dan Solusi

**Permasalahan**

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Karangpucung yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 62,91% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 53,17% dengan kriteria penilaian

"sangat tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 26,22% dan termasuk kriteria penilaian "rendah". Capaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi fisik sebesar 42,11% termasuk kriteria "sedang" dan penyerapan anggaran sebesar 33,68% termasuk kriteria "sedang";

2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

**Solusi:**

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Karangpucung yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 62,91% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 53,17% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 26,22% dan termasuk kriteria penilaian "rendah" dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III. Adapun capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi fisik sebesar 33,66% termasuk kriteria "sedang" dan penyerapan anggaran sebesar 28,27% termasuk kriteria "sedang" dikarenakan sub kegiatan pada program tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan III;
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

**21. Kecamatan Cimanggu**

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	55,66	47,68	Tinggi	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	86,09	60,52	Sangat tinggi	Tinggi
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98,42	15,87	Sangat tinggi	Rendah
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	18,88	Sedang	Rendah

5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78,33	70,53	Tinggi	Sedang
	Rata-rata	73,70	42,69	Tinggi	Sedang

## Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Cimanggu yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 73,70% dengan kriteria penilaian "tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 42.69% dengan kriteria penilaian "sedang". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 18,88% dan termasuk kriteria penilaian "rendah". Capaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi fisik sebesar 15.87% termasuk kriteria "rendah" dan penyerapan anggaran sebesar 42.69% termasuk kriteria "sedang";
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

### Solusi:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Cimanggu yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 73.70% dengan kriteria penilaian "tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 42.69% dengan kriteria penilaian "sedang". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 18,88% dan termasuk kriteria penilaian "rendah" dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III. Adapun capaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 15.87% termasuk kriteria "rendah" dan penyerapan anggaran sebesar 28,27% termasuk kriteria "sedang" dikarenakan sub kegiatan pada program tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan III;
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

## 22. Kecamatan Majenang

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II
		K	Rp (000)	K
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	49%	16.069.245	Sangat Tinggi (ST)
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	57%	215.700	Sangat Tinggi (ST)
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33%	95.225	Sedang (S)
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33%	226.636	Sedang (S)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16%	204.883	Sangat Rendah (SR)
	Rata-rata	37,6%	3.362.337,8	Sedang (S)

### Permasalahan dan Solusi

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA memperoleh status capaian ST (Sangat Tinggi), sesuai dengan target yang direncanakan.
- b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN memperoleh status capaian ST (Sangat Tinggi), sesuai dengan target yang direncanakan.
- c. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM memperoleh status capaian S (Sedang), sesuai dengan target yang direncanakan.
- d. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM memperoleh status capaian S (Sedang), sesuai dengan target yang direncanakan.
- e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA memperoleh status capaian SR (Sangat Rendah) dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya tau padaakhir tahun.

### 23. Kecamatan Wanareja

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	50	42,34	Sedang	Sedang
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50	27,60	Sedang	Rendah
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	Rendah	Rendah
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	35,41	Sedang	Sedang
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29	26,38	Rendah	Rendah
	Rata-rata				

Catatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota akan tercapai di akhir Tahun 2022
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan akan tercapai diakhir Tahun karena Sub Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan IV
3. Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum akan tercapai diakhir tahun karena Sub Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum akan tercapai di akhir Tahun 2022
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa akan tercapai diakhir Tahun karena Sub Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV

## 24. Kecamatan Dayeuluhur

No	Program	% Realisasi Capaian Kerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	55,16	42,05	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	99,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56,13	33,67	Sangat Tinggi	Sedang
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50	50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	22,82	Sangat Tinggi	Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45,88	28,85	Tinggi	Sedang
	<b>Rata-rata</b>	<b>59,53</b>	<b>46,15</b>		

### Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan:

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Dayeuluhur yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 59,53% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 46,15% dengan kriteria penilaian "tinggi". Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki capaian yang paling baik dengan perolehan capaian fisik sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 99,97%. Sedangkan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menjadi capaian yang paling rendah dengan capaian fisik sebesar 50% termasuk kriteria “sangat tinggi” dan capaian anggaran hanya sebesar 22,82% dengan kriteria penilaian "rendah".;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

**Solusi:**

1. Capaian kinerja fisik dan keuangan pada Kecamatan Dayeuhluhur yaitu realisasi fisik rata – rata sebesar 59,53% dengan kriteria penilaian "sangat tinggi" dan realisasi capaian anggaran rata – rata sebesar 46,15% dengan kriteria penilaian "tinggi". Sedangkan capaian penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum hanya sebesar 22,82% dan termasuk kriteria penilaian "rendah" dikarenakan sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai *timeline* sebesar 50% dan sisanya akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan Agustus). Adapun capaian anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi anggaran sebesar 28,85% termasuk kriteria "sedang" dikarenakan anggaran sub kegiatan pada program tersebut akan direalisasikan pada Triwulan III (bulan September);
2. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan/bimtek/diklat sesuai bidang tugas dan fungsi;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.



## 7.2 Kebijakan Strategi Yang Perlu Ditindaklanjuti

### 1. Program Leader Class

#### a. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Sebagai upaya pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap telah menetapkan kebijakan “Bangga Mbangun Desa” dengan 4 pilar, salah satunya yaitu Pilar Pendidikan.

Wujud pelaksanaan kebijakan ini melalui **Program Leader Class** yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 (Tahun Pelajaran 2012/2013). Tujuan adanya program ini adalah :

- 1) Mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan yang dapat melanjutkan estafet pembangunan Kabupaten Cilacap
- 2) Membentuk pribadi yang tangguh yang dapat menghadapi tantangan dan persaingan dalam era globalisasi
- 3) Membentuk jiwa kepemimpinan yang memiliki karakter kebangsaan yang baik serta kepedulian dalam lingkungannya
- 4) Mempersiapkan calon-calon pemimpin yang dapat menjadi tuntutan dalam bersikap, dan berperilaku sesuai kaidah kebangsaan dan keagamaan
- 5) Menciptakan generasi penerus bangsa yang handal baik secara akademik, non akademik serta memiliki ketrampilan life skill untuk bekal kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.

#### b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis

Program Leader Class dilaksanakan dengan mewadahi para pelajar berprestasi dari berbagai kecamatan yang memiliki kecerdasan, kejujuran, dan kesetiaan dalam satu tempat. Sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini yaitu SMP Negeri 1 Cilacap.

Secara umum materi pembelajaran yang diterima sama dengan kelas-kelas regular lainnya, yang membedakan adalah mereka akan menerima materi khusus tentang kepemimpinan sebagai bekal untuk menciptakan karakter positif yang lebih kuat bagi calon pemimpin.

Sampai dengan saat ini telah terdata lulusan program ini sejumlah 179 siswa yang berhasil melanjutkan pendidikan di SMA/SMK N Cilacap/Purwokerto sejumlah 157 siswa, SMA Taruna Nusantara Magelang 3 Siswa, SMK N Jateng 10 Siswa, dan 9 siswa masuk sekolah favorit di berbagai kota.

#### c. Permasalahan

- Masih Rendahnya angka Partisipasi Kasar PAUD
- Rendahnya rata-rata lama sekolah, masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah

Solusi

- Peraturan Bupati Cilacap no 174 Tahun 2020 tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar
- Program Pendidikan Kesetaraan ( Paket A, Paket B, dan Paket C)

### 2. SENI SEHAT

#### a. Kebijakan Strategis yang ditetapkan adalah **Seni Sehat**

#### b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis

Seni Sehat merupakan inovasi dalam rangka meningkatkan indikator cakupan desa ODF (Open Defecation Free). Open Defecation Free (**ODF**) adalah kondisi ketika setiap individu **dalam** masyarakat

tidak buang air besar sembarangan.

Seni Sehat adalah inovasi dalam pembuatan Septik-Tank Mini yang sederhana, ekonomis, hygiene, aman dan tertib. Inovasi “SENI SEHAT” atau *Septik-tank Mini Sederhana Ekonomis Hygiene Aman dan Tertib* yang berbasis murah bagi masyarakat.

Tujuan akhir diarahkan guna menciptakan kualitas lingkungan yang lebih sehat, agar dapat melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya kesehatan guna menuju derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Adapun manfaat inovasi ini yaitu :

- 1) Peningkatan mutu layanan Kesehatan Lingkungan sebagai bagian dari layanan dasar
  - 2) penanggulangan penyakit akibat lingkungan buruk dipemukiman padat penduduk dan dekat dengan sungai dan laut
  - 3) Peningkatan sinergitas lintas sektoral sebagai upaya pembinaan para kader Kesehatan, FKK ( Forum Kesehatan Kelurahan ), PKK yang berkelanjutan
  - 4) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman KLB.
  - 5) Seni sehat baru dilaksanakan di Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara kurang lebih 60 rumah dan pembiayaan untuk Seni Sehat baru akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
- c. Permasalahan dan Solusi
- Cakupan Desa ODF (%ODF) adalah salah satu indikator RPJMD Kabupaten Cilacap. Cakupan Desa ODF (%ODF) sudah 100% namun demikian baru berdasarkan akses terhadap fasilitas kesehatan lingkungan (jamban sehat), sehingga untuk mempertahankan cakupan ini perlu merealisasikan ketersediaan fasilitas kesehatan lingkungan (jamban sehat) agar semakin mudah diakses oleh keluarga dan masyarakat. Inovasi Seni Sehat ini adalah salah satu cara yang praktis dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini.

### **3. Pelayanan PSC 119 Kab. Cilacap (Si Penawar Ekpres = Sistem Penanggulangan Gawat Darurat dengan cepat dan tepat)**

a. Kebijakan Strategis yang ditetapkan adalah “Si Penawar Ekpres”

b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin akses masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Cilacap, merupakan ujung tombak pemberi pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dan tepat selama 24 jam secara terus menerus kepada masyarakat yang membutuhkan, PSC 119 Kabupaten Cilacap dibentuk pada tahun 2016, atas dasar Permenkes RI No. 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan mendapatkan SK Bupati Cilacap Tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Cilacap Nomor 440/601/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Cilacap.

Visi : Kabupaten Cilacap Bersama PSC 119 Kabupaten Cilacap Melangkah

bersama selamatkan Jiwa.

Misi : PSC 119 Kabupaten Cilacap memberikan pelayanan Kesehatan pra hospital yang profesional,berkualitas dan bermanfaat secara optimal, bekerjasama dengan faskes rujukan.

Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Jl. Gatot Subroto No.26, Tambaksari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212 72J8+J2 Sidanegara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan respons cepat PSC 119 ini, disediakan link melalui media sosial yaitu,

IG. psc119kabupatencilacap

Youtube. PSC 119 Kab. Cilacap

psckabcilacap@gmail.com

WA. 082 116 666 119

Telp . (0282) 5390488

**Proses Pelaksanaan**

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Strategi         | : | Jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan Swasta  |
| 2. Pihak Terlibat   | : | PSC 119 Kabupaten Cilacap, 38 Puskesmas dan 2 Klinik  |
| 3. Penerima Manfaat | : | Masyarakat di Kabupaten Cilacap   |
| Hasil & Dampak      | : | Tertanganinya kasus kasus kegawat daruratan kesehatan dan pencegahan kematian akibat kejadian keGawat Daruratan kesehatan.. |

c. Permasalahan dan Solusi

Pemenuhan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) utamanya yang berkaitan dengan kejadian kematian, satu hal diantaranya berhubungan dengan respon cepat kegawatdaruratan dan penguatan sistem rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan kondisi kesehatan perorangan yang membutuhkan penanganan cepat dan gawatdarurat menjadi semakin buruk bahkan bisa menimbulkan kematian. Gambaran permasalahan diatas serta situasi kesehatan yang komplek pada masyarakat perlu diupayakan langkah taktis dan strategis agar tidak terjadi permasalahan yang lebih buruk. Untuk itu dirancang konsep kesiapsiagaan dan kerjasama jejaring, sehingga kegawatdaruratan yang dihadapi masyarakat segera direspon secara cepat dan tepat. Salah satu solusi dalam menghadapi kegawatdaruratan inilah hadir Si Penawar Ekpres = Sistem Penanggulangan Gawat Darurat dengan cepat dan tepat

**4. BALAKAR TO RESPONSE TIME**

a. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Inovasi Pelayanan Publik “**BALAKAR TO RESPONSE TIME**”

b. Pelaksanaan Kebijakan strategis

Pembentukan Balakar (BARisan reLAWan pemadam kebaKARan) to Response Time dilatarbelakangi luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan unit layanan pemadam kebakaran, sehingga waktu tanggap

terhadap penanggulangan kebakaran sangat rendah, jauh dari standar pelayanan minimal. Oleh karena itu dengan inovasi Balakar to Respon Time, peran serta masyarakat dalam ikut serta melakukan pemadaman kebakaran pada kesempatan pertama dapat terwujud.

Keberadaan Anggota Balakar melekat pada masyarakat tingkat RT/RW dalam bentuk kelompok sadar (Pokdar) di bawah pengawasan pembina lingkungan.

Seiring perkembangan zaman Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR) berganti nama menjadi REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran). Saat ini anggota REDKAR se-kabupaten Cilacap sebanyak 131 Orang yang tersebar di 20 Kecamatan. Kedepan peningkatan jumlah anggota Relawan Pemadam Kebakaran menjadi agenda utama yang sangat penting untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah agar penanggulangan kebakaran dapat lebih cepat tertangani sehingga dapat mengurangi dampak kerugian akibat kejadian kebakaran.

#### **5. SOBAT PENGENDARA (Solusi Bersama Atasi Gelandangan, Pengemis, dan Orang telantar)**

Selama ini, pelayanan publik terkait penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Telantar (PGOT) sering mendapat keluhan dari masyarakat karena terkesan lambat. Penanganan terhadap PGOT masih belum terorganisir dengan baik dan saling lempar.

SOBAT PENGENDARA menjawab permasalahan ini melalui penanganan PGOT yang terorganisir dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu penanganan PGOT dengan memaksimalkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di wilayah-wilayah Kabupaten Cilacap.

SOBAT PENGENDARA bertujuan mengembalikan fungsi PMKS, dalam hal ini PGOT, untuk bisa hidup normal layaknya manusia lainnya setelah mendapat penanganan di Rumah Sakit maupun Panti Rehabilitasi Sosial.

#### **6. PUSKESOS CITRA (Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Sejahtera)**

Demi memastikan Pemerintah Kabupaten Cilacap hadir untuk masyarakat miskin dan rentan sampai di tingkat terbawah, yakni tingkat desa/kelurahan, perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Sejahtera (Puskesmas CITRA), agar masyarakat dapat mengadukan berbagai masalah dengan solusi dan pelayanan yang cepat dan tepat.

Puskesmas merupakan program layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) yang merupakan miniatur Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kabupaten dan berperan menjangkau warga rentan miskin. Layanan terintegrasi ini diselenggarakan dengan tujuan memudahkan masyarakat menerima layanan. Puskesmas juga berperan aktif sebagai perantara pemberian/distribusi bantuan ke daerah-daerah di Indonesia. Tujuan hadirnya layanan ini ke daerah-daerah adalah membantu pemerintah pusat dalam merangkul dan juga bergerak aktif serta luas dalam membantu kebutuhan

masyarakat di berbagai bidang. Layanan ini mampu menjadi sarana perbantuan yang bergerak luas, adil serta merata.

Melalui Puskesmas, masyarakat atau warga di Kabupaten Cilacap akan diberikan keuntungan dengan adanya bantuan yang menaunginya. Melalui layanan ini, masyarakat berhak memberikan pengaduan serta penanganan atas kebutuhan sosialnya maupun pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat. Pengaduan tersebut nantinya akan mendapatkan penanganan dan masyarakat bisa mendapatkan rujukan program apa yang bisa mengentaskan dan membantu persoalan ekonominya.

Selain itu, Puskesmas juga secara aktif menerima ragam keluhan berbagai bidang sosial masyarakat. Mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi hingga usaha. Warga masyarakat bisa mendapatkan penanganan serta rujukan program atau jenis bantuan apa yang bisa membantu persoalannya.

Pada tahun 2021, dibentuk Puskesmas di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Maos dan 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Jeruklegi, namun belum bisa berjalan karena keterbatasan anggaran.

#### a) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain keterbatasan anggaran karena *refocusing*, keterbatasan SDM serta keterbatasan sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Namun demikian, adanya komitmen dan rasa tanggung jawab dari berbagai pihak menjadi faktor pendorong yang membuat Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terus-menerus melakukan segenap daya dan upaya demi menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang meliputi fungsi bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain yang terkait serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat senantiasa dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk memberikan pelayanan optimal kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini berganti nama menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

## 7. BERAS PNS

### a. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.

Inovasi **Dinas Pangan dan Perkebunan** yang dihasilkan adalah **Beras PNS**. Latar belakang dari Inovasi ini bahwa Kabupaten Cilacap merupakan daerah sentra dan surplus beras, namun harga beras relatif fluktuatif, berpengaruh terhadap inflasi serta sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani sebagai produsen serta daya beli konsumen. Hal yang mendorong inovasi ini adalah distribusi beras Cilacap yang perlu dikembangkan, agar dikenal dan masyarakat Kabupaten Cilacap cinta produk lokal (bela beli produk lokal). Sehingga kedepannya penyerapan produk lokal dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta ketahanan pangan wilayah. Dan juga inovasi ini akan dapat menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok utamanya beras dan mengutamakan penyerapan produk dalam negeri.

b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis.

- Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap memfasilitasi Gapoktan penghasil beras untuk disalurkan/dibeli oleh para PNS di Kabupaten Cilacap yang membutuhkannya setiap bulan.
- Pengadaan Beras PNS ini dilakukan oleh Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/Gapoktan yang telah memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengolah hasil produksi, mendistribusikan dan memasarkan beras.
- Sasaran distribusi beras asli Cilacap adalah aparatur/PNS yang ada di 24 Kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap.
- Beras yang didistribusikan untuk Program PNS adalah beras yang dihasilkan di Cilacap guna mendukung semangat Gerakan Bangga Mbangun Desa, dengan kualitas beras yang diharapkan lebih baik dari yang beredar di pasaran sesuai jenis kelas yang sama (medium/premium).
- Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap memiliki tanggung jawab dalam mendorong LUPM/Gapoktan sebagai pemasok kebutuhan beras daerah bagi aparatur PNS di Kabupaten Cilacap. Guna mendukung Program Beras PNS maka telah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Cilacap No. 520/6115/34 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Program Beras Pegawai Negeri Sipil. Jenis Beras yang dihasilkan oleh Petani/Gapoktan yang disalurkan untuk PNS berbagai macam seperti Beras Merah, Beras C4, Beras Mentik Wangi, Beras Mapan.

c. Permasalahan dan Solusi

Adanya Program Beras PNS ini membantu LUPM/ Gapoktan dalam memperoleh kepastian pasar sedangkan bagi PNS akan mendapatkan beras kualitas baik dengan harga yang wajar. Beras PNS yang disalurkan oleh LUPM/Gapoktan jika ada yang tidak sesuai dengan kriteria beras medium/premium akan dapat dilakukan penggantian / penukaran dari beras yang telah diterima.

## **8. Pembebasan Lahan untuk Kawasan Industri Cilacap**

Dalam rangka pengembangan usaha Perumda Kawasan Industri Cilacap, menciptakan iklim investasi dan percepatan pertumbuhan industri di wilayah Kabupaten Cilacap maka perlu pembebasan lahan untuk kawasan industri baru yang ditempuh melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kawasan industri baru di Cilacap merupakan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berdampak positif bagi masyarakat yang dapat menjadi pengungkit perekonomian baru, menyerap tenaga kerja dan menghidupkan kegiatan UMKM di Kabupaten Cilacap.

Perumda Kawasan Industri Cilacap akan membebaskan lahan seluas ±821.756 m<sup>2</sup> yang terdiri dari ±493 bidang terletak di wilayah Desa Menganti Kecamatan Kesugihan dan Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara yang prosesnya ditempuh melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lokasi pembangunan kawasan industri cilacap ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 590/25 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap Di Kabupaten Cilacap.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah mencapai universal akses difokuskan pada terpenuhinya ruang publik. Salah satunya dengan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), untuk mewujudkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang optimal. Seperti yang sudah dilaksanakan pada Ruang Terbuka Hijau Taman Saliwangi yang bekerjasama dengan Bank Pasar Gunung Slamet.

### 9. Pelayanan Program Paket 3 in 1 (Tree in One)

Peningkatan cakupan administrasi kependudukan, diutamakan pencapaian akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, cakupan penerbitan KTP dengan melaksanakan : Pelayanan Program Paket 3 in 1 (Tree in One).

Pelayanan 3 in 1 yang dimaksud kan adalah :

- a. Apabila ada pemohon dokumen dengan landasan tiga peristiwa yaitu kelahiran, kematian dan pernikahan maka akan mendapat 3 dokumen sekaligus.
- b. Pemohon atas dasar kelahiran maka akan mendapatkan akte kelahiran, KK dengan tambahan keluarga baru serta KIA.
- c. Pemohon atas dasar kematian maka akan mendapatkan akta kematian, KK dengan berkurangnya jumlah anggota keluarga dan KTP dengan status berubah”.
- d. Pemohon atas dasar pernikahan Disdukcapil menggandeng Kementerian Agama, jadi ketika input data pemohon di Kementerian Agama dapat terintegrasi dengan Disdukcapil, sehingga KTP bias langsung tercetak, selain itu pemohon juga mendapatkan akta perkawinan serta KK baru.

### 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kebijakan Strategis	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Dengan adanya Penyampaian Audiensi dan Aksi Damai Perangkat Desa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 23 Mei 2022 dengan pembahasan, SILTAP bulanan, Pengajuan Gaji ke-13 dan THR mendasari mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas	Untuk memenuhi hasil audiensi Forum Solidaritas Aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa. berupa peningkatan/menambah penghasilan untuk anggota BPD, adanya tunjangan pendidikan dan perubahan penyaluran ADD.

No	Kebijakan Strategis	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa maka Pemerintah Kabupaten Cilacap membuat Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap, melakukan Revisi terhadap Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyaratan Desa dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka memenuhi hasil audiensi dengan Forum Solidaritas Aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap	

## 11. SMARTKIR BANG BADE

### a. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu pendorong utama pendukung pilar ekonomi dari Program Bangga mBangun Desa yang merupakan *blue print* yang memang telah disiapkan, dipikirkan dan yakin akan membawa Cilacap menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera, khususnya dalam rangka mewujudkan pembangunan kebutuhan sarana, prasarana dan Fasilitas serta penyediaan layanan yang berdimensi kelancaran dan keselamatan perhubungan yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**SMARTKIR BANG BADE** (*Sistem Manajemen Uji Kir Terintegrasi Bangga mBangun Desa*) merupakan salah satu alternatif upaya terobosan dan inovasi baru pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Konsep ini ditekankan pada upaya memberikan akses yang mudah, cepat, dan nyaman serta informatif dengan tidak hanya mengandalkan layanan berbasis elektronik, tetapi juga mengusung serangkaian pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan.

### b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pelaksanaan **SMARTKIR BANG BADE** pada Tahun 2018. Adapun tujuan dalam menerapkan inovasi **SMARTKIR BANG BADE** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan uji kir kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Cilacap, yaitu :



- 1) **Tujuan jangka pendek**, yaitu *pertama* melalui **4D** (Datang, Daftar, Duduk, Diantar) yang akan mempermudah dan menambah kenyamanan layanan kir serta yang *kedua* dengan penyediaan pelayanan terintegrasi yang dapat memberikan akses yang mudah, cepat, tepat, transparan, akuntabel, memberikan kepastian waktu pelayanan, praktis, serta informatif dengan tidak hanya mengandalkan layanan berbasis online/elektronik, tetapi juga mengusung serangkaian pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan, yang dapat menjawab keraguan masyarakat mengenai kualitas pelayanan uji kir di Kabupaten Cilacap.
- 2) **Tujuan jangka menengah** dilakukan dengan pembuatan Pos Pengaduan “**LAPOR**” (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Operasional KiR) yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan terkait dengan pengaduan ketidakpuasan terhadap kinerja dan pelayanan uji kir, sehingga dapat menghasilkan manfaat dalam memberikan kemudahan bagi organisasi dan fokus dalam mengelola serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku dan/atau pelaksanaan uji kir, dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai guna kepentingan perbaikan bagi organisasi, serta melalui pengintegrasian alat uji dengan sistem yang memungkinkan akses secara langsung dan *real time*.
- 3) **Tujuan jangka panjang** dilakukan melalui **sms gateway dan penerapan Smart Kir di Majenang** dengan tujuan untuk memperluas pelayanan dalam memberikan kemudahan, kepastian waktu, biaya dan prosedur yang berkualitas, cepat, mudah dan terukur sesuai dengan tuntutan, harapan serta keinginan masyarakat Majenang.

C. Pemasalahan dan Solusi

Dalam proses *pelaksanaan* Smart Kir ini, terdapat beberapa kendala/ permasalahan dan solusi permasalahannya, yaitu :

1) Penerapan 4D

Dalam penyediaan driver, terdapat kekurangan pegawai, sehingga perlu dilakukan langsung koordinasi dengan kepala sub bagian umum dan kepegawaian terkait penataan pegawai, sehingga memunculkan daftar nama petugas yang tidak terlalu banyak mengemban tugas fungsinya untuk dijadikan petugas layanan driver dan selanjutnya melaksanakan pendekatan interpersonal kepada calon petugas driver.

2) Penerapan Aplikasi

Terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, yaitu terkait dengan jaringan internet, sehingga dilakukan koordinasi dengan kepala sub bagian perencanaan, keuangan dan aset terkait partisi bandwidth internet, sehingga proses penerapan pendaftaran secara online dapat berjalan dengan lancar.

3) Penerapan LAPOR

LAPOR merupakan tahapan jangka menengah yang diajukan dalam jangka pendek. Penyediaan layanan pengaduan ini diperlukan langkah-langkah koordinasi dengan Kepala UPTD PKB terkait tempat dan

petugas layanan yang dapat mensukseskan pelaksanaan layanan LAPOR ini.

4) Penerapan SMS *Gateway*

SMS *gateway* ini adalah pengajuan dari jangka panjang ke jangka pendek. Kesulitan yang dihadapi adalah terkait database nomor telepon pemilik kendaraan wajib uji, sehingga dalam layanan sms *gateway* belum seluruhnya menikmati layanan ini, dan akan dilaksanakan update data, sehingga masyarakat akan dapat memanfaatkan sms *gateway* secara bertahap.

## 12. Program Parcel UMKM Kabupaten Cilacap

Dalam rangka meningkatkan penjualan produk UMKM Kabupaten Cilacap terutama di masa pandemi seperti kemarin, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui DPKUKM pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan program Parcel UMKM Kabupaten Cilacap. Hal ini dilaksanakan dengan menghimpun UMKM yang layak dan bisa untuk mengisi program parcel ini kemudian mengumumkan program ini melalui surat resmi yang dibagikan kepada OPD dan juga perusahaan-perusahaan daerah dan juga BUMN yang ada di Kabupaten Cilacap sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan UMKM bisa meningkatkan penjualannya.

## 13. Pembentukan Mall Pelayanan Publik

### a. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

- 1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik.
- 2) Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor: HK.201/4/3/DJPD/2022 dan Nomor : 028/02051/25/CLP Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan Berupa Gedung Terminal Penumpang Tipe A Bangga Mbangun Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap Sebagai Mal Pelayanan Publik.

### b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis

Dasar hukum dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya. MPP bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Perencanaan pembangunan MPP di Kabupaten Cilacap dimulai pada tahun 2019 melalui rapat – rapat koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait. Pembangunan MPP dianggarkan pada tahun 2020 melalui DPUPR Kabupaten Cilacap yang rencananya akan dibangun di Jalan Tentara Pelajar Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara, tetapi *refocussing* oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap karena mulai mewabahnya pandemi *Covid-19* di Kabupaten Cilacap dimana anggaran – anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akan adanya MPP dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Cilacap, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui DPMPTSP Kabupaten Cilacap mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Terminal Penumpang Tipe A Bangga Mbangun Desa dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor: HK.201/4/3/DJPD/2022 dan Nomor: 028/02051/25/CLP Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada Kementerian Perhubungan Berupa Gedung Terminal Penumpang Tipe A Bangga Mbangun Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap Sebagai Mal Pelayanan Publik. MPP Kabupaten Cilacap direncanakan akan *soft launching* pada tahun 2022.

#### C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pembangunan gedung MPP yang sudah dianggarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2020 dan tahun 2021 melalui DPUPR Kabupaten Cilacap di-*refocussing*.

Solusi :

- 1) Pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 direncanakan pembangunan Gedung MPP, sehingga diharapkan MPP dapat menempati Gedung tersendiri untuk memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Cilacap.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan akan adanya MPP di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui DPMPTSP Kabupaten Cilacap mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Terminal Penumpang Tipe A Bangga Mbangun Desa dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- 3) MPP rencana akan diselenggarakan melalui sewa gedung pada tahun 2022.

### **14. Bidang Pertanian**

a. Kebijakan strategis yang perlu ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

#### 1) Lapak Petani

Bupati telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2029 tentang Pemberdayaan Petani Melalui Lapak Petani di Kabupaten

Cilacap. Lapak petani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk dapat lebih sejahtera. Lapak Petani merupakan kegiatan jual beli langsung antara petani produsen selaku penjual dengan masyarakat selaku konsumen sehingga memperpendek rantai distribusi produk pertanian. Harga di lapak petani ditentukan sendiri oleh petani dan tentunya lebih baik dari harga di pasar pada umumnya. Lebih baik disini mengandung arti masih menguntungkan bagi petani selaku penjual dan murah bagi konsumen. Muara dari kegiatan Lapak Petani ini yaitu meningkatnya kesejahteraan di tingkat petani. Lapak petani saat ini rutin dilaksanakan setiap minggu pagi di lokasi Car Free Day. Harapannya kegiatan lapak petani dapat terus dikembangkan di Kabupaten Cilacap secara langsung (off line) maupun dengan memanfaatkan media online. Untuk mendukung hal tersebut tentunya perlu terus dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi para petani.

2) Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, Kabupaten Cilacap masuk dalam rencana pengembangan untuk Kawasan Barlingmascakeb. Salah satu Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Cilacap dalam bidang pertanian yaitu Pengembangan Kawasan Agrowisata Bantarsari, Kab. Cilacap senilai 25 Milyar besumber dari dana APBN. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan Agrowisata Bantarsari pada tahun 2020. Namun demikian kepastian terkait Proyek Strategis Nasional tersebut belum ada kepastian.

3) Kebun Buah Jambusari

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap saat ini sedang mengembangkan Kebun Buah Jambusari. Kebun Buah Jambusari direncanakan menjadi salah satu agrowisata kabupaten Cilacap. Beberapa infrastruktur sudah dibangun mulai dari jalan, mushola, gazebo dan gapura. Namun beberapa infrastruktur pendukung lain yang direncanakan dibangun seperti gedung pertemuan dan jogging track sampai saat ini belum dapat terealisasi karena adanya refocusing anggaran terkait adanya pandemic covid 19. Harapannya pembangunan dan pengembangan Kebun Buah Jambusari dapat dilanjutkan di tahun mendatang.

b. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan di Kabupaten Cilacap
- 2) Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian
- 3) Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian dan masih lemahnya kelembagaan petani
- 4) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Solusi

- 1) Pendistribusian bantuan benih padi yang bermutu

- 2) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- 3) Penggunaan pupuk yang tepat
- 4) Pengawasan pengendalian OPT secara tepat dan terpadu
- 5) Pengenalan teknologi baru atau formulasi pembuatan pakan secara mandiri

## **15. Bidang Perdagangan**

Urusan Perdagangan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap guna menunjang Visi dan Misi Bupati Cilacap dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan visi misi Bupati Cilacap yaitu meningkatkan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan yaitu :

### **a. Melaksanakan Revitalisasi Pasar Ikan PPC**

Dalam upaya meningkatkan perekonomian serta pendapatan masyarakat khususnya dari sektor perdagangan, pasar rakyat/pasar tradisional kiranya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah utamanya dalam mewujudkan pasar rakyat/pasar tradisional yang representatif. Untuk itu pada Tahun 2022 DPKUKM Kabupaten Cilacap melaksanakan Revitalisasi Pasar Ikan PPC melalui anggaran Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.000.000.000,- dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp.180.604.390,-. Dengan adanya revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar.

### **b. Digitalisasi Pasar Rakyat**

Digitalisasi Pasar Rakyat merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menjaga eksistensi pasar rakyat di era digitalisasi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat untuk lebih memilih hal-hal yang bersifat cepat dan praktis serta tanpa batas. Dalam rangka mewujudkan Digitalisasi Pasar Rakyat, DPKUKM Kabupaten Cilacap telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

#### **1) Penerapan e-Retribusi Pasar**

Penerapan e-Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap sebagai pembayaran transaksi non tunai retribusi pasar dimulai pada bulan September 2020 di Pasar Sidodadi dan bulan Juli 2021 di Pasar Tanjungsari. Adapun untuk tahun 2022 ini DPKUKM Kabupaten Cilacap akan menerapkan e-Retribusi Pasar di 5 (lima) pasar yaitu Pasar Pelemgading, Pasar Saliwangi, Pasar Adipala, Pasar Sidareja dan Pasar Wanareja. Dengan adanya e-Retribusi pasar diharapkan potensi penerimaan retribusi pasar lebih optimal dengan mengurangi resiko kebocoran.

#### **2) Implementasi Digitalisasi Pasar Rakyat S.I.A.P QRIS**

Menindaklanjuti surat Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Nomor SL.01.00/864/PDN.3/SD tanggal 3 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan pencanangan Program Pasar Tanjungsari S.I.A.P QRIS dimana masyarakat yang berbelanja ke Pasar Tanjungsari dapat menikmati fasilitas pembayaran non tunai QR code Indonesian Standart (QRIS) di lapak kios atau los yang sudah memiliki user Q.R.I.S. Selanjutnya pada tahun 2022 ini masing-masing UPTD Pasar untuk membuat 2 (dua) piloting implementasi Pasar Rakyat S.I.A.P QRIS di wilayah kerjanya.

**c. Program Kemitraan UMKM dengan Ritel Modern**

Pelaksanaan program kemitraan antara Ritel (toko) modern dengan UMKM di Kabupaten Cilacap dalam rangka untuk menggali potensi kewirausahaan UMKM, meningkatkan kemandirian UMKM, meningkatkan kemampuan produksi dan kualitas produk serta pemasaran produk UMKM melalui ritel/toko modern.

Disamping itu untuk meningkatkan peran dan sinergi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pengelola Ritel/toko modern dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat.

Program kemitraan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan para pengelola Ritel/toko modern yang ada di Kabupaten Cilacap tentang Program Kemitraan Pemasokan dan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.

**16. Integrasi dan Digitalisasi pelayanan pajak daerah melalui *Central Billing System***

a. Pelaksanaan

- Mapping sumber – sumber pendapatan asli daerah
- Pembangunan digitalisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Central Billing System
- Pengintegrasian Central Billing System dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Evaluasi dan pengembangan Central Billing System serta perluasan kerjasama dengan perbankan dan vendor penyedia digital payment

b. Permasalahan dan Solusi

Diperlukan sosialisasi yang menyeluruh terhadap dinas terkait dan masyarakat mengenai sistem pelayanan pajak yang terbaru

**17. Pembentukan Kecamatan Kahuripan**

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan Pemerintah Kabupaten Cilacap di Tahun 2015 telah mengkaji pembentukan beberapa kecamatan baru.

Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan baru yang layak dibentuk dengan mengacu indikator yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Adapun ketiga kecamatan baru tersebut meliputi : Kecamatan Boja; Kecamatan Kahuripan; dan Kecamatan Cinangsi, namun demikian seiring dengan dinamika

perkembangan peraturan tentang Pemerintahan Daerah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tata cara pembentukan kecamatan baru.

Dari Ketiga kecamatan yang dianggap layak pada kajian dimaksud hanya Kecamatan Boja yang hampir memenuhi semua aspek dalam persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Kecamatan Kahuripan dibentuk dari penggabungan bagian Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Jeruklegi, wilayah Kecamatan Kahuripan dimaksud terdiri dari :

a. Kecamatan Kesugihan, yang terdiri dari:

- 1) Desa Menganti;
- 2) Desa Karangandri;
- 3) Desa Kuripan;
- 4) Desa Dondong;
- 5) Desa Planjan;
- 6) Desa Kuripan Kidul;
- 7) Desa Jangrana

b. Kecamatan Jeruklegi, yang terdiri dari:

- 1) Desa Tritih Wetan;
- 2) Desa Sumingkir; dan
- 3) Desa Mandala.

Kecamatan baru dibentuk dengan Peraturan Daerah dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan.

Hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pembentukan Kecamatan Kahuripan adalah adanya persyaratan utama yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu lahan calon Kantor Kecamatan Kahuripan sehingga kedepan perlu disiapkan anggaran untuk pengadaan lahan dan pembangunan Kantor Kecamatan Kahuripan.

## **BAB VIII**

### **PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

Prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Kabupaten Cilacap selama kepemimpinan H. Tatto Suwanto Pamuji - Bupati Cilacap dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si - Wakil Bupati Cilacap, adalah sebagai berikut :

#### **2017**

1. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tingkat Nasional, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik” Tingkat Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
3. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan catatan ” Tingkat Nasional, DPMPTSP Kabupaten Cilacap.
4. Peringkat Ke-2 Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN Nasional.
5. Omzet penjualan terbesar Rumah Kreatif BUMN Tingkat Nasional.
6. UMKM Terbaik Kelas B Tingkat Nasional (UKM Rajasamas Batik Cilacap)
7. Juara II Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Tingkat Nasional Tahun 2017 Wilayah II, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap.
8. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 Kategori Pratama, Pemerintah Kabupaten Cilacap
9. Penghargaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2016.
10. Penghargaan Trophy Adipura Tahun 2017 Kategori Kota Sedang.
11. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2017 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk SMPN 1 Majenang.
12. Juara I Penilaian Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Kategori Pembudidaya Udang diraih Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) “TANI KARYA USAHA”, Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu
13. Penganugerahan BPBD Kabupaten Cilacap sebagai BPBD terbaik pertama wilayah barat
14. Penunjukkan Cilacap sebagai Kota Tangguh Bencana mewakili Indonesia untuk tingkat Asia Pasifik oleh United Nations office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)



## 2018

1. Juara I Lomba Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) Kategori Puskesmas Tingkat Nasional Regional I yang diraih oleh Puskesmas Sampang I
2. Kampung KB Center Of Excellence (CEO) Tingkat Nasional Kampung KB Guyup Aman Damai Indah Sejahtera (Gadis) yang diraih RW 4 Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan
3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama Tahun 2018
4. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya Tahun 2018 yang merupakan penghargaan atas upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Juara 1 Lomba / Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tahun 2018 Wilayah Barat Kategori Juru Mantri Permukaan Tingkat Nasional
6. Juara 1 Lomba / Pemilihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Partisipasif P3A Tingkat Nasional Tahun 2018
7. Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2018 dengan kategori Sangat Baik (A-) yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2018 dengan kategori Sangat Baik (A-) yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Penghargaan Tertinggi Pelayanan Publik dengan Predikat Penghargaan Pelayanan Prima dengan nilai A yang diraih Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
10. Sakip Award dengan Kategori nilai AKIP “BB”
11. Penghargaan atas Pengelola Kepegawaian Berkinerja Terbaik Tahun 2018 oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta bagi para pengelola kepegawaian atas kinerja terbaik dalam mendukung proses administrasi kenaikan pangkat periode April 2018 secara berkualitas dengan zero TMS (tidak memenuhi syarat) dan zero BTL (berkas tidak lengkap).
12. Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Tingkat Nasional
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) / Investment Award BKPM Tahun 2018 dengan kategori Kabupaten Terbaik
14. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yaitu SMP Negeri 4 Cilacap, SMP Negeri 6 Cilacap, SMP Negeri 4 Kroya, SMP Pius Cilacap, MAN 1 Cilacap, dan SMA Negeri 1 Kroya
15. Perhargaan Adipura Kategori Kota Sedang Terbersih

## 2019

1. Top 99 dan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Tahun 2019 untuk BALAKAR (BARisan SukareLA KebaKARan) To Respon Time pada UPT Pemadam Kebaran SatPol PP Kabupaten Cilacap.
2. Pembina Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019 bagi “Bupati Cilacap”

3. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” Tingkat Nasional bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” Tingkat Nasional bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
5. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “A” Tingkat Nasional bagi DPMPTSP Kabupaten Cilacap dan *Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A) Tahun 2019 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
6. Penghargaan Top 3 Unit Pelaksana Pelayanan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
7. Penghargaan Nasional dari BNPB terkait Kabupaten Yang Berperan Aktif dalam Penanggulangan Bencana .
8. SAKIP Award Kementerian PAN dan RB Tahun 2019 dengan kategori predikat “BB”
9. Inspektorat Kabupaten Cilacap memperoleh Penjaminan Kualitas APIP Level 3 dari BPKP pada Tahun 2019
10. Penghargaan Trophy Adipura Tahun 2018 Kategori Kota Sedang.
11. Penghargaan Tingkat Nasional Puskesmas Wanareja II sebagai Puskesmas Ramah Anak.
12. Penghargaan Kabupaten Cilacap sebagai Kabupaten Peduli HAM
13. Juara 1 Kampung KB Percontohan Tingkat Nasional (Kampung KB Gadis Kelurahan Tegalreja) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
14. Terbaik 1 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2019 untuk LAPOR BangBade pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
15. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
16. Adiwiyata Tingkat Nasional diraih SMPN 1 Jeruklegi, SMPN 1 Cilacap, SMPN 1 Maos SMPN 2 Cilacap, SMPN 8 Cilacap, SMP AL Irsyad Cilacap, SMP Pemda 2 Kesugihan, SMAN 1 Maos
17. Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional yang diraih SMP N 2 Kesugihan.
18. Top 20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 bagi Inovasi TB RO Paru RSUD Cilacap
19. Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 bagi Inovasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (SIMBAJA) Bappeda Kabupaten Cilacap.
20. Penyerahan Citra Daerah kepada Kabupaten Cilacap dari ANRI yang merupakan merupakan salah satu program ANRI dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai khazanah arsip statis Kabupate Cilacap yang telah tersimpan di

ANRI. Citra Daerah juga merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah.

21. Medali Perak Asia Youth Chers Tingkat Asia Tahun 2019 atas nama Rahmat Aji Febrian dari SMP N 1 Cilacap
22. Juara 2 Catur Tingkat Nasional Tahun 2019 atas nama Armenia Zendy dari SMP N 1 Cilacap
23. Juara 1 stand terbaik dlm rangka pameran produk unggulan porsenitas th 2019

## **2020**

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bagi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
2. Penghargaan Nasional dari BNPB terkait Kabupaten Yang Berperan Aktif dalam Penanggulangan Bencana .
3. Penghargaan Nasional dari Badan Kepegawaian Negara Kanreg I Yogyakarta Atas Pengelolaan Terbaik Dalam Layanan Pensiun Tahun 2020 bagi BKPPD Kabupaten Cilacap
4. Penghargaan Kementerian Dalam Negeri Kabupaten sebagai “Kabupaten Sangat Inovatif” dalam Innovative Government Award 2020.
5. Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
6. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap raih penghargaan kegiatan evaluasi kinerja pelayanan publik kategori a “ pelayanan prima “ tahun 2020
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap memperoleh predikat Zona Integritas ( ZI ) Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dari Kemenpan RB tahun 2020
9. Kabupaten dengan Produksi Beras Tertinggi Peringkat X Nasional

## **2021**

1. Penghargaan Nasional Abdi Bakti Tani Tahun 2021 sebagai Peringkat I Kabupaten Dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi.
2. Penghargaan Nasional Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
3. Penghargaan SAKIP AWARD Kategori “BB” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bagi DPMPTSP Kabupaten Cilacap

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap menerima sertifikat iso 9001:2015, pada tanggal 28 Oktober 2021
6. Penghargaan Wilayah Bebas Dari Korupsi kepada UPTD Puskesmas Dayeuhluhur 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
7. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak Peringkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
8. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
9. Juara 2 Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional Total MKJP Kelompok III dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
10. Penghargaan Nasional dari BNPB terkait Kabupaten Yang Berperan Aktif dalam Penanggulangan Bencana
11. Terbaik ke-1 Pengelolaan Layanan Pengangkatan dan Pensiun dan Terbaik ke-2 Pengelolaan Layanan Pemutakhiran Data Mandiri Tahun 2021 bagi BKPPD Kabupaten Cilacap.
12. Penghargaan ISO 9001 : 2015 bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Mei 2021.
13. Pengelola PIP terbaik 2 dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021
14. Juara 2 Indonesia Fokus English Contest at the Nasional Level Tahun 2021 atas nama Valent Aqilla Putri R dari SMP N 1 Cilacap
15. Juara 1 Lomba Kaligrafi Buah Hati Annual Festival Tk.Nasional Tahun 2021 atas nama Rayfan Tsaqif dari SMP N 1 Cilacap.

## **2022**

1. Penghargaan “Khasanah Arsip Konservasi dan Pembangunan Kawasan Segara Anakan Cilacap Tahun 1996-2000” sebagai Memori Kolektif Bangsa (Memory of The World Indonesia) berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 198 Tahun 2022.
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindiyadari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3. Terbaik I Kategori Lomba Provitas Terbaik Nasional Pada Kelompoktani Padi Kelompok Tani Sri Widodo, Desa Karangreja, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap
4. Terbaik II Kategori Lomba Provitas Terbaik Nasional Pada Kelompoktani Padi Kelompok Tani Tani Jaya, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode Tahun 2017 - 2022 merupakan gambaran Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode tersebut patut kita syukuri, mengingat pada tahun 2020 sampai dengan 2022 kita dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian itu diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen, baik dari jajaran Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat secara luas.

Hasil-hasil yang dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintah Daerah dengan Masyarakat yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan, sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang.

Memori Serah Terima Jabatan ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022, mengingat berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tidak diakhir tahun sehingga masih menyisakan kurang lebih 1 (satu) bulan untuk penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Kami menyadari bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih terdapat kekurangan dan belum dapat memuaskan semua pihak. Hal ini akan terus diperbaiki dengan semangat dan niat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk terus mengabdikan diri, mengemban amanah untuk membawa kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin masyarakat Kabupaten Cilacap yang BERCAHAYA

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Hidayah, Bimbingan dan Ridho-Nya kepada kita semua. Amiin.